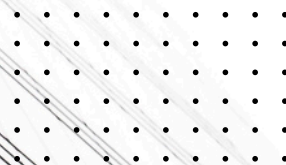


LAPORAN KEUANGAN *Audited*

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**20
24**

**PERIODE YANG BERAKHIR:
31 Desember 2024**



BAGIAN ANGGARAN 088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

JL. LETJEN SUTOYO NO. 12 CILILITAN - JAKARTA TIMUR
TELP. (021) 8093008

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Negara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Surat Representasi Manajemen	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	49
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	87
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	101
F. Pengungkapan Penting Lainnya	108
VI. Lampiran – Lampiran	
A. Lampiran A1 Daftar Rekening Bendahara Satker BKN	
B. Lampiran A2 Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C. Lampiran A3 Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	
D. Lampiran A4 Tabel Informasi Belanja Dibayar Dimuka	
E. Lampiran A5 Tabel Informasi Pendapatan Diterima Dimuka	
F. Lampiran A6 Daftar Hibah Langsung Berupa Barang/Jasa	
G. Lampiran A7 Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	15
Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	17
Tabel 2.1 Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2024	19
Tabel 2.2 Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	19
Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program	20
Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNB	20
Tabel 2.5 Rincian Pendapatan Peralatan dan Mesin per Satker	21
Tabel 2.6 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya per Satker	21
Tabel 2.7 Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per Satker	22
Tabel 2.8 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	23
Tabel 2.9 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	24
Tabel 2.10 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	24
Tabel 2.11 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNB Lainnya	25
Tabel 2.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	25
Tabel 2.13 Rincian Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Program	26
Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	27
Tabel 2.15 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	27
Tabel 2.16 Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker	28
Tabel 2.17 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	28
Tabel 2.18 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Satker	29
Tabel 2.19 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	29
Tabel 2.20 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per Satker	30
Tabel 2.21 Perbandingan Realisasi Belanja Lembur	30
Tabel 2.22 Rincian Belanja Lembur per Satker	31
Tabel 2.23 Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	31

Tabel 2.24	Perbandingan Realisasi Belanja Barang	32
Tabel 2.25	Rincian Belanja Barang per Satker	32
Tabel 2.26	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional	33
Tabel 2.27	Rincian Belanja Barang Operasional per Satker	33
Tabel 2.28	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional	34
Tabel 2.29	Rincian Belanja Barang Non Operasional per Satker	34
Tabel 2.30	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan	35
Tabel 2.31	Rincian Belanja Barang Persediaan per Satker	35
Tabel 2.32	Perbandingan Realisasi Belanja Jasa	36
Tabel 2.33	Rincian Belanja Jasa per Satker	36
Tabel 2.34	Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan	37
Tabel 2.35	Rincian Belanja Pemeliharaan per Satker	38
Tabel 2.36	Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	38
Tabel 2.37	Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Satker	39
Tabel 2.38	Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	39
Tabel 2.39	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	40
Tabel 2.40	Rincian Belanja Modal per Satker	40
Tabel 2.41	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah	41
Tabel 2.42	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41
Tabel 2.43	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker	42
Tabel 2.44	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42
Tabel 2.45	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker	43
Tabel 2.46	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker	43
Tabel 2.47	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya	44
Tabel 2.48	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya per Satker	44
Tabel 2.49	Rincian Capaian Output Prioritas Nasional	45
Tabel 3.1	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	50
Tabel 3.2	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Di Muka	50
Tabel 3.3	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak	51

Tabel 3.4	Rincian Piutang Bukan Lainnya	51
Tabel 3.5	Rincian Piutang Bukan Pajak per Satker	51
Tabel 3.6	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	52
Tabel 3.7	Rincian Persediaan	52
Tabel 3.8	Rincian Persediaan per Satker	53
Tabel 3.9	Rincian Persediaan Usang per Satker	53
Tabel 3.10	Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024	54
Tabel 3.11	Rincian Tanah Per Satker	54
Tabel 3.12	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	57
Tabel 3.13	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	58
Tabel 3.14	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker	58
Tabel 3.15	Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin	59
Tabel 3.16	Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per Satker	59
Tabel 3.17	Rincian Transfer Masuk Aset Peralatan dan Mesin	59
Tabel 3.18	Rincian Sumber Transfer Masuk Aset Peralatan dan Mesin	59
Tabel 3.19	Rincian Transfer Masuk per Satker	60
Tabel 3.20	Rincian Hibah Masuk Aset Peralatan dan Mesin	60
Tabel 3.21	Rincian Transfer Keluar Aset Peralatan dan Mesin	61
Tabel 3.22	Rincian Transfer Keluar per Satker	61
Tabel 3.23	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin	62
Tabel 3.24	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per Satker	62
Tabel 3.25	Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker	63
Tabel 3.26	Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	64
Tabel 3.27	Rincian Penyelesaian Pembangunan Langsung	65
Tabel 3.28	Rincian Penyelesaian Pembangunan Langsung per Satker	65
Tabel 3.29	Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung	65
Tabel 3.30	Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung per Satker	66
Tabel 3.31	Rincian Gedung dan Bangunan per Satker	67
Tabel 3.32	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024	68

Tabel 3.33	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satker	68
Tabel 3.34	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	69
Tabel 3.35	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan per Satker	70
Tabel 3.36	Rincian Aset Tetap Lainnya	70
Tabel 3.37	Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker	72
Tabel 3.38	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024	73
Tabel 3.39	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satker	74
Tabel 3.40	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	75
Tabel 3.41	Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	75
Tabel 3.42	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan per Satker	76
Tabel 3.43	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud	77
Tabel 3.44	Rincian Aset Tak Berwujud per Satker	77
Tabel 3.45	Mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024	78
Tabel 3.46	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker	78
Tabel 3.47	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024	79
Tabel 3.48	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	79
Tabel 3.49	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker	80
Tabel 3.50	Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan	80
Tabel 3.51	Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan per Satker	81
Tabel 3.52	Rincian Aset Lain-Lain per Satker	81
Tabel 3.53	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	82
Tabel 3.54	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	82
Tabel 3.55	Rincian Belanja Pegawai yang masih Harus Dibayar per Satker	83
Tabel 3.56	Rincian Belanja Barang yang masih Harus Dibayar per Satker	84
Tabel 3.57	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker	85
Tabel 3.58	Perbandingan Pendapatan Diterima Di Muka	85
Tabel 3.59	Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya	86
Tabel 4.1	Perbandingan Rincian PNBP	87
Tabel 4.2	Rincian Pendapatan Operasional per Satker	88
Tabel 4.3	Perbandingan Rincian Beban Pegawai	88

Tabel 4.4	Rincian Beban Pegawai per Satker	89
Tabel 4.5	Perbandingan Rincian Beban Persediaan	90
Tabel 4.6	Rincian Beban Persediaan per Satker	90
Tabel 4.7	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa	91
Tabel 4.8	Rincian Beban Barang dan Jasa per Satker	92
Tabel 4.9	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan	93
Tabel 4.10	Rincian Beban Pemeliharaan per Satker	94
Tabel 4.11	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas	95
Tabel 4.12	Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satker	95
Tabel 4.13	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	96
Tabel 4.14	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	97
Tabel 4.15	Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional	97
Tabel 4.16	Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per Satker	98
Tabel 4.17	Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	98
Tabel 4.18	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Satker	98
Tabel 4.19	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	99
Tabel 4.20	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	99
Tabel 4.21	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100
Tabel 5.1	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	101
Tabel 5.2	Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker	102
Tabel 5.3	Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	103
Tabel 5.4	Rincian Transaksi Antar Entitas	104
Tabel 5.5	Rincian Transfer Keluar per Satker	105
Tabel 5.6	Rincian Transfer Masuk per Satker	105
Tabel 6.1	Tabel Rincian Pekerjaan UPT BKN Mataram	108
Tabel 6.2	Tabel Rincian Pekerjaan UPT BKN Gorontalo	108
Tabel 6.3	Rincian MoU Pinjam Pakai Sejak Tahun 2015	110
Tabel 6.4	Rincian Kepemilikan UPT sampai dengan Tahun 2023	111
Tabel 6.5	Daftar Aset Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada BKN	112
Tabel 6.6	Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang Belum Diproses Pengesahan Hibah	112



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 6788/B-KU.04/SD/A/2025
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan
Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024

Jakarta, Mei 2025

Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav.31, Jakarta 10210

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Badan Kepegawaian Negara memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Badan Kepegawaian Negara telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2024 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024;
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 *Audited* sebagai asersi final Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp41.462.195.556,00 atau mencapai 145,20 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp28.555.248.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.500.101.756.801,00 atau mencapai 87,70 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.710.523.612.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.621.677.085.513,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp46.536.185.616,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.253.001.789.598,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp322.139.110.299,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp314.632.030.100,00 dan Rp3.307.045.055.413,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.538.699.954,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.399.772.465.694,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.360.233.765.740,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp500.075.154,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.360.733.840.894,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp3.208.549.866.357,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp1.360.733.840.894,00, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp1.771.756.201,00) dan ditambah transaksi antar entitas senilai Rp1.461.000.786.151,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.307.045.055.413,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CAT	31 DESEMBER 2024		% thd Angg	31 DESEMBER 2023
			ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
I	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	28,555,248,000.00	41,462,195,556.00	145.20	26,260,135,552.00
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1	28,555,248,000.00	41,462,195,556.00	145.20	26,260,135,552.00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			28,555,248,000.00	41,462,195,556.00	145.20	26,260,135,552.00
B	BELANJA NEGARA					
I	Belanja Pemerintah Pusat	B.2	1,710,523,612,000.00	1,500,101,756,801.00	87.70	1,028,677,308,609.00
	1. Belanja Pegawai	B.3	391,463,752,000.00	374,117,703,451.00	95.57	346,866,997,060.00
	2. Belanja Barang	B.4	1,136,020,270,000.00	954,577,173,848.00	84.03	578,789,169,324.00
	3. Belanja Modal	B.5	183,039,590,000.00	171,406,879,502.00	93.64	103,021,142,225.00
JUMLAH BELANJA NEGARA			1,710,523,612,000.00	1,500,101,756,801.00	87.70	1,028,677,308,609.00

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	9,270,300.00	4,587,816.00
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.4	33,980,518,810.00	131,199,742.00
Piutang Bukan Pajak	C.5	6,233,799,930.00	2,747,393,181.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(31,169,000.00)	(13,736,966.00)
Persediaan	C.7	6,343,765,576.00	7,106,175,160.00
JUMLAH ASET LANCAR		46,536,185,616.00	9,975,618,933.00
ASET TETAP			
Tanah	C.8	2,331,580,054,368.00	2,330,666,524,668.00
Peralatan dan Mesin	C.9	768,036,979,101.00	704,398,035,892.00
Gedung dan Bangunan	C.10	896,194,810,778.00	868,849,348,970.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.11	24,637,574,940.00	24,716,999,940.00
Aset Tetap Lainnya	C.12	13,675,359,416.00	13,874,987,099.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	19,621,605,525.00	168,877,064.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.14	(800,744,594,530.00)	(746,282,602,430.00)
JUMLAH ASET TETAP		3,253,001,789,598.00	3,196,392,171,203.00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.15	59,620,529,497.00	125,741,319,487.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.16	311,639,851,974.00	21,071,862,270.00
Aset Lain-Lain	C.17	20,550,730,766.00	21,362,783,827.00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.18	(69,672,001,938.00)	(145,268,566,532.00)
JUMLAH ASET LAINNYA		322,139,110,299.00	22,907,399,052.00
JUMLAH ASET		3,621,677,085,513.00	3,229,275,189,188.00

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	313,598,678,284.00	19,629,558,217.00
Pendapatan Diterima di Muka	C.20	1,033,351,816.00	1,091,528,298.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.21	-	4,236,316.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		314,632,030,100.00	20,725,322,831.00
JUMLAH KEWAJIBAN		314,632,030,100.00	20,725,322,831.00
EKUITAS			
Ekuitas	C.22	3,307,045,055,413.00	3,208,549,866,357.00
JUMLAH EKUITAS		3,307,045,055,413.00	3,208,549,866,357.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,621,677,085,513.00	3,229,275,189,188.00

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	39,538,699,954.00	23,670,868,321.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		39,538,699,954.00	23,670,868,321.00
BEBAN OPERASIONAL			
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	373,703,136,554.00	345,122,172,386.00
Beban Persediaan	D.3	6,596,632,606.00	7,953,984,101.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	758,833,704,817.00	436,964,717,186.00
Beban Pemeliharaan	D.5	24,043,517,036.00	27,841,739,788.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	130,157,147,903.00	104,054,816,105.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	106,420,894,744.00	78,060,519,188.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	17,432,034.00	13,703,211.00
JUMLAH BEBAN		1,399,772,465,694.00	1,000,011,651,965.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1,360,233,765,740.00)	(976,340,783,644.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		(522,246,218.00)	547,206,678.00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		22,171,064.00	688,636,238.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(500,075,154.00)	1,235,842,916.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1,360,733,840,894.00)	(975,104,940,728.00)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1,360,733,840,894.00)	(975,104,940,728.00)

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	3,208,549,866,357.00	3,173,325,597,443.00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1,360,733,840,894.00)	(975,104,940,728.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1,771,756,201.00)	(3,488,126,484.00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	1,678,100.00	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	(1,770,314,301.00)	(4,209,626,661.00)
Lain-Lain	E.3.6	(3,120,000.00)	721,500,177.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1,461,000,786,151.00	1,013,817,336,126.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		98,495,189,056.00	35,224,268,914.00
EKUITAS AKHIR	E.5	3,307,045,055,413.00	3,208,549,866,357.00

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BKN mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

BKN berkomitmen dengan visi “**Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, BKN memiliki 5 (lima) pilar yang menjadi misi BKN yakni meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN, dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, dalam melaksanakan tugas di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Manajemen ASN;
2. Pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
3. Penyelenggaraan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
4. Pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
5. Pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis digitalisasi Manajemen ASN terintegrasi secara nasional serta pengelolaan data dan informasi ASN;
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis Manajemen ASN;

8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan teknis Manajemen ASN;
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN;
11. Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKN; dan
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKN sebagai berikut:

1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN dalam bentuk:
 - a. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Mengimplementasikan Manajemen ASN Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) (minimal bernilai A dan B).
 - b. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dalam bentuk:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan BKN.
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dalam bentuk Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN dalam bentuk Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi (SI) ASN.
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN dalam bentuk Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN dalam bentuk Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti.
7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam bentuk:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN BKN,
 - b. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BKN,
 - c. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN,
 - d. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN, dan
 - e. Opini atas Laporan Keuangan BKN.

Adapun beberapa kebijakan teknis yang telah dibuat Kepala BKN pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
3. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.
4. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Penilaian Potensi Aparatur Sipil Negara dengan *Computer Assisted Competency Test* Badan Kepegawaian Negara.
5. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
6. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Verifikasi Nomor Induk Kependudukan Dengan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga.
8. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi *Integrated* Mutasi dalam Rangka Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
10. Keputusan Kepala BKN Nomor 57.3 Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BKN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) berfungsi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang menginformasikan terkait data aset dan persediaan. SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Pada Tahun Anggaran 2024, BKN memperoleh anggaran belanja yang berasal dari APBN sebesar Rp1.710.523.612.000,00 meliputi:

1. Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp1.343.413.971.000,00;
2. Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp367.109.641.000,00.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup BKN adalah 16 (enam belas) satker yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN;
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kantor Regional II BKN Surabaya;
4. Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Kantor Regional IV BKN Makassar;
6. Kantor Regional V BKN Jakarta;
7. Kantor Regional VI BKN Medan;
8. Kantor Regional VII BKN Palembang;
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
10. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
11. Kantor Regional X BKN Denpasar;
12. Kantor Regional XI BKN Manado;
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
14. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
15. Kantor Regional XIV BKN Manokwari; dan
16. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Pusbangpeg ASN).

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BKN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan LRA disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BKN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada SAP serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BKN adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BKN adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas/umur piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat menggunakan metode pencatatan *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Pada akhir tahun periode pelaporan nilai persediaan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah.
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- 1) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 3) Dana yang dibatasi penggunaannya, merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan dan disajikan sebesar dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan pada batas akhir pengajuan tagihan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam LPE.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BKN telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2024		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,684,000,000.00	28,555,248,000.00	9,871,248,000.00
Penerimaan Hibah	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	18,684,000,000.00	28,555,248,000.00	9,871,248,000.00
BELANJA NEGARA			
Belanja Pemerintah Pusat	783,765,194,000.00	1,710,523,612,000.00	926,758,418,000.00
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	-	-
JUMLAH BELANJA NEGARA	783,765,194,000.00	1,710,523,612,000.00	926,758,418,000.00
PEMBIAYAAN	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-

Revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu Belanja Barang sebesar Rp931.530.924.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.227.494.000,00 untuk memenuhi kebutuhan seleksi pengadaan ASN tahun 2024. Sedangkan penurunan atas Belanja Pemerintah Pusat ada pada Belanja Pegawai sebesar Rp6.000.000.000,00. Adapun rincian perubahan anggaran berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	
Belanja Pegawai	397,463,752,000.00	391,463,752,000.00	(6,000,000,000.00)
Belanja Barang	204,489,346,000.00	1,136,020,270,000.00	931,530,924,000.00
Belanja Modal	181,812,096,000.00	183,039,590,000.00	1,227,494,000.00
Total Belanja	783,765,194,000.00	1,710,523,612,000.00	926,758,418,000.00

Sedangkan apabila dilihat dari program BKN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	TA 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	43,561,432,000.00	968,039,600,000.00
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	666,248,856,000.00	661,544,622,000.00
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	10,703,907,000.00	16,335,086,000.00
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	2,646,429,000.00	3,999,734,000.00
Program Dukungan Manajemen (SBSN)	60,604,570,000.00	60,604,570,000.00
Total Belanja	783,765,194,000.00	1,710,523,612,000.00

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp41.462.195.556,-

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak BKN berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Pendapatan PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada TA 2024 adalah sebesar Rp41.462.195.556,00 atau mencapai 145,20% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp28.555.248.000,00. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	1,551,260,000.00	1,764,494,681.00	113.75
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	852,550,000.00	864,700,000.00	101.43
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	26,151,438,000.00	34,190,779,500.00	130.74
Pendapatan Denda	-	1,638,455,177.00	0.00
Pendapatan Lain - lain	-	3,003,766,198.00	0.00
Jumlah	28,555,248,000.00	41,462,195,556.00	145.20

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp41.462.195.556,00 berasal dari:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp1.764.494.681,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp213.519.900,00 yang berasal dari:

Tabel 2.5 Rincian Pendapatan Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional III BKN Bandung	59,845,500.00
2	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	15,520,200.00
3	Kantor Regional VI BKN Medan	34,643,500.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	36,144,700.00
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	15,750,000.00
6	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	51,616,000.00
	Jumlah	213,519,900.00

- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp222.560.889,00 yang berasal dari:

Tabel 2.6 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	71,042,000.00
2	Kantor Regional VII BKN Palembang	112,666,000.00
3	Kantor Regional X BKN Denpasar	14,963,000.00
4	Kantor Regional XI BKN Manado	23,889,889.00
	Jumlah	222,560,889.00

- c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp862.513.892,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan rumah negara, rumah dinas pegawai, maupun ruangan kantor yang berasal dari:

Tabel 2.7 Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	590,366,316.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	16,170,000.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	7,865,878.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	9,375,960.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	5,786,328.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	4,302,485.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	38,830,508.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	23,439,104.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	16,072,097.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	42,851,014.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	31,741,076.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2,704,950.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	60,892,488.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	12,115,688.00
	Jumlah	862,513,892.00

Terdapat Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp377.608,00 (NTPN: A02187QLUPFI5HSA) yang seharusnya disetorkan menggunakan kode Satker pada Kementerian Sosial tapi menggunakan kode Satker Kantor Pusat BKN;

- d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp465.900.000,00 yang berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp864.700.000,00 yang berasal dari:
 - a. Kantor Pusat BKN sebesar Rp401.200.000,00 berupa pendapatan atas pengujian akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN; dan
 - b. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp463.500.000,00 berupa pendapatan sertifikasi peserta Pendidikan/atau pelatihan teknis/fungsional kepegawaian.
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp34.190.779.500,00 yang berasal dari:
 - a. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp4.499.616.000,00; dan
 - b. Kantor Pusat BKN berupa Pendapatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Lainnya sebesar Rp29.691.163.500,00.

4. Pendapatan Denda sebesar Rp1.638.455.177,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
5. Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp3.003.766.198,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp338.676.146,00 yang berasal dari:

*Tabel 2.8 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker*

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	277,599,364.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,368,204.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	366,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,269.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	12,727,200.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	11,715,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1,832,140.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	35,150.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	14,052,447.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	3,786,674.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	190,000.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1,295,200.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,932,378.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	9,056,370.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,718,750.00
	Jumlah	338,676,146.00

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp2.371.937.319,00 yang berasal dari:

Tabel 2.9 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	42,334,949.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,600,000.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	2,029,380,979.00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	785,500.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	208,800.00
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,118,345.00
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	17,513,986.00
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	95,352,952.00
9	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	21,789,488.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	30,799,200.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	25,824,562.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,212,859.00
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	70,889,008.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	31,126,691.00
	Jumlah	2,371,937,319.00

- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp257.408.262,00 yang berasal dari:

Tabel 2.10 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	190,596,980.00
2	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	13,884,755.00
3	Kantor Regional XI BKN Manado	16,318,400.00
4	Kantor Regional XIV Manokwari	7,454,585.00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	29,153,542.00
	Jumlah	257,408,262.00

- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Pensiunan PNS sebesar Rp35.744.471,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 terdapat kenaikan sebesar 57,89% dikarenakan terdapat kenaikan pendapatan pada Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar 100,11%, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar 89,31%, dan Pendapatan Lain - lain sebesar 53,74%.

Tabel 2.11 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	1,764,494,681.00	2,944,989,133.00	(40.08)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	864,700,000.00	432,110,000.00	100.11
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	34,190,779,500.00	18,061,139,000.00	89.31
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	6,000,000.00	(100.00)
Pendapatan Denda	1,638,455,177.00	2,862,057,347.00	(42.75)
Pendapatan Lain - lain	3,003,766,198.00	1,953,840,072.00	53.74
Jumlah	41,462,195,556.00	26,260,135,552.00	57.89

Realisasi Belanja
Rp1.500.101.756.801
,-

B.2 Belanja Pemerintah Pusat

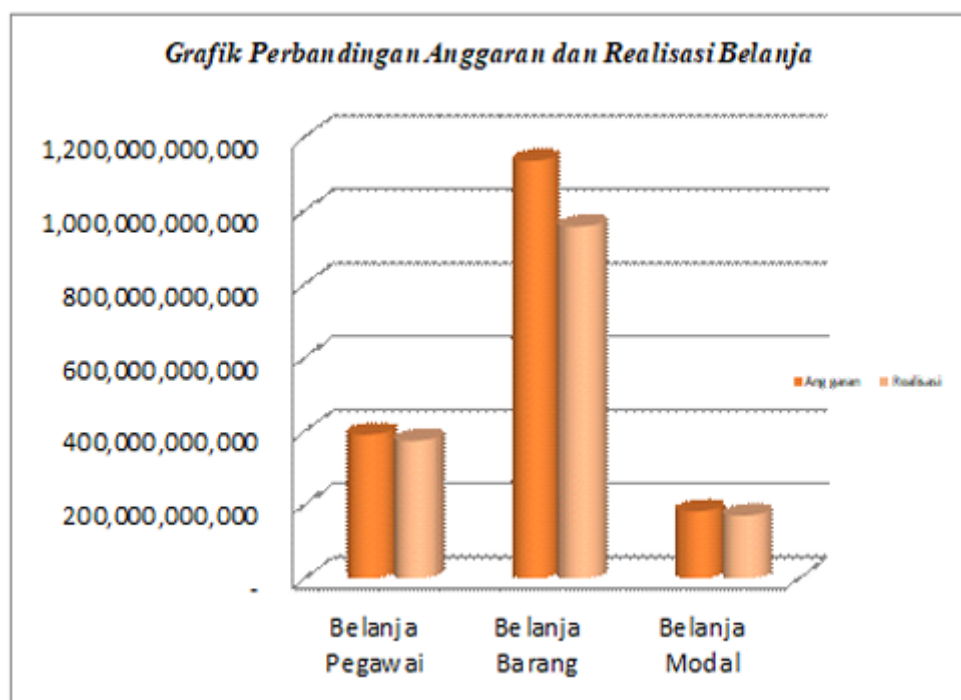
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat BKN pada TA 2024 sebesar Rp1.500.101.756.801,00 atau 87,70% dari anggaran belanja sebesar Rp1.710.523.612.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pemerintah pusat pada TA 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Belanja Pegawai	391,463,752,000.00	374,240,484,066.00	95.60
Belanja Barang	1,136,020,270,000.00	957,540,376,786.00	84.29
Belanja Modal	183,039,590,000.00	171,488,684,898.00	93.69
Jumlah Belanja Kotor	1,710,523,612,000.00	1,503,269,545,750.00	87.88
Pengembalian	-	(3,167,788,949.00)	
Jumlah	1,710,523,612,000.00	1,500,101,756,801.00	87.70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan program pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Rincian Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	TA 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	968,039,600,000.00	790,862,643,036.00	81.70
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	661,544,622,000.00	640,125,114,344.00	96.76
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	16,335,086,000.00	15,787,304,364.00	96.65
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	3,999,734,000.00	3,985,274,678.00	99.64
Program Dukungan Manajemen (SBSN)	60,604,570,000.00	49,341,420,379.00	81.42
Total Belanja	1,710,523,612,000.00	1,500,101,756,801.00	87.70

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 45,83% dibandingkan TA 2023. Kenaikan realisasi belanja yang sangat signifikan terdapat pada Belanja Barang sebesar 64,93% dan Belanja Modal sebesar 66,38%. Kenaikan anggaran dan realisasi belanja ini dikarenakan peningkatan kebutuhan pelaksanaan kegiatan seleksi pengadaan ASN tahun 2024.

Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	374,117,703,451.00	346,866,997,060.00	7.86
Belanja Barang	954,577,173,848.00	578,789,169,324.00	64.93
Belanja Modal	171,406,879,502.00	103,021,142,225.00	66.38
Jumlah	1,500,101,756,801.00	1,028,677,308,609.00	45.83

Belanja Pegawai
Rp374.117.703.451,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp374.117.703.451,00 dan Rp346.866.997.060,00 atau terjadi kenaikan sebesar 7,86%. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai disebabkan adanya kenaikan signifikan terhadap Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar 945,29% dan Realisasi Belanja Lembur sebesar 105,20%.

Tabel 2.15 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	170,452,708,025.00	168,628,818,868.00	1.08
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	7,472,465,164.00	714,869,476.00	945.29
5122	Belanja Lembur	2,508,312,000.00	1,222,348,000.00	105.20
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Pegawai Transito	193,806,998,877.00	176,662,078,848.00	9.70
	Jumlah Belanja Kotor	374,240,484,066.00	347,228,115,192.00	7.78
	Pengembalian Belanja Pegawai	(122,780,615.00)	(361,118,132.00)	(66.00)
	Jumlah Belanja	374,117,703,451.00	346,866,997,060.00	7.86

Adapun Rincian Realisasi Belanja Pegawai BKN TA 2024 sebesar Rp374.117.703.451,00 berasal dari:

Tabel 2.16 Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	268,441,575,543.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	11,122,955,694.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	7,957,102,497.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	9,370,820,194.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	10,067,889,949.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	6,253,811,333.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	7,830,245,757.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	7,183,788,419.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,885,404,224.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5,225,300,897.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	6,774,124,392.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5,278,626,214.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7,435,104,236.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4,518,156,421.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,531,418,008.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,241,379,673.00
	Jumlah	374,117,703,451.00

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp170.334.779.116,-

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp170.334.779.116,00 dan Rp168.310.808.686,00 atau terjadi kenaikan sebesar 1,20%.

Tabel 2.17 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	116,702,248,450.00	112,975,620,150.00	3.30
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,763,654.00	1,860,514.00	(5.21)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,402,214,220.00	7,102,996,726.00	4.21
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,970,264,720.00	1,830,762,192.00	7.62
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,261,745,000.00	4,364,660,000.00	(2.36)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,002,313,000.00	15,938,571,200.00	(5.87)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,466,073,801.00	705,477,476.00	107.81
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,630,452,180.00	5,803,310,610.00	(2.98)
511129	Belanja Uang Makan PNS	15,665,228,000.00	17,145,180,000.00	(8.63)
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	695,100,000.00	696,950,000.00	(0.27)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,655,305,000.00	2,063,430,000.00	(19.78)
	Jumlah Belanja Kotor	170,452,708,025.00	168,628,818,868.00	1.08
	Pengembalian Belanja	(117,928,909.00)	(318,010,182.00)	-62.92
	Jumlah Belanja	170,334,779,116.00	168,310,808,686.00	1.20

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada TA 2024 sebesar Rp170.334.779.116,00 berasal dari:

Tabel 2.18 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	70,231,293,098.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	10,107,870,884.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	7,728,364,387.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	8,194,154,288.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	9,960,803,949.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	5,809,974,828.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	7,449,453,174.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	6,613,360,871.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,542,924,826.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5,225,300,897.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	6,536,367,742.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5,051,469,818.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7,145,428,804.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4,299,636,889.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,326,347,956.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,112,026,705.00
	Jumlah	170,334,779,116.00

Belanja Gaji dan
Tunjangan PPPK
Rp7.468.765.908,-

B.3.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.468.765.908,00 dan Rp714.869.476,00.

Tabel 2.19 Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,193,129,200.00	478,122,400.00	986.15
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	105,364.00	11,006.00	857.33
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	295,597,680.00	29,478,610.00	902.75
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	64,575,960.00	5,704,960.00	1031.93
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	712,418,000.00	67,380,000.00	957.31
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	277,947,960.00	27,157,500.00	923.47
511628	Belanja Uang Makan PPPK	924,866,000.00	107,015,000.00	764.24
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	3,825,000.00	-	100.00
	Jumlah Belanja Kotor	7,472,465,164.00	714,869,476.00	945.29
	Pengembalian Belanja	(3,699,256.00)	-	100.00
	Jumlah Belanja	7,468,765,908.00	714,869,476.00	944.77

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada TA 2024 sebesar Rp7.468.765.908,00 berasal dari:

Tabel 2.20 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	3,937,227,568.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	770,512,810.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	55,341,110.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,123,234,906.00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	336,112,505.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	156,913,583.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	267,697,548.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	205,891,398.00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	204,875,650.00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	96,436,146.00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	116,761,432.00
12	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	112,911,532.00
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	45,830,352.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	39,019,368.00
	Jumlah	7,468,765,908.00

Belanja Lembur
Rp2.507.159.550,-

B.3.3 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.507.159.550,00 dan Rp1.222.272.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar 105,12%.

Tabel 2.21 Perbandingan Realisasi Belanja Lembur

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
512211	Belanja Uang Lembur	2,451,916,000.00	1,219,951,000.00	100.98
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	56,396,000.00	2,397,000.00	2252.77
	Jumlah Belanja Kotor	2,508,312,000.00	1,222,348,000.00	105.20
	Pengembalian Belanja	(1,152,450.00)	(76,000.00)	
	Jumlah Belanja	2,507,159,550.00	1,222,272,000.00	105.12

Realisasi Belanja Uang Lembur pada TA 2024 sebesar Rp2.507.159.550,00 berasal dari:

Tabel 2.22 Rincian Belanja Lembur per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	466,056,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	244,572,000.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	173,397,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	53,431,000.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	107,086,000.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	107,724,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	223,879,000.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	302,730,000.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	136,588,000.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	32,881,000.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	130,720,250.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	172,914,000.00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	105,608,000.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	159,239,700.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	90,333,600.00
	Jumlah	2,507,159,550.00

Belanja Tunjangan
Khusus dan Pegawai
Transito
Rp193.806.998.877,-

B.3.4 Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp193.806.998.877,00 dan Rp176.619.046.898,00 atau terjadi kenaikan sebesar 9,73%.

Tabel 2.23 Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	187,962,206,145.00	176,141,564,636.00	6.71
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPK)	5,844,792,732.00	520,514,212.00	1022.89
	Jumlah Belanja Kotor	193,806,998,877.00	176,662,078,848.00	9.70
	Pengembalian Belanja	-	(43,031,950.00)	
	Jumlah Belanja	193,806,998,877.00	176,619,046,898.00	9.73

Belanja Barang

Rp954.577.173.848,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp954.577.173.848,00 dan Rp578.789.169.324,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 64,93% dengan adanya seleksi pengadaan ASN.

Tabel 2.24 Perbandingan Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
5211	Belanja Barang Operasional	90,468,643,737.00	51,516,123,184.00	75.61
5212	Belanja Barang Non Operasional	60,857,739,412.00	41,577,813,115.00	46.37
5218	Belanja Barang Persediaan	6,492,904,252.00	8,334,429,662.00	(22.10)
5221	Belanja Jasa	642,634,480,784.00	343,819,052,395.00	86.91
5231	Belanja Pemeliharaan	24,187,942,273.00	27,396,502,150.00	(11.71)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	132,466,772,726.00	106,542,242,572.00	24.33
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	431,893,602.00	583,363,446.00	0.00
	Jumlah Belanja Kotor	957,540,376,786.00	579,769,526,524.00	65.16
	Pengembalian Belanja	(2,963,202,938.00)	(980,357,200.00)	202.26
	Jumlah Belanja	954,577,173,848.00	578,789,169,324.00	64.93

Adapun Realisasi Belanja Barang BKN pada TA 2024 sebesar Rp954.577.173.848,00 berasal dari:

Tabel 2.25 Rincian Belanja Barang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	740,823,157,931.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	19,789,476,430.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	16,882,618,052.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	12,523,208,537.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	22,522,929,671.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	13,985,704,913.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	11,719,324,547.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	17,329,248,994.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	17,727,353,035.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	9,574,051,270.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	17,484,737,225.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	11,024,718,698.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	16,045,838,531.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	5,976,519,483.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	7,225,779,517.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	13,942,507,014.00
	Jumlah	954,577,173,848.00

Belanja Barang
Operasional
Rp90.420.396.479,-

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp90.420.396.479,00 dan Rp51.510.523.125,00 atau mengalami kenaikan sebesar 75,54%.

Tabel 2.26 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	86,922,134,927.00	46,135,321,221.00	88.41
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	684,717,268.00	664,770,400.00	3.00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	275,039,396.00	428,633,930.00	(35.83)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,809,822,300.00	3,388,061,190.00	(46.58)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	776,929,846.00	899,336,443.00	(13.61)
	Jumlah Belanja Kotor	90,468,643,737.00	51,516,123,184.00	75.61
	Pengembalian Belanja	(48,247,258.00)	(5,600,059.00)	761.55
	Jumlah Belanja	90,420,396,479.00	51,510,523,125.00	75.54

Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024 sebesar Rp90.420.396.479,00 berasal dari:

Tabel 2.27 Rincian Belanja Barang Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	52,757,416,780.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	2,499,559,367.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2,072,295,619.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	3,180,521,481.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3,703,576,687.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	2,463,591,709.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1,791,512,603.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,601,256,680.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,798,753,792.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,676,115,879.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,488,851,138.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2,417,434,670.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,267,788,209.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	881,196,200.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1,345,615,044.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,474,910,621.00
	Jumlah	90,420,396,479.00

Belanja Barang Non
Operasional
Rp60.827.456.712,-

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp60.827.456.712,00 dan Rp41.527.745.763,00 atau mengalami kenaikan sebesar 46,47%.

Tabel 2.28 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
521211	Belanja Bahan	30,825,059,338.00	20,219,950,268.00	52.45
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	25,641,592,400.00	17,120,896,000.00	49.77
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,099,993,620.00	1,272,011,000.00	65.09
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,265,334,728.00	2,930,551,347.00	(22.70)
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,094,326.00	-	100.00
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	1,665,000.00	34,404,500.00	(95.16)
	Jumlah Belanja Kotor	60,857,739,412.00	41,577,813,115.00	46.37
	Pengembalian Belanja	(30,282,700.00)	(50,067,352.00)	-39.52
	Jumlah Belanja	60,827,456,712.00	41,527,745,763.00	46.47

Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024 sebesar Rp60.827.456.712,00 berasal dari:

Tabel 2.29 Rincian Belanja Barang Non Operasional per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	20,734,993,134.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	6,348,592,550.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	3,908,871,805.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,247,013,250.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	5,108,611,700.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1,953,976,116.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1,531,992,675.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,169,225,866.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	3,189,399,742.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	562,562,500.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3,872,357,261.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1,310,437,980.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	3,222,762,794.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	944,206,599.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	494,567,540.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	3,227,885,200.00
	Jumlah	60,827,456,712.00

Belanja Barang
Persediaan
Rp6.492.904.252,-

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.492.904.252,00 dan Rp8.334.429.662,00 atau mengalami penurunan sebesar 22,10%.

Tabel 2.30 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,421,518,752.00	8,250,080,112.00	(22.16)
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	71,385,500.00	63,032,000.00	13.25
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	21,317,550.00	(100.00)
	Jumlah Belanja Kotor	6,492,904,252.00	8,334,429,662.00	(22.10)
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	6,492,904,252.00	8,334,429,662.00	(22.10)

Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 sebesar Rp6.492.904.252,00 berasal dari:

Tabel 2.31 Rincian Belanja Barang Persediaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	3,344,190,543.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	279,043,138.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	248,162,810.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	205,400,685.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	138,201,350.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	211,067,847.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	207,804,965.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	226,520,837.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	122,693,726.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	97,313,317.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	63,610,982.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	305,097,805.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	194,274,715.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	254,489,450.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	69,297,218.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	525,734,864.00
	Jumlah	6,492,904,252.00

Belanja Jasa

Rp642.596.000.870,-

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp642.596.000.870,00 dan Rp343.813.617.415,00 atau mengalami kenaikan sebesar 86,90%.

Tabel 2.32 Perbandingan Realisasi Belanja Jasa

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
522111	Belanja Langganan Listrik	18,773,294,279.00	18,243,917,685.00	2.90
522112	Belanja Langganan Telepon	505,961,390.00	435,296,388.00	16.23
522113	Belanja Langganan Air	375,136,186.00	427,903,228.00	(12.33)
522131	Belanja Jasa Konsultan	4,399,655,300.00	4,042,894,600.00	8.82
522141	Belanja Sewa	71,710,473,283.00	309,720,853,032.00	(76.85)
522151	Belanja Jasa Profesi	2,439,100,000.00	2,245,284,550.00	8.63
522191	Belanja Jasa Lainnya	544,430,860,346.00	7,728,962,463.00	6944.04
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	973,940,449.00	(100.00)
	Jumlah Belanja Kotor	642,634,480,784.00	343,819,052,395.00	86.91
	Pengembalian Belanja	(38,479,914.00)	(5,434,980.00)	
	Jumlah Belanja	642,596,000,870.00	343,813,617,415.00	86.90

Realisasi Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp642.596.000.870,00 berasal dari:

Tabel 2.33 Rincian Belanja Jasa per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	592,059,083,127.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	4,176,961,179.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	5,396,295,605.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2,965,530,982.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	4,152,470,219.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	3,664,453,624.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	3,132,869,955.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	5,569,591,671.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	4,219,345,754.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,711,624,106.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,807,298,208.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	2,864,777,111.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	4,135,811,655.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	978,111,180.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,146,310,476.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,615,466,018.00
	Jumlah	642,596,000,870.00

Belanja
Pemeliharaan
Rp24.062.878.754,-

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.062.878.754,00 dan Rp27.390.434.048,00 dengan penurunan sebesar 12,15%.

Tabel 2.34 Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,332,799,112.00	10,548,048,282.00	(11.52)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	490,127,695.00	465,123,866.00	5.38
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	90,282,731.00	62,396,955.00	44.69
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	737,399,042.00	844,713,722.00	(12.70)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,235,744,928.00	13,504,860,735.00	(9.40)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173,460,549.00	219,037,308.00	(20.81)
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
523132	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	148,412,550.00	-	100.00
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	-	22,881,000.00	(100.00)
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	27,281,978.00	25,626,164.00	6.46
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	937,433,688.00	1,688,814,118.00	(44.49)
	Jumlah Belanja Kotor	24,187,942,273.00	27,396,502,150.00	(11.71)
	Pengembalian Belanja	(125,063,519.00)	(6,068,102.00)	1960.999
	Jumlah Belanja	24,062,878,754.00	27,390,434,048.00	(12.15)

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp24.062.878.754,00 berasal dari:

Tabel 2.35 Rincian Belanja Pemeliharaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	11,600,304,904.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,062,715,849.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	639,787,040.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	970,665,748.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1,195,136,132.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	846,869,684.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	843,637,144.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	613,732,765.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	740,880,524.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	389,711,068.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	953,972,692.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	929,690,297.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	875,307,550.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	233,925,220.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	566,280,382.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,600,261,755.00
	Jumlah	24,062,878,754.00

Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
Rp129.745.643.179,-

B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp129.745.643.179,00 dan Rp105.629.055.865,00 atau mengalami kenaikan sebesar 22,83%.

Tabel 2.36 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
524111	Belanja Perjalanan Biasa	98,382,270,261.00	83,644,474,115.00	17.62
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,979,348,439.00	3,533,974,909.00	323.87
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,283,600,200.00	9,300,947,757.00	(10.94)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,821,553,826.00	10,062,845,791.00	7.54
	Jumlah Belanja Kotor	132,466,772,726.00	106,542,242,572.00	24.33
	Pengembalian Belanja	(2,721,129,547.00)	(913,186,707.00)	197.98
	Jumlah Belanja	129,745,643,179.00	105,629,055,865.00	22.83

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2024 sebesar Rp129.745.643.179,00 berasal dari:

Tabel 2.37 Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	59,895,275,841.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	5,422,604,347.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	4,617,205,173.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	3,954,076,391.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	8,224,933,583.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	4,845,745,933.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	4,211,507,205.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	4,148,921,175.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	6,656,279,497.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5,136,724,400.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	7,298,646,944.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	3,197,280,835.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	5,349,893,608.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	2,684,590,834.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,603,708,857.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,498,248,556.00
	Jumlah	129,745,643,179.00

Belanja Perjalanan
Luar Negeri
Rp431.893.602,-

B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp431.893.602,00 dan Rp583.363.446,00. Belanja Perjalanan Luar Negeri BKN merupakan Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri terdapat pada Kantor Pusat BKN. Realisasi belanja perjalanan luar negeri pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 25,96% dibanding TA 2023.

Tabel 2.38 Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
524211	Belanja Perjalanan Biasa- Luar Negeri	431,893,602.00	583,363,446.00	(25.96)
	Jumlah Belanja Kotor	431,893,602.00	583,363,446.00	(25.96)
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	431,893,602.00	583,363,446.00	(25.96)

Belanja Modal

Rp171.406.879.502,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp171.406.879.502,00 dan Rp103.021.142.225,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 66,38%, karena adanya pembangunan Kantor UPT yang didanai dari sumber dana SBSN.

Tabel 2.39 Perbandingan Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
5311	Belanja Modal Tanah	-	206,181,000.00	(100.00)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110,124,033,353.00	95,027,046,618.00	15.89
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,373,986,801.00	5,648,930,847.00	738.64
5361	Belanja Modal Lainnya	13,990,664,744.00	2,138,983,760.00	554.08
	Jumlah Belanja Kotor	171,488,684,898.00	103,021,142,225.00	66.46
	Pengembalian	(81,805,396.00)	-	
	Jumlah Belanja	171,406,879,502.00	103,021,142,225.00	66.38

Realisasi Belanja Modal pada TA 204 sebesar Rp171.406.879.502,00 berasal dari:

Tabel 2.40 Rincian Belanja Modal per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	163,915,014,023.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	107,127,726.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	924,998,361.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	199,274,944.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	233,537,100.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	168,826,906.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	99,052,914.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	174,972,380.00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,193,593,800.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	341,492,801.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	61,378,615.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	449,795,260.00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	470,729,000.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	869,599,600.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,197,486,072.00
	Jumlah	171,406,879,502.00

Belanja Modal Tanah **B.5.1 Belanja Modal Tanah**
Rp0,-

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp206.181.000,00. Tidak ada realisasi belanja modal tanah pada tahun 2024.

Tabel 2.41 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	10,000,000.00	(100.00)
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	196,181,000.00	(100.00)
	Jumlah Belanja Kotor	-	206,181,000.00	(100.00)
	Pengembalian	-	-	
	Jumlah Belanja	-	206,181,000.00	(100.00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp110.120.219.753,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp110.120.219.753,00 dan Rp95.027.046.618,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,88% dibandingkan dengan TA 2023, karena adanya seleksi pengadaan ASN.

Tabel 2.42 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107,886,706,458.00	94,114,355,350.00	14.63
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,237,326,895.00	912,691,268.00	145.14
	Jumlah Belanja Kotor	110,124,033,353.00	95,027,046,618.00	15.89
	Pengembalian	(3,813,600.00)	-	
	Jumlah Belanja	110,120,219,753.00	95,027,046,618.00	15.88

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 sebesar Rp110.120.219.753,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp107.882.892.858,00, berasal dari:

Tabel 2.43 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	105,455,935,090.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	150,561,220.00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	233,537,100.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	104,999,380.00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	131,419,000.00
6	Kantor Regional X BKN Denpasar	181,533,941.00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	61,378,615.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	276,550,012.00
9	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	167,917,900.00
10	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	597,661,600.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	521,399,000.00
	Jumlah	107,882,892,858.00

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.237.326.895,00 yang berasal dari:
 - a. Kantor Pusat BKN sebesar Rp2.234.027.975,00
 - b. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp3.298.920,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp47.295.995.005,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp47.295.995.005,00 dan Rp5.648.930.847,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 737,26%.

Tabel 2.44 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42,377,376,008.00	1,263,933,579.00	3252.82
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,996,610,793.00	4,384,997,268.00	13.95
	Jumlah Belanja Kotor	47,373,986,801.00	5,648,930,847.00	738.64
	Pengembalian Belanja Modal	(77,991,796.00)	-	-
	Jumlah Belanja	47,295,995,005.00	5,648,930,847.00	737.26

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024 sebesar Rp47.295.995.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.364.547.886,00 berasal dari:

*Tabel 2.45 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker
(Dalam Rupiah)*

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	42,107,262,158.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	39,998,000.00
3	Kantor Regional VII BKN Palembang	99,052,914.00
4	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	118,234,814.00
	Jumlah	42,364,547,886.00

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.931.447.119,00 berasal dari:

*Tabel 2.46 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan per Satker*

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	618,270,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	107,127,726.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	734,439,141.00
4	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	168,826,906.00
5	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	69,973,000.00
6	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,062,174,800.00
7	Kantor Regional X BKN Denpasar	156,659,940.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	173,245,248.00
9	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	302,811,100.00
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,537,919,258.00
	Jumlah	4,931,447,119.00

*Belanja Modal
Lainnya
Rp13.990.664.744,-*

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.990.664.744,00 dan Rp2.138.983.760,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 554,08% dibandingkan dengan TA 2023.

Tabel 2.47 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BELANJA	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
536111	Belanja Modal Lainnya	12,866,668,300.00	191,475,000.00	6619.76
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,123,996,444.00	1,947,508,760.00	(42.29)
	Jumlah Belanja Kotor	13,990,664,744.00	2,138,983,760.00	554.08
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
	Jumlah Belanja	13,990,664,744.00	2,138,983,760.00	554.08

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2024 sebesar Rp13.990.664.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp12.866.668.300,00 berasal dari:
 - a. Kantor Pusat BKN sebesar Rp12.846.735.300,00
 - b. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp19.933.000,00
2. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya sebesar Rp1.123.996.444,00 berasal dari:

Tabel 2.48 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	652,783,500.00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	199,274,944.00
3	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	271,938,000.00
	Jumlah	1,123,996,444.00

Prioritas Nasional

B.6 PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET DAN REALISASI OUTPUT PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Sebagai wujud operasional RPJMN Tahun 2020 - 2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005 - 2025, Visi Indonesia 2025, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020 - 2024 yang meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Badan Kepegawaian Negara terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada **Prioritas Nasional VII - Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan Publik** yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp16.944.515.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp13.712.255.091,00. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi *Output* dari masing-masing Proyek Prioritas Nasional BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49 Rincian Capaian Output Prioritas Nasional

(Dalam Rupiah)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	(%)
1	3663 PFA 001	Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	2,000,000,000.00	1,957,910,710.00	97.90	1	1	NSPK	100.00
2	3663 UAC 001	Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	5,500,000,000.00	5,473,403,943.00	99.52	60,000	70,907	Orang	118.18
3	4845 PBQ 001	Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah	1,000,000,000.00	999,643,669.00	99.96	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00
4	4847 QMA 001	Layanan Data ASN Terintegrasi	2,500,000,000.00	2,478,406,972.00	99.14	1	1	Layanan	100.00
5	4848 QIC 001	Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah	3,447,047,000.00	2,093,006,388.00	60.72	467	94	Lembaga	20.13
6	4848 UAE 001	Pengawasan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	45,000,000.00	30,628,095.00	68.06	6	6	Laporan	100.00
7	4848 UAE 002	Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	1,936,330,000.00	597,521,766.00	30.86	1	1	Laporan	100.00
8	4848 UAE 003	Penanganan dan Penyelesaian Penyelenggaraan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	516,138,000.00	81,733,548.00	15.84	200	456	Laporan	228.00
Jumlah			16,944,515,000.00	13,712,255,091.00	80.92				

*Pemetaan/ Penilaian
Potensi dan
Kompetensi ASN*

B.6.1 Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN

BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara menjalankan program prioritas nasional untuk menyusun instrumen Pemetaan/ Penilaian Kompetensi ASN. Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN dengan target 1 NSPK. Dalam rangka percepatan implementasi sistem merit nasional, perlu didukung dengan pelaksanaan manajemen talenta secara nasional yaitu dengan menyiapkan *database* talenta. Hal ini sejalan dengan salah satu Program Prioritas pada RPJMN 2020-2024, yaitu “Pembangunan Manajemen Talenta Nasional”.

Pada kegiatan prioritas nasional ini, BKN akan mengembangkan sebuah alat ukur berbasis digital dengan target asesi adalah pejabat pimpinan tinggi. Hal ini perlu dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/ Lembaga. Instruksi ini dikeluarkan untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja serta pelayanan publik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Inovasi yang dilakukan adalah membangun Virtual Assessment Center (AC) yang dimulai dengan kegiatan Penyusunan Simulasi Assessment Center berbasis *Artificial Intelligence* yang dalam pelaksanaan penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilakukan secara daring dengan menggunakan teknologi *Natural Language Processing* (NLP), *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning* dan *Blockchain*. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, capaian output telah tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.957.910.710,00.

*Penyusunan
Instrumen
Pemetaan/ Penilaian
Kompetensi ASN*

B.6.2 Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN

BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara menjalankan program prioritas nasional untuk melakukan Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN. Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN dengan target 60.000 ASN yang terdiri dari 40.000 ASN untuk instansi pusat yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 20.000 ASN untuk instansi penyangga IKN. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2023 yang dilakukan menggunakan aplikasi *Computer Assisted Competency Test* (CACT). Sampai dengan 31 Desember 2024 progres capaian output pada kegiatan Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN adalah 118,18% atau sebesar 70.907 orang yang telah dilaksanakan di 46 Instansi Pusat, 7 Instansi mitra IKN/Instansi Penyangga (Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Samarinda) dari target 60.000 orang (pegawai) dan realisasi anggaran sebesar Rp5.473.403.943,00.

*Rekomendasi
Kebijakan Tentang
Sistem Penggajian
Pegawai ASN pada
Instansi Pemerintah*

B.6.3 Rekomendasi Kebijakan Tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah

BKN melalui Direktorat Kompensasi ASN menjalankan program prioritas nasional untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang mengatur sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah dengan target 1 rekomendasi kebijakan. Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah dilakukan untuk menelaah dan mengevaluasi sistem penggajian PNS yang berlaku saat ini. Saat ini sistem penggajian yang ada lebih menitikberatkan pada

pertimbangan golongan/ruang kepangkatan yang dimiliki seorang pegawai, akan tetapi tidak didasarkan pada standar penilaian prestasi kerja seorang pegawai sehingga semua pegawai yang mempunyai golongan ruang kepangkatan yang sama akan memperoleh gaji sama besar meskipun prestasi kerjanya berbeda. Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk mewujudkan sistem penggajian yang adil dan berkeadilan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS melalui peningkatan kesejahteraan dengan tetap mempertimbangkan beban fiskal Pemerintah.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 progres capaian output sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,96% atau sebesar Rp999.643.669,00. Selanjutnya akan dilakukan Penyampaian laporan hasil finalisasi konsep rekomendasi sistem penggajian ASN sebagai bahan masukan materi muatan RPP Penghargaan dan Pengakuan Pegawai ASN.

*Layanan Data ASN
Terintegrasi*

B.6.4 Layanan Data ASN Terintegrasi

BKN melalui Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, memiliki kewenangan dalam mengelola data ASN, dan diberikan tanggung jawab melaksanakan salah satu Program Nasional untuk mewujudkan layanan data dan informasi ASN yang terintegrasi, akurat dan terkini. Program ini dijalankan dengan mengukur dan meningkatkan kualitas data ASN melalui kegiatan:

1. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen Kualitas Data.
2. Pelaksanaan Evaluasi Uji Coba Instrumen Tingkat Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data.
3. Melanjutkan uji kelayakan ITSA *Dashboard* Disparitas Data ASN dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
4. Penyelesaian pengelolaan tabel referensi untuk jabatan fungsional, unit organisasi satuan pendidikan, sertifikasi profesi, dan pendidikan. Selanjutnya akan dilakukan Pembangunan layanan pengukuran kualitas data ASN di tahun 2025.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, progres capaian output sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,14% atau sebesar Rp2.478.406.972,00.

*Penilaian Penerapan
Sistem Merit di
Instansi Pemerintah*

B.6.5 Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah

BKN Melalui Direktorat pengawasan dan Pengendalian III menjalankan program prioritas nasional untuk melakukan penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan sistem merit merupakan tata kelola manajemen ASN yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi sendiri berarti prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.

Penilaian penerapan sistem merit tahun 2024 bertujuan agar mampu melengkapi gambaran mengenai progres penerapan sistem merit secara kumulatif selama lima tahun terakhir baik di level nasional maupun di level masing-masing instansi pemerintah yang menjadi objek penilaian. Informasi yang didapat dari hasil penilaian penerapan sistem merit di 2024 tentunya akan berharga untuk menjadi bahan penyempurnaan kebijakan bidang aparatur di periode pembangunan lima tahun selanjutnya pasca 2024. Sampai

dengan tanggal 31 Desember 2024 progres capaian output sebanyak 94 lembaga (20,13%) dari target 467 lembaga dengan realisasi anggaran sebesar 60,72% atau sebesar Rp2.093.006.388,00.

*Pengawasan Nilai
Dasar Kode Etik dan
Kode Perilaku
Pegawai ASN*

B.6.6 Pengawasan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN

BKN Melalui Direktorat pengawasan dan Pengendalian II menjalankan program prioritas nasional untuk melakukan Pengawasan terhadap Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan birokrasi yang berintegritas, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) mematuhi norma-norma yang ditetapkan, menjaga martabat profesi, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, pelanggaran terhadap etika kerja dan perilaku dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 progres capaian output sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 68,06% atau sebesar Rp30.628.095,00.

*Pengawasan
Netralitas Pegawai
ASN dalam
Penyelenggaraan
Pemilu dan
Pemilihan Serentak
Tahun 2024*

B.6.7 Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

BKN Melalui Direktorat pengawasan dan Pengendalian IV menjalankan program prioritas nasional untuk melakukan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Program ini menjadi bagian dari agenda strategis BKN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada tahun 2024. Tujuan utamanya adalah memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari intervensi politik praktis. BKN melalui Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN telah menyusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian Netralitas terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 November 2024. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 progres capaian output sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 30,86% atau sebesar Rp597.521.766,00.

*Penanganan dan
Penyelesaian
Pelanggaran
Netralitas Pegawai
ASN dalam
Penyelenggaraan
Pemilu dan
Pemilihan Serentak
Tahun 2024*

B.6.8 Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

BKN Melalui Direktorat pengawasan dan Pengendalian IV menjalankan program prioritas nasional untuk melakukan Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Program ini fokus pada pengawasan perilaku ASN, penanganan laporan pelanggaran, serta penegakan sanksi secara cepat dan tepat sesuai regulasi. Melalui mekanisme pelaporan yang transparan dan kolaborasi dengan instansi terkait, program ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran netralitas, meningkatkan kesadaran ASN, dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di Indonesia. Selain itu BKN melalui Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN telah menangani dan menyelesaikan pelanggaran netralitas ASN dengan menyelesaikan sebanyak 456 Laporan dengan tindak lanjut 1 laporan Belum Dikerjakan Bawaslu, 61 Laporan Ditolak Bawaslu. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 progres capaian output sebesar 228% dengan realisasi anggaran sebesar 15,84% atau sebesar Rp81.733.548,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja. Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKN per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Bendahara Pengeluaran mengelola Kas di rekening bank. Rincian rekening bank yang dikelola oleh masing-masing satker di BKN disajikan pada Lampiran Utama A1.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNBPN. Bendahara Penerimaan terdapat pada satker Kantor Pusat BKN yang mengelola rekening dengan nomor 0340-01-002735-30-2 pada Bank Rakyat Indonesia dan satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN yang mengelola rekening dengan nomor 1224-01-000123-30-4 pada Bank Rakyat Indonesia.

Mekanisme penerimaan PNBPN dilakukan melalui rekening Bendahara Penerimaan dan penyetoran langsung ke kas negara. Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp9.270.300,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas dan setara kas lainnya, merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.270.300,00 dan Rp4.587.816,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9,270,300.00	4,587,816.00
Jumlah	9,270,300.00	4,587,816.00

Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp9.270.300,00 berasal dari Kantor Pusat BKN yang berada pada RKK BKN OPS di Bank BRI dengan Nomor Rekening 0340-01-002815-30-6 yang terdiri dari:

1. Transaksi retur transfer ke penerima (dari SP2D LS-Bendahara) yang masuk ke *Virtual Account* (VA) pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp8.967.500,00;
2. Transaksi penerimaan yang disetor melalui *teller* BPD Kaltim Syariah pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp302.800,00.

Belanja Dibayar di
Muka
Rp33.977.549.372,-

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp33.977.549.372,00 dan Rp131.199.742,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Pembayaran Sewa Gedung Bangunan	10.097.419,00	9.543.716,00
Biaya Langganan Lisensi	33.967.451.953,00	121.656.026,00
Jumlah	33.977.549.372,00	131.199.742,00

Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Utama A4.

Piutang Bukan Pajak
Rp6.233.799.930,-

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.233.799.930,00 dan Rp2.747.393.181,00. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Piutang PNPB	-	-
Piutang Lainnya	6,233,799,930.00	2,747,393,181.00
Jumlah	6,233,799,930.00	2,747,393,181.00

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.233.799.930,00 berasal dari piutang lainnya merupakan piutang atas:

Tabel 3.4 Rincian Piutang Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024
Pengembalian Belanja Pegawai TA 2025	426,742,336.00
Pengembalian Belanja Barang TA 2025	1,485,481,317.00
Pengembalian Belanja Modal TA 2025	2,733,567,597.00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,582,008,680.00
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	6,000,000.00
Jumlah	6,233,799,930.00

Piutang Bukan Pajak berasal dari satker sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Kantor Pusat BKN	6,098,444,841.00	433,473,386.00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	4,700,000.00	1,368,040.00
Kantor Regional II BKN Surabaya	89,467,560.00	2,600,000.00
Kantor Regional III BKN Bandung	11,811,926.00	-
Kantor Regional IV BKN Makassar	415,000.00	2,034,084,835.00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	2,546,000.00	1,455,000.00
Kantor Regional VI BKN Medan	5,888,500.00	1,191,200.00
Kantor Regional VII BKN Palembang	3,026,803.00	-
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	-	45,450,641.00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	15,214,850.00	96,691,976.00
Kantor Regional X BKN Denpasar	105,450.00	30,799,200.00
Kantor Regional XI BKN Manado	1,050,000.00	25,194,262.00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	-	1,681,500.00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	-	13,643,600.00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1,129,000.00	6,688,350.00
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	53,071,191.00
Jumlah	6,233,799,930.00	2,747,393,181.00

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
Rp31.169.000,-

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing - masing sebesar Rp31.169.000,00 dan Rp13.736.966,00.

Tabel 3.6 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	6,233,799,930	0.50%	31,169,000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
JUMLAH	6,233,799,930		31,169,000

Persediaan
Rp6.343.765.576,-

C.7 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.343.765.576,00 dan Rp7.106.175.160,00.

Tabel 3.7 Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

Persediaan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Barang Konsumsi	6,036,557,346.00	6,722,383,660.00
Bahan untuk Pemeliharaan	307,208,230.00	383,791,500.00
Suku cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	6,343,765,576.00	7,106,175,160.00

Adapun rincian persediaan per satker sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Persediaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Kantor Pusat BKN	2,534,143,776.00	2,232,335,274.00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	511,376,450.00	579,302,866.00
Kantor Regional II BKN Surabaya	189,783,198.00	292,376,448.00
Kantor Regional III BKN Bandung	117,017,316.00	170,052,545.00
Kantor Regional IV BKN Makassar	138,744,912.00	181,080,450.00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	281,410,213.00	278,279,760.00
Kantor Regional VI BKN Medan	135,650,759.00	322,797,442.00
Kantor Regional VII BKN Palembang	139,508,535.00	201,179,129.00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	417,172,037.00	449,486,840.00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	293,983,986.00	499,488,799.00
Kantor Regional X BKN Denpasar	332,861,298.00	471,799,088.00
Kantor Regional XI BKN Manado	183,935,025.00	229,634,298.00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	744,371,850.00	882,110,788.00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	145,703,700.00	138,853,430.00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	34,093,997.00	44,708,946.00
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	144,008,524.00	132,689,057.00
Jumlah	6,343,765,576.00	7,106,175,160.00

Terdapat persediaan dalam kondisi usang sebesar Rp197.881.000,00 yang tidak disajikan dalam neraca. Persediaan dengan keadaan usang tersebut berasal dari:

Tabel 3.9 Rincian Persediaan Usang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Kantor Regional VII BKN Palembang	62,425,000.00	Toner Printer HP dan Laser Jet sebanyak 52 buah
2	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	135,456,000.00	Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian sebanyak 498 buah
	Jumlah	197,881,000.00	

Tanah

Rp2.331.580.054.368,-

C.8 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BKN yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.331.580.054.368,00 dan Rp2.330.666.524.668,00

Tabel 3.10 Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2,330,666,524,668.00
Mutasi Tambah:	913,529,700.00
Hibah Masuk	913,529,700.00
Saldo per 31 Desember 2024	2,331,580,054,368.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2,331,580,054,368.00

Rincian mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Tanah berasal dari:

Mutasi Tambah sebesar Rp913.529.700,00 berupa Hibah (Masuk) sebesar Rp913.529.700,00 atas transaksi Tanah yang berasal dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 000.2.3.2/0159/PUPR-PERKIM/SETDA dan Nomor 14/PL.03.04/ BA/A/2023 Tanggal 15 Januari 2024.

Adapun Rincian Tanah per satker adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rincian Tanah Per Satker

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Kantor Pusat BKN	790,911,774,000.00	790,911,774,000.00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	150,838,792,000.00	150,838,792,000.00
Kantor Regional II BKN Surabaya	351,559,532,000.00	351,559,532,000.00
Kantor Regional III BKN Bandung	50,955,787,080.00	50,955,787,080.00
Kantor Regional IV BKN Makassar	90,756,538,500.00	90,756,538,500.00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	62,663,190,000.00	62,663,190,000.00
Kantor Regional VI BKN Medan	164,724,060,000.00	164,724,060,000.00
Kantor Regional VII BKN Palembang	264,364,323,238.00	264,364,323,238.00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	18,198,878,840.00	17,285,349,140.00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	40,113,517,000.00	40,113,517,000.00
Kantor Regional X BKN Denpasar	166,626,748,000.00	166,626,748,000.00
Kantor Regional XI BKN Manado	48,274,100,310.00	48,274,100,310.00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	25,270,525,400.00	25,270,525,400.00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	18,461,628,000.00	18,461,628,000.00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,624,710,000.00	4,624,710,000.00
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	83,235,950,000.00	83,235,950,000.00
Jumlah	2,331,580,054,368.00	2,330,666,524,668.00

Pada tahun 2024, terdapat perubahan status tanah yang berlokasi di Bekasi yang sebelumnya berstatus sebagai Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II yang direncanakan akan dimanfaatkan dan disewakan sebagai Promart BKN.

Terdapat Tanah BKN yang dikuasai pihak lain dengan uraian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat BKN. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m² senilai Rp77.478.342.000,00.
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:
 - a. Kampung Sopen GK.I/445 seluas 619 m² senilai Rp3.037.866.000,00.
 - b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m² senilai Rp7.906.640.000,00.

Atas pemanfaatan BMN di kedua lokasi tersebut, masih belum ada kontribusi yang diterima oleh BKN. Pada Tahun 2021 telah ada persetujuan tarif sewa tanah atas sebagian tanah pada Kanreg I BKN Yogyakarta sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Nomor: S-40/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 5 Maret 2021, namun belum ada tindak lanjut dari BKN untuk melakukan pungutan sewa dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut. Para penyewa mengajukan keberatan atas tarif sewa dengan mengajukan keringanan tarif kepada BKN. Pengajuan keringanan tarif dilakukan pada bulan Maret 2023, dan masih dalam proses persetujuan di KPKNL.

Selain kedua tanah yang dikuasai pensiunan pegawai tersebut, terdapat juga tanah yang berlokasi di perumahan BKN telah dibangun oleh pihak ketiga berupa bangunan permanen yang dimanfaatkan sebagai Musholla di luar lingkungan BKN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rejowinangun, Kota Gede seluas 48 m² senilai Rp342.853.000,00
 - b. Sedangadi, Mlati, Sleman seluas 104 m² senilai Rp683.456.000,00
3. Kantor Regional II BKN Surabaya, terdapat Tanah yang telah diterbitkan pelepasan hak atas tanahnya oleh Kementerian PUPR namun belum mengurangi luasan pada Sertifikat Tanah Kantor Regional II BKN Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan atas nama 4 orang, seluas 591 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor 7730047.
 - b. Surat Keputusan atas nama 2 orang, seluas 262 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor B 2511581.
 4. Kantor Regional III BKN Bandung. Tanah milik BKN yang berlokasi di Muararajen Lama, Cihaurgeulis seluas 1.419 m² senilai Rp20.215.074.000,00 yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha oleh pihak ketiga.

Atas pemanfaatan BMN di lokasi tersebut, telah dilakukan pungutan sewa sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-192/MK.06/WKN.08/KNL01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara RI c.q. Kantor Regional III BKN. Pada tahun 2022, terjadi penyesuaian tarif sewa dan pergantian lima orang penyewa berdasarkan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-252/MK.6/KNL.0801/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, namun BKN belum dapat melakukan pungutan sewa dengan tarif baru tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut.

Atas permintaan penyesuaian tarif tersebut, melalui Surat KPKNL Bandung Nomor S-229/MK.6/KNL.0801/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, permintaan penyesuaian tarif oleh penyewa telah disesuaikan dengan nilai yang sewa baru namun tarif tersebut masih belum dapat disetujui para penyewa sehingga mengajukan keberatan kembali kepada BKN pada tanggal 2 Maret 2024 dan masih dalam proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan tarif sewa yang baru

Dari aset tanah BKN seluas 537,313 m², tanah yang belum bersertifikat sebagai berikut:

1. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Kalimantan Utara dengan luas tanah 15.000 m² senilai Rp913.529.700,00.
2. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Jalan Adinegoro Padang, Ganting, Koto Tengah, Kota Padang. dengan luas tanah 2.000 m² senilai Rp400.000.000,00.

Peralatan dan Mesin
Rp768.036.979.101,-

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp768.036.979.101,00 dan Rp704.398.035.892,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 3.12 Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	704,398,035,892.00
Mutasi Tambah:	133,937,729,331.00
Saldo Awal	113,331,000.00
Pembelian	111,141,830,533.00
Pengembangan Nilai Aset	2,112,560,120.00
Transfer Masuk	20,418,172,678.00
Hibah Masuk	151,135,000.00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	700,000.00
Mutasi Kurang:	(70,298,786,122.00)
Transfer Keluar	(16,131,104,850.00)
Hibah (Keluar)	(180,444,835.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1,201,764,093.00)
Koreksi Pencatatan	(263,300,000.00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(52,522,172,344.00)
Saldo per 31 Desember 2024	768,036,979,101.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(587,961,924,338.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	180,075,054,763.00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.120.219.753,00, sedangkan Penambahan Peralatan dan Mesin dari Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp113.254.390.653,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.134.170.900,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian berupa *Walkthrough/ Portal Metal Detector* yang merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya dimana pembayarannya telah dilakukan melalui Dana Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada Tahun 2023 sebesar (Rp3.204.250.000,00) pada Kantor Pusat BKN.
2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan terkait pembelian AC Split di Kantor Pusat senilai (Rp3.813.600,00)
3. Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp73.892.700,00 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp62.060.100,00;
 - b. Penambahan nilai aset ekstrakomptabel sebesar Rp7.947.600,00;
 - c. Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp3.885.000,00.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp117.806.624.481,00 berupa:

1. Saldo Awal sebesar Rp113.331.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga yang merupakan koreksi terhadap aset yang perolehannya dilakukan melalui belanja barang tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

2. Pembelian sebesar Rp111.141.830.533,00 yang menggunakan akun 532111 sebesar Rp110.986.541.533,00 dan akun 532121 sebesar Rp155.289.000,00 berupa:

Tabel 3.13 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Bantu	749,544,600.00
2	Alat Angkutan	1,504,965,000.00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9,870,500.00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8,087,146,133.00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1,898,326,101.00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2,220,000.00
7	Alat Laboratorium	2,974,800.00
8	Alat Persenjataan	1,576,400.00
9	Komputer	98,144,162,999.00
10	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	64,269,000.00
11	Alat Keselamatan Kerja	465,283,000.00
12	Peralatan Proses/Produksi	12,250,000.00
13	Peralatan Olahraga	199,242,000.00
Jumlah		111,141,830,533.00

Pembelian Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.14 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	108,714,872,765.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	150,561,220.00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	233,537,100.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	104,999,380.00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	131,419,000.00
6	Kantor Regional X BKN Denpasar	181,533,941.00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	61,378,615.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	276,550,012.00
9	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	167,917,900.00
10	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	597,661,600.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	521,399,000.00
Jumlah		111,141,830,533.00

3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp2.112.560.120,00 yang menggunakan akun 532121 sebesar Rp2.082.037.895,00 dan akun 532111 sebesar Rp30.522.225,00 berupa:

Tabel 3.15 Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	33,821,145.00
2	Komputer	2,078,738,975.00
	Jumlah	2,112,560,120.00

Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.16 Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	2,109,261,200.00
2	Kantor Regional X BKN Denpasar	3,298,920.00
	Jumlah	2,112,560,120.00

4. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.418.172.678,00 berupa:

Tabel 3.17 Rincian Transfer Masuk Aset Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	1,386,600,000.00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6,686,000.00
3	Alat Bengkel Tak Bermesin	2,706,000.00
4	Alat Kantor	3,130,599,061.00
5	Alat Rumah Tangga	2,196,092,817.00
6	Alat Komunikasi	30,774,000.00
7	Unit Alat Laboratorium	3,910,000.00
8	Komputer Unit	11,515,060,000.00
9	Peralatan Komputer	2,145,744,800.00
	Jumlah	20,418,172,678.00

Rincian Transfer Masuk Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.418.172.678,00 bersumber dari:

Tabel 3.18 Rincian Sumber Transfer Masuk Aset Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Internal BKN	16,131,104,850.00
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	3,316,439,428.00
3	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)	970,628,400.00
	Jumlah	20,418,172,678.00

Transfer Masuk senilai Rp20.418.172.678,00 berasal dari:

Tabel 3.19 Rincian Transfer Masuk per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	4.308.967.828,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	375.900.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	236.650.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	940.023.950,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	3.040.289.800,00
6	Kantor Regional V BKN DKI	1.634.067.200,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1.957.790.000,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	3.376.126.200,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.051.971.800,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	156.400.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	961.820.600,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	597.164.100,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1.295.850.600,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	127.270.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	357.880.600,00
	Jumlah	20.418.172.678,00

5. Hibah Masuk sebesar Rp151.135.000,00 pada Kantor Regional IV BKN Makassar yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Barang Milik Negara Nomor: 000,4/1981/Dispus.Arsip, tanggal 27 Agustus 2024 berupa:

Tabel 3.20 Rincian Hibah Masuk Aset Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	73,573,200.00
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3,005,200.00
3	Komputer	74,556,600.00
	Jumlah	151,135,000.00

6. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp700.000,00 berupa:
- Koreksi atas pencatatan SSD (Server) sebesar Rp350.000,00 pada pengembangan NUP *Hard Disk* yang menggunakan akun belanja 523111 di Kantor Regional III BKN Bandung.

- b. Koreksi atas pencatatan biaya ongkos pengiriman ke UPT Mamuju terkait pembelian sofa sebesar Rp350.000,00 yang menggunakan akun belanja 521252 di Kantor Regional IV BKN Makassar.

Mutasi Kurang transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp70.298.786.122,00 berupa:

1. Transfer Keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.131.104.850,00 di Kantor Pusat yang berupa:

Tabel 3.21 Rincian Transfer Keluar Aset Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	299,000,000.00
2	Alat Kantor	2,940,950,000.00
3	Alat Rumah Tangga	179,078,450.00
4	Alat Komunikasi	21,900,000.00
5	Komputer Unit	11,515,060,000.00
6	Peralatan Komputer	1,175,116,400.00
	Jumlah	16,131,104,850.00

Transfer Keluar senilai Rp16.131.104.850,00 berasal dari:

Tabel 3.22 Rincian Transfer Keluar per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	16,109,204,850.00
2	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	21,900,000.00
	Jumlah	16,131,104,850.00

2. Hibah (Keluar) sebesar Rp180.444.835,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Barang Milik Negara Nomor: 54/KA.03/UE/B.IV/VIII/2024, tanggal 9 Agustus 2024 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Barang Milik Negara Nomor: 55/KA.03/UE/B.IV/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024.
3. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.201.764.093,00 pada Kantor Pusat BKN berupa:
 - a. Koreksi pencatatan atas pengembalian belanja tahun berjalan atas kelebihan pembayaran terkait pembelian AC Split senilai Rp3.813.600,00;
 - b. Koreksi pencatatan atas pengembalian belanja tahun anggaran 2024 yang disetorkan di tahun 2025 terkait kelebihan pembayaran pada pengadaan *Access Point* senilai Rp891.384.416,00;
 - c. Koreksi pencatatan atas pengembalian belanja tahun anggaran 2024 yang disetorkan di tahun 2025 terkait kelebihan pembayaran pada pengadaan *Storage Modul Disk* senilai Rp306.566.077,00;

4. Koreksi Pencatatan berupa Peralatan Komputer sebesar Rp263.300.000,00 atas pembelian *Walkthrough/Portal Metal Detector* yang sebagian barangnya sudah diterima pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kantor UPT BKN Serang sebesar Rp87.750.000,00;
 - b. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp87.950.000,00;
 - c. Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp87.600.000,00.
5. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp54.522.172.344,00 berupa:

*Tabel 3.23 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	870,448,670.00
2	Alat Angkutan	622,363,200.00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,095,036,939.00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2,211,172,672.00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	73,718,000.00
6	Alat Laboratorium	549,053,947.00
7	Komputer	38,085,788,916.00
8	Peralatan Proses/Produksi	400,000.00
9	Peralatan Olahraga	14,190,000.00
	Jumlah	52,522,172,344.00

6. Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin berasal dari:

*Tabel 3.24 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan
Peralatan dan Mesin per Satker*

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	31,078,414,622.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	948,104,839.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	1,407,375,477.00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	3,406,008,718.00
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	1,041,002,384.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	1,370,691,091.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	2,903,931,669.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	3,483,478,849.00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	3,135,658,029.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	3,747,506,666.00
	Jumlah	52,522,172,344.00

Rincian Peralatan dan Mesin per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.25 Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Kantor Pusat BKN	408,640,296,174.00	342,160,941,921.00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	25,033,056,441.00	24,657,156,441.00
Kantor Regional II BKN Surabaya	16,146,753,301.00	16,707,646,920.00
Kantor Regional III BKN Bandung	19,512,770,820.00	19,979,772,347.00
Kantor Regional IV BKN Makassar	34,249,134,540.00	34,229,568,898.00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	23,448,111,459.00	22,854,992,523.00
Kantor Regional VI BKN Medan	20,306,472,583.00	19,719,157,084.00
Kantor Regional VII BKN Palembang	36,060,514,149.00	35,588,018,933.00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	23,897,955,538.00	26,224,463,207.00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	19,427,930,370.00	20,125,790,739.00
Kantor Regional X BKN Denpasar	21,163,271,324.00	22,166,473,103.00
Kantor Regional XI BKN Manado	25,994,616,971.00	25,336,074,256.00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	26,033,714,745.00	26,801,800,810
Kantor Regional XIII Banda Aceh	7,676,020,156.00	7,402,732,256.00
Kantor Regional XIV Manokwari	14,376,123,944.00	13,420,581,744.00
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	46,070,236,586.00	47,022,864,710.00
Jumlah	768,036,979,101.00	704,398,035,892.00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Gedung dan Bangunan
Rp896.194.810.778,-

C.10 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp896.194.810.778,00 dan Rp868.849.348.970,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	868,849,348,970.00
Mutasi Tambah:	28,397,401,282.00
Hibah (Masuk)	65,000,000.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1,304,186,028.00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	3,921,190,593.00
Pengembangan melalui KDP	22,599,554,415.00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	507,470,246.00
Mutasi Kurang:	(1,051,939,474.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(124,318,474.00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(927,621,000.00)
Saldo per 31 Desember 2024	896,194,810,778.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(192,573,355,342.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	703,621,455,436.00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.295.995.005,00, sedangkan Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan (Langsung) dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp5.225.376.621,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.070.618.384,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi untuk Pekerjaan KDP sebesar Rp42.129.790.700,00.
2. SPM Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 03/KONTRAK-KONSULTAN/ROUM/BKN/IV/2024 untuk Addendum I Kontrak Pengawasan Pembangunan UPT BKN Mataram senilai Rp92.285.400,00.
3. Koreksi pencatatan atas BAST Void sebesar (Rp11.405.820,00) di Kantor Pusat BKN.
4. Pengembalian belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar (Rp77.991.796,00) di Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional X BKN Denpasar.
5. Kesalahan penggunaan akun dengan akun belanja 532111 senilai (Rp62.060.100,00) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.397.401.282,00 berupa:

1. Hibah (Masuk) sebesar Rp65.000.000,00 atas transaksi Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta sesuai dengan BAST Hibah dari Komisariat Kantor Regional I BKN Yogyakarta Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan BAST Nomor 003/BA/KORPRI/KR.I/2024 dan Nomor 14.1/PL.03.04/BA/KR.I/2023 Tanggal 01 Juli 2024.

2. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp1.304.186.028,00 yang menggunakan akun 533111 sebesar Rp257.285.728,00 dan menggunakan akun 532121 sebesar Rp1.046.900.300,00 berupa:

Tabel 3.27 Rincian Penyelesaian Pembangunan Langsung
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1,046,900,300.00
2	Bangunan Gedung Kantor Perpustakaan Semi Permanen	118,234,814.00
3	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	39,998,000.00
4	Gedung Pos Jaga Permanen	99,052,914.00
	Jumlah	1,304,186,028.00

Penyelesaian Pembangunan Langsung berasal dari:

Tabel 3.28 Rincian Penyelesaian Pembangunan Langsung per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	28,582,500.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	39,998,000.00
3	Kantor Regional VII BKN Palembang	99,052,914.00
4	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,018,317,800.00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	118,234,814.00
	Jumlah	1,304,186,028.00

3. Pengembangan Nilai Aset Langsung sebesar Rp3.921.190.593,00 yang menggunakan akun 533111 sebesar Rp173.245.248,00; akun 532111 sebesar Rp62.060.100,00; dan akun 533121 sebesar Rp3.685.885.245,00 berupa:

Tabel 3.29 Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Asrama Permanen	1,220,817,250.00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2,197,715,162.00
3	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	30,434,091.00
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	177,894,381.00
5	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	175,236,699.00
6	Pagar Permanen	119,093,010.00
	Jumlah	3,921,190,593.00

Pengembangan Nilai Aset Langsung berasal dari:

Tabel 3.30 Rincian Pengembangan Nilai Aset Langsung per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	651,747,600.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	107,127,726.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	734,439,141.00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	168,826,906.00
5	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	69,973,000.00
6	Kantor Regional IX BKN Jayapura	43,857,000.00
7	Kantor Regional X BKN Denpasar	164,833,422.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	173,245,248.00
9	Kantor Regional XIII BKN Aceh	212,231,100.00
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,594,909,450.00
	Jumlah	3,921,190,593.00

4. Pengembangan melalui KDP menggunakan akun 533111 sebesar Rp22.599.554.415,00 atas pekerjaan pembangunan UPT BKN Mataram yang berasal dari Kantor Pusat BKN.
5. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah menggunakan akun 523111 sebesar Rp507,470,246,00 berupa:
 - a. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.801.000,00 atas pekerjaan renovasi ruang CAT 2 di Kantor Regional IV BKN Makassar;
 - b. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.805.828,00 atas pekerjaan renovasi ruang subbagian umum di Kantor Regional IV BKN Makassar;
 - c. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp147.688.650,00 atas pekerjaan renovasi pagar di Kantor Regional IV BKN Makassar; dan
 - d. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp67.174.768,00 terkait pekerjaan renovasi toilet sekretariat di Kantor Regional X BKN Denpasar;

Mutasi Kurang transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.051.939.474,00 berupa:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp124.318.474,00 berupa:
 - a. Koreksi pencatatan atas pengembalian belanja tahun berjalan pada satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN terkait kekurangan volume pekerjaan perbaikan asrama senilai Rp56.990.192,00;
 - b. Koreksi pencatatan atas pengembalian belanja tahun berjalan pada satker Kantor Regional X BKN Denpasar terkait kekurangan volume pekerjaan perbaikan pagar tembok pura senilai Rp8.173.482,00;

- c. Koreksi pencatatan atas pengembalian belanja tahun anggaran 2024 yang disetorkan di tahun 2025 pada satker Kantor Regional II BKN Surabaya terkait kekurangan volume pekerjaan renovasi gedung gudang persediaan dan pekerjaan alumunium *composite panel* senilai Rp42.836.400,00; dan
 - d. Koreksi pencatatan atas pengembalian belanja tahun anggaran 2023 yang disetorkan di tahun 2024 pada satker Kantor Regional XI BKN Manado senilai Rp16.318.400,00.
2. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp927.621.000,00 terdiri dari:
 - a. Penghentian rumah dinas di Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp862.263.000,00; dan
 - b. Penghentian rumah dinas di Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp65.358.000,00

Pada tahun 2024, terdapat perubahan status gedung yang berlokasi di Bekasi yang sebelumnya berstatus sebagai Rumah Negara Golongan II menjadi Bangunan Lainnya yang direncanakan akan dimanfaatkan dan disewakan sebagai Promart BKN.

Rincian Gedung dan Bangunan per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.31 Rincian Gedung dan Bangunan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	391,550,344,876.00	368,299,042,861.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	39,306,149,671.00	39,134,021,945.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	27,186,849,423.00	26,455,248,682.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	33,950,073,535.00	33,921,491,035.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	44,929,747,836.00	45,351,715,358.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	31,691,877,203.00	31,523,050,297.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	35,938,587,025.00	36,003,945,025.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	45,809,690,840.00	45,710,637,926.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	22,766,261,832.00	22,696,288,832.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	23,387,103,349.00	22,324,928,549.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	31,034,256,522.00	30,810,421,814.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	28,334,674,241.00	28,350,992,641.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	30,547,136,767.00	30,373,891,519.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	6,296,864,104.00	6,084,633,004.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	499,327,000.00	499,327,000.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	102,965,866,554.00	101,309,712,482.00
	Jumlah	896,194,810,778.00	868,849,348,970.00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Rp24,637.574.940,-

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.637.574.940,00 dan Rp24.716.999.940,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	24,716,999,940.00
Mutasi Kurang:	(79,425,000.00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(79,425,000.00)
Saldo per 31 Desember 2024	24,637,574,940.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(19,546,069,887.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5,091,505,053.00

Mutasi Kurang transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp79.425.000,00 berasal dari Kantor Regional IV BKN Makassar, yang terdiri dari:

1. Penghentian aset dari penggunaan Jaringan sebesar Rp33.600.000,00.
2. Penghentian aset dari penggunaan Bangunan Air sebesar Rp45.825.000,00.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	56,071,000.00	56,071,000.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	925,565,400.00	925,565,400.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	20,000,000.00	20,000,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	290,456,867.00	290,456,867.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	7,319,987,500.00	7,399,412,500.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	127,455,000.00	127,455,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2,540,823,780.00	2,540,823,780.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2,879,491,700.00	2,879,491,700.00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2,942,634,000.00	2,942,634,000.00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,062,182,000.00	2,062,182,000.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	2,064,521,123.00	2,064,521,123.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	308,174,570.00	308,174,570.00
13	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	3,100,212,000.00	3,100,212,000.00
	Jumlah	24,637,574,940.00	24,716,999,940.00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Aset Tetap Lainnya
Rp13.675.359.416,-

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp13.675.359.416,00 dan Rp13.874.987.099,00 . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	13,874,987,099.00
Mutasi Tambah:	513,165,944.00
Pembelian	23,818,000.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung (ATR)	271,938,000.00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	199,274,944.00
Hibah Masuk	18,135,000.00
Mutasi Kurang:	(712,793,627.00)
Hibah (Keluar)	(434,314,820.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(7,454,585.00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(271,024,222.00)
Saldo per 31 Desember 2024	13,675,359,416.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(663,244,963.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	13,012,114,453.00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp13.990.664.744,00, sedangkan Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp495.030.944,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp13.495.633.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi untuk Belanja Aset Tak Berwujud sebesar Rp13.499.518.800,00; dan
2. Kesalahan penggunaan akun dengan akun belanja 532111 senilai (Rp3.885.000,00) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp513.165.944,00 yang terdiri dari:

1. Pembelian Aset Tetap Lainnya menggunakan akun 532111 sebesar Rp3.885.000,00 dan menggunakan akun 536111 sebesar Rp19.933.000,00 berupa:
 - a. Lukisan Kanvas sebesar Rp3.885.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN;
 - b. Koleksi Buku Perpustakaan senilai Rp19.933.000,00 yang berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN;

2. Penyelesaian Pembangunan Langsung berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) menggunakan akun 536121 sebesar Rp271.938.000,00 pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari, yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan Gedung Parkir Gedung CAT sebesar Rp119.888.000,00;
 - b. Lapangan Olahraga sebesar Rp84.500.000,00;
 - c. Rumah Genset Gedung CAT senilai Rp67.550.000,00.
3. Pengembangan Nilai Aset Langsung berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) menggunakan akun 536121 sebesar Rp199.274.944,00 yang merupakan pekerjaan renovasi atap Kantor UPT BKN Serang.
4. Hibah Masuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp18.135.000,00 berupa koleksi buku yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Barang Milik Negara Nomor: 000.4/1981/Dispus.Arsip, tanggal 27 Agustus 2024 pada Kantor Regional IV BKN Makassar.

Mutasi Kurang transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp712.793.627,00 yang terdiri dari:

1. Hibah (Keluar) sebesar Rp434.314.820,00 pada Kantor Regional V BKN Jakarta berupa Penghapusan nilai Aset Tetap Renovasi atas transaksi pinjam pakai untuk UPT Pontianak sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 132 Tahun 2024, tanggal 21 Maret 2024.
2. Koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp7.454.585,00 merupakan koreksi atas pengembalian belanja tahun berjalan pada satker Kantor Regional XIV BKN Manokwari terkait kekurangan volume pekerjaan.
3. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp271.024.222,00 berupa Bahan Perpustakaan yang berasal dari:

Tabel 3.35 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional III BKN Bandung	47,000,000.00
2	Kantor Regional VI BKN Medan	173,193,222.00
3	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	6,500,000.00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	13,631,000.00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	30,700,000.00
	Jumlah	271,024,222.00

Rincian Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36 Rincian Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap Renovasi	12,089,820,513.00
2	Bahan Perpustakaan	1,498,519,803.00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	87,019,100.00
	Jumlah	13,675,359,416.00

Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) pada BKN merupakan aset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik BKN. Nilai ATR tersebut masih tercatat dalam laporan keuangan BKN karena kerja sama pinjam pakai yang masih berlaku. Adapun rincian aset tetap renovasi sebesar Rp12.089.820.513,00 terdiri dari:

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp330.933.500,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Semarang dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2026.
2. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp584.934.794,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Serang dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2025.
3. Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp1.340.813.225,00 terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Ambon sebesar Rp491.127.225,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2027.
 - b. Kantor UPT BKN Mamuju Rp849.686.000,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Maret 2028.
4. Kantor Regional V BKN Jakarta sebesar Rp296.942.500,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung Kantor UPT BKN Lampung yang berakhir sampai dengan April 2027.
5. Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp818.738.074,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Pangkal Pinang sebesar Rp398.897.674,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Februari 2029.
 - b. Kantor UPT BKN Jambi sebesar Rp419.840.400,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2026.
6. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp1.921.038.381,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Palangka Raya sebesar Rp442.521.200,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2028.
 - b. Kantor UPT BKN Balikpapan sebesar Rp994.989.900,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Februari 2029.
 - c. Kantor UPT BKN Tarakan sebesar Rp483.527.281,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Juni 2029.
7. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp1.191.495.203,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:

- a. Kantor UPT BKN Mataram sebesar Rp432.104.317,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan Desember 2025.
- b. Kantor UPT BKN Kupang sebesar Rp759.390.886,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan November 2025.
8. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp1.175.607.217,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Padang sebesar Rp372.780.267,00 yang masa pinjam pakai gedung telah berakhir pada tahun 2021 akan dihibahkan kembali ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Kantor UPT BKN Batam sebesar Rp802.826.950,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan April 2028.
9. Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp4.429.317.619,00 merupakan pengakuan nilai belanja modal atas biaya renovasi untuk pemakaian pinjam pakai gedung yang terdiri dari:
 - a. Kantor UPT BKN Sorong sebesar Rp1.661.582.588,00 dengan masa pinjam pakai yang berakhir sampai dengan tahun 2025.
 - b. Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp2.767.735.031,00 yang sudah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan telah bersertifikat atas nama BKN namun proses atas pengesahan hibahnya masih dalam proses.

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.37 Rincian Aset Tetap Lainnya Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	485,955,963.00	482,070,963.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	376,956,817.00	376,956,817.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	50,566,000.00	50,566,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	603,773,844.00	451,498,900.00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	1,399,873,022.00	1,381,738,022.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	296,942,500.00	731,257,320.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	-	173,193,222.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	838,912,644.00	838,912,644.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,923,788,381.00	1,930,288,381.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	9,999,550.00	9,999,550.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1,191,495,203.00	1,205,126,203.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	99,972,695.00	99,972,695.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,185,150,817.00	1,185,150,817.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,429,317,619.00	4,164,834,204.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	813,354,361.00	793,421,361.00
	Jumlah	13,706,059,416.00	13,874,987,099.00

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Konstruksi dalam
pengerjaan (KDP)
Rp19.621.605.525,-

C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.621.605.525,00 dan Rp168.877.064,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai dan belum digunakan sampai dengan tanggal neraca. Mutasi transaksi terhadap KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	168,877,064.00
Mutasi Tambah:	42,236,977,018.00
Perolehan/Penambahan KDP	253,319,379.00
Pengembangan KDP	41,876,471,321.00
Koreksi Nilai KDP Bertambah	107,186,318.00
Mutasi Kurang:	(22,784,248,557.00)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(184,694,142.00)
Reklasifikasi KDP menjadi Aset Definitif	(22,599,554,415.00)
Saldo per 31 Desember 2024	19,621,605,525.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	19,621,605,525.00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai KDP adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp42.129.790.700,00 berupa:

1. Perolehan/Penambahan KDP Gedung dan Bangunan menggunakan akun 533111 sebesar Rp169.339.379,00 dan menggunakan akun 533121 sebesar Rp83.980.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. KDP atas Biaya Jasa Konsultan Perencana untuk pekerjaan pembangunan UPT BKN Pangkalpinang sebesar Rp84.712.147,00 pada Kantor Pusat BKN;
 - b. KDP atas Biaya Jasa Konsultan Perencana untuk pekerjaan pembangunan UPT BKN Jambi sebesar Rp84.627.232,00 pada Kantor Pusat BKN; dan
 - c. KDP atas Biaya Jasa Konsultan Perencana untuk pekerjaan renovasi perluasan gedung kantor sebesar Rp83.980.000,00 pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh.

2. Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan menggunakan akun 533111 sebesar Rp41.869.871.321,00 dan menggunakan akun 533121 sebesar Rp6.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan untuk pekerjaan pembangunan UPT Gorontalo dan UPT BKN Mataram sebesar Rp41.869.871.321,00 pada Kantor Pusat BKN.
 - b. Biaya Honorarium Tim Tenaga Pengelola Teknis pembangunan renovasi gedung kantor menggunakan akun 533121 sebesar Rp6.600.000,00 pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
3. Koreksi nilai KDP Bertambah pada Gedung dan Bangunan untuk pekerjaan jasa konsultan pembangunan UPT BKN Mataram yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp107.186.318,00 di Kantor Pusat BKN.

Mutasi Kurang transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.784.248.557,00 berupa:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp184.694.142,00 yang terdiri atas:
 - a. Pengembalian belanja tahun anggaran 2024 yang disetor di 2025 sebesar Rp160.460.200,00 terkait kelebihan pembayaran biaya jasa konsultan untuk pembangunan UPT BKN Mataram pada Kantor Pusat BKN.
 - b. Pengembalian belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp12.828.122,00 terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka pembangunan UPT BKN Mataram dan UPT BKN Gorontalo pada Kantor Pusat BKN.
2. Reklasifikasi KDP menjadi Aset Definitif sebesar Rp22.599.554.415,00 atas penyelesaian pekerjaan pembangunan UPT BKN Mataram pada Kantor Pusat BKN.

Rincian KDP per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.39 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	19,531,025,525.00	168,877,064.00
2	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	90,580,000.00	-
	Jumlah	19,621,605,525.00	168,877,064.00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp800.744.594.530,-

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp800.744.594.530,00 dan Rp746.282.602.430,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024. Rincian Akumulasi Penyusutan pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.40 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	768,036,979,101.00	587,961,924,338.00	180,075,054,763.00
2	Gedung dan Bangunan	896,194,810,778.00	192,573,355,342.00	703,621,455,436.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,637,574,940.00	19,546,069,887.00	5,091,505,053.00
4	Aset Tetap Lainnya	13,675,359,416.00	663,244,963.00	13,012,114,453.00
Jumlah		1,702,544,724,235.00	800,744,594,530.00	901,800,129,705.00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan dalam Lampiran Utama A2.

Aset Tak Berwujud
Rp59.620.529.497,-

C.15 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp59.620.529.497,00 dan Rp125.741.319.487,00. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi ATB pada BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41 Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	125,741,319,487.00
Mutasi tambah:	13,793,416,800.00
Pembelian	12,846,735,300.00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	652,783,500.00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	293,898,000.00
Mutasi kurang:	(79,914,206,790.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1,375,156,904.00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(78,539,049,886.00)
Saldo per 31 Desember 2024	59,620,529,497.00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(49,968,862,959.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	9,651,666,538.00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp13.990.664.744,00, sedangkan Penambahan dari Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp13.499.518.800,00. Terdapat selisih sebesar Rp491.145.944,00 yang terdiri dari:

1. Belanja modal lainnya untuk penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.933.000,00;
2. Belanja modal lainnya untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi sebesar Rp471.212.944,00.

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai ATB adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi ATB sebesar Rp13.793.416.800,00 berasal dari Kantor Pusat BKN menggunakan akun belanja 536111 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian sebesar Rp12.846.735.300,00 menggunakan akun 536111 berasal dari Kantor Pusat BKN berupa:
 - a. *Software* Komputer sebesar Rp10.723.050.000,00;
 - b. Lisensi sebesar Rp2.024.640.000,00;
 - c. Hasil Kajian/Penelitian sebesar Rp99.045.300,00.
2. Pengembangan Nilai Aset Langsung sebesar Rp652.783.500,00 menggunakan akun belanja 536121 berupa *Software* Komputer di Kantor Pusat BKN;
3. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp293.898.000,00 di Kantor Pusat BKN.

Mutasi Kurang transaksi ATB sebesar Rp79.914.206.790.000,00 berupa:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas *Software* Komputer sebesar Rp1.375.156.904,00 terkait pengembalian belanja tahun anggaran 2024 yang disetor di 2025 atas kekurangan volume pekerjaan *software* pada Kantor Pusat BKN.
2. Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp78.539.049.886,00 atas *Software* Komputer berasal dari:

Tabel 3.42 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	75,900,726,756.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	22,000,000.00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	713,533,250.00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	743,904,180.00
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	651,566,250.00
6	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	507,319,450.00
	Jumlah	78,539,049,886.00

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 3.43 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Hak Cipta	500,000.00	500,000.00
2	Software Komputer	57,301,344,197.00	125,545,819,487.00
3	Lisensi	2,024,640,000.00	-
4	Hasil Kajian/Penelitian	294,045,300.00	195,000,000.00
Jumlah Nilai Perolehan		59,620,529,497.00	125,741,319,487.00
Amortisasi ATB		(49,968,862,959)	(124,210,061,367)
Jumlah		9,651,666,538.00	1,531,258,120.00

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.44 Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	56,138,010,597.00	119,620,477,457.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	409,397,750.00	409,397,750.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	-	22,000,000.00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	713,533,250.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	23,850,000.00	767,754,180.00
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	886,661,700.00	886,661,700.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	729,484,450.00	729,484,450.00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	651,566,250.00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	651,566,250.00	651,566,250.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	740,391,250.00	740,391,250.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	41,167,500.00	548,486,950.00
Jumlah		59,620,529,497.00	125,741,319,487.00

Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Utama A3.

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp311.639.851.974,-

C.16 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan. Dana yang dibatasi penggunaannya pada BKN adalah dana pada rekening penampungan sementara yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang penyelesaian pekerjaannya diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 311,639,851.974,00 dan Rp21.071.862.270,00. Mutasi transaksi terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45 Mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai per 31 Desember 2023	21,071,862,270.00
Mutasi Tambah:	311,639,851,974.00
Penampungan RPATA 2024	311,639,851,974.00
Mutasi Kurang:	(21,071,862,270.00)
Pembayaran RPATA 2023	(20,892,754,629.00)
Penihilan RPATA 2023	(179,107,641.00)
Saldo per 31 Desember 2024	311,639,851,974.00

Adapun rincian dana yang dibatasi penggunaannya per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46 Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Satker
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	311,198,499,224.00	20,674,809,270.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	7,000,000.00	-
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	-	200,880,000.00
4	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	7,203,900.00	-
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	378,548,850.00	-
6	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	147,555,000.00
7	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	48,600,000.00	48,618,000.00
	Jumlah	311,639,851,974.00	21,071,862,270.00

Aset Lain-Lain

Rp20.550.730.766,-

C.17 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp20.550.730.766,00 dan Rp21.362.783.827,00. Aset Lain-lain berupa reklasifikasi atas Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 3.47 Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	21,362,783,827.00
Mutasi Tambah:	132,339,292,452.00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	132,339,292,452.00
Mutasi Kurang:	(133,151,345,513.00)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(293,898,000.00)
Pencatatan barang yang telah dihapuskan	(132,857,447,513.00)
Saldo per 31 Desember 2024	20,550,730,766.00
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2024	(19,703,138,979.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	847,591,787.00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Aset Lain-Lain berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp132.339.292.452,00 berupa:

Tabel 3.48 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	870,448,670.00
2	Alat Angkutan	622,363,200.00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,095,036,939.00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2,211,172,672.00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	73,718,000.00
6	Alat Laboratorium	549,053,947.00
7	Komputer	38,085,788,916.00
8	Peralatan Proses/Produksi	400,000.00
9	Peralatan Olahraga	14,190,000.00
10	Bangunan Gedung	927,621,000.00
11	Bangunan Air	45,825,000.00
12	Instalasi	33,600,000.00
13	Bahan Perpustakaan	224,024,222.00
14	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	47,000,000.00
15	Aset Tak Berwujud	78,539,049,886.00
	Jumlah	132,339,292,452.00

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berasal dari:

Tabel 3.49 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	106,979,141,378.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	970,104,839.00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	1,454,375,477.00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	5,061,229,968.00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	1,041,002,384.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	2,353,146,493.00
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	2,903,931,669.00
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	3,489,978,849.00
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	985,679,369.00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,815,175,910.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,340,593,377.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,944,932,739.00
	Jumlah	132,339,292,452.00

Mutasi Kurang transaksi Aset Lain-Lain sebesar Rp133.151.345.513,00 yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp293.898.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN berupa *Software Komputer*.
2. Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan sebesar Rp132.857.447.513,00 berupa:

Tabel 3.50 Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	585,381,000.00
2	Alat Angkutan	421,736,200.00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9,100,423,274.00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3,176,271,672.00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	64,029,000.00
6	Alat Laboratorium	857,606,894.00
7	Komputer	36,288,378,365.00
8	Peralatan Proses/Produksi	400,000.00
9	Instalasi	33,600,000.00
10	Bahan Perpustakaan	186,824,222.00
11	Bahan Bercorak Kesenian/Kebudayaan	47,000,000.00
12	Aset Tak Berwujud	82,095,796,886.00
	Jumlah	132,857,447,513.00

Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan berasal dari:

Tabel 3.51 Rincian Pencatatan Barang yang telah Dihapuskan per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	110,256,573,724.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	1,086,350,289.00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	1,454,375,477.00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	4,727,279,968.00
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	1,041,002,384.00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	2,123,135,493.00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	3,577,918,169.00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2,574,939,325.00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,815,175,910.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,693,377,324.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	507,319,450.00
	Jumlah	132,857,447,513.00

Rincian Aset Lain-lain Per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.52 Rincian Aset Lain-lain per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	13,703,008,843.00	17,274,339,189.00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	668,516,250.00	784,761,700.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	908,088,000.00	574,138,000.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	374,185,000.00	144,174,000.00
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	673,986,500.00
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1,177,978,414.00	262,938,890.00
8	Kantor Regional IX Jayapura	1,568,050,116.00	582,370,747.00
9	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	9,794,300.00	362,578,247.00
10	Kantor Regional XIII BKN Aceh	83,705,650.00	83,705,650.00
11	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	619,790,904.00	619,790,904.00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,437,613,289.00	-
	Jumlah	20,550,730,766.00	21,362,783,827.00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku Per 31 Desember 2024 tersaji pada Lampiran Utama A2 dan A3.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp69.672.001.938,-*

C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp69.672.001.938,00 dan Rp145.268.566.532,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	500,000.00	71,421.00	428,579.00
2	Software Komputer	57,301,344,197.00	49,867,559,538.00	7,433,784,659.00
3	Lisensi	2,024,640,000.00	101,232,000.00	1,923,408,000.00
4	Hasil Kajian/Penelitian	294,045,300.00	-	294,045,300.00
Jumlah		59,620,529,497.00	49,968,862,959.00	9,651,666,538.00
B	Aset Lain-lain	20,550,730,766.00	19,703,138,979.00	847,591,787.00
Jumlah		80,171,260,263.00	69,672,001,938.00	10,499,258,325.00

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan Per 31 Desember 2024 dalam Lampiran Utama A2 dan A3.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp313.598.678.284,-*

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp313.598.678.284,00 dan Rp19.629.558.217,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sampai dengan 31 Desember 2024, BKN memiliki utang kepada pihak ketiga yang terdiri dari:

Tabel 3.54 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	108,794,949.00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1,826,222,943.00
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	311,663,660,392.00
Jumlah		313,598,678,284.00

Rincian utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp108.794.949,00 merupakan pembayaran atas kekurangan gaji, tunjangan ataupun uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai. Adapun rincian per satker, yaitu:

*Tabel 3.55 Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per Satker
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	76,617,290.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,102,680.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1,036,573.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,710,200.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1,135,538.00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	1,324,059.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1,158,565.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,349,176.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	3,850,930.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,381,094.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3,582,380.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	10,138,721.00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	1,365,709.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	817,242.00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2,224,792.00
	Jumlah	108,794,949.00

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.826.222.943,00 merupakan pembayaran atas tagihan pemakaian listrik, telepon, air, pengiriman surat dinas/pos dan tagihan lainnya yang seharusnya menjadi beban tahun 2024, namun baru dibayarkan pada tahun 2024. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.56 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	800,959,091.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	70,641,167.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	68,104,433.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	55,622,455.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	118,873,459.00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	77,442,162.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	65,345,022.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	99,812,383.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	77,831,635.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	44,210,375.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	60,010,291.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	67,276,631.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	84,920,452.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	21,145,151.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	22,634,843.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	91,393,393.00
	Jumlah	1,826,222,943.00

3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp311.663.660.392,00 terdiri dari:
- Belanja modal gedung dan bangunan atas penyelesaian pekerjaan pembangunan UPT BKN Mataram yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp107.186.318,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN.

- b. Transaksi retur transfer ke penerima (dari SP2D LS-Bendahara) yang masuk ke *Virtual Account* (VA) pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp8.967.500,00.
- c. Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas Pembayaran dan Penihilan Dana RPATA sebesar Rp311.547.506.574,00 yang berasal dari:

Tabel 3.57 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	311,106,153,824.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	7,000,000.00
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	7,203,900.00
4	Kantor Regional VII BKN Palembang	378,548,850.00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	48,600,000.00
	Jumlah	311,547,506,574.00

Pendapatan Diterima di Muka Rp1.033.351.816,-

C.20 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.033.351.816,00 dan Rp1.091.528.298,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum diserahkan kepada Pihak Ketiga. Pendapatan diterima dimuka pada BKN bersumber dari sewa tanah, gedung dan bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun anggaran.

Tabel 3.58 Perbandingan Pendapatan Diterima di Muka

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Kantor Pusat BKN	957,225,510.00	989,641,310.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	131,661.00	1,429,301.00
3	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	16,632,363.00	28,996,835.00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	3,977,568.00	-
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	2,056,686.00	3,482,110.00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	33,798,920.00	54,157,333.00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	16,182,332.00	-
8	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	3,346,776.00	13,821,409.00
	Jumlah	1,033,351,816.00	1,091,528,298.00

Rincian Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Utama A5.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0,-

C.21 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.236.316,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara yang berasal dari:

Tabel 3.59 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Kantor Regional IV BKN Makassar	-	4,236,316.00
Jumlah	-	4,236,316.00

Ekuitas
Rp3.307.045.055.413,-

C.22 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.307.045.055.413,00 dan Rp3.208.549.866.357,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp39.538.699.954,-

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah PNBPN pada BKN untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39.538.699.954,00 dan Rp23.670.868.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Rincian PNBPN

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	920,690,374.00	913,125,397.00	0.83
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusnya	465,900,000.00	1,278,300,000.00	(63.55)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	864,700,000.00	432,110,000.00	100.11
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	4,499,616,000.00	3,133,238,000.00	43.61
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	29,691,163,500.00	14,927,901,000.00	98.90
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3,096,327,280.00	2,986,193,924.00	3.69
Pendapatan Anggaran Lain-lain	302,800.00	-	0.00
TOTAL	39,538,699,954.00	23,670,868,321.00	67.04

Pendapatan Operasional pada BKN mengalami kenaikan sebesar 67,04% dari tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan ini diakibatkan oleh adanya pendapatan atas pengujian akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN dan kenaikan pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya yang berasal dari uji penilaian kompetensi ASN yang ada di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Berdasarkan LRA, BKN memperoleh PNBPN sebesar Rp41.462.195.556,00. Sedangkan Pendapatan LO sebesar Rp39.538.699.954,00, terdapat selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp1.923.495.602,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA yang dicatat sebagai Pendapatan Non Operasional pada Laporan Operasional sebesar Rp619.709.757,00.
2. Penyesuaian Piutang Lainnya untuk Pendapatan Non Operasional Lainnya TA 2023 sebesar Rp2.623.256.604,00.
3. Jurnal koreksi terhadap Pengembalian Belanja Modal TAYL sebagai transaksi atas pengurang aset sebesar Rp23.772.985,00.
4. Pendapatan yang berasal dari penihilan atas transaksi RPATA TA 2023 sebesar Rp179.107.641,00.
5. Penyesuaian Pendapatan LO atas transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp58.176.482,00).
6. Penyesuaian Piutang Lainnya atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar (Rp1.457.872.103,00).

7. Pencatatan Piutang Lainnya atas setoran sisa utang Non TP/TGR sebesar (Rp6.000.000,00).
8. Pencatatan Pendapatan Lain-Lain atas kesalahan setor yang ada pada saldo kas pada RKK Ops BRI sebesar (Rp302.800,00).

Adapun Pendapatan Operasional BKN per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Operasional per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	33,811,775,696.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	17,467,640.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	7,865,878.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	9,375,960.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	5,786,328.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	16,666,957.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	34,852,940.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	23,439,104.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	16,072,097.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	42,851,014.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	33,166,500.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	23,063,363.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	44,710,156.00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	5,451,606,321.00
	Jumlah	39,538,699,954.00

Beban Pegawai
Rp373.703.136.554,-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp373.703.136.554,00 dan Rp345.122.172.386,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, PPPK dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan aset.

Tabel 4.3 Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	169,982,321,863.00	166,879,061,059.00	1.86
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	7,438,496,458.00	717,039,576.00	100.00
Beban Lembur	2,507,159,550.00	1,214,127,000.00	106.50
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	193,775,158,683.00	176,311,944,751.00	9.90
JUMLAH	373,703,136,554.00	345,122,172,386.00	8.28

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Pegawai pada BKN adalah sebesar Rp374.117.703.451,00, sedangkan Beban Pegawai LO sebesar Rp373.703.136.554,00. Terdapat selisih antara Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO sebesar Rp414.566.897,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar (Rp15.295.439,00).
2. Pencatatan atas Piutang Lainnya untuk Pengembalian Belanja TA 2025 sebesar Rp426.742.336,00.
3. Koreksi lainnya atas hutang belanja pegawai tahun 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp3.120.000,00.

Adapun Beban Pegawai BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	268,080,899,210.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	11,117,754,494.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	7,957,350,070.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	9,364,815,215.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	10,042,678,312.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	6,251,646,762.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	7,831,404,322.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	7,185,067,445.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	7,878,755,872.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5,204,499,535.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	6,775,866,322.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	5,288,140,935.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	7,433,914,236.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4,519,522,130.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4,532,235,250.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	4,238,586,444.00
	Jumlah	373,703,136,554.00

Beban Persediaan
Rp6.596.632.606,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.596.632.606,00 dan Rp7.953.984.101,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 4.5 Perbandingan Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	6,596,632,606.00	7,953,984,101.00	(17.07)
JUMLAH	6,596,632,606.00	7,953,984,101.00	(17.07)

Adapun Beban Persediaan BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Persediaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	2,654,462,543.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	335,870,847.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	358,221,230.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	269,677,084.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	237,457,489.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	217,906,061.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	421,402,558.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	204,535,651.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	186,864,539.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	272,562,563.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	180,524,699.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	361,253,678.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	172,332,364.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	229,702,530.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	76,752,998.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	417,105,772.00
	Jumlah	6,596,632,606.00

Beban Barang dan Jasa
Rp758.833.704.817,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp758.833.704.817,00 dan Rp436.964.717.186,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 4.7 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	56,577,086,646.00	51,449,187,172.00	9.97
Beban Barang Non Operasional	58,540,970,750.00	38,502,478,785.00	52.04
Beban Langganan Daya dan Jasa	641,415,920,667.00	344,046,866,382.00	86.43
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2,273,967,428.00	2,966,184,847.00	(23.34)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	24,094,326.00	-	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	1,665,000.00	-	0.00
JUMLAH	758,833,704,817.00	436,964,717,186.00	73.66

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Barang dan Belanja Jasa pada BKN adalah sebesar Rp793.843.854.061,00, sedangkan nilai Beban Barang dan Jasa pada LO sebesar Rp758.833.704.817,00. Terdapat selisih nilai antara Beban Barang Jasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Barang dan Belanja Jasa pada LRA sebesar Rp35.010.149.244,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas Belanja Barang Dibayar Dimuka (*prepaid*) sebesar Rp33.849.319.068,00.
2. Beban yang berasal dari penihilan atas transaksi RPATA TA 2024 sebesar Rp60.000,00.
3. Pencatatan atas Piutang Lainnya untuk Pengembalian Belanja TA 2025 sebesar Rp1.407.718.339,00.
4. Kesalahan penggunaan akun ekstrakomptabel untuk belanja modal sebesar Rp350.000,00.
5. Penyesuaian atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar (Rp238.275.563,00).
6. Kesalahan penggunaan akun atas belanja modal untuk barang ekstrakomptabel sebesar (Rp7.947.600,00).
7. Koreksi pencatatan ekstrakomptabel dari hibah pocadi sebesar (Rp775.000,00).
8. Koreksi antar beban atas Ralat SPM ke Beban Persediaan sebesar (Rp300.000,00)

Adapun Beban Barang dan Jasa BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Barang dan Jasa per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	630,447,310,857.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	13,014,757,941.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	11,328,810,383.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	7,399,605,836.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	13,050,168,731.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	8,105,778,401.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	6,460,961,166.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	12,354,240,416.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	10,228,335,861.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	3,941,389,668.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	9,175,180,793.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	6,570,083,300.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	9,648,913,841.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	2,803,830,603.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	3,992,452,415.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	10,311,884,605.00
	Jumlah	758,833,704,817.00

Beban Pemeliharaan
Rp24.043.517.036,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.043.517.036,00 dan Rp27.841.739.788,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 4.9 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,772,953,198.00	10,492,615,169.00	(16.39)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	90,282,731.00	62,396,955.00	44.69
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	741,443,844.00	781,112,733.00	(5.08)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,154,009,628.00	13,502,149,553.00	(9.98)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	143,401,074.00	-	0.00
Beban Pemeliharaan Irigasi	-	22,881,000.00	(100.00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	26,773,203.00	28,123,664.00	(4.80)
Beban Pemeliharaan Lainnya	937,433,688.00	1,691,646,618.00	(44.58)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1,162,219,670.00	1,240,758,396.00	(6.33)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	5,055,700.00	(100.00)
JUMLAH	24,043,517,036.00	27,841,739,788.00	(13.64)

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Pemeliharaan pada BKN adalah sebesar Rp24.062.878.754,00, sedangkan nilai Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp24.043.517.036,00. Terdapat selisih nilai antara Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dengan Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp19.361.718,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar (Rp4.044.802,00).
2. Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar (Rp1.162.219.670,00).
3. Realisasi atas Belanja Pemeliharaan untuk persediaan sebesar Rp663.588.244,00.
4. Kesalahan penggunaan akun yang menambah nilai aset sebesar Rp507.470.246,00.
5. Pencatatan atas Piutang Lainnya untuk Pengembalian Belanja TA 2025 sebesar Rp14.537.700,00.
6. Koreksi antar beban atas Ralat SPM ke Beban Persediaan sebesar Rp30.000,00.

Adapun Beban Pemeliharaan BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rincian Beban Pemeliharaan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	11,964,670,334.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,073,814,556.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	632,321,870.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	970,665,748.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	697,920,053.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	836,901,017.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	817,186,234.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	699,066,645.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	709,024,514.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	419,566,635.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	860,393,257.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	918,933,697.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	923,069,675.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	251,861,870.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	570,549,551.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,697,571,380.00
	Jumlah	24,043,517,036.00

Beban Perjalanan Dinas
Rp130.157.147.903,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp130.157.147.903,00 dan Rp104.054.816.105,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

Tabel 4.11 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	96,267,045,229.00	80,771,971,991.00	19.18
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,649,200,320.00	3,496,674,909.00	318.95
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,276,920,200.00	9,300,257,757.00	(11.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,532,088,552.00	9,902,548,002.00	6.36
Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	431,893,602.00	583,363,446.00	(25.96)
JUMLAH	130,157,147,903.00	104,054,816,105.00	25.09

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada BKN adalah sebesar Rp130.177.536.781,00, sedangkan nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp130.157.147.903,00. Terdapat selisih nilai sebesar Rp20.388.878,00 yang berasal dari Pencatatan atas Piutang Lainnya untuk Pengembalian Belanja TA 2025.

Adapun Beban Perjalanan Dinas BKN per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	60,323,054,168.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	5,422,604,347.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	4,617,205,173.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	3,949,661,891.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	8,224,933,583.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	4,845,745,933.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	4,205,618,705.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	4,147,354,572.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	6,656,279,497.00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	5,134,499,400.00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	7,298,646,944.00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	3,196,230,835.00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	5,349,893,608.00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	2,684,590,834.00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,602,579,857.00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1,498,248,556.00
	Jumlah	130,157,147,903.00

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp106.420.894.744,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp106.420.894.744,00 dan Rp78.060.519.188,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74,726,689,255.00	48,518,688,033.00	54.02
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26,957,031,358.00	26,558,681,827.00	1.50
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	429,194,805.00	462,207,627.00	(7.14)
Beban Penyusutan Irigasi	109,373,225.00	110,761,861.00	(1.25)
Beban Penyusutan Jaringan	115,407,766.00	115,407,767.00	(0.00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	60,285,834.00	60,285,834.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	37,736,023.00	16,160,515.00	133.51
Jumlah Penyusutan	102,435,718,266.00	75,842,193,464.00	35.06
Beban Amortisasi			
Beban Amortisasi Software	3,883,937,336.00	2,202,631,082.00	76.33
Beban Amortisasi Hak Cipta	7,142.00	7,142.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	-	15,687,500.00	(100.00)
Beban Amortisasi Lisensi	101,232,000.00	-	0.00
Jumlah Amortisasi	3,985,176,478.00	2,218,325,724.00	79.65
JUMLAH	106,420,894,744.00	78,060,519,188.00	36.33

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp17.432.034,-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.432.034,00 dan Rp13.703.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.14 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	-	(33,755.00)	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	17,432,034.00	13,736,966.00	100.00
JUMLAH	17,432,034.00	13,703,211.00	27.21

Kegiatan Non
Operasional
Rp(500.075.154,-)

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(500.075.154,00) dan Rp1.235.842.916,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15 Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(522,246,218.00)	547,206,678.00	(195.44)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	436,080,789.00	568,247,120.00	(23.26)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	958,327,007.00	21,040,442.00	4454.69
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	22,171,064.00	688,636,238.00	(96.78)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	183,628,968.00	1,227,446,601.00	(85.04)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	161,457,904.00	538,810,363.00	(70.03)
Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	(500,075,154.00)	1,235,842,916.00	(140.46)

Defisit Kegiatan Non Operasional pada TA 2024 sebesar Rp(500.075.154,00) berasal dari:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp436.080.789,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp213.519.900,00 yang berasal dari:

Tabel 4.16 Rincian Pendapatan dari Penjualan
Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional III BKN Bandung	59,845,500.00
2	Kantor Regional V BKN Jakarta	15,520,200.00
3	Kantor Regional VI BKN Medan	34,643,500.00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	36,144,700.00
5	Kantor Regional X BKN Denpasar	15,750,000.00
6	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	51,616,000.00
Jumlah		213,519,900.00

- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp222.560.889,00 yang terdiri atas:

Tabel 4.17 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	71,042,000.00
2	Kantor Regional VII BKN Palembang	112,666,000.00
3	Kantor Regional X BKN Denpasar	14,963,000.00
4	Kantor Regional XI BKN Manado	23,889,889.00
Jumlah		222,560,889.00

2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp958.327.007,00 yang merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset yang berasal dari:

Tabel 4.18 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	200,173,500.00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	74,015,473.00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	19,595,830.00
4	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	434,314,820.00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	173,193,222.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	12,268,262.00
7	Kantor Regional X BKN Denpasar	25,988,900.00
8	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	18,777,000.00
Jumlah		958,327,007.00

3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp183.628.968,00 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp28.043.311,00 yang berasal dari:

Tabel 4.19 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	3,122,643.00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	164.00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	366,000.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1,269.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	7,624,050.00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	10,260,000.00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	640,940.00
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	35,150.00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	547.00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	455,150.00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	190,000.00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	1,295,200.00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1,250,878.00
11	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2,368,020.00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	433,300.00
	Jumlah	28,043,311.00

- b. Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp113.841.186,00 yang berasal dari:

Tabel 4.20 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	18,964,200.00
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	399,294.00
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	785,500.00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	208,800.00
5	Kantor Regional VII BKN Palembang	1,118,345.00
6	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1,992,500.00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	630,300.00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2,212,859.00
9	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	8,145,888.00
10	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	70,889,008.00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	8,494,492.00
	Jumlah	113,841,186.00

- c. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp41.744.471,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN.
4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp161.457.904,00 berupa Beban Persediaan Rusak/Usang yang berasal dari:

Tabel 4.21 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional X BKN Denpasar	49,538,740.00
2	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	111,919,164.00
	Jumlah	161,457,904.00

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp3.208.549.866.357,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.208.549.866.357,00 dan Rp3.173.325.597.443,00.

Surplus (Defisit) LO

(Rp1.360.733.840.894,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.360.733.840.894,00) dan (Rp975.104.940.728,00). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah/Mengurangi

Ekuitas

(Rp1.771.756.201,-)

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.771.756.201,00) dan (Rp3.488.126.484,00). Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan antara Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dan Koreksi Lainnya. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Koreksi Nilai Persediaan	1,678,100.00	-	0.00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(1,770,314,301.00)	(4,209,626,661.00)	(57.95)
Koreksi Lain-Lain	(3,120,000.00)	721,500,177.00	(100.43)
JUMLAH	(1,771,756,201.00)	(3,488,126,484.00)	(49.21)

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp1.678.100,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.678.100,00 dan Rp0,00.

**Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,-**

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi yang merupakan bagian dari pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (391151) yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN. Tidak terdapat koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

**Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-**

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

**Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp1.770.314.301,-)**

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.770.314.301,00) dan (Rp4.209.626.661,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari:

*Tabel 5.2 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	(1,796,099,855.00)
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	(3,937,378.00)
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	30,246,318.00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	32,938,200.00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	229,700.00
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	(5,250,930.00)
7	Kantor Regional VI BKN Medan	189,530.00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	263,072.00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	(23,657,700.00)
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	108,000.00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	741,744.00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	93,374.00
13	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	21,958,800.00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	(18,070,061.00)
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	(10,067,115.00)
	Jumlah	(1,770,314,301.00)

Tabel 5.3 Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Debit	Kredit	
A. Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	114,394,975.00	1,063,975.00	113,331,000.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	120,552,400.00	1,870,195,782.00	(1,749,643,382.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,256,935.00	142,258,854.00	(134,001,919.00)
Jumlah	243,204,310.00	2,013,518,611.00	(1,770,314,301.00)

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp1.770.314.301,00) berasal dari:

1. Koreksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp113.331.000,00 berupa Koreksi Saldo Awal terhadap Alat Kantor dan Rumah Tangga yang merupakan koreksi terhadap aset yang perolehannya dilakukan melalui belanja barang tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.
2. Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp1.749.643.382,00) merupakan koreksi yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi terhadap kesalahan pencatatan kode barang Peralatan dan Mesin sebesar (Rp1.551.264.182,00)
 - b. Koreksi pencatatan *transportable water pump* NUP 1 – Saldo Penyusutan Debit sebesar (Rp198.379.200,00).
3. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp134.001.919,00) merupakan koreksi yang terdiri dari:
 - a. Pengembalian belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.256.935,00.
 - b. Koreksi atas kesalahan pencatatan NUP Gedung dan Bangunan sebesar (Rp108.772.706,00).
 - c. Koreksi tambah Gedung dan Bangunan dari realisasi akun belanja pemeliharaan sebesar (Rp33.486.148,00).

Koreksi Lain-lain
(Rp3.120.000,-)

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp3.120.000,00) dan Rp721.500.177,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp1.461.000.786.151,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.461.000.786.151,00 dan Rp1.013.817.336.126,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Tabel 5.4 Rincian Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
1. Ditagihkan ke Entitas Lain	1,500,101,756,801.00
2. Diterima dari Entitas Lain	(41,462,195,556.00)
3. Transfer Keluar	(13,797,411,975.00)
4. Transfer Masuk	15,010,062,181.00
5. Pengesahan Hibah Langsung	1,148,574,700.00
Jumlah	1,461,000,786,151.00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2024, Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp1.500.101.756.801,00.

2. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2024, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp41.462.195.556,00).

3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp13.797.411.975,00) merupakan transaksi perpindahan aset antar entitas yang terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Transfer Keluar Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Asal	Uraian	Nilai
Kantor Pusat BKN Jakarta	Barang Konsumsi	(13,061,870.00)
	Peralatan dan Mesin	(16,109,204,850.00)
	Gedung dan Bangunan	(28,582,500.00)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,362,310,720.00
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	285,825.00
	Bahan untuk Pemeliharaan	(399,300.00)
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Peralatan dan Mesin	(21,900,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	13,140,000.00
JUMLAH		(13,797,411,975.00)

4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp15.010.062.181,00 merupakan transaksi perpindahan aset antar entitas yang terdiri dari:

Tabel 5.6 Rincian Transfer Masuk Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Uraian	Nilai
Kantor Pusat BKN Jakarta	Peralatan dan Mesin	4,308,967,828.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,087,557,622.00)
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Peralatan dan Mesin	375,900,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(34,450,000.00)
Kantor Regional II BKN Surabaya	Peralatan dan Mesin	236,650,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,421,250.00)
Kantor Regional III BKN Bandung	Barang Konsumsi	10,841,870.00
	Bahan untuk Pemeliharaan	399,300.00
	Peralatan dan Mesin	940,023,950.00
	Gedung dan Bangunan	28,582,500.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(341,392,315.00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(285,825.00)
Kantor Regional IV BKN Makassar	Peralatan dan Mesin	3,040,289,800.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(344,005,450.00)

Entitas Tujuan	Uraian	Nilai
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	Peralatan dan Mesin	1,634,067,200.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(262,402,175.00)
Kantor Regional VI BKN Medan	Peralatan dan Mesin	1,957,790,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(233,736,250.00)
Kantor Regional VII BKN Palembang	Peralatan dan Mesin	3,376,126,200.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(394,919,730.00)
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Peralatan dan Mesin	1,051,971,800.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(372,372,950.00)
Kantor Regional IX BKN Jayapura	Peralatan dan Mesin	156,400,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,125,000.00)
Kantor Regional X BKN Denpasar	Barang Konsumsi	1,110,000.00
	Peralatan dan Mesin	961,820,600.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(94,785,150.00)
Kantor Regional XI BKN Manado	Peralatan dan Mesin	597,164,100.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(86,916,650.00)
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Peralatan dan Mesin	1,295,850,600.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(136,826,150.00)
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Peralatan dan Mesin	127,270,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,750,000.00)
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Barang Konsumsi	1,110,000.00
	Peralatan dan Mesin	357,880,600.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(29,207,650.00)
JUMLAH		15,010,062,181.00

5. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.148.574.700,00. Pengesahan Hibah Langsung berasal dari:

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp65.000.000,00, yaitu berupa pengesahan hibah atas Gedung dan Bangunan dari Komisariat Kantor Regional I BKN Yogyakarta Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sesuai dengan Nomor Pengesahan Hibah: MPHL-820544677961389866, tanggal 13 November 2024.
2. Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp170.045.000,00 berupa pengesahan hibah atas koleksi buku dan peralatan kantor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Nomor Pengesahan Hibah: MPHL-823011811995133773, tanggal 31 Desember 2024.
3. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp913.529.700,00, yaitu berupa pengesahan hibah atas Tanah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Nomor Pengesahan Hibah: MPHL-817345445918653960, tanggal 7 Juni 2024.

6. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Ekuitas Akhir

Rp3.307.045.055.413,-

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing – masing sebesar Rp3.307.045.055.413,00 dan Rp3.208.549.866.357,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Terdapat pekerjaan pembangunan UPT BKN Mataram dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Tabel Rincian Pekerjaan UPT BKN Mataram

No	Pekerjaan	Kontrak	Tanggal Pelaksanaan	Nilai	Progress Fisik per 31 Des 2024	Progress Pembayaran per 31 Des 2024	Nilai Utang per 31 Des 2024
1	Pekerjaan konsultan perencana	102/SPK/PRASI K/ROUM/PPK/X /2023	2 s.d. 31 Oktober 2023	99,339,450	100%	85%	14,900,918
2	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan	01/KONTRAK-KONSTRUKSI/R OUM-SBSN/BKN/IV/2 024	5 April s.d. 30 Desember 2024	20,134,909,950	100%	100%	-
3	Pekerjaan konsultan pengawas	03/KONTRAK-KONSULTAN/R OUM/BKN/IV/20 24	5 April s.d. 30 Desember 2024	1,153,567,500	100%	92%	92,285,400
TOTAL							107,186,318

Berdasarkan tabel tersebut, nilai utang senilai Rp107.186.318,00 yang berasal dari pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawas. Sisa pembayaran konsultan perencana seharusnya sudah dapat dibayarkan pada 31 Desember 2024 namun sampai dengan penerbitan Laporan Keuangan belum dapat dibayarkan karena tidak masuk dalam perencanaan pembayaran akhir tahun. sedangkan sisa pembayaran konsultan pengawas baru dapat dibayarkan pada tahun 2025 setelah proses revisi anggaran.

2. Terdapat pekerjaan pembangunan UPT BKN Gorontalo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Tabel Rincian Pekerjaan UPT BKN Gorontalo

No	Pekerjaan	Kontrak	Tanggal Pelaksanaan	Nilai	Progress pekerjaan per 31 Des 2024	Progress Pembayaran per 31 Des 2024	Progress pekerjaan per 17 Jan 2025	Nilai Utang per 17 Jan 2025
1	Pekerjaan konsultan perencana	103/SPK/PRASIK/ ROUM/PPK/X/ 2023	2 s.d. 31 Oktober 2023	99,339,450	100%	85%	100%	14,900,918
2	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan	02/KONTRAK-KONSTRUKSI/ ROUM-SBSN/BKN/IV/ 2024	5 April s.d. 27 Maret 2025	20,052,009,822	85%	85%	100%	2,865,382,886
3	Pekerjaan konsultan pengawas	04/KONTRAK-KONSULTAN/RO UM/BKN/IV/ 2024	5 April s.d. 27 Maret 2025	1,131,367,500	85%	85%	100%	135,764,100
TOTAL								3,016,047,904

Pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan konsultan pengawas UPT BKN Gorontalo telah selesai 100% pada 17 Januari 2025 sesuai BAST Nomor: 001/BASTP/ROUM-SBSN/I/2025. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut sampai dengan penerbitan Laporan Keuangan belum terdapat pembayaran.

Sisa pembayaran konsultan perencana, pelaksanaan pembayaran dan konsultan pengawas seharusnya sudah dapat dibayarkan pada 17 Januari 2025 namun sampai dengan penerbitan Laporan Keuangan belum dapat dibayarkan karena masih dalam proses revisi anggaran.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Melalui Surat Nomor 149/1/KR/III/1/2017 tanggal 9 Februari 2017, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara telah membuat surat permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BKN. Selain surat tersebut, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga mengajukan surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor K26-30/V21-10/06 tanggal 9 Februari 2017 permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Berdasar informasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, Tanah seluas 7.390,5 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 27.400 m² dimana pencatatannya ada dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat berdasar pada PMK nomor 59 tanggal 20 Juli 2005, yang berlokasi di Jl. Surapati No. 10 merupakan tanah negara bekas tanah *Rech van Eigendom* No.11582 dengan surat hak tanah nomor 257 tgl. 15 April 1950 dan bekas tanah *Rech van Eigendom* No.11577 dengan surat hak tanah nomor 273 tgl. 20 April 1950. Selain diklaim oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan dasar naskah serah terima aset-aset eks Dana Pensiun Indonesia tanah tersebut juga diklaim oleh Pemerintah Kota Bandung dengan dasar kepemilikan bukti jual beli tanah.

Berdasarkan penuturan dari KPKNL Bandung, terdapat dua pengajuan atas permintaan sertifikat tanah yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui surat nomor 408/1/1992 tanggal 27 Agustus 1992, yang diajukan oleh Kepala Kantor Regional III BKN dan melalui surat Nomor S-1310/A.954/0896 tanggal 15 Agustus 1996, yang diajukan oleh Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Departemen Keuangan. Sampai saat ini tanah tersebut masih dalam proses penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga dari pihak Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, pihak Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat, maupun pihak Kantor Regional III BKN belum ada satu pun yang memiliki sertifikat tanah tersebut.

2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di ibu kota seluruh Indonesia. Pembentukan Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN ini dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya

layanan penyelenggara seleksi calon dan kompetensi Aparatur Sipil Negara serta mempercepat perbaikan kualitas sistem seleksi dan SDM ASN, BKN mendorong terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memfasilitasi pemanfaatan *Computer Assisted Test* (CAT) dan *Assesment* yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pemetaan kompetensi pegawai ASN di daerah-daerah yang tidak terdapat Kantor Regional BKN.

Adapun Rincian *Memorandum of Understanding* (MoU) Pinjam Pakai antara BKN dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Rincian MoU Pinjam Pakai Sejak Tahun 2015

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Status
1	Mataram	900/3824.9/BPKAD/2015 06/K/KS/1/2016 21 Desember 2015	Mataram Barat, Selarapang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pinjam Pakai s/d 2025
2	Semarang	030/000639 04/A/KS/1/2016 12 Januari 2016	Jalan Soekarno Hatta KM. 29 Bergas, Kebonan Randugunting Bergas, Semarang, Jawa Tengah, 50552	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Pinjam Pakai s/d 2026
3	Jambi	3228/BAST/BPKPD-7.2/2021 47/HM.05/01/2021 30 Desember 2021	Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pinjam Pakai s/d 2026
4	Serang	032/764-BPKAD/2023 2/HM.04.01/2023 03 Maret 2023	Jalan KH. Sokhari No. 40, Cipare Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten	Kantor Regional III BKN Bandung	Pinjam Pakai s/d Maret 2025
5	Ambon	011-26 Tahun 2022 7/HM.05.01/2022 8 Maret 2022	Jl. A.I.S Nasution No. 8, Karang Panjang, Kel. Amantelu Sirimau, Kota Ambon, Maluku	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pinjam Pakai s/d Maret 2027
6	Sorong	030/448/2017 & 22/A/KS/2017, tgl 23 Mei 2017 Surat Sekda No.: 800/281/2022, tgl 6 Juni 2022	Jl. Pemda Kompleks Kantor Pemda Kelurahan Airmas Distrik Airmas Km. 24 Kabupaten Sorong	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Pinjam Pakai s/d Mei 2025
7	Mamuju	B-800/512/2023 11/HM.04.01/2023 06 Maret 2023	Jl. Martadinata Simboro Kec. Simboro Dan Kepulauan Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, 91512	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pinjam Pakai s/d Maret 2028
8	Palangka Raya	900/146/BPKAD/2023 5/HM.04.01/2023 22 Februari 2023	Jl. W. Sudirohusodo No. 20 Langkai Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 74874	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d April 2028
9	Lampung	415.4/1753/VI.02/2022 15/HM.05.01/2022 18 Mei 2022	Jl. Nusa Indah 1 No 02A Sumur Batu Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 35214	Kantor Regional V BKN Jakarta	Pinjam Pakai s/d April 2027
10	Batam	124/900.1.4.3/IV/2023 13/HM.04.01/2023 03 April 2023	Gedung Bersama Pemko Belian Batam Kota Batam Kepulauan Riau	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pinjam Pakai s/d April 2028
11	Balikpapan	032/0186/BKAD 3/HM.04.01/2024 01 Februari 2024	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 11 No. 3 Sepinggang Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d Februari 2029

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Status
12	Pangkal Pinang	02/PPP/BAKEUDA/II/2024 26/HM.04.01/2024 29 Februari 2024	Jl. M Saleh Zainudin, Air Salemba, Pangkalpinang, Bangka Belitung	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pinjam Pakai s/d Februari 2029
13	Tarakan	032/ASET-III/003/2024 10/HM.04.01/2024 07 Maret 2024	Jl. Kalimantan No. 1 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pinjam Pakai s/d Juni 2029
14	Kupang	BU.028/1635/BPKAD/XI/2020 37.1/A/KS/XI/2020 02 November 2020	Jl. Timor Raya Km.36-Oelamasi	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pinjam Pakai s/d November 2025

Dari 21 UPT yang dimiliki BKN sampai dengan tahun 2024, terdapat 10 UPT yang telah tercatat mempunyai kepemilikan atas Tanah dan Gedung Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.4 Rincian Kepemilikan UPT sampai dengan Tahun 2024

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional	Status
1	Kendari	028/947 KR.IV.K.26-25/P.7-44/2018 15 Februari 2018	Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93122	Kantor Regional IV BKN Makassar	Hibah TA 2018
2	Gorontalo	900/BKPG/2946/IX/2022 23/PL.03.04/KE/K/2022 22 Agustus 2022	Jl. H.D.I Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Gorontalo 96181	Kantor Regional XI BKN Manado	Hibah TA 2022
3	Padang	030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 03/HM.04.01/BA/A/2023 27 Februari 2023	Jl. Adinegoro No 6-7, Kota Padang	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Hibah TA 2023
4	Bengkulu	43/PPA/Roum/VII/2016 29 Juli 2016	Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu 38119	Kantor Regional VII BKN Palembang	Tanah dan Gedung Bangunan sendiri
5	Donggala	011/231/BPKAD/2018 42/A/KS/2018 17 Desember 2018	Jl. Bantilan No. 20 Lere Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah 94111	Kantor Regional IV BKN Makassar	Hibah TA 2021
6	Ternate	800/101/SETDA/2018 01/K/KS/2019 04 Januari 2019	Jl. Jato no. 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	Kantor Regional XI BKN Manado	Hibah TA 2021
7	Pontianak	01/BAST-BKAD-F/2023 01/HM.04.01/BA/A/2023 02 Januari 2023	Jl. A Sood, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak	Kantor Regional V BKN Jakarta	Hibah TA 2023
8	Mataram	900/326.a/BPKAD/2017 18/K/KS/III/2017 02 Maret 2017	Jl. Majapahit No. 15 Mataram	Kantor Regional X BKN Denpasar	Hibah TA 2017
9	Jambi	3228/BAST/BPKD-7.2/2021 47/HM.05/01/2021 30 Desember 2021	Jl. Jambi Palembang KM.11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi)	Kantor Regional VII BKN Palembang	Hibah TA 2021
10	Pangkal Pinang	980/11/I/2021 32/HM.05.01/2021 04 Agustus 2021	Jl. Lanjutan Pulau Lepar, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu	Kantor Regional VII BKN Palembang	Hibah TA 2021

3. Tahun 2024 terdapat setoran dari PT. Taspen (Persero) pada Kantor Pusat BKN sebesar Rp35.744.471,00 berupa kewajiban pengembalian dana ke kas negara dari pegawai BKN yang telah pensiun dan dicatat sebagai Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931).
4. Pada Tahun 2018, BKN menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Irigasi yang digunakan untuk UPT BKN Kendari dengan nilai Rp947.847.125,00 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 610 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah atas Tanah, Bangunan dan Irigasi milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Badan Kepegawaian Negara dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 028/947 dan KR.IV.K.26-25/P.7-44/2018 tanggal 15 Februari 2018. Hibah tersebut telah disahkan dengan nomor 00520/BKN/MPHL-BJS/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan telah tercatat sebagai BMN pada satker Kantor Regional IV BKN Makassar dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 6.5 Daftar Aset Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada BKN

No	Aset BMN	Luas (M2)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	170	47,698,000
2	Pagar	610	167,825,625
3	Bangunan Air Kotor	132	16,428,500
4	Tanah	2,137	715,895,000
TOTAL		3,049	947,847,125

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 219 Tahun 2018 tentang Penghapusan Aset Berupa Hibah Tanah, Gedung, dan Bangunan Pembawa Air Kotor dari Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan kondisi fisik di lapangan, pada bidang tanah yang telah diserahkan ke BKN terdapat sejumlah bangunan lainnya dengan total luas $\pm$ 1.641 m² yang belum termasuk dalam BAST Hibah sehingga belum dapat dicatat sebagai BMN dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 6.6 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang Belum Diproses Pengesahan Hibah

No	Aset BMN	No Gedung	Luas (M2)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	115	79,639,000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	402	26,502,458
3	Bangunan Air Kotor	7	200	382,359,250
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	442	997,941,000
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	75	44,900,000
6	Tanah	6	407	29,778,750
TOTAL			1,641	1,561,120,458

Sampai dengan Tahun 2024 Kantor Regional IV BKN Makassar masih dalam proses identifikasi dokumen untuk selanjutnya akan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memproses hibah gedung tersebut.

5. Terdapat penerimaan Hibah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan sebagai pengganti atas MoU Pinjam Pakai untuk penggunaan Kantor Regional XIV BKN Manokwari sesuai dengan BAST Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada BKN dengan Nomor: 032/508/GPB/2021 dan Nomor: 9/HM.05.01/2021, Tanggal 15 Maret 2021. Atas penerimaan hibah tersebut, Tanah seluas 7.893 m² telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. BKN dan Pengesahan atas Hibah Tanah, Gedung dan Bangunan tersebut masih dalam proses koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kantor Wilayah Kemenkeu setempat.
6. Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin memperoleh Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa tanah seluas 10.264 m² senilai Rp1.276.500.000 dan Bangunan Rumah Jaga seluas 36 m² senilai Rp6.540.000 yang berlokasi di Jl. Tjilik Riwut km 10.5 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Nomor BAST 900/753.d/BKAD12024/171PL.03.04/BA/A12024 tanggal 04 November 2024 (sebagaimana BAST dan NPHD terlampir dalam Laporan Keuangan ini) yang sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2024 masih dalam proses register hibah dan pengesahan hibah.

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H

LAMPIRAN UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAFTAR REKENING BENDAHARA SATKER BKN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	SALDO 31 DESEMBER 2024	REKENING			
			NOMOR	NOMOR IZIN	NAMA	BANK & CABANG
REKENING PENGELUARAN						
REKENING KAS INDUK (RKK BKN OPS)						
1	Kantor Pusat BKN	-	00000003005194884	S-1541/WPB.12/KP/03/2020	RKK BKN OPS	BNI JAKARTA TIMUR
2	Kantor Pusat BKN	-	1660003144508	S-1540/WPB.12/KP/03/2020	RKK BKN OPS	MANDIRI JAKTIM
3	Kantor Pusat BKN	-	1054535755	S-2747/WPB.12/KP.03/2021	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI	BANK SYARIAH INDONESIA
4	Kantor Pusat BKN	9,270,300.00	034001002815306	S-1542/WPB.12/KP/03/2020	RKK BKN OPS	BRI KC JAKARTA OTISTA
REKENING VIRTUAL ACCOUNT (VA)						
5	Kantor Pusat BKN	-	652320172201000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA	BRI KC JAKARTA OTISTA
6	Kantor Pusat BKN	-	653150172201001	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 1	BRI KC JAKARTA OTISTA
7	Kantor Pusat BKN	-	653150172201002	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 2	BRI KC JAKARTA OTISTA
8	Kantor Pusat BKN	-	654150172201003	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 3	BRI KC JAKARTA OTISTA
9	Kantor Pusat BKN	-	654150172201004	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 4	BRI KC JAKARTA OTISTA
10	Kantor Pusat BKN	-	654150172201005	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 5	BRI KC JAKARTA OTISTA
11	Kantor Pusat BKN	-	654150172201006	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 6	BRI KC JAKARTA OTISTA
12	Kantor Pusat BKN	-	654150172201007	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 7	BRI KC JAKARTA OTISTA
13	Kantor Pusat BKN	-	654150172201008	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 8	BRI KC JAKARTA OTISTA
14	Kantor Pusat BKN	-	654150172201009	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 9	BRI KC JAKARTA OTISTA
15	Kantor Pusat BKN	-	654150172201010	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 10	BRI KC JAKARTA OTISTA
16	Kantor Pusat BKN	-	654150172201011	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 11	BRI KC JAKARTA OTISTA
17	Kantor Pusat BKN	-	654150172201012	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 12	BRI KC JAKARTA OTISTA
18	Kantor Pusat BKN	-	654150172201013	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 13	BRI KC JAKARTA OTISTA
19	Kantor Pusat BKN	-	654150172201014	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 14	BRI KC JAKARTA OTISTA
20	Kantor Pusat BKN	-	654150172201015	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 15	BRI KC JAKARTA OTISTA
21	Kantor Pusat BKN	-	654150172201016	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 16	BRI KC JAKARTA OTISTA
22	Kantor Pusat BKN	-	654150172201017	S-203/WPB.12/KP.03/2022	BPP 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA 17	BRI KC JAKARTA OTISTA
23	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	-	8100120172411000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 030 KANREG I BKN YOGYA	MANDIRI KC YOGYAKARTA SUDIRMAN
24	Kantor Regional II BKN Surabaya	-	652324504541000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 165 KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	BRI KC JEMURSARI SURABAYA
25	Kantor Regional III BKN Bandung	-	9890840172371000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 095 KANTOR REGIONAL III BKN	BNI KCP PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG
26	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	9890845606351000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 136 KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	BNI KC MATTOANGIN
27	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	652325606351000	S-2677/KPN.1203/2024	BPG 136 KANTOR REG IV BKN MAKASSAR	BRI KC MAKASSAR
28	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	652325606351001	S-2677/KPN.1203/2024	BPP 136 KANREG IV BKN MAKASAR	BRI KC MAKASSAR
29	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	-	652326062541000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA	BRI KC JAKARTA OTISTA

NO	SATUAN KERJA	SALDO 31 DESEMBER 2024	REKENING			
			NOMOR	NOMOR IZIN	NAMA	BANK & CABANG
30	Kantor Regional VI BKN Medan	-	8100126062611000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 004 KANREG VI BKN	MANDIRI KC MEDAN IMAM BONJOL
31	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	9890846223721000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 014 KANREG VII BKN PLG	BNI KC. PALEMBANG SUDIRMAN
32	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	-	9890846223861000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 045 BKN KANREG VIII BANJARMASIN	BNI KCP DEPARTEMEN KEUANGAN PECENONGAN
33	Kantor Regional IX BKN Jayapura	-	030701001118309	S-890/WPB.30/KP.063/2015	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
		-	652326223901000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
34	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	9890846678821000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 037 KANREG X BKN DENPASAR	BNI KC 1946
35	Kantor Regional XI BKN Manado	-	9890846678961000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 049 KANREG XI BKN MANADO	BNI KCP JATINEGARA BKN
36	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	-	652326679011000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 008 KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	BRI KC Jakarta Gatot Subroto
37	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	-	8100996677521000	S-3029/WPB.12/KP.03/2020	BPG 001 BKN KANTOR REGIONAL XIII BKN BA	BRI SYARIAH
38	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	652326676521000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 065 KANREG XIV BKN MKW 667652	BRI KC Manokwari
39	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	654500205051000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KC Otista
REKENING PENERIMAAN						
17	Kantor Pusat BKN	-	034001002735302	S-6002/WPB.12/KP.03/2019	BNP 088 BKN 017220	BRI KC JAKARTA OTISTA
18	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000123304	S-389/WPB.13/KP.04/2018	BNP 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KCP KPPN BOGOR
REKENING LAINNYA						
19	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000127308	S-678/WPB.13/KP.04/2018	RPL 023 KS PUSBANG ASN UTK DIKLAT	BRI KCP KPPN BOGOR
TOTAL		9,270,300.00				

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	9=4-8
131111	Tanah	585,438.00	2,331,580,054,368.00	-	2,331,580,054,368.00
20101	TANAH PERSIL	585,268.00	2,330,462,866,368.00	-	2,330,462,866,368.00
20103	LAPANGAN	170.00	1,117,188,000.00	-	1,117,188,000.00
132111	Peralatan dan Mesin	64,812.00	768,036,979,101.00	(587,961,924,338.00)	180,075,054,763.00
30101	ALAT BESAR DARAT	-	-	-	-
30103	ALAT BANTU	213.00	38,944,767,751.00	(31,487,294,413.00)	7,457,473,338.00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	211.00	42,637,868,720.00	(33,999,073,728.00)	8,638,794,992.00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	107.00	247,687,720.00	(216,478,970.00)	31,208,750.00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29.00	6,062,155,711.00	(5,789,478,463.00)	272,677,248.00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	42.00	132,108,050.00	(120,981,535.00)	11,126,515.00
30303	ALAT UKUR	8.00	109,795,050.00	(77,176,725.00)	32,618,325.00
30401	ALAT PENGOLAHAN	6.00	49,107,300.00	(49,107,300.00)	-
30501	ALAT KANTOR	9,084.00	82,367,541,436.00	(77,540,964,463.00)	4,826,576,973.00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,507.00	149,524,519,562.00	(133,306,729,498.00)	16,217,790,064.00
30601	ALAT STUDIO	1,163.00	40,260,019,087.00	(27,486,748,795.00)	12,773,270,292.00
30602	ALAT KOMUNIKASI	541.00	4,888,094,509.00	(4,819,904,150.00)	68,190,359.00
30603	PERALATAN PEMANCAR	13.00	1,905,464,793.00	(1,267,927,810.00)	637,536,983.00
30701	ALAT KEDOKTERAN	291.00	881,215,794.00	(821,421,708.00)	59,794,086.00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14.00	120,200,625.00	(91,633,250.00)	28,567,375.00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	85.00	5,252,882,817.00	(5,057,586,578.00)	195,296,239.00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	-	-	-
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17.00	87,670,000.00	(46,899,282.00)	40,770,718.00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1.00	4,284,000.00	(1,285,200.00)	2,998,800.00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	-	-	-
31001	KOMPUTER UNIT	9,927.00	146,175,869,826.00	(99,986,014,527.00)	46,189,855,299.00
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,457.00	246,094,089,850.00	(163,737,079,411.00)	82,357,010,439.00
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6.00	64,269,000.00	(4,284,600.00)	59,984,400.00
31503	ALAT SAR	46.00	1,795,742,500.00	(1,795,742,500.00)	-
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	-	-	-
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27.00	143,815,000.00	(141,136,432.00)	2,678,568.00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	17.00	287,810,000.00	(116,975,000.00)	170,835,000.00
133111	Gedung dan Bangunan	486.00	896,194,810,778.00	(192,573,355,342.00)	703,621,455,436.00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	174.00	775,739,279,774.00	(168,390,315,223.00)	607,348,964,551.00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	283.00	104,910,773,764.00	(21,410,555,581.00)	83,500,218,183.00
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1.00	45,569,000.00	(7,010,612.00)	38,558,388.00
40401	TUGU/TANDA BATAS	28.00	15,499,188,240.00	(2,765,473,926.00)	12,733,714,314.00
134111	Jalan dan Jembatan	58,771.00	16,468,966,800.00	(16,260,541,380.00)	208,425,420.00
50101	JALAN	58,761.00	16,466,806,800.00	(16,260,126,000.00)	206,680,800.00
50102	JEMBATAN	10.00	2,160,000.00	(415,380.00)	1,744,620.00
134112	Irigasi	26.00	2,934,621,163.00	(877,968,085.00)	2,056,653,078.00
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2.00	257,076,600.00	(38,211,067.00)	218,865,533.00
50202	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	2.00	159,020,000.00	(28,985,130.00)	130,034,870.00
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.00	16,428,500.00	(16,428,500.00)	-

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	
1	2	3	4	5	9=4-8
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11.00	1,757,299,063.00	(613,252,207.00)	1,144,046,856.00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3.00	394,889,000.00	(94,165,530.00)	300,723,470.00
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7.00	349,908,000.00	(86,925,651.00)	262,982,349.00
134113	Jaringan	31.00	5,233,986,977.00	(2,407,560,422.00)	2,826,426,555.00
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2.00	335,572,500.00	(214,729,916.00)	120,842,584.00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4.00	1,783,479,940.00	(303,823,517.00)	1,479,656,423.00
50310	INSTALASI LAIN	6.00	917,573,820.00	(917,573,820.00)	-
50401	JARINGAN AIR MINUM	1.00	103,840,700.00	(64,035,095.00)	39,805,605.00
50402	JARINGAN LISTRIK	16.00	2,028,728,367.00	(858,072,069.00)	1,170,656,298.00
50403	JARINGAN TELEPON	2.00	64,791,650.00	(49,326,005.00)	15,465,645.00
135111	Aset Tetap Renovasi	27.00	12,089,820,513.00	(609,295,525.00)	11,480,524,988.00
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1.00	3,998,500.00	-	3,998,500.00
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	25.00	12,005,583,613.00	(609,295,525.00)	11,396,288,088.00
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1.00	80,238,400.00	-	80,238,400.00
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	-	-	-	-
135121	Aset Tetap Lainnya	9,652.00	1,585,538,903.00	(53,949,438.00)	1,531,589,465.00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	9,418.00	796,179,803.00	-	796,179,803.00
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1.00	21,500,000.00	-	21,500,000.00
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	203.00	650,140,000.00	-	650,140,000.00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29.00	84,719,100.00	(53,949,438.00)	30,769,662.00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1.00	33,000,000.00	-	33,000,000.00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	742.00	18,650,632,641.00	(17,803,040,854.00)	847,591,787.00
30103	ALAT BANTU	6.00	285,067,670.00	(285,067,670.00)	-
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.00	197,800,000.00	(197,800,000.00)	-
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2.00	2,827,000.00	(2,827,000.00)	-
30303	ALAT UKUR	-	-	-	-
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	-	-	-
30501	ALAT KANTOR	48.00	331,403,135.00	(331,046,735.00)	356,400.00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	404.00	1,061,451,282.00	(1,056,976,282.00)	4,475,000.00
30601	ALAT STUDIO	14.00	58,268,597.00	(58,268,597.00)	-
30602	ALAT KOMUNIKASI	7.00	465,458,610.00	(465,458,610.00)	-
30701	ALAT KEDOKTERAN	7.00	9,689,000.00	(9,580,100.00)	108,900.00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1.00	127,632,947.00	(127,632,947.00)	-
31001	KOMPUTER UNIT	137.00	1,546,717,403.00	(1,546,717,403.00)	-
31002	PERALATAN KOMPUTER	85.00	13,395,306,997.00	(13,395,306,997.00)	-
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2.00	14,190,000.00	(14,190,000.00)	-
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	16.00	1,071,795,000.00	(291,338,970.00)	780,456,030.00
50310	INSTALASI LAIN	1.00	45,825,000.00	(20,829,543.00)	24,995,457.00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	-	-	-
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1.00	6,500,000.00	-	6,500,000.00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10.00	30,700,000.00	-	30,700,000.00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	-	-	-
JUMLAH		719,985.00	4,052,775,411,244.00	(818,547,635,384.00)	3,234,227,775,860.00

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024			NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI	
1	2	3	4	8=5+6+7	9=4-8
162121	Hak Cipta	1	500,000.00	(71,421.00)	428,579.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000.00	(71,421.00)	428,579.00
162151	Software	176	57,301,344,197.00	(49,867,559,538.00)	7,433,784,659.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	176	57,301,344,197.00	(49,867,559,538.00)	7,433,784,659.00
162161	Lisensi	1	2,024,640,000.00	(101,232,000.00)	1,923,408,000.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	2,024,640,000.00	(101,232,000.00)	1,923,408,000.00
162171	Hasil Kajian/Penelitian	2	294,045,300.00	-	294,045,300.00
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	294,045,300.00	-	294,045,300.00
166113	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7	1,900,098,125.00	(1,900,098,125.00)	-
80101	ASET TAK BERWUJUD	7	1,900,098,125.00	(1,900,098,125.00)	-
JUMLAH		187	61,520,627,622.00	(51,868,961,084.00)	9,651,666,538.00

Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Informasi Belanja Dibayar Dimuka
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

Bagian Anggaran : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Eselon I / UAPPA-E1 : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(Dalam Rupiah)

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Perjanjian	Akun	Nilai Kontrak	Saldo Belanja Dibayar Di Muka 31 Des 2024
1	Kantor Pusat BKN	Biaya langganan lisensi <i>Canva Pro</i>	365 hari	1 April 2024 s/d 31 Maret 2025	INV 04108-26530123	522141	769,000	189,617
		Biaya langganan lisensi <i>Envato</i>	366 hari	17 Mei 2024 s/d 17 Mei 2025	INV 14820175	522141	4,300,511	1,609,754
		Biaya langganan lisensi <i>Capcut Pro</i>	396 hari	1 Mei 2024 s/d 31 Mei 2025	INV 003	522141	999,000	380,932
		Biaya langganan lisensi <i>Brand24</i>	32 hari	5 Desember 2024 s/d 5 Januari 2025	INV 172298	522141	3,985,245	622,695
		Biaya langganan lisensi <i>DOI Jurnal</i>	366 hari	1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024	INV 027854	521111	500,000	-
		Biaya langganan lisensi <i>Microsoft</i>	365 hari	3 Maret 2024 s/d 2 Maret 2025	003/SPK/PPK PUSPENKOM/II/2024	521211	113,400,000	18,951,781
		Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	31 hari	11 Desember 2024 s/d 10 Januari 2025	64/KW/ACW/XI/2024	521211	3,290,000	1,061,290
		Biaya langganan lisensi Deteksi Anomali SCASN	365 hari	16 Desember 2024 s/d 15 Desember 2025	004/KWT-MBI/XII/2024	521111	8,412,439,000	8,043,674,551
		Biaya langganan lisensi <i>Siber Fusion Darkweb</i> SCASN	374 hari	23 Desember 2024 s/d 31 Desember 2025	1114/KW-MVT/XII/2024	521111	8,100,000,000	7,905,080,214

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Perjanjian	Akun	Nilai Kontrak	Saldo Belanja Dibayar Di Muka 31 Des 2024
	Kantor Pusat BKN	Biaya langganan lisensi <i>East West Security Traffic</i>	427 hari	23 Desember 2024 s/d 22 Februari 2026	K241120006	521111	2,908,068,000	2,846,773,827
		Biaya langganan lisensi AKAMAI API <i>Security</i>	367 hari	23 Desember 2024 s/d 24 Desember 2025	030-KWT-ADI-XII-2024	521111	3,060,000,000	2,984,959,128
		Biaya langganan lisensi <i>Logger Security Manager</i>	396 hari	18 Desember 2024 s/d 17 Januari 2026	004/MJI/KW/XII/2024	521111	3,522,083,000	3,397,564,914
		Biaya langganan lisensi <i>DNS Security</i>	365 hari	13 Desember 2024 s/d 12 Desember 2025	041/KW-SDA/XII/2024	521111	2,355,596,000	2,232,975,934
		Biaya langganan lisensi <i>Threat Intellegence</i>	381 hari	16 Desember 2024 s/d 31 Desember 2025	2024-KW-MSI403	521111	3,065,733,000	2,936,988,307
		Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	367 hari	2 Februari 2024 s/d 2 Februari 2025	018/KW/DKP-JKT/II/2024	521111	233,420,000	20,988,719
		Biaya langganan lisensi <i>Intelij</i>	365 hari	15 Maret 2024 s/d 14 Maret 2025	INV ID2024-2142	521111	5,001,757	1,000,351
		Biaya langganan lisensi <i>Intelij</i>	365 hari	15 Maret 2024 s/d 14 Maret 2025	INV ID2024-2141	521111	5,001,757	1,000,351
		Biaya langganan lisensi <i>Intelij</i>	365 hari	15 Maret 2024 s/d 14 Maret 2025	INV ID2024-2143	521111	5,001,757	1,000,351
		Biaya langganan lisensi <i>Intelij</i>	365 hari	19 Maret 2024 s/d 18 Maret 2025	INV ID2024-2234	521111	5,036,403	1,062,474
		Biaya langganan lisensi <i>Canva Pro</i>	366 hari	23 Maret 2024 s/d 23 Maret 2025	INV 04099-16253073	521111	769,000	172,290
		Biaya langganan lisensi <i>Apple Developer Program Membership</i>	366 hari	28 Maret 2024 s/d 28 Maret 2025	INV MA70869650	521111	1,565,388	372,100
		Biaya langganan lisensi <i>Tableau Creator</i>	365 hari	02 Mei 2024 s/d 01 Mei 2025	001/SDK/V/2024	521111	95,238,000	31,572,049
		Biaya langganan lisensi <i>Canva Pro</i>	366 hari	27 Juni 2024 s/d 27 Juni 2025	INV 203818020509	521111	769,000	373,995

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Perjanjian	Akun	Nilai Kontrak	Saldo Belanja Dibayar Di Muka 31 Des 2024
	Kantor Pusat BKN	Biaya langganan lisensi <i>Renewal Warranty Storage-ECS</i>	409 hari	19 Maret 2024 s/d 1 Mei 2025	0902/KW-MVT/XI/2024	521111	1,600,000,000	473,349,633
		Biaya langganan lisensi <i>Renewal Warranty Storage-Isilon</i>	366 hari	19 Maret 2024 s/d 19 Maret 2025	0902/KW-MVT/XI/2024	521111	1,900,000,000	404,918,033
		Biaya langganan lisensi <i>Firewall - FG 2201E</i>	366 hari	4 September 2024 s/d 4 September 2024	2024-KW-MSI312	521111	1,500,000,000	1,012,295,082
		Biaya langganan lisensi <i>Firewall - FG 3301E</i>	366 hari	26 Oktober 2024 s/d 26 Oktober 2025	2024-KW-MSI312	521111	2,000,000,000	1,633,879,782
2	Kanreg I BKN Yogyakarta	Biaya langganan lisensi <i>Canva Pro</i>	365 hari	24 Februari 2024 s/d 23 Februari 2025	INV 04071-5676470	521111	2,850,000	1,803,699
		Biaya langganan lisensi Hak Penggunaan Spektrum Frek.	366 hari	5 April 2024 s/d 4 April 2025	2661097/DJSDPPI.3/SP.02.07/04/2024	521111	1,900,000	280,328
		Biaya langganan lisensi <i>Google Email</i>	365 hari	3 Juni 2024 s/d 2 Juni 2025	INV 00093	521111	1,294,615	333,408
		Biaya langganan lisensi <i>SSL Wildcard</i>	365 hari	30 Juni 2024 s/d 29 Juni 2025	G/SL/SH/16387/0624	521111	298,590	125,162
		Biaya langganan lisensi <i>AVAST</i>	365 hari	16 September 2024 s/d 15 September 2025	INV 1412137230800	521111	3,552,000	1,751,671
		Biaya langganan lisensi <i>AVAST</i>	365 hari	11 September 2024 s/d 10 September 2025	INV 1412137230800	521111	540,000	381,699
		Biaya langganan lisensi Presensi PPNPN	730 hari	15 Maret 2024 s/d 14 Maret 2026	INV 4202757	521111	870,409	603,325
3	Kanreg III BKN Bandung	Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	365 hari	20 Agustus 2024 s/d 19 Agustus 2025	INV 269757099	521111	579,468	347,681
		Biaya langganan lisensi <i>Canva Pro</i>	366 hari	5 Februari 2024 s/d 4 Februari 2025	INV GPA.3319-0825-5964-35730	521111	853,590	81,627
4	Kanreg IV BKN Makasar	Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	365 hari	27 Juni 2024 s/d 26 Juni 2025	INV 262535388	521111	1,437,780	697,225

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Perjanjian	Akun	Nilai Kontrak	Saldo Belanja Dibayar Di Muka 31 Des 2024
5	Kanreg V BKN DKI Jakarta	Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	365 hari	29 Juli 2024 s/d 28 Juli 2025	INV 266908552	521111	13,567,957	7,769,049
		Biaya langganan lisensi <i>Google Storage</i>	365 hari	1 Oktober 2024 s/d 30 September 2025	INV SOP3343-2055-0653-18851	521111	477,300	356,994
6	Kanreg VII BKN Palembang	Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	366 hari	21 Januari 2024 s/d 20 Januari 2025	INV 237274985	521111	2,695,157	147,276
		Biaya langganan lisensi <i>Canva Pro</i>	367 hari	1 Februari 2024 s/d 31 Januari 2025	INV 04048-13110343	521111	1,240,000	108,120
7	Kanreg XI BKN Manado	Biaya langganan lisensi <i>Canva Pro</i>	365 hari	24 Februari 2024 s/d 23 Februari 2025	INV 04071-13697587	521111	1,240,000	180,055
		Biaya langganan lisensi <i>Linktree</i>	365 hari	12 Mei 2024 s/d 11 Mei 2025	INV LT-11546850	521111	708,000	254,104
8	Kanreg XIII BKN Aceh	Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	366 hari	22 Januari 2024 s/d 21 Januari 2025	INV 240122HYHYQAFR	521111	1,902,000	109,131
		Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	366 hari	6 Februari 2024 s/d 5 Februari 2025	INV 240206SXBPA9SP	521111	1,902,000	187,082
		Biaya sewa Gedung Tata Naskah	366 hari	11 Maret 2024 s/d 10 Maret 2025	5.2/SPK/PPK/KANREG-XIII/III/2024	522141	52,170,000	9,977,869
9	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	Biaya langganan lisensi <i>Canva Pro</i>	365 hari	23 April 2024 s/d 22 April 2025	INV 04130-25968520	521111	1,240,000	380,493
		Biaya langganan lisensi <i>Zoom</i>	365 hari	16 Februari 2024 s/d 15 Februari 2025	006/KW/IGP/II/2024	521111	14,800,000	1,824,658
Jumlah							39,009,084,684	33,980,518,810

Badan Kepegawaian Negara (BA 088)
Informasi Pendapatan Diterima Dimuka
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

Bagian Anggaran : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Eselon I / UAPPA-E1 : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(Dalam Rupiah)

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI	1097 hari	1 Jan 2022 s.d 1 Jan 2025	44/HM.05.03/2021 2179/FIT/PKS/XII/2021	327,907,000	298,912
		Koperasi Promart (1)	1096 hari	01 Sept 2022 s.d. 31 Agus 2025	44/HM.04.01/2022	55,902,000	12,394,330
		Koperasi Promart (2)	1096 hari	01 Des 2022 s.d. 30 Nov 2025	45/HM.04.01/2022	85,850,000	26,162,318
		PT. FIDAC (2)	732 hari	02 Jan 2023 s.d. 02 Jan 2025	46/HM.04.01/2022 3861/FIT/PKS/I/2023	111,349,000	304,232
		ATM BRI	1097 hari	15 Feb 2023 s.d 15 Feb 2026	23/HM.04.01/2023 B.2805.KC-V/LOG/05/2023	119,328,000	44,707,209
		PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	1827 hari	01 Des 2023 s.d. 30 Nov 2028	KEPKA No. 502 Tahun 2023	143,025,000	111,946,223
		PT. BANK BNI	731 hari	01 Jan 2024 s.d. 31 Des 2025	48/HM.04.01/2023 JNG/PKS/54/23	455,446,000	227,411,477
		BANK DKI (ATM)	730 hari	01 Okt 2024 s.d. 30 Sept 2026	KEPKA NO 217 Tahun 2024	35,793,000	31,282,101
		BSI (ATM)	730 hari	01 Nov 2024 s.d. 31 Okt 2026	42/HM.04.01/202404/003-2/0073	50,901,000	46,647,629
		PT BRI (KANTOR)	1095 hari	01 Agt 2024 s.d. 31 Juli 2027	KEPKA NO 193 TAHUN 2024	223,086,000	191,915,079
		KOPERASI PROMART BKN BEKASI	1826 hari	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2029	KEPKA NO 326 Tahun 2024	264,156,000	264,156,000

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2024
2	Kanreg I BKN Yogyakarta	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SEDAR	1096 hari	07 Feb 2022 s.d. 06 Feb 2025	1/HM0401/2022	3,900,000	131,661
3	Kanreg V BKN DKI Jakarta	Kantin	365 hari	01 Des 2024 s.d. 30 Nov 2025	S-201/MK.6/KNL.O704/2024	3,171,000	2,901,682
		PT BRI	1096 hari	08 Feb 2023 s.d. 07 Feb 2026	080.1B-RT.01.01/SD/KR.V/2023	37,342,000	13,730,681
4	Kanreg VI BKN Medan	Kantin	366 hari	02 Sept 2024 s.d. 02 Sept 2025	653.1/KR.VI/BKN.A/IX/2022	5,942,000	3,977,568
5	Kanreg X BKN Denpasar	Koperasi	1097 hari	13 Juni 2023 s.d. 13 Juni 2026	001/KR.X/VI/2023	4,265,000	2,056,686
6	Kanreg XI BKN Manado	PT. BNI (ATM)	1096 hari	01 Sept 2023 s.d 31 Agus 2026	MDO/01/020/PKS SEWA ATM/2023	60,927,000	33,798,920
7	Kanreg XII BKN Pekanbaru	PT. BRI (ATM)	731 hari	01 Jan 2024 s.d. 31 Des 2025	523/B-PL.03.04/SD/KR.XII/2024 00945-KC-RO-PKU/02/2024	32,409,000	16,182,332
8	Pusat Pengembangan ASN	PT. BRI (ATM)	1096 hari	28 April 2022 s.d. 27 April 2025	001/PKS-BMN/A/PUSBANGPEGASN/IV/2022 B.335 KC/XIV/LYI/04/2022	31,351,000	3,346,776
Jumlah						2,052,050,000	1,033,351,816

Lampiran A6

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	KET
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Barang	DN	913,529,700.00	913,529,700.00	Tanah
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Barang	DN	170,045,000.00	170,045,000.00	Peralatan dan Mesi, Buku Perpustakaan
3	Komisariat Kantor Regional I BKN Yogyakarta Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Barang	DN	65,000,000.00	65,000,000.00	Tanah
Jumlah				1,148,574,700.00	1,148,574,700.00	

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian / Lembaga : Badan Kepegawaian Negara
Fungsi : Pelayanan Umum
Sub Fungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
088	Program (CO)	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
	3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian							
	AFA 001	133,966,000.00	130,630,073.00	97.51	4	4	NSPK	100.00	
	BAB 001	182,788,000.00	182,737,100.00	99.97	520	520	Lembaga	100.00	
	FAC 001	330,746,000.00	330,562,515.00	99.94	1,000	1,000	Orang	100.00	
	3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi							
	AFA 001	146,864,000.00	142,539,610.00	97.06	1	2	NSPK	200.00	
	AFA 002	85,295,000.00	84,881,800.00	99.52	2	2	Standar	100.00	
	BAA 001	916,312,270,000.00	748,849,690,015.00	81.72	4,735,962	4,804,712	Orang	101.45	
	BAA 002	9,973,862,000.00	9,490,324,557.00	95.15	142,134	160,990	Orang	113.27	
	FAB 001	6,078,663,000.00	109,012,000.00	1.79	1	1	Sistem Informasi	100.00	
	3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN							
	ADE 001	335,724,000.00	335,641,646.00	99.98	21	20	Lembaga	95.24	
	BAA 001	2,975,260,000.00	2,941,111,932.00	98.85	2,892	13,164	Orang	455.19	
	PFA 001	2,000,000,000.00	1,957,910,710.00	97.90	1	1	NSPK	100.00	
	UAC 001	5,500,000,000.00	5,465,607,943.00	99.37	60,000	70,907	Orang	118.18	
	3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian							
	ABQ 001	50,000,000.00	44,019,600.00	88.04	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	FAC 002	632,200,000.00	601,949,892.00	95.22	640	640	Orang	100.00	
	FAC 003	3,050,240,000.00	3,024,880,229.00	99.17	1,321	1,321	Orang	100.00	
	FAC 004	290,685,000.00	289,804,500.00	99.70	200	200	Orang	100.00	
	FAC U01	2,000,000,000.00	1,991,496,273.00	99.57	168	168	Orang	100.00	
	4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN							
	AAH 001	740,000,000.00	737,978,836.00	99.73	10	11	Peraturan	110.00	
	ABQ 002	167,840,000.00	161,403,750.00	96.17	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	ABQ 004	200,000,000.00	199,746,416.00	99.87	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	ABQ 005	118,490,000.00	118,490,000.00	100.00	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	ABQ 006	301,628,000.00	301,628,000.00	100.00	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	AFA 001	227,022,000.00	221,832,940.00	97.71	1	1	Rancangan Standar	100.00	
	BDB 001	363,525,000.00	352,711,629.00	97.03	628	628	Lembaga	100.00	
	BDB 002	339,882,000.00	339,882,000.00	100.00	624	626	Lembaga	100.32	
	BDB 003	82,160,000.00	82,160,000.00	100.00	8	8	Lembaga	100.00	
	BDB 005	149,453,000.00	147,777,969.00	98.88	42	50	Lembaga	119.05	
	BDB 006	636,875,000.00	635,905,732.00	99.85	33	33	Lembaga	100.00	
	PBQ 001	1,000,000,000.00	992,097,669.00	99.21	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN							
	AEA 001	365,000,000.00	364,219,961.00	99.79	2	2	kegiatan	100.00	
	AEA 002	372,090,000.00	371,708,816.00	99.90	2	2	kegiatan	100.00	
	AEA 003	369,698,000.00	324,048,777.00	87.65	2	2	kegiatan	100.00	
	BAB 001	505,952,000.00	484,830,206.00	95.83	581	581	Lembaga	100.00	
	BAB 002	1,268,299,000.00	1,247,323,865.00	98.35	1,315	1,315	Lembaga	100.00	
	BAB 003	1,159,130,000.00	1,091,466,348.00	94.16	1,301	1,301	Lembaga	100.00	
	BAB 004	324,129,000.00	333,803,618.00	102.98	743	743	Lembaga	100.00	
	BAB 008	308,784,000.00	298,860,299.00	96.79	1,045	1,045	Lembaga	100.00	
	BAB 009	74,800,000.00	57,746,278.00	77.20	71	71	Lembaga	100.00	
	BAB 010	187,477,000.00	174,374,164.00	93.01	916	916	Lembaga	100.00	
	4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN							
	BMA 001	231,250,000.00	230,551,590.00	99.70	1	1	layanan	100.00	
	FAA 002	2,285,732,000.00	2,170,158,916.00	94.94	2,285,624	2,620,569	Dokumen	114.65	
	FAB 001	1,782,923,000.00	1,695,384,702.00	95.09	1	1	Sistem Informasi	100.00	
	QMA 001	2,500,000,000.00	2,478,406,972.00	99.14	1	1	layanan	100.00	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4848 Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN								
	AEA 001	1,848,512,000.00	1,950,623,616.00	105.52	1	1	kegiatan	100.00	
	BAA 001	55,000,000.00	-	-	4	-	Orang	-	
	BIC 001	2,041,148,000.00	2,118,728,565.00	103.80	177	177	Lembaga	100.00	
	BIC 002	1,959,960,000.00	1,994,003,125.00	101.74	162	162	Lembaga	100.00	
	BIC 003	405,844,000.00	368,300,680.00	90.75	162	162	Lembaga	100.00	
	BIC 004	1,474,345,000.00	1,394,786,305.00	94.60	115	115	Lembaga	100.00	
	BIC 005	874,079,000.00	862,226,379.00	98.64	397	397	Lembaga	100.00	
	BIC 006	903,404,000.00	722,610,015.00	79.99	321	321	Lembaga	100.00	
	BIC 007	1,265,246,000.00	1,241,041,969.00	98.09	302	302	Lembaga	100.00	
	BIC 008	998,332,000.00	969,590,795.00	97.12	216	216	Lembaga	100.00	
	FAE 001	391,785,000.00	322,450,936.00	82.30	120	120	Laporan	100.00	
	FAE 002	71,814,000.00	51,613,420.00	71.87	7	7	Laporan	100.00	
	QIC 001	3,447,047,000.00	2,093,006,388.00	60.72	467	303	Lembaga	64.88	
	UAE 001	45,000,000.00	30,628,095.00	68.06	6	6	Laporan	100.00	
	UAE 002	1,936,330,000.00	597,521,766.00	30.86	1	1	Laporan	100.00	
	UAE 003	516,138,000.00	81,733,548.00	15.84	200	3	Laporan	1.50	
088	Program (WA)	Program Dukungan Manajemen							
	3630 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik								
	EBA 958	752,769,000.00	719,159,855.00	95.54	14	14	Layanan	100.00	
	EBA 959	1,476,179,000.00	1,474,930,225.00	99.92	4	4	Layanan	100.00	
	3635 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal								
	EBD 961	43,477,000.00	43,284,234.00	99.56	2	2	Dokumen	100.00	
	EBD 965	974,023,000.00	973,412,280.00	99.94	50	50	Dokumen	100.00	
	3639 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)								
	BCE 001	688,656,000.00	663,570,378.00	96.36	255	255	Perkara	100.00	
	BCE 002	97,594,000.00	97,233,500.00	99.63	20	20	Perkara	100.00	
	3648 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi								
	CBT 001	118,371,650,000.00	118,127,410,925.00	99.79	3,565	3,565	Unit	100.00	
	CCL 001	842,950,000.00	700,437,750.00	83.09	179	179	Unit	100.00	
	CDS 001	1,080,830,000.00	1,080,799,200.00	100.00	265	265	Unit	100.00	
	EBA 962	1,080,000,000.00	1,037,656,057.00	96.08	1	1	Layanan	100.00	
	3662 Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN								
	EBA 963	185,000,000.00	181,497,450.00	98.11	1	1	Layanan	100.00	
	4842 Pengelolaan Organisasi dan SDM								
	EBA 960	634,086,000.00	631,549,472.00	99.60	1	1	Layanan	100.00	
	EBC 954	4,883,428,000.00	4,583,021,539.00	93.85	4,091	4,091	Orang	100.00	
	EBC 996	1,344,117,000.00	1,213,566,565.00	90.29	426	426	Orang	100.00	
	EBD 961	281,211,000.00	280,134,420.00	99.62	1	1	Dokumen	100.00	
	4843 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum								
	EBA 956	244,655,000.00	234,127,508.00	95.70	12	12	Layanan	100.00	
	EBA 962	497,106,000.00	478,511,844.00	96.26	4	4	Layanan	100.00	
	EBA 994	511,405,600,000.00	482,777,766,726.00	94.40	18	18	Layanan	100.00	
	EBB 951	14,899,774,000.00	13,896,725,074.00	93.27	510	510	Unit	100.00	
	EBB 971	59,049,463,000.00	48,153,053,825.00	81.55	36	36	Unit	100.00	
	EBD 952	905,818,000.00	845,707,542.00	93.36	43	43	Dokumen	100.00	
	EBD 953	890,583,000.00	814,884,944.00	91.50	53	53	Dokumen	100.00	
	EBD 955	2,360,219,000.00	2,226,155,893.00	94.32	20	20	Dokumen	100.00	
	EBD 961	2,284,778,000.00	2,276,198,674.00	99.62	8	8	Dokumen	100.00	
	EBD 974	229,435,000.00	223,534,585.00	97.43	12	12	Dokumen	100.00	
	FAB 002	145,000,000.00	141,240,000.00	97.41	1	1	Sistem Informasi	100.00	
	4844 Legislasi dan Litigasi								
	EBA 957	38,025,000.00	38,024,240.00	100.00	1	1	Layanan	100.00	
	EBA 969	462,500,000.00	420,281,392.00	90.87	24	24	Layanan	100.00	
SUBTOTAL		1,710,523,612,000.00	1,490,720,041,547.00		7,250,100.27	7,693,476.00			

LAMPIRAN PENDUKUNG

LAMPIRAN I

Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 088

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,555,248,000	41,462,195,556	12,906,947,556	145.20	19,396,526,000	26,260,135,552	6,863,609,552	135.39
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	28,555,248,000	41,462,195,556	12,906,947,556	145.20	19,396,526,000	26,260,135,552	6,863,609,552	135.39
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	28,555,248,000	41,462,195,556	12,906,947,556	145.20	19,396,526,000	26,260,135,552	6,863,609,552	135.39
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,710,523,612,000	1,500,101,756,801	(210,421,855,199)	87.70	1,079,227,170,000	1,028,677,308,609	(50,549,861,391)	95.32
1. Belanja Pegawai	391,463,752,000	374,117,703,451	(17,346,048,549)	95.57	356,489,232,000	346,866,997,060	(9,622,234,940)	97.3
2. Belanja Barang	1,136,020,270,000	954,577,173,848	(181,443,096,152)	84.03	619,400,961,000	578,789,169,324	(40,611,791,676)	93.44
3. Belanja Modal	183,039,590,000	171,406,879,502	(11,632,710,498)	93.64	103,336,977,000	103,021,142,225	(315,834,775)	99.69
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 088

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,710,523,612,000	1,500,101,756,801	(210,421,855,199)	87.70	1,079,227,170,000	1,028,677,308,609	(50,549,861,391)	95.32
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
51	BELANJA PEGAWAI	397,463,752,000	391,463,752,000	374,240,484,066	122,780,615	374,117,703,451	95.57	17,346,048,549
52	BELANJA BARANG	204,489,346,000	1,136,020,270,000	957,540,376,786	2,963,202,938	954,577,173,848	84.03	181,443,096,152
53	BELANJA MODAL	181,812,096,000	183,039,590,000	171,488,684,898	81,805,396	171,406,879,502	93.64	11,632,710,498
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	783,765,194,000	1,710,523,612,000	1,503,269,545,750	3,167,788,949	1,500,101,756,801	87.88	210,421,855,199
	JUMLAH BELANJA	783,765,194,000	1,710,523,612,000	1,503,269,545,750	3,167,788,949	1,500,101,756,801	87.88	210,421,855,199

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	700,000,000	647,500,000	643,929,688	0	643,929,688	99.45	3,570,312
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	550,000,000	922,623,092,000	751,693,528,822	2,209,578,781	749,483,950,041	1168.93	173,139,141,959
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	7,800,900,000	7,500,000,000	7,431,314,653	23,483,302	7,407,831,351	98.77	92,168,649
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	3,016,550,000	2,972,885,000	2,956,803,265	22,184,707	2,934,618,558	98.71	38,266,442
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	4,575,000,000	4,326,875,000	4,322,454,476	394,683	4,322,059,793	99.89	4,815,207
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	8,390,032,000	4,935,359,000	4,837,923,251	102,494,298	4,735,428,953	1423.92	199,930,047
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	7,109,532,000	6,799,905,000	6,717,092,360	3,979,252	6,713,113,108	1464.89	86,791,892
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	11,419,418,000	18,233,984,000	14,921,921,417	300,209,873	14,621,711,544	1439.43	3,612,272,456
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	43,561,432,000	968,039,600,000	793,524,967,932	2,662,324,896	790,862,643,036	81.972	177,176,956,964
WA	Program Dukungan Manajemen							
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1,981,121,000	2,228,948,000	2,202,359,420	571,900	2,201,787,520	1310.31	27,160,480
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1,100,000,000	1,017,500,000	1,016,696,514	0	1,016,696,514	99.92	803,486
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Spesial Mission)	850,000,000	786,250,000	786,008,878	0	786,008,878	99.97	241,122
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	121,495,430,000	121,375,430,000	120,946,303,932	68,000,000	120,878,303,932	99.59	497,126,068
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	200,000,000	185,000,000	181,497,450	0	181,497,450	98.11	3,502,550
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7,678,635,000	7,142,842,000	6,988,299,194	9,372,614	6,978,926,580	1514.22	163,915,420
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	532,392,839,000	528,308,127,000	507,993,275,020	410,037,417	507,583,237,603	1535.78	20,724,889,397
4844	Legislasi dan Litigasi	550,831,000	500,525,000	498,655,867	0	498,655,867	99.63	1,869,133

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	666,248,856,000	661,544,622,000	640,613,096,275	487,981,931	640,125,114,344	96.836	21,419,507,656
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	709,810,288,000	1,629,584,222,000	1,434,138,064,207	3,150,306,827	1,430,987,757,380	88.006	198,596,464,620
04	PNBP							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	7,058,086,000	9,973,862,000	9,490,324,557	0	9,490,324,557	95.15	483,537,443
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	1,333,610,000	3,310,984,000	3,276,753,578	4,460,400	3,272,293,178	98.83	38,690,822
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	2,312,211,000	3,050,240,000	3,024,880,229	193,600	3,024,686,629	99.16	25,553,371
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	10,703,907,000	16,335,086,000	15,791,958,364	4,654,000	15,787,304,364	96.675	547,781,636
WA	Program Dukungan Manajemen							
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,646,429,000	3,999,734,000	3,985,274,678	0	3,985,274,678	199.48	14,459,322
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,646,429,000	3,999,734,000	3,985,274,678	0	3,985,274,678	99.638	14,459,322
	JUMLAH BELANJA PNBP	13,350,336,000	20,334,820,000	19,777,233,042	4,654,000	19,772,579,042	97.258	562,240,958
20	SBSN							
WA	Program Dukungan Manajemen							
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	60,604,570,000	60,604,570,000	49,354,248,501	12,828,122	49,341,420,379	81.42	11,263,149,621
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	60,604,570,000	60,604,570,000	49,354,248,501	12,828,122	49,341,420,379	81.437	11,263,149,621
	JUMLAH BELANJA SBSN	60,604,570,000	60,604,570,000	49,354,248,501	12,828,122	49,341,420,379	81.437	11,263,149,621
	JUMLAH	783,765,194,000	1,710,523,612,000	1,503,269,545,750	3,167,788,949	1,500,101,756,801	87.88	210,421,855,199

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 09/05/25 7:40 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfpk_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	1,400,000,000	1,295,000,000	1,287,859,376	0	1,287,859,376	99.45	7,140,624
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	15,216,172,000	1,865,193,908,000	1,522,367,706,758	4,419,157,562	1,517,948,549,196	81.38	347,245,358,804
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	18,269,020,000	21,621,968,000	21,416,136,462	55,887,404	21,360,249,058	98.79	261,718,942
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	10,657,522,000	12,046,250,000	11,963,366,988	44,756,614	11,918,610,374	98.94	127,639,626
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	4,575,000,000	4,326,875,000	4,322,454,476	394,683	4,322,059,793	99.89	4,815,207
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	8,390,032,000	4,935,359,000	4,837,923,251	102,494,298	4,735,428,953	95.95	199,930,047
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	7,109,532,000	6,799,905,000	6,717,092,360	3,979,252	6,713,113,108	98.72	86,791,892
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	11,419,418,000	18,233,984,000	14,921,921,417	300,209,873	14,621,711,544	80.19	3,612,272,456
	JUMLAH PROGRAM Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	77,036,696,000	1,934,453,249,000	1,587,834,461,088	4,926,879,686	1,582,907,581,402	82.08	351,545,667,598
WA	Program Dukungan Manajemen							
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	3,962,242,000	4,457,896,000	4,404,718,840	1,143,800	4,403,575,040	98.78	54,320,960
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	2,200,000,000	2,035,000,000	2,033,393,028	0	2,033,393,028	99.92	1,606,972
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	1,700,000,000	1,572,500,000	1,572,017,756	0	1,572,017,756	99.97	482,244
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	242,990,860,000	242,750,860,000	241,892,607,864	136,000,000	241,756,607,864	99.59	994,252,136
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	400,000,000	370,000,000	362,994,900	0	362,994,900	98.11	7,005,100
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7,678,635,000	7,142,842,000	6,988,299,194	9,372,614	6,978,926,580	97.71	163,915,420
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	595,643,838,000	592,912,431,000	561,332,798,199	422,865,539	560,909,932,660	94.6	32,002,498,340
4844	Legislasi dan Litigasi	550,831,000	500,525,000	498,655,867	0	498,655,867	99.63	1,869,133
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	855,126,406,000	851,742,054,000	819,085,485,648	569,381,953	818,516,103,695	96.17	33,225,950,305
	JUMLAH SUBFUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	932,163,102,000	2,786,195,303,000	2,406,919,946,736	5,496,261,639	2,401,423,685,097	86.39	384,771,617,903
	JUMLAH FUNGSI PELAYANAN UMUM	932,163,102,000	2,786,195,303,000	2,406,919,946,736	5,496,261,639	2,401,423,685,097	86.39	384,771,617,903

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
088010100KD	kanreg V BKN							
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	11,962,460,000	22,617,726,000	20,942,790,560	534,447,408	20,408,343,152	90.23	2,209,382,848
	JUMLAH BELANJA kanreg V BKN	11,962,460,000	22,617,726,000	20,942,790,560	534,447,408	20,408,343,152	92.59	2,209,382,848
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA							
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	572,393,714,000	1,343,413,971,000	1,174,527,911,377	1,348,163,880	1,173,179,747,497	87.33	170,234,223,503
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	572,393,714,000	1,343,413,971,000	1,174,527,911,377	1,348,163,880	1,173,179,747,497	87.43	170,234,223,503
088010200KD	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT							
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	16,154,432,000	26,233,601,000	22,103,136,444	9,832,769	22,093,303,675	84.22	4,140,297,325
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	16,154,432,000	26,233,601,000	22,103,136,444	9,832,769	22,093,303,675	84.26	4,140,297,325
088010400KD	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA							
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	16,968,778,000	31,213,824,000	31,022,929,677	3,369,827	31,019,559,850	99.38	194,264,150
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	16,968,778,000	31,213,824,000	31,022,929,677	3,369,827	31,019,559,850	99.39	194,264,150
088010500KD	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR							
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	13,665,161,000	26,274,012,000	25,766,883,141	2,164,231	25,764,718,910	98.06	509,293,090
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	13,665,161,000	26,274,012,000	25,766,883,141	2,164,231	25,764,718,910	98.07	509,293,090
088010600KD	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	9,958,719,000	13,487,789,000	10,967,959,810	2,554,906	10,965,404,904	81.3	2,522,384,096
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	9,958,719,000	13,487,789,000	10,967,959,810	2,554,906	10,965,404,904	81.32	2,522,384,096
088010700KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA							
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	13,454,430,000	21,165,895,000	19,556,954,397	7,384,093	19,549,570,304	92.36	1,616,324,696
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	13,454,430,000	21,165,895,000	19,556,954,397	7,384,093	19,549,570,304	92.4	1,616,324,696
088010900KD	BA(088) ES1(01) RIAU							
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	14,682,611,000	27,554,607,000	23,932,921,434	2,183,407	23,930,738,027	86.85	3,623,868,973
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) RIAU	14,682,611,000	27,554,607,000	23,932,921,434	2,183,407	23,930,738,027	86.86	3,623,868,973
088011100KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	14,738,808,000	29,138,596,000	24,621,151,137	9,060,810	24,612,090,327	84.47	4,526,505,673
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	14,738,808,000	29,138,596,000	24,621,151,137	9,060,810	24,612,090,327	84.5	4,526,505,673
088011500KD	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	14,277,716,000	26,614,384,000	25,873,895,377	86,165,738	25,787,729,639	96.89	826,654,361
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	14,277,716,000	26,614,384,000	25,873,895,377	86,165,738	25,787,729,639	97.22	826,654,361
088011700KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
667896	KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	11,505,818,000	18,110,749,000	17,068,762,267	704,038,740	16,364,723,527	90.36	1,746,025,473
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	11,505,818,000	18,110,749,000	17,068,762,267	704,038,740	16,364,723,527	94.25	1,746,025,473
088011900KD	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
560635	KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	18,773,542,000	38,984,972,000	32,940,146,740	115,790,020	32,824,356,720	84.2	6,160,615,280
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	18,773,542,000	38,984,972,000	32,940,146,740	115,790,020	32,824,356,720	84.49	6,160,615,280
088012200KD	BA(088) ES1(01) BALI							
667882	KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	13,025,818,000	27,514,001,000	24,622,760,579	22,406,161	24,600,354,418	89.41	2,913,646,582
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) BALI	13,025,818,000	27,514,001,000	24,622,760,579	22,406,161	24,600,354,418	89.49	2,913,646,582
088012500KD	BA(088) ES1(01) PAPUA							
622390	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	12,225,192,000	22,188,971,000	16,124,340,576	131,394,609	15,992,945,967	72.08	6,196,025,033
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA	12,225,192,000	22,188,971,000	16,124,340,576	131,394,609	15,992,945,967	72.67	6,196,025,033
088013300KD	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT							
667652	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	9,564,979,000	14,804,269,000	12,690,398,465	63,601,340	12,626,797,125	85.29	2,177,471,875
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	9,564,979,000	14,804,269,000	12,690,398,465	63,601,340	12,626,797,125	85.72	2,177,471,875
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
020505	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	20,413,016,000	21,206,245,000	20,506,603,769	125,231,010	20,381,372,759	96.11	824,872,241
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	20,413,016,000	21,206,245,000	20,506,603,769	125,231,010	20,381,372,759	96.7	824,872,241
	JUMLAH BELANJA 01	783,765,194,000	1,710,523,612,000	1,503,269,545,750	3,167,788,949	1,500,101,756,801	87.88	210421855199
	JUMLAH BELANJA	783,765,194,000	1,710,523,612,000	1,503,269,545,750	3,167,788,949	1,500,101,756,801	87.88	210,421,855,199

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	114,795,541,000	120,255,881,000	116,702,248,450	13,574,070	116,688,674,380	97.04	3,567,206,620
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,339,000	2,609,000	1,763,654	79,286	1,684,368	67.6	924,632
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,465,672,000	7,826,257,000	7,402,214,220	6,754,800	7,395,459,420	94.58	430,797,580
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,968,876,000	2,251,027,000	1,970,264,720	5,892	1,970,258,828	87.53	280,768,172
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,847,133,000	4,603,272,000	4,261,745,000	23,158,072	4,238,586,928	92.58	364,685,072
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,794,155,000	16,874,047,000	15,002,313,000	52,927,339	14,949,385,661	88.91	1,924,661,339
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	427,414,000	2,299,878,000	1,466,073,801	0	1,466,073,801	63.75	833,804,199
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,824,720,000	6,208,507,000	5,630,452,180	362,100	5,630,090,080	90.69	578,416,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	21,965,807,000	17,936,515,000	15,665,228,000	1,650,550	15,663,577,450	87.34	2,272,937,550
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	726,000,000	713,460,000	695,100,000	0	695,100,000	97.43	18,360,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,927,167,000	1,904,158,000	1,655,305,000	19,416,800	1,635,888,200	86.93	268,269,800
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,489,589,000	5,537,645,000	5,193,129,200	2,788,178	5,190,341,022	93.78	347,303,978
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	378,000	386,000	105,364	762	104,602	27.3	281,398
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	797,538,000	842,163,000	295,597,680	285,880	295,311,800	35.1	546,851,200
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	363,476,000	366,580,000	64,575,960	57,176	64,518,784	17.62	302,061,216
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,448,865,000	1,596,453,000	712,418,000	350,000	712,068,000	44.63	884,385,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	747,491,000	834,872,000	277,947,960	217,260	277,730,700	33.29	557,141,300
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,935,540,000	1,499,117,000	924,866,000	0	924,866,000	61.69	574,251,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	3,825,000	3,825,000	0	3,825,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	51,548,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,656,238,000	3,572,582,000	2,451,916,000	1,152,450	2,450,763,550	68.63	1,121,818,450
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	156,600,000	92,933,000	56,396,000	0	56,396,000	60.68	36,537,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	201,347,238,000	189,647,238,000	187,962,206,145	0	187,962,206,145	99.11	1,685,031,855
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,724,427,000	6,569,347,000	5,844,792,732	0	5,844,792,732	88.97	724,554,268
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	397,463,752,000	391,463,752,000	374,240,484,066	122,780,615	374,117,703,451	95.6	17,346,048,549
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	53,893,324,000	96,338,427,000	86,894,132,007	2,294,558	86,891,837,449	90.2	9,446,589,551
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	723,200,000	687,173,000	684,717,268	0	684,717,268	99.64	2,455,732
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,021,700,000	313,091,000	275,039,396	0	275,039,396	87.85	38,051,604
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,032,000,000	1,897,508,000	1,781,526,300	45,248,700	1,736,277,600	93.89	161,230,400
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	780,172,000	871,382,000	776,929,846	704,000	776,225,846	89.16	95,156,154
521211	Belanja Bahan	9,069,112,000	36,219,531,000	26,908,561,285	10,855,200	26,897,706,085	74.29	9,321,824,915
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,073,962,000	35,926,995,000	23,875,068,400	12,667,500	23,862,400,900	66.45	12,064,594,100
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,650,437,000	2,032,015,000	1,991,457,900	6,760,000	1,984,697,900	98	47,317,100
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	398,518,000	2,245,122,000	2,130,748,489	0	2,130,748,489	94.91	114,373,511
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	24,095,000	24,094,326	0	24,094,326	100	674
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	12,000,000	1,665,000	1,665,000	0	1,665,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,588,715,000	6,331,082,000	6,278,547,252	0	6,278,547,252	99.17	52,534,748

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	52,200,000	73,590,000	70,385,500	0	70,385,500	95.65	3,204,500
522111	Belanja Langganan Listrik	18,626,164,000	18,930,390,000	18,660,398,574	100,001	18,660,298,573	98.57	270,091,427
522112	Belanja Langganan Telepon	617,024,000	535,552,000	505,961,390	0	505,961,390	94.47	29,590,610
522113	Belanja Langganan Air	556,260,000	415,499,000	375,136,186	0	375,136,186	90.29	40,362,814
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,386,842,000	4,450,821,000	4,399,655,300	0	4,399,655,300	98.85	51,165,700
522141	Belanja Sewa	11,233,390,000	87,487,881,000	68,181,462,268	34,759,913	68,146,702,355	77.93	19,341,178,645
522151	Belanja Jasa Profesi	2,120,600,000	1,605,448,000	1,496,900,000	3,620,000	1,493,280,000	93.24	112,168,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,452,488,000	642,821,812,000	544,295,047,846	0	544,295,047,846	84.67	98,526,764,154
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,992,366,000	10,192,459,000	9,332,799,112	47,744,243	9,285,054,869	91.57	907,404,131
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	537,603,000	511,563,000	490,127,695	0	490,127,695	95.81	21,435,305
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	91,200,000	91,200,000	90,282,731	0	90,282,731	98.99	917,269
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	913,214,000	797,463,000	737,399,042	0	737,399,042	92.47	60,063,958
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,604,266,000	12,529,785,000	12,045,934,928	72,307,800	11,973,627,128	96.14	556,157,872
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299,576,000	200,480,000	173,460,549	0	173,460,549	86.52	27,019,451
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	148,423,000	148,412,550	5,011,476	143,401,074	99.99	5,021,926
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	0	0	0	0	0	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	32,508,000	40,008,000	27,281,978	0	27,281,978	68.19	12,726,022
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	4,000,000	0	0	0	0	0	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,667,538,000	1,085,364,000	937,433,688	0	937,433,688	86.37	147,930,312
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,992,145,000	118,939,009,000	95,374,641,129	2,090,392,154	93,284,248,975	80.19	25,654,760,025
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840,470,000	15,871,213,000	14,790,021,439	329,938,119	14,460,083,320	93.19	1,411,129,680
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,264,208,000	8,858,308,000	7,090,163,200	6,680,000	7,083,483,200	80.04	1,774,824,800
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,084,436,000	10,813,890,000	10,506,087,053	289,465,274	10,216,621,779	97.15	597,268,221
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	168,801,000	381,940,000	381,938,795	0	381,938,795	100	1,205
	JUMLAH BELANJA BARANG	193,785,439,000	1,119,685,184,000	941,748,418,422	2,958,548,938	938,789,869,484	84.11	180,895,314,516
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,019,918,000	98,016,264,000	97,802,484,362	3,813,600	97,798,670,762	99.78	217,593,238
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,435,000,000	1,984,300,000	1,984,248,920	0	1,984,248,920	100	51,080
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	426,540,000	339,998,000	308,390,293	0	308,390,293	90.7	31,607,707
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,414,279,000	4,110,286,000	4,083,306,400	65,163,674	4,018,142,726	99.34	92,143,274
536111	Belanja Modal Lainnya	22,015,360,000	12,853,309,000	12,846,735,300	0	12,846,735,300	99.95	6,573,700
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,250,000,000	1,131,129,000	1,123,996,444	0	1,123,996,444	99.37	7,132,556
	JUMLAH BELANJA MODAL	118,561,097,000	118,435,286,000	118,149,161,719	68,977,274	118,080,184,445	99.76	355,101,555
	JUMLAH RUPIAH MURNI	709,810,288,000	1,629,584,222,000	1,434,138,064,207	3,150,306,827	1,430,987,757,380	88.01	198,596,464,620
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	200,000,000	28,006,000	28,002,920	0	28,002,920	99.99	3,080
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	28,296,000	28,296,000	28,296,000	0	28,296,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	2,214,994,000	4,269,977,000	3,916,498,053	0	3,916,498,053	91.72	353,478,947
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,713,720,000	1,834,044,000	1,766,524,000	0	1,766,524,000	96.32	67,520,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100,000,000	108,550,000	108,535,720	0	108,535,720	99.99	14,280
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	136,155,000	134,586,239	0	134,586,239	98.85	1,568,761
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	105,000,000	142,976,000	142,971,500	0	142,971,500	100	4,500
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	3,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
522111	Belanja Langganan Listrik	0	112,896,000	112,895,705	0	112,895,705	100	295
522131	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	0	0	0	0	0	0
522141	Belanja Sewa	2,241,561,000	3,547,759,000	3,529,011,015	0	3,529,011,015	99.47	18,747,985
522151	Belanja Jasa Profesi	719,700,000	945,500,000	942,200,000	0	942,200,000	99.65	3,300,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	450,000,000	135,813,000	135,812,500	0	135,812,500	100	500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	497,000,000	191,708,000	189,810,000	0	189,810,000	99.01	1,898,000
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	198,000,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,454,892,000	3,045,956,000	3,007,629,132	4,444,000	3,003,185,132	98.74	42,770,868
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,280,000	189,375,000	189,327,000	210,000	189,117,000	99.97	258,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	244,950,000	1,231,848,000	1,193,437,000	0	1,193,437,000	96.88	38,411,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	450,514,000	335,272,000	315,466,773	0	315,466,773	94.09	19,805,227
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	49,955,000	49,954,807	0	49,954,807	100	193
	JUMLAH BELANJA BARANG	10,703,907,000	16,335,086,000	15,791,958,364	4,654,000	15,787,304,364	96.68	547,781,636
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,734,429,000	2,686,107,000	2,680,724,496	0	2,680,724,496	99.8	5,382,504
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	261,556,000	253,077,975	0	253,077,975	96.76	8,478,025
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	118,235,000	118,234,814	0	118,234,814	100	186
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	912,000,000	913,836,000	913,304,393	0	913,304,393	99.94	531,607
536111	Belanja Modal Lainnya	0	20,000,000	19,933,000	0	19,933,000	99.67	67,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,646,429,000	3,999,734,000	3,985,274,678	0	3,985,274,678	99.64	14,459,322
	JUMLAH PNPB	13,350,336,000	20,334,820,000	19,777,233,042	4,654,000	19,772,579,042	97.26	562,240,958
20	SBSN							
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	8,281,639,000	7,403,497,600	0	7,403,497,600	89.4	878,141,400
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60,604,570,000	52,322,931,000	41,950,750,901	12,828,122	41,937,922,779	80.18	10,385,008,221
	JUMLAH BELANJA MODAL	60,604,570,000	60,604,570,000	49,354,248,501	12,828,122	49,341,420,379	81.44	11,263,149,621
	JUMLAH SBSN	60,604,570,000	60,604,570,000	49,354,248,501	12,828,122	49,341,420,379	81.44	11,263,149,621
	TOTAL	783,765,194,000	1,710,523,612,000	1,503,269,545,750	3,167,788,949	1,500,101,756,801	87.88	210,421,855,199

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	114,795,541,000	120,255,881,000	116,702,248,450	13,574,070	116,688,674,380	97.04	3,567,206,620
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,339,000	2,609,000	1,763,654	79,286	1,684,368	67.6	924,632
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,465,672,000	7,826,257,000	7,402,214,220	6,754,800	7,395,459,420	94.58	430,797,580
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,968,876,000	2,251,027,000	1,970,264,720	5,892	1,970,258,828	87.53	280,768,172
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,847,133,000	4,603,272,000	4,261,745,000	23,158,072	4,238,586,928	92.58	364,685,072
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,794,155,000	16,874,047,000	15,002,313,000	52,927,339	14,949,385,661	88.91	1,924,661,339
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	427,414,000	2,299,878,000	1,466,073,801	0	1,466,073,801	63.75	833,804,199
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,824,720,000	6,208,507,000	5,630,452,180	362,100	5,630,090,080	90.69	578,416,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	21,965,807,000	17,936,515,000	15,665,228,000	1,650,550	15,663,577,450	87.34	2,272,937,550
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	726,000,000	713,460,000	695,100,000	0	695,100,000	97.43	18,360,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,927,167,000	1,904,158,000	1,655,305,000	19,416,800	1,635,888,200	86.93	268,269,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	175,744,824,000	180,875,611,000	170,452,708,025	117,928,909	170,334,779,116	94.24	10,540,831,884
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,489,589,000	5,537,645,000	5,193,129,200	2,788,178	5,190,341,022	93.78	347,303,978
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	378,000	386,000	105,364	762	104,602	27.3	281,398
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	797,538,000	842,163,000	295,597,680	285,880	295,311,800	35.1	546,851,200
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	363,476,000	366,580,000	64,575,960	57,176	64,518,784	17.62	302,061,216
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,448,865,000	1,596,453,000	712,418,000	350,000	712,068,000	44.63	884,385,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	747,491,000	834,872,000	277,947,960	217,260	277,730,700	33.29	557,141,300
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,935,540,000	1,499,117,000	924,866,000	0	924,866,000	61.69	574,251,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	3,825,000	3,825,000	0	3,825,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	51,548,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	10,834,425,000	10,706,041,000	7,472,465,164	3,699,256	7,468,765,908	69.8	3,237,275,092
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,656,238,000	3,572,582,000	2,451,916,000	1,152,450	2,450,763,550	68.63	1,121,818,450
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	156,600,000	92,933,000	56,396,000	0	56,396,000	60.68	36,537,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,812,838,000	3,665,515,000	2,508,312,000	1,152,450	2,507,159,550	68.43	1,158,355,450
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	201,347,238,000	189,647,238,000	187,962,206,145	0	187,962,206,145	99.11	1,685,031,855
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,724,427,000	6,569,347,000	5,844,792,732	0	5,844,792,732	88.97	724,554,268
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	209,071,665,000	196,216,585,000	193,806,998,877	0	193,806,998,877	98.77	2,409,586,123
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	397,463,752,000	391,463,752,000	374,240,484,066	122,780,615	374,117,703,451	95.6	17,346,048,549
52	BELANJA BARANG							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	54,093,324,000	96,366,433,000	86,922,134,927	2,294,558	86,919,840,369	90.2	9,446,592,631
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	723,200,000	687,173,000	684,717,268	0	684,717,268	99.64	2,455,732
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,021,700,000	313,091,000	275,039,396	0	275,039,396	87.85	38,051,604
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,060,296,000	1,925,804,000	1,809,822,300	45,248,700	1,764,573,600	93.98	161,230,400
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	780,172,000	871,382,000	776,929,846	704,000	776,225,846	89.16	95,156,154
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	58,678,692,000	100,163,883,000	90,468,643,737	48,247,258	90,420,396,479	90.32	9,743,486,521
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	11,284,106,000	40,489,508,000	30,825,059,338	10,855,200	30,814,204,138	76.13	9,675,303,862
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,787,682,000	37,761,039,000	25,641,592,400	12,667,500	25,628,924,900	67.9	12,132,114,100
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,750,437,000	2,140,565,000	2,099,993,620	6,760,000	2,093,233,620	98.1	47,331,380
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	398,518,000	2,381,277,000	2,265,334,728	0	2,265,334,728	95.13	115,942,272
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	24,095,000	24,094,326	0	24,094,326	100	674
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	12,000,000	1,665,000	1,665,000	0	1,665,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	17,232,743,000	82,798,149,000	60,857,739,412	30,282,700	60,827,456,712	73.5	21,970,692,288
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,693,715,000	6,474,058,000	6,421,518,752	0	6,421,518,752	99.19	52,539,248
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	55,200,000	74,590,000	71,385,500	0	71,385,500	95.7	3,204,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,748,915,000	6,548,648,000	6,492,904,252	0	6,492,904,252	99.15	55,743,748
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	18,626,164,000	19,043,286,000	18,773,294,279	100,001	18,773,194,278	98.58	270,091,722
522112	Belanja Langganan Telepon	617,024,000	535,552,000	505,961,390	0	505,961,390	94.47	29,590,610
522113	Belanja Langganan Air	556,260,000	415,499,000	375,136,186	0	375,136,186	90.29	40,362,814
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,436,842,000	4,450,821,000	4,399,655,300	0	4,399,655,300	98.85	51,165,700
522141	Belanja Sewa	13,474,951,000	91,035,640,000	71,710,473,283	34,759,913	71,675,713,370	78.77	19,359,926,630
522151	Belanja Jasa Profesi	2,840,300,000	2,550,948,000	2,439,100,000	3,620,000	2,435,480,000	95.62	115,468,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,902,488,000	642,957,625,000	544,430,860,346	0	544,430,860,346	84.68	98,526,764,654
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	46,454,029,000	760,989,371,000	642,634,480,784	38,479,914	642,596,000,870	84.45	118,393,370,130
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,992,366,000	10,192,459,000	9,332,799,112	47,744,243	9,285,054,869	91.57	907,404,131
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	537,603,000	511,563,000	490,127,695	0	490,127,695	95.81	21,435,305
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	91,200,000	91,200,000	90,282,731	0	90,282,731	98.99	917,269
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	913,214,000	797,463,000	737,399,042	0	737,399,042	92.47	60,063,958
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,101,266,000	12,721,493,000	12,235,744,928	72,307,800	12,163,437,128	96.18	558,055,872
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299,576,000	200,480,000	173,460,549	0	173,460,549	86.52	27,019,451

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 7:40 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	198,000,000	148,423,000	148,412,550	5,011,476	143,401,074	99.99	5,021,926
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	0	0	0	0		0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	32,508,000	40,008,000	27,281,978	0	27,281,978	68.19	12,726,022
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	4,000,000	0	0	0	0		0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,667,538,000	1,085,364,000	937,433,688	0	937,433,688	86.37	147,930,312
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	27,842,271,000	25,803,453,000	24,187,942,273	125,063,519	24,062,878,754	93.74	1,740,574,246
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,447,037,000	121,984,965,000	98,382,270,261	2,094,836,154	96,287,434,107	80.65	25,697,530,893
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	872,750,000	16,060,588,000	14,979,348,439	330,148,119	14,649,200,320	93.27	1,411,387,680
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,509,158,000	10,090,156,000	8,283,600,200	6,680,000	8,276,920,200	82.1	1,813,235,800
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,534,950,000	11,149,162,000	10,821,553,826	289,465,274	10,532,088,552	97.06	617,073,448
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	46,363,895,000	159,284,871,000	132,466,772,726	2,721,129,547	129,745,643,179	83.16	29,539,227,821
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	168,801,000	431,895,000	431,893,602	0	431,893,602	100	1,398
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	168,801,000	431,895,000	431,893,602	0	431,893,602	100	1,398
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	204,489,346,000	1,136,020,270,000	957,540,376,786	2,963,202,938	954,577,173,848	84.29	181,443,096,152
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88,754,347,000	108,984,010,000	107,886,706,458	3,813,600	107,882,892,858	98.99	1,101,117,142
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,435,000,000	2,245,856,000	2,237,326,895	0	2,237,326,895	99.62	8,529,105
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	91,189,347,000	111,229,866,000	110,124,033,353	3,813,600	110,120,219,753	99.01	1,109,646,247
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61,031,110,000	52,781,164,000	42,377,376,008	12,828,122	42,364,547,886	80.29	10,416,616,114
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,326,279,000	5,024,122,000	4,996,610,793	65,163,674	4,931,447,119	99.45	92,674,881
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	67,357,389,000	57,805,286,000	47,373,986,801	77,991,796	47,295,995,005	81.95	10,509,290,995
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	22,015,360,000	12,873,309,000	12,866,668,300	0	12,866,668,300	99.95	6,640,700
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,250,000,000	1,131,129,000	1,123,996,444	0	1,123,996,444	99.37	7,132,556
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	23,265,360,000	14,004,438,000	13,990,664,744	0	13,990,664,744	99.9	13,773,256
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	181,812,096,000	183,039,590,000	171,488,684,898	81,805,396	171,406,879,502	93.69	11,632,710,498
	JUMLAH BELANJA	783,765,194,000	1,710,523,612,000	1,503,269,545,750	3,167,788,949	1,500,101,756,801	87.88	210,421,855,199

LAMPIRAN II

Neraca

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak 09/05/25 7:39 AM

Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,270,300	4,587,816	4,682,484	102.06
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	33,980,518,810	131,199,742	33,849,319,068	25,799.84
Piutang Bukan Pajak	6,233,799,930	2,747,393,181	3,486,406,749	126.90
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(31,169,000)	(13,736,966)	(17,432,034)	126.90
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	6,202,630,930	2,733,656,215	3,468,974,715	126.90
Persediaan	6,343,765,576	7,106,175,160	(762,409,584)	(10.73)
JUMLAH ASET LANCAR	46,536,185,616	9,975,618,933	36,560,566,683	366.50
ASET TETAP				
Tanah	2,331,580,054,368	2,330,666,524,668	913,529,700	0.04
Peralatan dan Mesin	768,036,979,101	704,398,035,892	63,638,943,209	9.03
Gedung dan Bangunan	896,194,810,778	868,849,348,970	27,345,461,808	3.15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,637,574,940	24,716,999,940	(79,425,000)	(0.32)
Aset Tetap Lainnya	13,675,359,416	13,874,987,099	(199,627,683)	(1.44)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19,621,605,525	168,877,064	19,452,728,461	11,518.87
AKUMULASI PENYUSUTAN	(800,744,594,530)	(746,282,602,430)	(54,461,992,100)	7.30
JUMLAH ASET TETAP	3,253,001,789,598	3,196,392,171,203	56,609,618,395	1.77
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	59,620,529,497	125,741,319,487	(66,120,789,990)	(52.58)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	311,639,851,974	21,071,862,270	290,567,989,704	1,378.94
Aset Lain-lain	20,550,730,766	21,362,783,827	(812,053,061)	(3.80)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(69,672,001,938)	(145,268,566,532)	75,596,564,594	(52.04)
JUMLAH ASET LAINNYA	322,139,110,299	22,907,399,052	299,231,711,247	1,306.27
JUMLAH ASET	3,621,677,085,513	3,229,275,189,188	392,401,896,325	12.15
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	313,598,678,284	19,629,558,217	293,969,120,067	1,497.58
Pendapatan Diterima Dimuka	1,033,351,816	1,091,528,298	(58,176,482)	(5.33)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	4,236,316	(4,236,316)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	314,632,030,100	20,725,322,831	293,906,707,269	1,418.10
JUMLAH KEWAJIBAN	314,632,030,100	20,725,322,831	293,906,707,269	1,418.10
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,307,045,055,413	3,208,549,866,357	98,495,189,056	3.07
JUMLAH EKUITAS	3,307,045,055,413	3,208,549,866,357	98,495,189,056	3.07
JUMLAH EKUITAS	3,307,045,055,413	3,208,549,866,357	98,495,189,056	3.07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,621,677,085,513	3,229,275,189,188	392,401,896,325	12.15

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data 09/05/25 2:10 AM
Tgl Cetak 09/05/25 7:39 AM
Halaman 2
lap_neraca_kl_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

LAMPIRAN III

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM

Halaman : 1

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,538,699,954	23,670,868,321	15,867,831,633	67.035
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	39,538,699,954	23,670,868,321	15,867,831,633	67.035
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	39,538,699,954	23,670,868,321	15,867,831,633	67.035
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	373,703,136,554	345,122,172,386	28,580,964,168	8.281
Beban Persediaan	6,596,632,606	7,953,984,101	(1,357,351,495)	(17.065)
Beban Barang dan Jasa	758,833,704,817	436,964,717,186	321,868,987,631	73.66
Beban Pemeliharaan	24,043,517,036	27,841,739,788	(3,798,222,752)	(13.642)
Beban Perjalanan Dinas	130,157,147,903	104,054,816,105	26,102,331,798	25.085
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM

Halaman : 2

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	106,420,894,744	78,060,519,188	28,360,375,556	36.331
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	17,432,034	13,703,211	3,728,823	27.211
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,399,772,465,694	1,000,011,651,965	399,760,813,729	39.976
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,360,233,765,740)	(976,340,783,644)	(383,892,982,096)	39.32
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(522,246,218)	547,206,678	(1,069,452,896)	(195.439)
Pendapatan Pelepasan Aset	436,080,789	568,247,120	(132,166,331)	(23.259)
Beban Pelepasan Aset	958,327,007	21,040,442	937,286,565	4,454.69
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22,171,064	688,636,238	(666,465,174)	(96.78)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	183,628,968	1,227,446,601	(1,043,817,633)	(85.04)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	161,457,904	538,810,363	(377,352,459)	(70.034)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(500,075,154)	1,235,842,916	(1,735,918,070)	(140.464)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,360,733,840,894)	(975,104,940,728)	(385,628,900,166)	39.547
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,360,733,840,894)	(975,104,940,728)	(385,628,900,166)	39.547

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN IV

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM
Halaman : 1
lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,208,549,866,357	3,173,325,597,443	35,224,268,914	1.11
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,360,733,840,894)	(975,104,940,728)	(385,628,900,166)	39.55
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,771,756,201)	(3,488,126,484)	1,716,370,283	(49.21)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,678,100	0	1,678,100	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,770,314,301)	(4,209,626,661)	2,439,312,360	(57.95)
LAIN-LAIN	(3,120,000)	721,500,177	(724,620,177)	(100.43)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,461,000,786,151	1,013,817,336,126	447,183,450,025	44.11
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	98,495,189,056	35,224,268,914	63,270,920,142	179.62
EKUITAS AKHIR	3,307,045,055,413	3,208,549,866,357	98,495,189,056	3.07

Keterangan :
FINAL

LAMPIRAN V

Neraca Percobaan

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 09/05/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,587,816	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	131,199,742	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,747,393,181	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	13,736,966
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,722,383,660	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	383,791,500	0
0.0	131111	Tanah	2,330,666,524,668	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	704,398,035,892	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	868,849,348,970	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800	0
0.0	134112	Irigasi	2,980,446,163	0
0.0	134113	Jaringan	5,267,586,977	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	12,060,376,974	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,814,610,125	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,877,064	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	561,012,680,230
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	165,721,828,073
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	15,831,346,575
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	788,035,767
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,325,752,656
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	602,959,129
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	125,545,819,487	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	21,071,862,270	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,612,040,702	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5,750,743,125	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	15,497,962,040
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	64,279
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	124,209,997,088
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	5,560,543,125
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	93,499,510
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,583,902,578
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	17,952,156,129
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,091,528,298
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	4,236,316
0.0	391111	Ekuitas	0	3,208,549,866,357
JUMLAH			4,120,840,095,116	4,120,840,095,116

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,500,101,756,801
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	41,462,195,556	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	213,519,900
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	222,560,889
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	862,513,892
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	465,900,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	864,700,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	4,499,616,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	29,691,163,500
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,638,455,177
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	338,676,146
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	2,371,937,319
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	257,408,262
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	35,744,471
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	116,702,248,450	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	13,574,070
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,763,654	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	79,286
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	6,754,800
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,402,214,220	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,970,264,720	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	5,892
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,261,745,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	23,158,072
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,002,313,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	52,927,339
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,466,073,801	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	362,100
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,630,452,180	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	1,650,550
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	15,665,228,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	695,100,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	19,416,800
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,655,305,000	0
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	2,788,178
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,193,129,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	105,364	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	762

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	285,880
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	295,597,680	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	64,575,960	0
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	57,176
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	712,418,000	0
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	350,000
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	277,947,960	0
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	217,260
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	924,866,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	3,825,000	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	1,152,450
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	2,451,916,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	56,396,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	187,962,206,145	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	5,844,792,732	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	2,294,558
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	86,922,134,927	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	684,717,268	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	275,039,396	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,809,822,300	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	45,248,700
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	776,929,846	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	704,000
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	10,855,200
3.0	521211	Belanja Bahan	30,825,059,338	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	25,641,592,400	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	12,667,500
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	6,760,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,099,993,620	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,265,334,728	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,094,326	0
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	1,665,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,421,518,752	0
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	71,385,500	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	100,001
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	18,773,294,279	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	505,961,390	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	375,136,186	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	4,399,655,300	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	34,759,913
3.0	522141	Belanja Sewa	71,710,473,283	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,439,100,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	3,620,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	544,430,860,346	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,332,799,112	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	47,744,243
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	490,127,695	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	90,282,731	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	737,399,042	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,235,744,928	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	72,307,800
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	173,460,549	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	0
3.1	523131	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	5,011,476
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	148,412,550	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	27,281,978	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	937,433,688	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,094,836,154
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98,382,270,261	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	330,148,119
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,979,348,439	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	6,680,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,283,600,200	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	289,465,274
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,821,553,826	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	431,893,602	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3,813,600
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107,886,706,458	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,237,326,895	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	12,828,122
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42,377,376,008	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	65,163,674
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,996,610,793	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	12,866,668,300	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	1,123,996,444	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

JUMLAH	1,544,731,741,306	1,544,731,741,306
--------	-------------------	-------------------

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9,270,300	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	33,980,518,810	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	6,233,799,930	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	31,169,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,036,557,346	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	307,208,230	0
0.0	131111	Tanah	2,331,580,054,368	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	768,036,979,101	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	896,194,810,778	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800	0
0.0	134112	Irigasi	2,934,621,163	0
0.0	134113	Jaringan	5,233,986,977	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	12,089,820,513	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,585,538,903	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	19,621,605,525	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	587,961,924,338
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	192,573,355,342
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	16,260,541,380
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	877,968,085
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,407,560,422
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	663,244,963
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	57,301,344,197	0
0.0	162161	Lisensi	2,024,640,000	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	294,045,300	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	311,639,851,974	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	18,650,632,641	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,900,098,125	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	17,803,040,854
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	71,421
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	49,867,559,538
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	101,232,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	1,900,098,125
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	108,794,949
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,826,222,943
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	311,663,660,392
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,033,351,816
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,500,101,756,801

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	41,462,195,556	0
0.0	313211	Transfer Keluar	13,797,411,975	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,010,062,181
0.0	391111	Ekuitas	0	3,208,549,866,357
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,678,100
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,770,314,301	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	3,120,000	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,148,574,700
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	213,519,900
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	222,560,889
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	920,690,374
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	465,900,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	864,700,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	4,499,616,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	29,691,163,500
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,096,327,280
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	28,043,311
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	113,841,186
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	41,744,471
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	302,800
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	116,693,503,429	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,702,208	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,394,425,290	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,970,061,202	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,242,186,928	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	14,944,420,321	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,466,232,305	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	5,629,727,980	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	15,313,964,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	695,200,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,630,898,200	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	5,190,341,022	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	104,502	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	295,311,800	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	64,518,784	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	711,088,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	277,730,700	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	895,576,650	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	3,825,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	2,450,763,550	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	56,396,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	187,931,729,507	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	5,843,429,176	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	53,063,756,736	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	684,717,268	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	299,629,896	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,752,756,900	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	776,225,846	0
3.0	521211	Beban Bahan	30,818,812,230	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	25,628,924,900	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,093,233,620	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,273,967,428	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,094,326	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	1,665,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	18,990,706,764	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	507,470,784	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	373,024,825	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	4,399,655,300	0
3.0	522141	Beban Sewa	71,621,779,591	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,435,480,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	543,087,803,403	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,772,953,198	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	90,282,731	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	741,443,844	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,154,009,628	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	143,401,074	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	26,773,203	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	937,433,688	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	96,267,045,229	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,649,200,320	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,276,920,200	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,532,088,552	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	431,893,602	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74,726,689,255	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26,957,031,358	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 7:39 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	429,194,805	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	109,373,225	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	115,407,766	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	60,285,834	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	7,142	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,883,937,336	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	101,232,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	37,736,023	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	6,596,632,606	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,162,219,670	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	17,432,034	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	958,327,007	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	161,457,904	0
JUMLAH			5,950,050,143,418	5,950,050,143,418

Keterangan :
FINAL

LAMPIRAN VI

Laporan Realisasi Pendapatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 09/05/25 7:41 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	35,000,000	213,519,900	0	213,519,900	610.06
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	222,560,889	0	222,560,889	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,082,760,000	862,513,892	0	862,513,892	79.66
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	433,500,000	465,900,000	0	465,900,000	107.47
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,551,260,000	1,764,494,681	0	1,764,494,681	113.75
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	852,550,000	864,700,000	0	864,700,000	101.43
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	852,550,000	864,700,000	0	864,700,000	101.43
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	4,405,533,000	4,499,616,000	0	4,499,616,000	102.14
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	21,745,905,000	29,691,163,500	0	29,691,163,500	136.54
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	26,151,438,000	34,190,779,500	0	34,190,779,500	130.74
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,638,455,177	0	1,638,455,177	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,638,455,177	0	1,638,455,177	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	338,676,146	0	338,676,146	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,371,937,319	0	2,371,937,319	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	257,408,262	0	257,408,262	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	35,744,471	0	35,744,471	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	3,003,766,198	0	3,003,766,198	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	28,555,248,000	41,462,195,556	0	41,462,195,556	145.2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 09/05/25 7:41 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN	28,555,248,000	41,462,195,556	0	41,462,195,556	145.2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 09/05/25 7:41 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	35,000,000	213,519,900	0	213,519,900	610.06
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	222,560,889	0	222,560,889	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,082,760,000	862,513,892	0	862,513,892	79.66
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	433,500,000	465,900,000	0	465,900,000	107.47
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	852,550,000	864,700,000	0	864,700,000	101.43
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	4,405,533,000	4,499,616,000	0	4,499,616,000	102.14
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	21,745,905,000	29,691,163,500	0	29,691,163,500	136.54
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,638,455,177	0	1,638,455,177	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	338,676,146	0	338,676,146	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,371,937,319	0	2,371,937,319	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	257,408,262	0	257,408,262	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	35,744,471	0	35,744,471	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	28,555,248,000	41,462,195,556	0	41,462,195,556	145.2
	JUMLAH PENDAPATAN	28,555,248,000	41,462,195,556	0	41,462,195,556	145.2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 09/05/25 7:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
088010100KD	kanreg V BKN					
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	16,591,000	32,323,185	0	32,323,185	194.82
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KD kanreg V BKN	16,591,000	32,323,185	0	32,323,185	194.82
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA					
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	22,936,264,000	32,938,502,757	0	32,938,502,757	143.61
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KP BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	22,936,264,000	32,938,502,757	0	32,938,502,757	143.61
088010200KD	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT					
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	74,668,000	69,222,729	0	69,222,729	92.71
	JUMLAH PENDAPATAN 088010200KD BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	74,668,000	69,222,729	0	69,222,729	92.71
088010400KD	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA					
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	102,000,000	17,538,204	0	17,538,204	17.19
	JUMLAH PENDAPATAN 088010400KD BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	102,000,000	17,538,204	0	17,538,204	17.19
088010500KD	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR					
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	8,504,000	10,831,878	0	10,831,878	127.37
	JUMLAH PENDAPATAN 088010500KD BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	8,504,000	10,831,878	0	10,831,878	127.37
088010600KD	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	0	21,789,488	0	21,789,488	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010600KD BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	21,789,488	0	21,789,488	
088010700KD	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA					
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	5,448,000	75,514,948	0	75,514,948	1386.1
	JUMLAH PENDAPATAN 088010700KD BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	5,448,000	75,514,948	0	75,514,948	1,386.1
088010900KD	BA(088) ES1(01) RIAU					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 09/05/25 7:41 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	39,532,000	117,653,725	0	117,653,725	297.62
	JUMLAH PENDAPATAN 088010900KD BA(088) ES1(01) RIAU	39,532,000	117,653,725	0	117,653,725	297.62
088011100KD 622372	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	0	137,258,599	0	137,258,599	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011100KD BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	0	137,258,599	0	137,258,599	
088011500KD 622386	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	13,740,000	97,667,985	0	97,667,985	710.83
	JUMLAH PENDAPATAN 088011500KD BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	13,740,000	97,667,985	0	97,667,985	710.83
088011700KD 667896	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	2,889,000	70,033,001	0	70,033,001	2424.13
	JUMLAH PENDAPATAN 088011700KD BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	2,889,000	70,033,001	0	70,033,001	2,424.13
088011900KD 560635	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	0	2,047,894,507	0	2,047,894,507	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011900KD BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	2,047,894,507	0	2,047,894,507	
088012200KD 667882	BA(088) ES1(01) BALI KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	36,530,000	93,443,276	0	93,443,276	255.8
	JUMLAH PENDAPATAN 088012200KD BA(088) ES1(01) BALI	36,530,000	93,443,276	0	93,443,276	255.8
088012500KD 622390	BA(088) ES1(01) PAPUA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	40,601,000	141,990,640	0	141,990,640	349.72
	JUMLAH PENDAPATAN 088012500KD BA(088) ES1(01) PAPUA	40,601,000	141,990,640	0	141,990,640	349.72
088013300KD 667652	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	0	87,399,963	0	87,399,963	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088013300KD BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	0	87,399,963	0	87,399,963	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 09/05/25 7:41 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
020505	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	5,278,481,000	5,503,130,671	0	5,503,130,671	104.26
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	5,278,481,000	5,503,130,671	0	5,503,130,671	104.26
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	28,555,248,000	41,462,195,556	0	41,462,195,556	145.2
	JUMLAH PENDAPATAN	28,555,248,000	41,462,195,556	0	41,462,195,556	145.2

LAMPIRAN VII

Laporan Posisi BMN di Neraca

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT KL
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 09/05/25 7:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	6,722,383,660
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	383,791,500
131111	Tanah	2,330,666,524,668
132111	Peralatan dan Mesin	704,398,035,892
133111	Gedung dan Bangunan	868,849,348,970
134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800
134112	Irigasi	2,980,446,163
134113	Jaringan	5,267,586,977
135111	Aset Tetap Renovasi	12,060,376,974
135121	Aset Tetap Lainnya	1,814,610,125
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,877,064
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(561,012,680,230)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(165,721,828,073)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(15,831,346,575)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(788,035,767)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,325,752,656)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(602,959,129)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	125,545,819,487
162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	15,612,040,702
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	5,750,743,125
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(15,497,962,040)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(64,279)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(124,209,997,088)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(5,560,543,125)
J U M L A H		3,205,333,883,145

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl.Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	6,036,557,346
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	307,208,230
131111	Tanah	2,331,580,054,368
132111	Peralatan dan Mesin	768,036,979,101
133111	Gedung dan Bangunan	896,194,810,778
134111	Jalan dan Jembatan	16,468,966,800
134112	Irigasi	2,934,621,163
134113	Jaringan	5,233,986,977
135111	Aset Tetap Renovasi	12,089,820,513
135121	Aset Tetap Lainnya	1,585,538,903
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	19,621,605,525
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(587,961,924,338)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(192,573,355,342)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16,260,541,380)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(877,968,085)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,407,560,422)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(663,244,963)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	57,301,344,197
162161	Lisensi	2,024,640,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	294,045,300
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	18,650,632,641
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,900,098,125
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(17,803,040,854)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(71,421)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(49,867,559,538)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(101,232,000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(1,900,098,125)
J U M L A H		3,269,844,813,499

LAMPIRAN VIII

Laporan Barang Kuasa Pengguna

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	570,438	2,330,666,524,668	15,894	5,204,501,026	894	4,290,971,326	585,438	2,331,580,054,368
20101	TANAH PERSIL	570,438	2,330,666,524,668	15,724	4,087,313,026	894	4,290,971,326	585,268	2,330,462,866,368
20103	LAPANGAN	0	0	170	1,117,188,000	0	0	170	1,117,188,000
132111	Peralatan dan Mesin	79,341	709,687,406,999	7,316	148,373,228,600	6,804	82,495,357,695	79,853	775,565,277,904
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	234	39,080,792,221	16	1,106,065,800	10	1,219,965,470	240	38,966,892,551
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	216	40,686,136,920	6	2,856,600,000	11	904,868,200	211	42,637,868,720
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	121	232,789,580	18	46,922,215	13	16,495,000	126	263,216,795
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	31	6,056,599,300	8	12,427,720	0	0	39	6,069,027,020
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	52	133,358,862	8	10,109,900	0	0	60	143,468,762
30303	ALAT UKUR	19	115,980,850	1	654,900	1	862,400	19	115,773,350
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	1	489,900	0	0	7	49,597,200
30501	ALAT KANTOR	10,082	82,207,081,680	789	8,102,483,344	928	7,347,755,262	9,943	82,961,809,762
30502	ALAT RUMAH TANGGA	43,802	152,001,868,328	4,327	9,205,407,821	2,709	7,287,042,206	45,420	153,920,233,943
30601	ALAT STUDIO	1,539	40,820,840,307	302	2,320,752,352	139	2,531,068,011	1,702	40,610,524,648
30602	ALAT KOMUNIKASI	988	5,158,609,139	39	60,563,230	91	181,936,401	936	5,037,235,968
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	1	465,283,000	0	0	13	1,905,464,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	440	974,838,274	7	5,373,500	55	75,941,250	392	904,270,524
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	19	122,174,025	0	0	0	0	19	122,174,025
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	96	5,802,205,964	3	6,884,800	4	549,053,947	95	5,260,036,817
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	0	1	18,616,500	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	0	0	0	0	17	87,670,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	33	7,084,000	0	0	0	0	33	7,084,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	9	6,339,000	4	2,476,400	13	8,815,400	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	10,870	155,198,977,129	1,051	19,609,989,315	1,994	28,633,096,618	9,927	146,175,869,826
31002	PERALATAN KOMPUTER	10,627	176,774,951,313	713	103,819,220,403	800	32,580,606,116	10,540	248,013,565,600
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	6	64,269,000	0	0	6	64,269,000
31503	ALAT SAR	62	2,173,125,100	0	0	11	373,977,000	51	1,799,148,100
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	12	218,556,314	1	465,283,000	13	683,839,314	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	15	58,719,600	3	12,730,000	9	67,228,600	9	4,221,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	30	157,150,900	0	0	0	0	30	157,150,900
31901	PERALATAN OLAH RAGA	8	103,652,600	12	199,242,000	2	14,190,000	18	288,704,600
133111	Gedung dan Bangunan	499	868,873,680,270	12	31,721,184,613	20	4,375,722,805	491	896,219,142,078
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	169	748,643,512,334	11	29,287,070,086	5	2,172,821,346	175	775,757,761,074
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	297	104,798,653,706	1	2,315,021,517	15	2,202,901,459	283	104,910,773,764
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	51,419,000	0	0	0	0	5	51,419,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,380,095,230	0	119,093,010	0	0	28	15,499,188,240

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:42 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	58,771	16,468,966,800	0	0	0	0	58,771	16,468,966,800
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	0	0	0	0	58,761	16,466,806,800
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
134112	Irigasi	27	2,980,446,163	0	0	1	45,825,000	26	2,934,621,163
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,757,299,063	0	0	0	0	11	1,757,299,063
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	0	0	1	45,825,000	3	394,889,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	32	5,267,586,977	0	0	1	33,600,000	31	5,233,986,977
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	0	0	0	0	4	1,783,479,940
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	1	33,600,000	6	917,573,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	25	12,060,376,974	3	471,212,944	1	441,769,405	27	12,089,820,513
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	23	11,976,140,074	3	471,212,944	1	441,769,405	25	12,005,583,613
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	0	0	0	0	1	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	12,138	1,849,014,625	5,585	427,982,940	7,575	655,389,162	10,148	1,621,608,403
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,403	951,436,025	5,579	422,432,940	7,564	577,689,162	9,418	796,179,803
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211	676,955,000	2	3,885,000	10	30,700,000	203	650,140,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	0	0	0	0	29	84,719,100
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	1	47,000,000	1	33,000,000
60501	TANAMAN	492	34,404,500	4	1,665,000	0	0	496	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	188	15,612,040,702	7,480	53,841,570,598	6,923	50,801,716,259	745	18,651,895,041
30103	ALAT BANTU	0	0	9	870,448,670	3	585,381,000	6	285,067,670
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	10	605,868,200	9	408,068,200	1	197,800,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	13	16,495,000	11	13,668,000	2	2,827,000
30303	ALAT UKUR	0	0	1	862,400	0	0	1	862,400
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	3	8,881,020	854	3,903,069,200	809	3,580,547,085	48	331,403,135

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:42 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30502	ALAT RUMAH TANGGA	66	389,359,732	2,216	6,227,038,121	1,876	5,554,546,571	406	1,061,851,282
30601	ALAT STUDIO	10	946,857,597	49	2,053,858,271	45	2,942,447,271	14	58,268,597
30602	ALAT KOMUNIKASI	5	541,968,610	90	160,036,401	88	236,546,401	7	465,458,610
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	55	75,941,250	48	66,252,250	7	9,689,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	4	549,053,947	6	857,606,894	1	127,632,947
31001	KOMPUTER UNIT	81	2,110,400,875	1,187	14,878,171,693	1,131	15,441,855,165	137	1,546,717,403
31002	PERALATAN KOMPUTER	17	11,034,212,974	555	23,208,067,223	487	20,846,973,200	85	13,395,306,997
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	1	400,000	1	400,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	2	14,190,000	0	0	2	14,190,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	144,174,000	13	927,621,000	0	0	16	1,071,795,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0	1	45,825,000	0	0	1	45,825,000
50310	INSTALASI LAIN	0	0	1	33,600,000	1	33,600,000	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	2,408	193,324,222	2,407	186,824,222	1	6,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	10	30,700,000	0	0	10	30,700,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	1	47,000,000	1	47,000,000	0	0
TOTAL			3,963,466,044,178		240,039,680,721		143,140,351,652		4,060,365,373,247

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	570,438	2,330,666,524,668	15,894	5,204,501,026	894	4,290,971,326	585,438	2,331,580,054,368
20101	TANAH PERSIL	570,438	2,330,666,524,668	15,724	4,087,313,026	894	4,290,971,326	585,268	2,330,462,866,368
20103	LAPANGAN	0	0	170	1,117,188,000	0	0	170	1,117,188,000
132111	Peralatan dan Mesin	67,234	704,398,035,892	3,891	145,924,083,980	6,313	82,285,140,771	64,812	768,036,979,101
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	216	39,065,671,821	7	1,099,061,400	10	1,219,965,470	213	38,944,767,751
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	216	40,686,136,920	6	2,856,600,000	11	904,868,200	211	42,637,868,720
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	108	222,531,720	12	41,651,000	13	16,495,000	107	247,687,720
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	28	6,054,885,211	1	7,270,500	0	0	29	6,062,155,711
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	40	126,802,050	2	5,306,000	0	0	42	132,108,050
30303	ALAT UKUR	8	109,795,050	0	0	0	0	8	109,795,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	0	0	0	0	6	49,107,300
30501	ALAT KANTOR	9,792	82,050,874,380	188	7,648,740,916	896	7,332,073,860	9,084	82,367,541,436
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,934	149,188,518,672	2,156	7,588,695,314	2,583	7,252,694,424	37,507	149,524,519,562
30601	ALAT STUDIO	1,150	40,567,265,657	64	2,166,163,701	51	2,473,410,271	1,163	40,260,019,087
30602	ALAT KOMUNIKASI	618	5,023,790,910	6	43,518,000	83	179,214,401	541	4,888,094,509
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	1	465,283,000	0	0	13	1,905,464,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	329	952,713,794	1	2,220,000	39	73,718,000	291	881,215,794
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14	120,200,625	0	0	0	0	14	120,200,625
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	86	5,795,051,964	3	6,884,800	4	549,053,947	85	5,252,882,817
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	0	1	18,616,500	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	0	0	0	0	17	87,670,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	4,284,000	0	0	0	0	1	4,284,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	2,400,000	1	1,576,400	3	3,976,400	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	10,870	155,198,977,129	1,039	19,607,861,365	1,982	28,630,968,668	9,927	146,175,869,826
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,675	174,942,732,982	384	103,642,207,584	602	32,490,850,716	5,457	246,094,089,850
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	6	64,269,000	0	0	6	64,269,000
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	0	0	11	373,977,000	46	1,795,742,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	12	218,556,314	1	465,283,000	13	683,839,314	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	54,978,600	1	12,250,000	9	67,228,600	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27	143,815,000	0	0	0	0	27	143,815,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	7	102,758,000	12	199,242,000	2	14,190,000	17	287,810,000
133111	Gedung dan Bangunan	494	868,849,348,970	12	31,721,184,613	20	4,375,722,805	486	896,194,810,778
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	168	748,625,031,034	11	29,287,070,086	5	2,172,821,346	174	775,739,279,774
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	297	104,798,653,706	1	2,315,021,517	15	2,202,901,459	283	104,910,773,764
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	0	0	0	0	1	45,569,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,380,095,230	0	119,093,010	0	0	28	15,499,188,240

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:42 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	58,771	16,468,966,800	0	0	0	0	58,771	16,468,966,800
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	0	0	0	0	58,761	16,466,806,800
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
134112	Irigasi	27	2,980,446,163	0	0	1	45,825,000	26	2,934,621,163
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	11	1,757,299,063	0	0	0	0	11	1,757,299,063
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	0	0	1	45,825,000	3	394,889,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	32	5,267,586,977	0	0	1	33,600,000	31	5,233,986,977
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	0	0	0	0	4	1,783,479,940
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	1	33,600,000	6	917,573,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	25	12,060,376,974	3	471,212,944	1	441,769,405	27	12,089,820,513
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	23	11,976,140,074	3	471,212,944	1	441,769,405	25	12,005,583,613
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	0	0	0	0	1	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	11,646	1,814,610,125	5,581	426,317,940	7,575	655,389,162	9,652	1,585,538,903
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,403	951,436,025	5,579	422,432,940	7,564	577,689,162	9,418	796,179,803
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	211	676,955,000	2	3,885,000	10	30,700,000	203	650,140,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	0	0	0	0	29	84,719,100
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	1	47,000,000	1	33,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	188	15,612,040,702	7,312	53,800,242,566	6,758	50,761,650,627	742	18,650,632,641
30103	ALAT BANTU	0	0	9	870,448,670	3	585,381,000	6	285,067,670
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	10	605,868,200	9	408,068,200	1	197,800,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	13	16,495,000	11	13,668,000	2	2,827,000
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	3	8,881,020	834	3,899,223,600	789	3,576,701,485	48	331,403,135
30502	ALAT RUMAH TANGGA	66	389,359,732	2,094	6,195,813,339	1,756	5,523,721,789	404	1,061,451,282

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:42 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30601	ALAT STUDIO	10	946,857,597	49	2,053,858,271	45	2,942,447,271	14	58,268,597
30602	ALAT KOMUNIKASI	5	541,968,610	82	157,314,401	80	233,824,401	7	465,458,610
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	39	73,718,000	32	64,029,000	7	9,689,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	4	549,053,947	6	857,606,894	1	127,632,947
31001	KOMPUTER UNIT	81	2,110,400,875	1,187	14,878,171,693	1,131	15,441,855,165	137	1,546,717,403
31002	PERALATAN KOMPUTER	17	11,034,212,974	554	23,207,617,223	486	20,846,523,200	85	13,395,306,997
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	1	400,000	1	400,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	2	14,190,000	0	0	2	14,190,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	144,174,000	13	927,621,000	0	0	16	1,071,795,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0	1	45,825,000	0	0	1	45,825,000
50310	INSTALASI LAIN	0	0	1	33,600,000	1	33,600,000	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	2,408	193,324,222	2,407	186,824,222	1	6,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	10	30,700,000	0	0	10	30,700,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	1	47,000,000	1	47,000,000	0	0
TOTAL			3,958,117,937,271		237,547,543,069		142,890,069,096		4,052,775,411,244

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	585,438	2,331,580,054,368	0	0	0	2,331,580,054,368
20101	TANAH PERSIL	585,268	2,330,462,866,368	0	0	0	2,330,462,866,368
20103	LAPANGAN	170	1,117,188,000	0	0	0	1,117,188,000
132111	Peralatan dan Mesin	64,812	768,036,979,101	(561,012,680,230)	(26,949,244,108)	(587,961,924,338)	180,075,054,763
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0
30103	ALAT BANTU	213	38,944,767,751	(29,344,312,493)	(2,142,981,920)	(31,487,294,413)	7,457,473,338
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	211	42,637,868,720	(30,743,231,976)	(3,255,841,752)	(33,999,073,728)	8,638,794,992
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	107	247,687,720	(200,062,024)	(16,416,946)	(216,478,970)	31,208,750
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29	6,062,155,711	(5,614,626,877)	(174,851,586)	(5,789,478,463)	272,677,248
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	42	132,108,050	(114,580,445)	(6,401,090)	(120,981,535)	11,126,515
30303	ALAT UKUR	8	109,795,050	(57,048,075)	(20,128,650)	(77,176,725)	32,618,325
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	(48,602,950)	(504,350)	(49,107,300)	0
30501	ALAT KANTOR	9,084	82,367,541,436	(79,102,508,309)	1,561,543,846	(77,540,964,463)	4,826,576,973
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,507	149,524,519,562	(131,409,062,162)	(1,897,667,336)	(133,306,729,498)	16,217,790,064
30601	ALAT STUDIO	1,163	40,260,019,087	(25,744,100,838)	(1,742,647,957)	(27,486,748,795)	12,773,270,292
30602	ALAT KOMUNIKASI	541	4,888,094,509	(4,908,290,992)	88,386,842	(4,819,904,150)	68,190,359
30603	PERALATAN PEMANCAR	13	1,905,464,793	(1,111,327,449)	(156,600,361)	(1,267,927,810)	637,536,983
30701	ALAT KEDOKTERAN	291	881,215,794	(822,012,535)	590,827	(821,421,708)	59,794,086
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14	120,200,625	(71,774,675)	(19,858,575)	(91,633,250)	28,567,375
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	85	5,252,882,817	(5,516,731,780)	459,145,202	(5,057,586,578)	195,296,239
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	(4,343,850)	4,343,850	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	(34,374,991)	(12,524,291)	(46,899,282)	40,770,718
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	4,284,000	(856,800)	(428,400)	(1,285,200)	2,998,800
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	(1,200,000)	1,200,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	9,927	146,175,869,826	(91,669,555,574)	(8,316,458,953)	(99,986,014,527)	46,189,855,299
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,457	246,094,089,850	(152,023,638,823)	(11,713,440,588)	(163,737,079,411)	82,357,010,439
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6	64,269,000	0	(4,284,600)	(4,284,600)	59,984,400
31503	ALAT SAR	46	1,795,742,500	(2,169,719,500)	373,977,000	(1,795,742,500)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	(41,967,758)	41,967,758	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	(39,390,638)	39,390,638	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	27	143,815,000	(140,600,716)	(535,716)	(141,136,432)	2,678,568
31901	PERALATAN OLAH RAGA	17	287,810,000	(78,758,000)	(38,217,000)	(116,975,000)	170,835,000
133111	Gedung dan Bangunan	486	896,194,810,778	(165,721,828,073)	(26,851,527,269)	(192,573,355,342)	703,621,455,436
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	174	775,739,279,774	(144,860,915,863)	(23,529,399,360)	(168,390,315,223)	607,348,964,551
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	283	104,910,773,764	(18,551,340,094)	(2,859,215,487)	(21,410,555,581)	83,500,218,183
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	(6,009,096)	(1,001,516)	(7,010,612)	38,558,388
40401	TUGU/TANDA BATAS	28	15,499,188,240	(2,303,563,020)	(461,910,906)	(2,765,473,926)	12,733,714,314

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:43 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
134111	Jalan dan Jembatan	58,771	16,468,966,800	(15,831,346,575)	(429,194,805)	(16,260,541,380)	208,425,420
50101	JALAN	58,761	16,466,806,800	(15,830,986,579)	(429,139,421)	(16,260,126,000)	206,680,800
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	(359,996)	(55,384)	(415,380)	1,744,620
134112	Irigasi	26	2,934,621,163	(788,035,767)	(89,932,318)	(877,968,085)	2,056,653,078
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	(32,623,537)	(5,587,530)	(38,211,067)	218,865,533
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	(25,120,446)	(3,864,684)	(28,985,130)	130,034,870
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	16,428,500	(16,428,500)	0	(16,428,500)	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,757,299,063	(538,865,324)	(74,386,883)	(613,252,207)	1,144,046,856
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3	394,889,000	(99,662,396)	5,496,866	(94,165,530)	300,723,470
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	(75,335,564)	(11,590,087)	(86,925,651)	262,982,349
134113	Jaringan	31	5,233,986,977	(2,325,752,656)	(81,807,766)	(2,407,560,422)	2,826,426,555
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	(203,544,165)	(11,185,751)	(214,729,916)	120,842,584
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,783,479,940	(257,020,652)	(46,802,865)	(303,823,517)	1,479,656,423
50310	INSTALASI LAIN	6	917,573,820	(951,173,820)	33,600,000	(917,573,820)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	(60,573,738)	(3,461,357)	(64,035,095)	39,805,605
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	(807,353,859)	(50,718,210)	(858,072,069)	1,170,656,298
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	(46,086,422)	(3,239,583)	(49,326,005)	15,465,645
135111	Aset Tetap Renovasi	27	12,089,820,513	(558,669,466)	(50,626,059)	(609,295,525)	11,480,524,988
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	25	12,005,583,613	(558,669,466)	(50,626,059)	(609,295,525)	11,396,288,088
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	80,238,400	0	0	0	80,238,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,652	1,585,538,903	(44,289,663)	(9,659,775)	(53,949,438)	1,531,589,465
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	9,418	796,179,803	0	0	0	796,179,803
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	203	650,140,000	0	0	0	650,140,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	29	84,719,100	(44,289,663)	(9,659,775)	(53,949,438)	30,769,662
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	33,000,000	0	0	0	33,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	742	18,650,632,641	(15,497,962,040)	(2,305,078,814)	(17,803,040,854)	847,591,787
30103	ALAT BANTU	6	285,067,670	0	(285,067,670)	(285,067,670)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	197,800,000	0	(197,800,000)	(197,800,000)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	2,827,000	0	(2,827,000)	(2,827,000)	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	48	331,403,135	(8,881,020)	(322,165,715)	(331,046,735)	356,400
30502	ALAT RUMAH TANGGA	404	1,061,451,282	(389,359,732)	(667,616,550)	(1,056,976,282)	4,475,000
30601	ALAT STUDIO	14	58,268,597	(946,857,597)	888,589,000	(58,268,597)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:43 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30602	ALAT KOMUNIKASI	7	465,458,610	(541,968,610)	76,510,000	(465,458,610)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	7	9,689,000	0	(9,580,100)	(9,580,100)	108,900
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	127,632,947	(436,185,894)	308,552,947	(127,632,947)	0
31001	KOMPUTER UNIT	137	1,546,717,403	(2,110,400,875)	563,683,472	(1,546,717,403)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	85	13,395,306,997	(11,034,212,974)	(2,361,094,023)	(13,395,306,997)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2	14,190,000	0	(14,190,000)	(14,190,000)	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	16	1,071,795,000	(30,095,338)	(261,243,632)	(291,338,970)	780,456,030
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	45,825,000	0	(20,829,543)	(20,829,543)	24,995,457
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1	6,500,000	0	0	0	6,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	10	30,700,000	0	0	0	30,700,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		719,985	4,052,775,411,244	(761,780,564,470)	(56,767,070,914)	(818,547,635,384)	3,234,227,775,860

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	12,107	5,289,371,107	3,425	2,449,144,620	491	210,216,924	15,041	7,528,298,803
30103	ALAT BANTU	18	15,120,400	9	7,004,400	0	0	27	22,124,800
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	13	10,257,860	6	5,271,215	0	0	19	15,529,075
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	1,714,089	7	5,157,220	0	0	10	6,871,309
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	12	6,556,812	6	4,803,900	0	0	18	11,360,712
30303	ALAT UKUR	11	6,185,800	1	654,900	1	862,400	11	5,978,300
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	1	489,900	0	0	1	489,900
30501	ALAT KANTOR	290	156,207,300	601	453,742,428	32	15,681,402	859	594,268,326
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,868	2,813,349,656	2,171	1,616,712,507	126	34,347,782	7,913	4,395,714,381
30601	ALAT STUDIO	389	253,574,650	238	154,588,651	88	57,657,740	539	350,505,561
30602	ALAT KOMUNIKASI	370	134,818,229	33	17,045,230	8	2,722,000	395	149,141,459
30701	ALAT KEDOKTERAN	111	22,124,480	6	3,153,500	16	2,223,250	101	23,054,730
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	0	0	0	0	5	1,973,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	7,154,000	0	0	0	0	10	7,154,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	32	2,800,000	0	0	0	0	32	2,800,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	3,939,000	3	900,000	10	4,839,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	12	2,127,950	12	2,127,950	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,952	1,832,218,331	329	177,012,819	198	89,755,400	5,083	1,919,475,750
31503	ALAT SAR	5	3,405,600	0	0	0	0	5	3,405,600
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	3,741,000	2	480,000	0	0	9	4,221,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	3	13,335,900	0	0	0	0	3	13,335,900
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	894,600	0	0	0	0	1	894,600
133111	Gedung dan Bangunan	5	24,331,300	0	0	0	0	5	24,331,300
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	18,481,300	0	0	0	0	1	18,481,300
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	0	0	0	0	4	5,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya	492	34,404,500	4	1,665,000	0	0	496	36,069,500
60501	TANAMAN	492	34,404,500	4	1,665,000	0	0	496	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	168	41,328,032	165	40,065,632	3	1,262,400
30303	ALAT UKUR	0	0	1	862,400	0	0	1	862,400
30501	ALAT KANTOR	0	0	20	3,845,600	20	3,845,600	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	122	31,224,782	120	30,824,782	2	400,000
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	8	2,722,000	8	2,722,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	16	2,223,250	16	2,223,250	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	1	450,000	1	450,000	0	0
TOTAL			5,348,106,907		2,492,137,652		250,282,556		7,589,962,003

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	15,041	7,528,298,803	(2,293,350,149)	(1,067,454,168)	(3,360,804,317)	4,167,494,486
30103	ALAT BANTU	27	22,124,800	(4,919,516)	(2,924,327)	(7,843,843)	14,280,957
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19	15,529,075	(8,300,850)	(4,366,022)	(12,666,872)	2,862,203
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	6,871,309	(237,832)	(614,631)	(852,463)	6,018,846
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	18	11,360,712	(3,942,868)	(1,295,883)	(5,238,751)	6,121,961
30303	ALAT UKUR	11	5,978,300	(2,101,400)	(871,450)	(2,972,850)	3,005,450
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	489,900	0	(122,475)	(122,475)	367,425
30501	ALAT KANTOR	859	594,268,326	(56,395,880)	(67,296,646)	(123,692,526)	470,575,800
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,913	4,395,714,381	(1,697,087,981)	(467,945,983)	(2,165,033,964)	2,230,680,417
30601	ALAT STUDIO	539	350,505,561	(50,097,845)	(62,026,400)	(112,124,245)	238,381,316
30602	ALAT KOMUNIKASI	395	149,141,459	(76,948,807)	(13,584,409)	(90,533,216)	58,608,243
30701	ALAT KEDOKTERAN	101	23,054,730	(14,722,165)	(834,020)	(15,556,185)	7,498,545
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	(1,973,400)	0	(1,973,400)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	7,154,000	(3,227,626)	(835,250)	(4,062,876)	3,091,124
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	32	2,800,000	(923,750)	(197,500)	(1,121,250)	1,678,750
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	(739,875)	739,875	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,083	1,919,475,750	(356,121,507)	(443,052,100)	(799,173,607)	1,120,302,143
31503	ALAT SAR	5	3,405,600	(2,066,750)	(1,338,850)	(3,405,600)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	4,221,000	(281,625)	(527,625)	(809,250)	3,411,750
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	3	13,335,900	(12,962,272)	(62,272)	(13,024,544)	311,356
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	894,600	(298,200)	(298,200)	(596,400)	298,200
133111	Gedung dan Bangunan	5	24,331,300	(1,701,939)	(486,626)	(2,188,565)	22,142,735
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	18,481,300	(554,439)	(369,626)	(924,065)	17,557,235
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	(1,147,500)	(117,000)	(1,264,500)	4,585,500
135121	Aset Tetap Lainnya	496	36,069,500	0	0	0	36,069,500
60501	TANAMAN	496	36,069,500	0	0	0	36,069,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3	1,262,400	0	(831,200)	(831,200)	431,200
30303	ALAT UKUR	1	862,400	0	(431,200)	(431,200)	431,200
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2	400,000	0	(400,000)	(400,000)	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		15,545	7,589,962,003	(2,295,052,088)	(1,068,771,994)	(3,363,824,082)	4,226,137,921

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162121	Hak Cipta	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
162151	Software	211	125,545,819,487	7	11,674,731,500	42	79,919,206,790	176	57,301,344,197
80101	ASET TAK BERWUJUD	211	125,545,819,487	7	11,674,731,500	42	79,919,206,790	176	57,301,344,197
162161	Lisensi	0	0	1	2,024,640,000	0	0	1	2,024,640,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	1	2,024,640,000	0	0	1	2,024,640,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1	195,000,000	1	99,045,300	0	0	2	294,045,300
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	195,000,000	1	99,045,300	0	0	2	294,045,300
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	28	5,750,743,125	41	78,539,049,886	62	82,389,694,886	7	1,900,098,125
80101	ASET TAK BERWUJUD	28	5,750,743,125	41	78,539,049,886	62	82,389,694,886	7	1,900,098,125
TOTAL			131,492,062,612		92,337,466,686		162,308,901,676		61,520,627,622

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/25 12:25 AM
Tanggal : 09/05/25 7:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI AMORTISASI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
162121	Hak Cipta	1	500,000	(64,279)	(7,142)	(71,421)	428,579
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	(64,279)	(7,142)	(71,421)	428,579
162151	Software	176	57,301,344,197	(124,209,997,088)	74,342,437,550	(49,867,559,538)	7,433,784,659
80101	ASET TAK BERWUJUD	176	57,301,344,197	(124,209,997,088)	74,342,437,550	(49,867,559,538)	7,433,784,659
162161	Lisensi	1	2,024,640,000	0	(101,232,000)	(101,232,000)	1,923,408,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	2,024,640,000	0	(101,232,000)	(101,232,000)	1,923,408,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	2	294,045,300	0	0	0	294,045,300
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	294,045,300	0	0	0	294,045,300
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	7	1,900,098,125	(5,560,543,125)	3,660,445,000	(1,900,098,125)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	7	1,900,098,125	(5,560,543,125)	3,660,445,000	(1,900,098,125)	0
JUMLAH		187	61,520,627,622	(129,770,604,492)	77,901,643,408	(51,868,961,084)	9,651,666,538

LAMPIRAN IX

Laporan Persediaan

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Tanggal : 09/05/25 7:41 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_kl_poc

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	209,672,338
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	18,053,246
1010301003	Penjepit Kertas	158,676,936
1010301004	Penghapus/Korektor	16,837,403
1010301005	Buku Tulis	48,585,372
1010301006	Ordner Dan Map	659,759,628
1010301007	Penggaris	8,981,223
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	18,764,352
1010301009	Pita Mesin Ketik	12,249,500
1010301010	Alat Perekat	70,676,523
1010301011	Stadler HD	924,435
1010301012	Staples	24,026,461
1010301013	Isi Staples	44,104,384
1010301014	Barang Cetak	253,275,717
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	770,033,614
1010302001	Kertas HVS	406,702,370
1010302002	Berbagai Kertas	84,556,469
1010302003	Kertas Cover	21,038,212
1010302004	Amplop	496,339,406
1010302005	Kop Surat	3,500,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	163,796,770
1010303002	Tinta Cetak	4,665,000
1010303003	Plat Cetak	125,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	224,395,567
1010304002	Computer File/Tempat Disket	557,000
1010304003	Pita Printer	2,604,800
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,408,343,895
1010304005	Disket	1,148,400
1010304006	USB/Flash Disk	34,668,335
1010304010	Mouse	1,723,460
1010304011	CD/DVD	473,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	31,912,449
1010306001	Kabel Listrik	28,485,543
1010306002	Lampu Listrik	118,152,249
1010306003	Stop Kontak	6,268,163
1010306004	Saklar	429,860
1010306005	Stacker	3,086,750
1010306007	Starter	1,439,500
1010306008	Vitting	11,321,424
1010306010	Batu Baterai	63,673,021
1010306999	Alat Listrik Lainnya	29,296,478
1010307005	Penutup Kaki	230,000
1010309001	Meterai	8,650,000
1010309003	Stempel	106,700
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	3,313,200

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 09/05/25 7:41 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_persediaan_kl_poc

Kode	Uraian	Jumlah
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	1,549,219
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	971,000
1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	59,009,163
1010313001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)	44,244,555
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	45,688,445
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	324,478,172
1010314003	Obat Gas (Barang Konsumsi)	200,799
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	1,226,289
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	19,617,048
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	36,937,129
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27,011,374
Jumlah Barang Konsumsi		6,036,557,346
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	23,653,665
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	30,361,320
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	8,924,268
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	21,691,924
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	23,322,182
1010305006	Alat Pengikat	5,520,755
1010305007	Peralatan Ledeng	2,653,950
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	88,575,256
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	943,000
1010305012	Pengharum Ruangan	28,762,150
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	72,799,760
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		307,208,230
TOTAL		6,343,765,576

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.

0 dalam kondisi rusak.

2. Persediaan senilai Rp.

197,881,000 dalam kondisi usang.

LAMPIRAN X

Telaah Laporan Keuangan

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

Kode dan Nama K/L : (088) Badan Kepegawaian Negara

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA Neraca LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI

Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Semua face laporan (LRA LO LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama apabila ada yang tidak sama uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit) LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama

PENGECEKAN PADA MONSAKTI

To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar (TK) Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di <i>Settle</i> Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

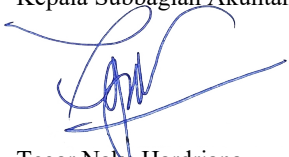
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a Pagu/DIPA		√	Tidak
	b Estimasi PNPB		√	Tidak
	c Belanja		√	Tidak
	d Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e Pendapatan		√	Tidak
	f Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g Kas BLU		√	Tidak
	h Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i Kas Hibah		√	Tidak
	j Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	√		Tidak
Daftar MONSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (<i>Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun belum diregister</i>)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (<i>selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada</i>)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1xxxxx bersaldo (D) (<i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i>)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (<i>kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu</i>)	√		Ya

7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (<i>untuk LK tahunan tidak boleh ada</i>)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41xxxx / 43xxxx (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan Pita Cukai Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (<i>untuk LK tahunan tidak boleh ada</i>)		√	Ada/Tidak
	<i>Dalam hal masih terdapat akun tersebut agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/barang/jasa? <i>Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya</i>		√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	√		Ada/Tidak

2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211 Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133 Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211	-	-	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	-		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	√		Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	-	-	Ya/Tidak
	<i>Jika ada konfirmasi kebenarannya Jelaskan dalam Calk</i>			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20xx di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya

6	Dari kolom perbandingan adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx) beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx) beban subsidi (55xxxx) beban hibah (56xxxx) dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset" Bila ada cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? <i>Akun ini hanya khusus dari IP</i>		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	<i>Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000 transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST</i>			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111 313121 313211 313221 391131 391132 391133 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA" maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA" sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK" maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak

	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512x pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	<i>Jika Ada apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?</i>	√		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	<i>Jika Ya ada realisasi akun 526xxx pada Neraca Percobaan Kas</i>	-	-	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	<i>Jika Ya ada realisasi akun 57xxxx pada Neraca Percobaan Kas</i>	-	-	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411x) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121xx) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914 1133XX dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya

6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914 1133XX dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	-	-	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx 111826 1133xx 165111 dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA serta hal-hal lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan MONSAKTI" 1 Terdapat Selisih Rekon Internal sebesar Rp4.796.161.227,00 yang terdiri dari : a Kantor Regional III BKN Bandung berupa piutang lainnya sebesar Rp265.500,00 dengan kondisi dimana saat input settlement piutang non SBS, ada satu piutang yang salah tulis keterangannya. Karena tidak ada menu edit, maka dihapus dulu lalu saat diinput ulang ternyata tidak bisa karena sudah sempat kerekam. Ketika dicek di kartu piutangnya saldo kreditnya tidak muncul, senilai 265.500 untuk piutang nomor 00014/AR/017237/202 nama debitur Herlina Tambunan. b Pencatatan Jurnal Penyesuaian untuk transaksi Piutang Lainnya sebesar Rp6.233.534.430,00 atas pengembalian belanja yang baru disetorkan pada tahun 2025				
Mengetahui, Pejabat Penyusun LKKL Kepala Subbagian Akuntansi  Tegar Nake Hardriana NIP. 198907072015031004		Jakarta, 9 Mei 2025 Penelaah Pranata Keuangan APBN Mahir  Eka Desi Lestari NIP 198812022010122001		

LAMPIRAN XI

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/PMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP.291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. BKN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKN adalah tersusunnya sistem (norma, standar, dan prosedur) manajemen kepegawaian secara nasional. Sedangkan hasil (*outcome*) yang hendak dicapai oleh BKN adalah "Terwujudnya Sistem Manajemen Kepegawaian Secara Nasional". *Outcome* tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan manajemen kepegawaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan dari seluruh unit/satuan kerja BKN.

C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Badan

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Kodefikasi Barang Milik Negara

Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang milik negara sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik negara. Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab BMN. Sedangkan Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setiap BMN yang terdiri dari kode lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kodefikasi BMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. Kapitalisasi Barang Milik Negara

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dasar kapitalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, disebutkan pada bagian Kedua (Kapitalisasi BMN Berupa Aset Tetap) Pasal 40 ayat 4, bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:
 - a. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk peralatan dan mesin; atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
 - b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), untuk gedung dan bangunan; atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
2. Serta dengan memperhatikan lampiran 11.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat dikapitalisasi merupakan "pengeluaran setelah saldo awal suatu aset tetap yang *memperpanjang masa manfaat* atau yang kemungkinan besar *memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja*, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan".

C. Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara

Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

(UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga. Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

D. Penyusutan Barang Milik Negara

1. Penyusutan

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang bertujuan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

2. Nilai Penyusutan

- a. Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 01 Januari 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 01 Januari 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 01 Januari 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- d. Penyusutan aset tak berwujud (amortisasi) merupakan penghitungan dan pencatatan yang dilakukan pada dan oleh tingkat Kuasa Pengguna Barang, dilakukan pada setiap akhir semester dengan tidak memperhatikan nilai residu untuk setiap sub kelompok ATB. Metode amortisasi yang digunakan adalah

metode garis lurus dengan masa manfaat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- e. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2015 untuk aset tak berwujud yang diperoleh berdasarkan saldo sampai dengan 01 Januari 2016 sebesar nilai perolehan.

3. Metode Penyusutan Yang Digunakan

- a. Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- b. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

4. Masa Manfaat Yang Digunakan

- a. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/PMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s/d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s/d 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s/d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

- b. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum label masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

KODE BARANG					URAIAN	TAHUN
8	01	01	01	068	Peta Nilai Bidang Tanah	5
8	01	01	01	069	Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan	5
8	01	01	01	070	Peta Inventarisasi Tanah Kritis	5
8	01	01	01	071	Peta Dasar Pertanahan	5
8	01	01	01	072	Peta Lahan Baku Sawah Nasional	4
8	01	01	01	073	Peta Data Potensi WP3WT	5
8	01	01	01	074	Peta Lokasi Pengembangan Pertanahan	5
8	01	01	01	075	Peta Inventarisasi Tanah Timbul	5
8	01	01	01	076	Peta Neraca Penatagunaan Tanah	5
8	01	01	01	077	Peta Zona Nilai Tanah	5
8	01	01	01	078	Peta Persebaran Pulau- Pulau Kecil Terluar di Indonesia	5
8	01	01	01	079	Peta Desain Konsolidasi Tanah	3
8	01	01	01	080	Peta Potensi Subjek Objek Konsolidasi Tanah	3
8	01	01	01	081	Peta Penguasaan Tanah	5
8	01	01	01	082	Peta Pemilikan Tanah	5
8	01	01	01	083	Peta Terindikasi Terlantar	5
8	01	01	01	084	Peta Lahan Sawah Dilindungi	5
8	01	01	01	085	Peta Kawasan Terindikasi Terlantar	5

E. Metode Penilaian Persediaan

Terkait Kebijakan Akuntansi Persediaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, di dalam mencatat persediaan Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Dalam hal metode *First In First Out* (FIFO) mulai diterapkan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* ini dengan penjelasan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2021 tentang Penerapan Metode Penilaian Persediaan *First In First Out* (FIFO).

I. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh BKN.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar Rp 4.147.851.371.970,00 (*Empat triliun seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp4.102.233.159.014,00 (*Empat triliun seratus dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat belas rupiah*) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp377.779.392.300,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) nilai mutasi kurang sebesar Rp330.636.360.176,00 (*Tiga ratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 16 Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta (088.01.0100.017220)
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta (088.01.0400.017241)
3. Kantor Regional II BKN Surabaya (088.01.0500.450454)
4. Kantor Regional III BKN Bandung (088.01.0200.017237)
5. Kantor Regional IV BKN Makassar (088.01.1900.560635)
6. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta (088.01.0100.606254)

7. Kantor Regional VI BKN Medan (088.01.0700.606261)
8. Kantor Regional VII BKN Palembang (088.01.1100.622372)
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin (088.01.1500.622386)
10. Kantor Regional IX BKN Jayapura (088.01.2500.622390)
11. Kantor Regional X BKN Denpasar (088.01.2200.667882)
12. Kantor Regional XI BKN Manado (088.01.1751.667896)
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (088.01.0900.667901)
14. Kantor Regional XIII BKN Aceh (088.01.0600.667752)
15. Kantor Regional XIV BKN Manokari (088.01.3300.667652)
16. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (088.01.0200.020505)

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca.
2. Laporan Barang Persediaan.
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan).
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
5. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB).
6. Laporan Barang Bersejarah.
7. Laporan Kondisi Barang.
8. Laporan Penyusutan.
9. Laporan Barang Rusak Berat.
10. Laporan Barang Hilang.
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

13. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN.

II. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2024

Nilai BMN per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp4.102.233.159.014,00 (*Empat triliun seratus dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat belas rupiah*), yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp4.096.885.052.107,00 (*Empat triliun sembilan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu seratus tujuh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp5.348.106.907,00 (*Lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2024 Audited

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 Audited sebesar Rp6.343.765.576,00 (*Enam milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 01 Januari 2024 Rp7.106.175.160,00 (*Tujuh milyar seratus enam juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp762.409.584,00 (*Tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.

Daftar Mutasi barang persediaan

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111 Barang Konsumsi	6.722.383.660,00	(685.826.314,00)	6.036.557.346,00
117113 Bahan Pemeliharaan	383.791.500,00	(76.583.270,00)	307.208.230,00
JUMLAH	7.106.175.160,00	(762.409.584,00)	6.343.765.576,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang dari aplikasi Persediaan masing-masing satuan kerja adalah sebesar Rp197,881,000,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp197,881,000,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 Audited seluas 585.438 m² sebesar Rp2.331.580.054.368,00 (*Dua triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 570.438 m² sebesar Rp2.330.666.524.668,00 (*Dua triliun tiga ratus tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Mutasi tambah seluas 15.894 m² dengan nilai sebesar Rp5.204.501.026,00 (*Lima milyar dua ratus empat juta lima ratus satu ribu dua puluh enam rupiah*), mutasi kurang seluas 894 m² dengan nilai sebesar Rp4.290.971.326,00 (*Empat milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Hibah masuk	913.529.700,00		913.529.700,00
Reklasifikasi masuk	4.266.877.000,00		4.266.877.000,00
Perolehan Lainnya	24.094.326,00		24.094.326,00
Jumlah	5.180.406.700,00	0,00	5.180.406.700,00

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi keluar	4.266.877.000,00		4.266.877.000,00
Koreksi Pencatatan	24.094.326,00		24.094.326,00
Jumlah	4.290.971.326,00	-	4.290.971.326,00

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	585.438	2.331.580.054.368,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m²/ Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	-	0,00
Tidak terdapat bukti kepemilikan	-	0,00
Dikuasai pihak lain	9.493,96	Rp109.664.231.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut

1. Kantor Pusat BKN Jakarta. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m² senilai Rp77.478.342.000,00.
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta dengan luas total 2.640 m² dikuasai pihak lain. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:

- a. Kampung Sapen GK.I/445 seluas 619 m² senilai Rp3.037.866.000,00.
- b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m² senilai Rp7.906.640.000,00.

Atas pemanfaatan BMN di kedua lokasi tersebut, masih belum ada kontribusi yang diterima oleh BKN. Pada Tahun 2021 telah ada persetujuan tarif sewa tanah atas sebagian tanah pada Kanreg I BKN Yogyakarta sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Nomor: S-40/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 5 Maret 2021, namun belum ada tindak lanjut dari BKN untuk melakukan pungutan sewa dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut. Para penyewa mengajukan keberatan atas tarif sewa dengan mengajukan keringanan tarif kepada BKN. Pengajuan keringanan tarif dilakukan pada bulan Maret 2023, dan masih dalam proses persetujuan di KPKNL.

Selain kedua tanah yang dikuasai pensiunan pegawai tersebut, terdapat juga tanah yang berlokasi di perumahan BKN telah dibangun oleh pihak ketiga berupa bangunan permanen yang dimanfaatkan sebagai Musholla di luar lingkungan BKN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rejowinangun, Kota Gede seluas 48 m² senilai Rp342.853.000,00
 - b. Sedangadi, Mlati, Sleman seluas 104 m² senilai Rp683.456.000,00
3. Kantor Regional II BKN Surabaya. Tanah milik BKN yang berlokasi di belakang kantor yaitu Desa Waru, Sidoarjo seluas 97,44 m² telah dibangun bangunan permanen dan difungsikan oleh pihak ketiga sebagai garasi mobil.
- Selain itu, terdapat Tanah yang telah diterbitkan pelepasan hak atas tanahnya oleh Kementerian PUPR namun belum mengurangi luasan pada Sertifikat Tanah Kantor Regional II BKN Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan atas nama 7 orang, seluas 844,82 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor 7730047.
 - b. Surat Keputusan atas nama 6 orang, seluas 733,70 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor B 2511581.
4. Kantor Regional III BKN Bandung. Tanah milik BKN yang berlokasi di Muararajen Lama, Cihaurgeulis seluas 1.118 m² senilai Rp20.215.074.000,00 yang tidak dimanfaatkan oleh BKN, namun digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha oleh pihak ketiga.

Atas pemanfaatan BMN di lokasi tersebut, telah dilakukan pungutan sewa sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-192/MK.06/WKN.08/KNL01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara RI c.q. Kantor Regional III BKN. Pada tahun 2022, terjadi penyesuaian tarif sewa dan pergantian lima orang penyewa berdasarkan Surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S-252/MK.6/KNL.0801/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, namun BKN belum dapat melakukan pungutan sewa dengan tarif baru tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penghuni atas tarif sewa tersebut.

Atas permintaan penyesuaian tarif tersebut, melalui Surat KPKNL Bandung Nomor S-229/MK.6/KNL.0801/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Persetujuan Sewa atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada BKN RI c.q. Kanreg III BKN, permintaan penyesuaian tarif oleh penyewa telah disesuaikan dengan nilai yang sewa baru namun tarif tersebut masih belum dapat disetujui para penyewa sehingga mengajukan keberatan kembali kepada BKN

pada tanggal 2 Maret 2024 dan masih dalam proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan tarif sewa yang baru

Dari aset tanah BKN seluas 585.438 m², terdapat tanah yang belum bersertifikat yang terdiri dari:

1. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebanyak 1 bidang tanah yang berlokasi di Jl. Nasional Poros Bulungan-Malinau Desa Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dengan luas tanah 15.000 m² senilai Rp913.529.700,00
2. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebanyak 2 bidang tanah yang berlokasi di Jalan Adinegoro Padang, Ganting, Koto Tengah, Kota Padang dengan luas tanah 2.000 m² senilai Rp400.000.000,00

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan Tanah untuk Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang berlokasi di Aimas-Kab Sorong dengan luas 30.000 m² dengan nilai Rp4.624.710.000,00 (*Empat milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor: 34/A/KS/LX/2020 tanggal 24 September 2020 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara disertai dengan penyerahan Sertifikat Tanah sebanyak dua sertifikat rincian 1 (satu) sertifikat seluas 20.000 m² dengan No. 33.02.06.01.4.00033 dan 1 (satu) sertifikat seluas 10.000 m² dengan No.33.02.06.01.4.00034 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 79.853 unit sebesar Rp775.565.277.904,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 79.341 unit sebesar Rp709.687.406.999,00 (*tujuh ratus sembilan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sejumlah 7.316 unit sebesar Rp148.373.228.600,00 (*Seratus empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 6.804 unit sebesar Rp82.495.357.695,00 (*Delapan puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

c.1. Alat Besar (3.01);

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 240 unit sebesar Rp38.966.892.551,00 (*Tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo

awal total jumlah barang sejumlah 234 unit sebesar Rp39.080.792.221,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) mutasi tambah 16 unit dengan nilai sebesar Rp1.106.065.800,00 (*Satu milyar seratus enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*) dan mutasi kurang 10 unit dengan nilai sebesar Rp1.219.965.470,00 (*Satu milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	749.544.600	6.229.400	755.774.000
Hibah Masuk	0	775.000	775.000
Batal Transfer Keluar	349.516.800	0	349.516.800
Jumlah	1.099.061.400,00	7.004.400,00	1.106.065.800,00

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	349.516.800,00	0,00	349.516.800,00
Penghentian Aset Dari Penggunaan	870.448.670,00	0,00	870.448.670,00
Jumlah	1.219.965.470,00	0,00	1.219.965.470,00

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	237	38.409.243.551,00
Rusak Ringan	2	518.588.000,00
Rusak Berat	1	39.061.000,00

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 9 unit dengan nilai sebesar Rp870.448.670,00 (*Delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*).

c.2. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 Audited adalah sejumlah 337 unit sebesar Rp42.901.085.515,00 (*Empat puluh dua milyar sembilan ratus satu juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total sejumlah 337 unit sebesar Rp40.918.926.500,00 (*Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 24 unit alat angkutan darat bermotor dengan nilai

sebesar Rp2.903.522.215,00 (*Dua milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 24 unit alat angkutan darat bermotor dengan nilai sebesar Rp921.363.200,00 (*Sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	1.504.965.000,00	4.326.215,00	1.509.291.215,00
Transfer Masuk	1.393.286.000,00	945.000,00	1.394.231.000,00
Jumlah	2.898.251.000,00	5.271.215,00	2.903.522.215,00

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	299.000.000,00	0,00	299.000.000,00
Penghentiaan Aset dari Penggunaan	622.363.200,00	0,00	622.363.200,00
Jumlah	921.363.200,00	0,00	921.363.200,00

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	332	42.226.358.515,00
Rusak Ringan	3	474.100.000,00
Rusak Berat	2	200.627.000,00

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 21 unit/unit dengan nilai sebesar Rp622.363.200,00 (*Enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

c.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 118 unit sebesar Rp6.328.269.132,00 (*Enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 102 unit sebesar Rp6.305.939.012,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 17 unit dengan nilai sebesar Rp23.192.520,00 (*Dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh*

rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp862.400,00 (Delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	9.870.500,00	10.616.020,00	20.486.520,00
Transfer Masuk	2.706.000,00	-	2.706.000,00
Jumlah	12.576.500,00	10.616.020,00	23.192.520,00

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	-	862.400,00	862.400,00
Jumlah	-	862.400,00	862.400,00

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	116	6.327.317.543,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	2	951.589,00

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional adalah 1 unit dengan nilai sebesar Rp862.400,00 (Delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

c.4. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 Audited adalah sejumlah 7 unit sebesar Rp49.597.200,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 6 unit sebesar Rp49.107.300,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp489.900,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	489.900,00	489.900,00
Jumlah	-	489.900,00	489.900,00

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari jumlah Alat Pertanian diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pertanian diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	49.597.200,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 55.363 unit sebesar Rp236.882.043.705,00 (*Dua ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 53.884 unit sebesar Rp234.208.950.008,00 (*Dua ratus tiga puluh empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 5.116 unit dengan nilai sebesar Rp17.307.891.165,00 (*Tujuh belas milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 3.637 unit dengan nilai sebesar Rp14.634.797.468,00 (*Empat belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Saldo Awal	113.331.000,00	-	113.331.000
Pembelian	8.087.146.133,00	2.048.052.833,00	10.135.198.966
Transfer Masuk	5.326.691.878,00	15.200.100,00	5.341.891.978
Hibah Masuk	73.573.200,00	-	73.573.200
Reklasifikasi Masuk	680.378.414,00	6.252.002,00	686.630.416
Perolehan Lainnya	54.415.000,00	950.000,00	55.365.000
Batal Transfer Keluar	866.080.000,00	-	866.080.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	33.821.145,00	-	33.821.145
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.999.460,00	-	1.999.460
Jumlah	15.237.436.230,00	2.070.454.935,00	17.307.891.165,00

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	59.878.060,00	-	59.878.060,00
Transfer Keluar	3.986.108.450,00	9.856.800,00	3.995.965.250,00
Hibah Keluar	180.444.835,00	-	180.444.835,00
Reklasifikasi Keluar	-	4.752.002,00	4.752.002,00
Koreksi Pencatatan	263.300.000,00	350.000,00	263.650.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	10.095.036.939,00	35.070.382,00	10.130.107.321,00
Jumlah	14.584.768.284,00	50.029.184,00	14.634.797.468,00

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	54.522	234.832.803.451,00
Rusak Ringan	110	237.133.863,00
Rusak Berat	731	1.812.106.391,00

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 3.070 unit/unit sebesar Rp10.130.107.321,00 (*Sepuluh milyar seratus tiga puluh juta seratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).

c.6. Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 2.651 unit sebesar Rp47.553.225.409,00 (*Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal total jumlah barang sebesar 2.539 unit sebesar Rp47.419.631.239,00 (*Empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 342 unit dengan nilai sebesar Rp2.846.598.582,00 (*Dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 230 unit dengan nilai sebesar Rp2.713.004.412,00 (*Dua milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ribu empat ratus dua belas rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	1.898.326.101,00	110.377.041,00	2.008.703.142,00
Transfer Masuk	30.774.000,00	57.657.740,00	88.431.740,00
Hibah Masuk	3.005.200,00	-	3.005.200,00
Reklasifikasi Masuk	466.859.400,00	3.339.000,00	470.198.400,00
Perolehan Lainnya	-	260.100,00	260.100,00
Batal Transfer Keluar	276.000.000,00	-	276.000.000,00
Jumlah	2.674.964.701,00	171.633.881,00	2.846.598.582,00

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	297.900.000,00	57.657.740,00	355.557.740,00
Reklasifikasi Keluar	143.552.000,00	-	143.552.000,00
Penghentiaan Aset dari Penggunaan	2.211.172.672,00	2.722.000,00	2.213.894.672,00
Jumlah	2.652.624.672,00	60.379.740,00	2.713.004.412,00

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2.603	46.908.905.921,00
Rusak Ringan	3	453.823.750,00
Rusak Berat	45	190.495.738,00

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sejumlah 130 unit senilai Rp2.213.894.672,00 (*Dua milyar dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*).

c.7. Alat Kedokteran dan Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 411 unit sebesar Rp1.026.444.549,00 (*Satu milyar dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 459 unit sebesar Rp1.097.012.299,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 7 unit dengan nilai sebesar Rp5.373.500,00 (*Lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 55 unit dengan nilai sebesar Rp75.941.250,00 (*Tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	2.220.000,00	3.153.500,00	5.373.500,00
Jumlah	2.220.000,00	3.153.500,00	5.373.500,00

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	73.718.000,00	2.223.250,00	75.941.250,00
Jumlah	73.718.000,00	2.223.250,00	75.941.250,00

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	404	1.017.230.549,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	7	9.214.000,00

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 55 unit dengan nilai sebesar Rp75.941.250,00 (*Tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

c.8. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 145 unit sebesar Rp5.354.790.817,00 (*Lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 147 unit sebesar Rp5.915.576.464,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 3 unit dengan nilai sebesar Rp6.884.800,00 (*Enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 5 unit dengan nilai sebesar Rp567.670.447,00 (*Lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	2.974.800,00	-	2.974.800,00
Transfer Masuk	3.910.000,00	-	3.910.000,00
Jumlah	6.884.800,00	-	6.884.800,00

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	18.616.500,00	-	18.616.500,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	549.053.947,00	-	549.053.947,00
Jumlah	567.670.447,00	-	567.670.447,00

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	143	5.099.524.923,00
Rusak Ringan	1	127.632.947,00
Rusak Berat	1	127.632.947,00

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 4 unit dengan nilai sebesar Rp549.053.947,00 (*Lima ratus empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).

c.9. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang 9 unit sebesar Rp6.339.000,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 4 unit dengan nilai sebesar Rp2.476.400,00 (*Dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 13 unit dengan nilai sebesar Rp8.815.400,00 (*Delapan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	1.576.400,00	900.000,00	2.476.400,00
Jumlah	1.576.400,00	900.000,00	2.476.400,00

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	3.976.400,00	4.839.000,00	8.815.400,00
Jumlah	3.976.400,00	4.839.000,00	8.815.400,00

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.10. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 20.467 unit sebesar Rp394.189.435.426,00 (*Tiga ratus sembilan puluh empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 21.497 unit sebesar Rp331.973.928.442,00 (*tiga ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 1.764 unit dengan nilai sebesar Rp123.429.209.718,00 (*Seratus dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 2.794 unit dengan nilai sebesar Rp61.213.702.734,00 (*Enam puluh satu milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	100.125.112.999,00	86.632.419,00	100.211.745.418,00
Transfer Masuk	13.660.804.800,00	90.019.375,00	13.750.824.175,00
Hibah Masuk	74.556.600,00	-	74.556.600,00
Reklasifikasi Masuk	143.552.000,00	-	143.552.000,00
Perolehan Lainnya	32.886.600,00	2.488.975,00	35.375.575,00
Batal Transfer Keluar	7.037.830.000,00	-	7.037.830.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	97.788.975,00	-	97.788.975,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2.077.536.975,00	-	2.077.536.975,00
Jumlah	123.250.068.949,00	179.140.769,00	123.429.209.718,00

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Susulan	96.236.975,00	-	96.236.975,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	1.230.837.093,00	-	1.230.837.093,00
Transfer Keluar	19.728.006.400,00	90.019.375,00	19.818.025.775,00
Koreksi Pencatatan	1.980.950.000,00	1.413.975,00	1.982.363.975,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	38.085.788.916,00	450.000,00	38.086.238.916,00
Jumlah	61.121.819.384,00	91.883.350,00	61.213.702.734,00

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak

ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	20.114	377.841.637.183,00
Rusak Ringan	7	64.391.250,00
Rusak Berat	346	16.283.406.993,00

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1.742 unit sebesar Rp38.086.238.916,00 (*Tiga puluh delapan milyar delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).

c.11. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 6 unit sebesar Rp64.269.000,00 (*Enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 6 unit sebesar Rp64.269.000,00 (*Enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	64.269.000,00	-	64.269.000,00
Jumlah	64.269.000,00	-	64.269.000,00

Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	64.269.000,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.12. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 51 unit sebesar Rp1.799.148.100,00 (*Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 74 unit sebesar Rp2.391.681.414,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp465.283.000,00 (*Empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 24 unit dengan nilai sebesar Rp1.057.816.314,00 (*Satu milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus empat belas rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	465.283.000,00		465.283.000,00
Jumlah	465.283.000,00	-	465.283.000,00

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	1.057.816.314,00		1.057.816.314,00
Jumlah	1.057.816.314,00	-	1.057.816.314,00

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	51	1.799.148.100,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.13. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 9 unit sebesar Rp4.221.000,00 (*Empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 15 unit sebesar Rp58.719.600,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 3 unit dengan nilai sebesar Rp12.730.000,00 (*Dua belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 9 unit dengan nilai sebesar Rp67.228.600,00 (*Enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	12.250.000,00	480.000,00	12.730.000,00
Jumlah	12.250.000,00	480.000,00	12.730.000,00

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	66.828.600,00	-	66.828.600,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	400.000,00	-	400.000,00
Jumlah	67.228.600,00	-	67.228.600,00

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9	4.221.000,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari

penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit senilai Rp400.000,00 (*Empat ratus ribu rupiah*).

c.14. Rambu – Rambu (3.18)

Saldo Rambu - Rambu pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 30 unit sebesar Rp157.150.900,00 (*seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal total jumlah barang sebanyak 30 unit sebesar Rp157.150.900,00 (*seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	30	157.150.900,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Rambu - Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.15. Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 18 unit sebesar Rp288.704.600,00 (*Dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 8 unit sebesar Rp103.652.600,00 (*Seratus tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*)., mutasi tambah jumlah barang 12 unit sebesar Rp199.242.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*)

dan mutasi kurang jumlah barang 2 unit sebesar Rp14.190.000,00 (*Empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	199.242.000,00	-	199.242.000,00
Jumlah	199.242.000,00	-	199.242.000,00

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	14.190.000,00	-	14.190.000,00
Jumlah	14.190.000,00	-	14.190.000,00

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	16	274.514.600,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	2	14.190.000,00

Kelompok barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 2 unit sebesar Rp14.190.000,00 (*Empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

c.16. Akumulasi Penyusutan

Tabel 3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN		
		INTRAKOMPTABLE (Rp)	EKSTRAKOMPTABLE (Rp)	GABUNGAN (Rp)
30101	ALAT BESAR DARAT	-	-	-
30103	ALAT BANTU	31.487.294.413,00	7.843.843,00	31.495.138.256,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	33.999.073.728,00	-	33.999.073.728,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	216.478.970,00	12.666.872,00	229.145.842,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5.789.478.463,00	852.463,00	5.790.330.926,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	120.981.535,00	5.238.751,00	126.220.286,00
30303	ALAT UKUR	77.176.725,00	2.972.850,00	80.149.575,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	49.107.300,00	122.475,00	49.229.775,00
30501	ALAT KANTOR	77.540.964.463,00	123.692.526,00	77.664.656.989,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	133.306.729.498,00	2.165.033.964,00	135.471.763.462,00
30601	ALAT STUDIO	27.486.748.795,00	112.124.245,00	27.598.873.040,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	4.819.904.150,00	90.533.216,00	4.910.437.366,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	1.267.927.810,00	-	1.267.927.810,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	821.421.708,00	15.556.185,00	836.977.893,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	91.633.250,00	1.973.400,00	93.606.650,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	5.057.586.578,00	4.062.876,00	5.061.649.454,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	-	-
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	46.899.282,00	-	46.899.282,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1.285.200,00	1.121.250,00	2.406.450,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	-	-
31001	KOMPUTER UNIT	99.986.014.527,00	-	99.986.014.527,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	163.737.079.411,00	799.173.607,00	164.536.253.018,00
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4.284.600,00	-	4.284.600,00
31503	ALAT SAR	1.795.742.500,00	3.405.600,00	1.799.148.100,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	-	-
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	809.250,00	809.250,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	141.136.432,00	13.024.544,00	154.160.976,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	116.975.000,00	596.400,00	117.571.400,00
JUMLAH		587.961.924.338,00	3.360.804.317,00	591.322.728.655,00

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 491 unit sebesar Rp896.219.142.078,00 (*Delapan ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 499 unit sebesar Rp868.873.680.270,00 (*Delapan ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), mutasi tambah 12 unit sebesar Rp31.721.184.613,00 (*Tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah*) dan mutasi kurang 20 unit sebesar Rp4.375.722.805,00 (*Empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua*

puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

d.1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebanyak 458 unit sebesar Rp880.668.534.838,00 (*Delapan ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 466 unit sebesar Rp853.442.166.040,00 (*Delapan ratus lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu empat puluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 12 unit sebesar Rp31.066.038.857,00 (*Delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dan mutasi kurang 20 unit sebesar Rp3.839.670.059,00 (*Tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu lima puluh sembilan rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	1.065.682.100,00	-	1.065.682.100,00
Transfer Masuk	28.582.500,00	-	28.582.500,00
Hibah Masuk	65.000.000,00	-	65.000.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	23.693.758.682,00	-	23.693.758.682,00
Reklasifikasi Masuk	124.086.000,00	-	124.086.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	217.287.728,00	-	217.287.728,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.644.654.182,00	-	1.644.654.182,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2.284.864.057,00	-	2.284.864.057,00
Pengembangan Melalui KDP	1.942.123.608,00	-	1.942.123.608,00
Jumlah	31.066.038.857,00	-	31.066.038.857,00

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Susulan	471.636.854,00	-	471.636.854,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	124.318.474,00	-	124.318.474,00
Transfer Keluar	28.582.500,00	-	28.582.500,00
Reklasifikasi Keluar	124.086.000,00	-	124.086.000,00
Koreksi Pencatatan	2.163.425.231,00	-	2.163.425.231,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	927.621.000,00	-	927.621.000,00
Jumlah	3.839.670.059,00	-	3.839.670.059,00

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah

sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	422	873.631.578.838,00
Rusak Ringan	7	4.836.814.000,00
Rusak Berat	29	2.200.142.000,00

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 13 unit dengan nilai sebesar Rp927.621.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

d.2. Monumen (4.02)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebanyak 5 unit sebesar Rp51.419.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 5 unit sebesar Rp51.419.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Mutasi Kurang Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari jumlah Monumen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Monumen di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	51.419.000,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Monumen yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.3. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Pengguna Tahunan

Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebanyak 28 unit sebesar Rp15.499.188.240,00 (*Lima belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 28 unit sebesar Rp15.380.095.230,00 (*Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp119.093.010,00 (*Seratus sembilan belas juta sembilan puluh tiga ribu sepuluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	119.093.010,00	-	119.093.010,00
Jumlah	119.093.010,00	-	119.093.010,00

Mutasi Kurang Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	28	15.499.188.240,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	0	0,00

Kelompok barang Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan		
		intrakomptabel	ekstrakomptabel	gabungan
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	168.390.315.223,00	924.065,00	168.391.239.288,00
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	21.410.555.581,00	-	21.410.555.581,00
4.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.010.612,00	1.264.500,00	8.275.112,00
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	2.765.473.926,00	-	2.765.473.926,00
	Jumlah	192.573.355.342,00	2.188.565,00	192.575.543.907,00

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebanyak 58.828 m² sebesar Rp24.637.574.940,00 (*Dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 58.830 m² sebesar Rp24.716.999.940,00 (*Dua puluh empat miliar*

tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), mutasi tambah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 2 m² dengan nilai sebesar Rp79.425.000,00 (*Tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

e.1. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 58.771 m² sebesar Rp16.468.966.800,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 58.771 m² sebesar Rp16.468.966.800,00 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	58.771	16.468.966.800,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m² sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.2. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 26 unit sebesar Rp2.934.621.163,00 (*Dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus*

enam puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 27 unit sebesar Rp2.980.446.163,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp45.825.000,00 (*Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	45.825.000,00	-	45.825.000,00
Jumlah	45.825.000,00	-	45.825.000,00

Dari jumlah Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	25	2.888.796.163,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	1	45.825.000,00

Kelompok barang irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit dengan nilai sebesar Rp45.825.000,00 (*Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

e.3. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 12 unit dengan nilai sebesar Rp3.036.626.260,00 (*Tiga milyar tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp3.070.226.260,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp33.600.000,00 (*Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	33.600.000,00	-	33.600.000,00
Jumlah	33.600.000,00	-	33.600.000,00

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	12	3.036.626.260,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.4. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 19 unit sebesar Rp2.197.360.717,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 19 unit sebesar Rp2.197.360.717,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	19	2.197.360.717,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Tabel 5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

	JALAN DAN JEMBATAN	16.260.541.380,00
5.01.01	Jalan	16.260.126.000,00
5.01.02	Jembatan	415.380,00
	IRIGASI	877.968.085,00
5.02.01	Bangunan Air Irigasi	38.211.067,00
5.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	28.985.130,00
5.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	16.428.500,00
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	613.252.207,00
5.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	94.165.530,00
5.02.07	Bangunan Air Kotor	86.925.651,00
	JARINGAN	2.407.560.422,00
5.03.01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	214.729.916,00
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	303.823.517,00
5.03.10	Instalasi Lain	917.573.820,00
5.04.01	Jaringan Air Minum	64.035.095,00
5.04.02	Jaringan Listrik	858.072.069,00
5.04.03	Jaringan Telepon	49.326.005,00
	JUMLAH	19.546.069.887,00

f. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebanyak 27 unit sebesar Rp12.089.820.513,00 (*Dua belas milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak sebanyak 25 unit sebesar Rp12.060.376.974,00 (*Dua belas milyar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), mutasi tambah sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp471.212.944,00 (*Empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit sebesar Rp441.769.405,00 (*Empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi per bidang barang adalah sebagai berikut:

f.1. Peralatan dan Mesin dalam Renovasi (6.07)

Saldo Peralatan dan Mesin dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 1 unit sebesar Rp3.998.500,00 (*tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 1 unit sebesar

Rp3.998.500,00 (*tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah mutasi tambah sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan dan Mesin dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	3.998.500,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Peralatan dan Mesin dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

f.2. Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (6.07)

Saldo Gedung dan Bangunan dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 25 unit sebesar Rp12.005.583.613,00 (*Dua belas milyar lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 23 unit sebesar Rp11.976.140.074,00 (*sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu tujuh puluh empat rupiah*), mutasi tambah sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar Rp471.212.944,00 (*Empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit sebesar Rp441.769.405,00 (*Empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah*).

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	271.938.000,00	-	271.938.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	199.274.944,00	-	199.274.944,00
Jumlah	471.212.944,00	-	471.212.944,00

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	7.454.585,00	-	7.454.585,00
Hibah Keluar	434.314.820,00	-	434.314.820,00
Jumlah	441.769.405,00	-	441.769.405,00

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	25	12.005.583.613,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Gedung dan Bangunan dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

f.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi (6.03)

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 1 unit sebesar Rp80.238.400,00 (*delapan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 1 unit sebesar Rp80.238.400,00 (*delapan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah mutasi tambah sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	80.238.400,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

f.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Tabel 6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.07.02	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	-
6.07.03	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	609.295.525,00
6.07.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	-
6.07.05	Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi	-
	Jumlah	609.295.525,00

g. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* sejumlah 10.148 unit sebesar Rp1.621.608.403,00 (*Satu milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan ribu empat ratus tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 12.138 unit sebesar Rp1.849.014.625,00 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 5.585 unit sebesar Rp427.982.940,00 (*Empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 7.575 unit sebesar Rp655.389.162,00 (*Enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut: .

g.1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 9.622 sebesar Rp1.467.819.803,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 11.615 sebesar Rp1.649.891.025,00 (*Satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 5.581 unit dengan nilai sebesar Rp426.317.940,00 (*Empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 7.574 unit sebesar Rp608.389.162,00 (*Enam ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	23.818.000,00	-	23.818.000,00
Hibah Masuk	18.135.000,00	-	18.135.000,00
Reklasifikasi Masuk	384.364.940,00	-	384.364.940,00
Jumlah	426.317.940,00	-	426.317.940,00

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	384.364.940	-	384.364.940,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	224.024.222	-	224.024.222,00
Jumlah	608.389.162,00	-	608.389.162,00

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9.611	1.430.619.803,00
Rusak Ringan	0	0,00
Rusak Berat	11	37.200.000,00

Kelompok Bahan Perpustakaan Tercetak yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 2.418 unit sebesar Rp224.024.222,00 (*Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).

g.2. Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga (6.02);

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 30 unit sebesar Rp117.719.100,00 (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah sejumlah 31 unit sebesar Rp164.719.100,00 (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp47.000.000,00 (*Empat puluh tujuh juta rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	-	-
Reklasifikasi Masuk	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	47.000.000,00	-	47.000.000,00
Jumlah	47.000.000,00	-	47.000.000,00

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Alat Kebudayaan/Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	30	117.719.100,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Barang Bercorak Kesenian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit dengan nilai sebesar Rp47.000.000,00 (*Empat puluh tujuh juta rupiah*).

g.3. Tanaman (6.05);

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 496 unit sebesar Rp36.069.500,00 (*Tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 492 unit sebesar Rp34.404.500,00 (*Tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah*), mutasi tambah sejumlah 4 unit sebesar Rp1.665.000,00 (*Satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	1.665.000	1.665.000
Jumlah	-	1.665.000,00	1.665.000,00

Mutasi Kurang Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Dari jumlah Tanaman di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Tanaman di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	496	36.069.500,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

g.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.01.01	Bahan Perpustakaan	0,00
6.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	0,00
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	53.949.438,00
6.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	0,00
6.05.01	Tanaman	0,00
	JUMLAH	53.949.438,00

h. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebesar Rp19.621.605.525,00 (*Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp168.877.064,00 (*Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp45.277.554.893,00 (*Empat puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp25.824.826.432,00 (*Dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Perolehan/Penambahan KDP	911.895.345
Pengembangan KDP	43.246.533.630
Koreksi Nilai KDP Bertambah	1.064.680.918
Perolehan Lainnya KDP	54.445.000
Jumlah	45.277.554.893,00

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Koreksi Pencatatan KDP	4.250.000,00
Koreksi Nilai KDP Berkurang	184.694.142,00
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	25.635.882.290,00
Jumlah	25.824.826.432,00

i. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024

Audited adalah sebesar Rp80.172.522.663,00 (*Delapan puluh milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp147.104.103.314,00 (*Seratus empat puluh tujuh milyar seratus empat juta seratus tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp146.179.037.284,00 (*Seratus empat puluh enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp213.110.617.935,00 (*Dua ratus tiga belas milyar seratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).

i.1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

i.2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 180 unit sebesar Rp59.620.529.497,00 (*Lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 213 unit sebesar Rp125.741.319.487,00 (*seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 9 unit sebesar Rp13.798.416.800,00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 42 unit dengan nilai sebesar Rp79.919.206.790,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang barang adalah sebagai berikut:

i.2.1 Hak Cipta

Saldo Hak Cipta pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 1 unit sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Dari jumlah Hak Cipta di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Hak Cipta yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

i.2.2 Software

Saldo Software pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 176 unit sebesar Rp57.301.344.197,00 (*Lima puluh tujuh milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 211 unit sebesar Rp125.545.819.487,00 (*seratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 7 unit sebesar Rp11.674.731.500,00 (*Sebelas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 42 unit dengan nilai sebesar Rp79.919.206.790,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	10.723.050.000,00
Perolehan Lainnya	5.000.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	528.093.500,00
Pengembangan Melalui KDP	124.690.000,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	293.898.000,00
Jumlah	11.674.731.500,00

Mutasi Kurang Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	1.375.156.904,00
Koreksi Pencatatan	5.000.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	78.539.049.886,00
Jumlah	79.919.206.790,00

Dari jumlah Software di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 41 unit dengan nilai sebesar Rp78.539.049.886,00 (*Tujuh puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*).

i.2.3 Lisensi

Saldo Lisensi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 1 unit sebesar Rp2.024.640.000,00 (*Dua milyar dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 1 unit sebesar Rp2.024.640.000,00 (*Dua milyar dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	2.024.640.000,00
Jumlah	2.024.640.000,00

Mutasi Kurang Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Jumlah	

Dari jumlah Lisensi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Lisensi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

i.2.4 Hasil Kajian Penelitian

Saldo Hasil Kajian Penelitian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 2 unit sebesar Rp294.045.300,00 (*Dua ratus sembilan puluh empat juta empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) mutasi tambah sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp99.045.300,00 (*Sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) dan mutasi

kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	99.045.300,00
Jumlah	99.045.300,00

Mutasi Kurang Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Jumlah	

Dari jumlah Hasil Kajian Penelitian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Hasil Kajian Penelitian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

i.3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sejumlah 752 unit sebesar Rp20.551.993.166,00 (*Dua puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah*).

Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 216 unit sebesar Rp21.362.783.827,00 (*dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 7.521 unit dengan nilai sebesar Rp132.380.620.484,00,00 (*Seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 6.985 unit dengan nilai sebesar Rp133.191.411.145,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu seratus empat puluh lima rupiah*).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	132.339.292.452,00	41.328.032,00	132.380.620.484,00
Jumlah	132.339.292.452,00	41.328.032,00	132.380.620.484,00

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	293.898.000,00	-	293.898.000,00
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	132.857.447.513,00	40.065.632,00	132.897.513.145,00
Jumlah	133.151.345.513,00	40.065.632,00	133.191.411.145,00

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Peralatan dan Mesin	17.495.812.641,00	1.262.400,00	17.497.075.041,00
Gedung dan Bangunan	1.071.795.000,00	-	1.071.795.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.825.000,00	-	45.825.000,00
Aset Tetap Lainnya	37.200.000,00	-	37.200.000,00
Aset Tak Berwujud	1.900.098.125,00	-	1.900.098.125,00
Jumlah	20.550.730.766,00	1.262.400,00	20.551.993.166,00

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah adalah:

Tabel 9. Akumulasi Penyusutan BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Kode	Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
30103	ALAT BANTU	285.067.670,00	-	285.067.670,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	197.800.000,00	-	197.800.000,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2.827.000,00	-	2.827.000,00
30303	ALAT UKUR	-	431.200,00	431.200,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	-	-
30501	ALAT KANTOR	331.046.735,00	-	331.046.735,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1.056.976.282,00	400.000,00	1.057.376.282,00
30601	ALAT STUDIO	58.268.597,00	-	58.268.597,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	465.458.610,00	-	465.458.610,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	9.580.100,00	-	9.580.100,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	127.632.947,00	-	127.632.947,00
31001	KOMPUTER UNIT	1.546.717.403,00	-	1.546.717.403,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	13.395.306.997,00	-	13.395.306.997,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-
31901	PERALATAN OLAH RAGA	14.190.000,00	-	14.190.000,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	291.338.970,00	-	291.338.970,00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20.829.543,00	-	20.829.543,00
50310	INSTALASI LAIN	-	-	-
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCEPAK	-	-	-
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	-	-
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	-	-
80101	ASET TAK BERWUJUD	51.868.961.084,00	-	51.868.961.084,00
Total		69.672.001.938,00	831.200,00	69.672.833.138,00

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited*

a. Barang Milik Negara per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024

Audited adalah sebesar Rp4.147.630.860.217,00 (*Empat triliun seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut

Tabel 10. Penyajian nilai BMN dalam Neraca

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET LANCAR						
1	Persediaan	6.343.765.576,00	0,15	-	0,00	6.343.765.576,00	0,15
	Sub Jumlah (1)	6.343.765.576,00	0,15	-	0,00	6.343.765.576,00	0,15
II	ASET TETAP						
1	Tanah	2.331.580.054.368,00	56,31	-	0,00	2.331.580.054.368,00	56,21
2	Peralatan Mesin	768.036.979.101,00	18,55	7.528.298.803,00	99,19	775.565.277.904,00	18,70
3	Gedung & Bangunan	896.194.810.778,00	21,65	24.331.300	0,32	896.219.142.078,00	21,61
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.637.574.940,00	0,60	-	0,00	24.637.574.940,00	0,59
5	Aset Tetap Lainnya	1.585.538.903,00	0,04	36.069.500,00	0,00	1.621.608.403,00	0,04
6	ATR	12.089.820.513,00	0,29	-	0,00	12.089.820.513,00	0,29
7	KDP	19.621.605.525,00	0,47	-	0,00	19.621.605.525,00	0,47
	Sub Jumlah (2)	4.053.746.384.128,00	97,91	7.588.699.603,00	99,98	4.061.335.083.731,00	97,91
III	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Aset Tak Berwujud	61.520.627.622,00	1,49	-	0,00	61.520.627.622,00	1,48
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	18.650.632.641,00	0,45	1.262.400,00	0,02	18.651.895.041,00	0,45
	Sub Jumlah (3)	80.171.260.263,00	1,94	1.262.400,00	0,02	80.172.522.663,00	1,93
	TOTAL	4.140.261.409.967,00	100	7.589.962.003,00	100,00	4.147.851.371.970,00	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Penyajian nilai Penyusutan BMN dalam Neraca

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	
III	ASET TETAP						
1	Peralatan Mesin	587.961.924.338,00	67,55	3.360.804.317,00	99,91	591.322.728.655,00	
2	Gedung & Bangunan	192.573.355.342,00	22,12	2.188.565,00	0,07	192.575.543.907,00	
3	Jalan, dan Jembatan	16.260.541.380,00	1,87	-	0,00	16.260.541.380,00	
4	Irigasi	877.968.085,00	0,10	-	0,00	877.968.085,00	
5	Jaringan	2.407.560.422,00	0,28	-	0,00	2.407.560.422,00	
6	Aset Tetap dlm Renov.(ATR)	609.295.525,00	0,07	-	0,00	609.295.525,00	
7	Aset Tetap Lainnya	53.949.438,00	0,01	-	0,00	53.949.438,00	
	Sub Jumlah (1)	800.744.594.530,00	92,00	3.362.992.882,00	99,98	804.107.587.412,00	
III	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	-	
2	Aset Tak Berwujud (ATB)	49.968.862.959,00	5,74	-	0,00	49.968.862.959,00	
3	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional	17.803.040.854,00	2,05	831.200,00	0,02	17.803.872.054,00	
4	ATB yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	1.900.098.125,00	0,22	-	0,00	1.900.098.125,00	
	Sub Jumlah (2)	69.672.001.938,00	8,00	831.200,00	0,02	69.672.833.138,00	
	TOTAL	870.416.596.468,00	100,00	3.363.824.082,00	100,00	873.780.420.550,00	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan nilai BMN Laporan Barang dan Laporan Keuangan

No.	Golongan Barang	Laporan Barang (Rp)	Laporan Keuangan (Rp)	Selisih
1	Persediaan	6.343.765.576,00	6.343.765.576,00	-
2	Tanah	2.331.580.054.368,00	2.331.580.054.368,00	-
3	Peralatan Mesin	768.036.979.101,00	768.036.979.101,00	-
4	Gedung & Bangunan	896.194.810.778,00	896.194.810.778,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.637.574.940,00	24.637.574.940,00	-
6	Aset Tetap di Renov (ATR)	12.089.820.513,00	12.089.820.513,00	-
7	Aset Tetap Lainnya	1.585.538.903,00	1.585.538.903,00	-
8	KDP	19.621.605.525,00	19.621.605.525,00	-
9	Aset Tak Bervujud	61.520.627.622,00	61.520.627.622,00	-
10	Aset Lain-lain *)	18.650.632.641,00	18.650.632.641,00	-
TOTAL		4.140.261.409.967,00	4.140.261.409.967,00	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

II. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	31 Desember 2020	3.950.769.706.634,00	(236.764.775.270,00)	(5,65)
2	31 Desember 2021	4.014.796.075.085,00	64.026.368.451,00	1,62
3	31 Desember 2022	4.034.613.674.636,00	19.817.599.551,00	0,49
4	31 Desember 2023	4.102.233.159.014,00	67.619.484.378,00	0,02
5	31 Desember 2024	4.147.851.371.970,00	45.618.212.956,00	0,01

2. Informasi Pengelola BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebagai berikut:

No	Golongan Barang	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah (m ²)	2.331.578.779.368	1.275.000,00
2	Peralatan dan Mesin	761.062.437.211	25.942.591.585,00
3	Gedung dan Bangunan	872.565.590.404	1.811.408.009,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.666.971.440	16.428.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.607.728.886	44.579.517
6	Aset Tak Berwujud	61.520.627.622,00	0,00
TOTAL		4.053.002.134.931,00	27.816.282.611,00

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	1	-	1
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	1	1
	c. Disetujui	3	5	4	6	18
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/Kuasa Pengguna	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	12	-	6	3	21
7	Tindak Lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	15	5	10	9	39
8	Selesai serah terima	-	-	10	-	-
9	Gagal/Batal Proses	-	-	-	-	-

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

3. BMN dari dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited*, adalah sebagai berikut :

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (Neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				
Total				

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebesar Rp5.519.894.697,00 (*Lima milyar lima ratus Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang

Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	5.519.894.697,00	0,00
Total		5.519.894.697,00	0,00

b. Daftar barang hilang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* adalah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku
1			
Total			

7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1			0,00
Total			

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kanreg II BKN Surabaya	931.154.839,00	0,00
2	Kanreg III BKN Bandung	106.905.700,00	0,00
3	Kanreg IV BKN Makassar	3.599.371.518,00	0,00
4	Kanreg XII BKN Pekanbaru	882.462.640,00	0,00
Total		5.519.894.697,00	0,00

9. BMN Berupa BPYBDS

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai (Rp)
1		
2		
Total		

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan serta langkah-langkah strategis yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN antara lain:

1. Aset berupa gedung dan bangunan masih terdapat permasalahan pada Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Melalui Surat Nomor 149/1/KR/III/1/2017 tanggal 9 Februari 2017, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara telah membuat surat permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BKN. Selain surat tersebut, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga mengajukan surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor K26-30/V21-10/06 tanggal 9 Februari 2017 permohonan Hibah/Pemindahtanganan Tanah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Berdasar informasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, Tanah seluas 7.849,5 m2 yang berlokasi di Jl. Surapati No. 10 merupakan tanah negara bekas tanah Rech van Eigendom No.11582 dengan surat hak tanah nomor 257 tgl. 15 April 1950 dan bekas tanah Rech van Eigendom No.11577 dengan surat hak tanah nomor 273 tgl. 20 April 1950. Selain diklaim oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan dasar naskah serah terima aset-aset eks Dana Pensiun Indonesia tanah tersebut juga diklaim oleh Pemerintah Kota Bandung dengan dasar kepemilikan bukti jual beli tanah.

Berdasarkan penuturan dari KPKNL Bandung, terdapat dua pengajuan atas permintaan sertifikat tanah yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui surat nomor 408/1/1992 tanggal 27 Agustus 1992, yang diajukan oleh Kepala Kantor Regional III BKN dan melalui surat Nomor S-1310/A.954/0896 tanggal 15 Agustus 1996, yang diajukan oleh Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Departemen Keuangan. Sampai saat ini tanah tersebut masih dalam proses penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga dari pihak Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, pihak Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat, maupun pihak Kantor Regional III BKN belum ada satu pun yang memiliki sertifikat tanah tersebut.

11. Langkah-langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian adalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Badan Kepegawaian Negara, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DJKN dan KPKNL sebagai pembina Penatausahaan BMN ;
- b. Melakukan sosialisasi peraturan penatausahaan BMN kepada satker-satker dan stakeholder terkait;
- c. Melakukan penatausahaan pengelolaan BMN lebih cermat dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

III. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- I. *“Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara/ Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.”*
- II. *“Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”*

Dalam rangka mewujudkan Penyajian BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset tetap :

- a. tanah,
- b. gedung dan bangunan.
- c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi :

1) jalan dan jembatan.

2) bangunan air.

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan Kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023, terdapat temuan terkait Penatausahaan Persediaan dan Pengelolaan Aset tetap. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023

Pada Badan Kepegawaian Negara
Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Pengelolaan aset tetap berupa tanah pada Kanreg II BKN Surabaya belum memadai dan terdapat kekurangan pembayaran tanah yang dilepas sebesar Rp4.738.507,83	Tahun 2022: -S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II Tahun 2023: -Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut -Surat ke Warga untuk merenovasi Pagar Rumah -Pemecahan sertifikat [belum] -Penertiban lahan [belum]

Penanggungjawab

Laporan Pengguna Barang Tahunan *Audited*

Per 31 Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H.

LAMPIRAN XII

Monitoring Tindak Lanjut Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanlanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
1	2022	43/LHP/XVI/05/2022 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021	Pengelolaan aset tetap berupa tanah pada Kanreg II BKN Surabaya belum memadai dan terdapat kekurangan pembayaran tanah yang dilepas sebesar Rp4.738.507,83	BPK merekomendasikan Plt. Kepala BKN agar menginstruksikan KPA pada Biro Umum Kantor Pusat BKN dan Kanreg II BKN Surabaya untuk: a. Menindaklanjuti permintaan dari pihak ketiga untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah yang telah dilunasi.	Semester II 2022: - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II Semester II 2023: - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Pemecahan sertifikat [belum]	Belum Sesuai	Semester II 2023: belum ada pengosongan lahan/ pembongkaran bangunan yang ada di tanah BKN yang dipakai warga	Melakukan pemecahan sertipikat.
2				b. Melakukan penertiban atas tanah milik BKN yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga.	Semester II 2022: - S-16678-2022 Surat Perintah KPA Biro Umum Kantor Pusat dan Kanreg II Semester I 2023: - Surat ke Warga untuk merenovasi Pagar Rumah; Semester II 2023: - Surat Kakanreg II BKN Surabaya perihal Informasi Status Tindak Lanjut - Penertiban lahan [belum]	Belum Sesuai	Semester II 2023: Belum sesuai Rekomendasi dengan alasan: belum ada pemecahan sertifikat, yang disampaikan baru berupa surat	Melakukan penertiban.
3	2023	115/LHP/XVI/05/2023 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2022	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tunjangan Kinerja Pegawai BKN Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk mengenakan tarif pajak atas penghasilan tukin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan melaporkan penghasilan tukin sebagai komponen penghasilan tetap berikut nilai pajak atas penghasilan tukin yang dipotong ke dalam form 1721-A2.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Sekretaris Utama dan Kepala Biro Keuangan Semester II 2023: - Surat Penyampaian Progres oleh Kepala Biro Keuangan - Surat Sesma ke Kepala Biro Keuangan Semester I 2024: - Pengenaan tarif pajak atas tunjangan kinerja dan pemotogan tukin dalam form 1721-A2 (Sampel Bukti Potong Pajak Pegawai) - Dokumen bukti pengenaan tarif pajak penghasilan atas tunjangan kinerja - Pengenaan tarif pajak atas tunjangan kinerja dan pemotogan tukin dalam form 1721-A2 (Sampel Bukti Potong Pajak Pegawai) Semester II 2024 1. Surat pernyataan Kepala Biro Keuangan tanggal 19 Desember 2024 yang menyatakan bahwa : a). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada masa pajak 2023 atas Penghasilan pegawai telah memperhitungkan Tunjangan Kinerja Pegawai BKN tahun 2023, b). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada masa pajak 2024 telah menggunakan aplikasi Gaji Web Kementerian Keuangan dengan memperhitungkan komponen gaji dan tunjangan kinerja sehingga perhitungan tersebut telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan Perundang-Undangan Sampel Detil Pajak Tunkin - Pengenaan tarif pajak atas tunjangan kinerja dan pemotongan tukin dalam form 1721-A2 (Sampel Bukti Potong Pajak Pegawai TA 2024 Pusbang & 14 Kanreg)	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Pengenaan tarif pajak atas penghasilan tunjangan kinerja baru dilaksanakan pada tingkat Kantor Pusat. Belum ada bukti dukung sampel laporan pajak form 1721-A2 dan belum mengakumulasikan tunjangan kinerja pada masa pajak 2023 yang menunjukkan perhitungan pajak penghasilan termasuk tunjangan kinerja pada satker Pusbangpeg ASN dan 14 Kantor Regional BKN	Kepala BKN memerintahkan Sekretaris Utama BKN untuk mengenakan tarif pajak atas penghasilan tukin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan melaporkan penghasilan tukin sebagai komponen penghasilan tetap berikut nilai pajak atas penghasilan tukin yang dipotong ke dalam form 1721-A2.

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindaklanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
4			Peraturan tentang Tukin BKN Tidak Selaras dengan Peraturan Disiplin Pegawai Terkait Hukuman dan Belum Terdapat Pemotongan Tukin Terhadap Pegawai yang Presensi tanpa Melalui Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN memerintahkan Kepala Biro SDM untuk: a. Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia Semester I 2024: - Surat Tanggapan Karo SDM bahwa Penyesesuaian Peraturan akan Dilakukan Ketika PP Gaji dan Tunjangan Berlaku - Peraturan pemberian dan pembayaran tukin [belum]	Belum Sesuai	Semester I 2024: Belum ada peraturan untuk penyelarasan aturan pemberian dan pembayaran tukin masih menunggu pemberlakuan PP Gaji dan Tunjangan.	Kepala BKN memerintahkan Kepala Biro SDM berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk: a. Menyelaraskan aturan pemberian dan pembayaran tukin dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
5			Pembayaran Uang Lembur Tidak Didukung dengan Bukti Kehadiran Real Time dari Aplikasi Presensi LBP	BPK merekomendasikan Kepala BKN: a. Menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung dan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Semester I 2023: - Surat Tanggapan Kepala PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Surat Kepala PusBangPeg ASN ke Kepala Biro SDM perihal Teknis Jam Kerja Lembur Semester I 2024: - Surat Kakanreg Bandung ke Kepala Biro SDM perihal Penggunaan LBP untuk Lembur Pegawai Semester II 2024: Pada Semester II 2024 Telah ditindaklanjuti dengan: - Nota Dinas Kepala Biro SDM kepada Kepala Kantor Regional III Bandung Nomor 223/S1-02-01/ND/AII/2024 perihal penggunaan LBP untuk lembur Pegawai - Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepada Kepala Pusat Pengembangan Kepegawian No 432/KP.11.02/ND/A.11/2024 tanggal 12 Juli2024 Perihal Penyelesaian Usul. Lembur Pegawai Pusbang Kepegawaian ASN - Keputusan Kepala No 432 Tahun 2024 tentang Pedoman Standarisasi Persyaratan dokumen tagihan dan pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan BKN - Pada lampiran poin D.1 Hal 20. Persyaratan tagihan kegiatan pembayaran uang lembur	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Surat tanggapan Pusbang belum dilampirkan Belum ada surat jawaban dari Kabiro SDM kepada Kepala Pusbang (dan sekaligus pemberitahuan kepada seluruh satker/kanreg) perihal presensi LBP untuk lembur di hari libur. Belum ada bukti implementasi presensi LBP untuk lembur di hari libur pada Pusbang ASN.	Kepla BKN menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk: a. Berkoordinasi dengan Biro SDM dalam penggunaan LBP untuk presensi lembur di hari libur.
6			b. Menginstruksikan Kepala Kanreg III BKN Bandung dan Pusbang ASN untuk mengimplementasikan dan mengendalikan kedisiplinan presensi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke Kepala Kantor Regional III BKN Bandung dan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Semester I 2024: - Bukti pelaksanaan lembur hari sabtu di Kanreg III BKN Bandung sudah menggunakan LBP Semester II 2024: Pada semester II telah ditindaklanjuti dengan: - Bukti pelaksanaan lembur sabtu minggu di PusBangPeg ASN sudah menggunakan LBP Keputusan Kepala No 432 Tahun 2024 tentang Pedoman Standarisasi Persyaratan dokumen tagihan dan pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan BKN - Pada lampiran poin D.1 Hal 20. Persyaratan tagihan kegiatan pembayaran uang lembur	Pengajuan Sesuai	Semester 1 2024: Bukti lembur hari sabtu minggu sudah pakai LBP (ST Lembur dan Printout LBP), jika tidak ada lembur dapat melampirkan absen pegawai yang masuk di Sabtu atau minggu. Belum ada bukti implementasi presensi LBP untuk lembur di hari libur pada Pusbang ASN	b. Mengimplementasikan dan mengendalikan kedisiplinan presensi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7		Pengenaan Pajak atas Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruangn Hotel Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan: a. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN memastikan: 1) Bendahara pengeluaran di masing-masing satker dapat memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan. 2) Berkoordinasi dengan KPP setempat untuk memastikan penyetoran PPh Pasal 23 oleh pihak hotel.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Semester II 2023: - Bukti bahwa PPH23 telah disetor oleh Oemah Kecebong Yogyakarta atas kegiatan Fullday meeting Rakor Permasalahan Kepegawaian wilker Kanreg X Denpasar BKN bulan Mei 2022 - Tanda Terima Surat Perintah (Manado) - Surat Perintah KPA Kanreg V BKN Jakarta ke PPK dan Bendahara - Surat Penyampaian Tanggapan oleh Kakanreg IV BKN Makassar bahwa telah menegur Bendahara Pengeluaran dan berkoordinasi dengan Pihak Hotel - Surat Tanggapan KPA PusBangPeg ASN atas Surat Perintah Sistem Pengendalian Intern - Bukti bahwa PPH23 telah disetor oleh PusBangPeg ASN atas kegiatan 2023 - Surat Perintah Sesma ke KPA terkait	Belum Sesuai	Akhir Semester II 2023: belum sesuai. belum didukung bukti setor yang memadai Akhir Semester I 2024: Bukti bahwa PPH23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg V BKN Jakarta dengan KPP setempat (3 Paket Meeting) [belum] Tindak Lanjut belum didukung bukti koordinasi/korespondensi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Perlu ditambahkan bukti surat menyurat kepada hotel dan KPP serta menyampaikan hasil dari surat menyurat	Kepala BKN menginstruksikan : a. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BKN untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan terkait Belanja Sewa Paket Meeting/Sewa Ruangn Hotel;	

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanlanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
					Semester I 2024: Pada Semester I Telah ditindaklanjuti dengan: - Surat Perintah Kakanreg III BKN Bandung 111/AI.07.03/ND/KR.III/2023 tanggal 29 Agustus 2023 kepada Bendahara Pengeluaran Untuk: 1. Lebih cermat dalam memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan; 2. Berkoordinasi dengan KPPN Bandung untuk memastikan penyetoran PPh Pasal 23 oleh pihak hotel; 3. Melaporkan hasil tindak lanjut yang sudah dilaksanakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Regional III BKN Bandung. Semester I 2024: Pada semester I Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan: Bukti Setor PPSS - Nomor NTPN : FC1B21PLAKQ6HLTL tanggal 10 Juli 2024 sebesar Rp.1,306,000 - Nomor NTPN : 7712200QAVLCN7QN Tanggal 10 Juli 2024 sebesar Rp.1,632,000 - Nomor NTPN : E7D374FTQ4H0GS9M Tanggal 10 Juli 2024 Sebesar Rp.2,940,000 - Nomor NTPN : F024F0T7QQ7GFEB8 Tanggal 28 Juni 2024 Sebesar Rp.6,888,400 - Nomor NTPN : E0F954ETQ4GV908D Tanggal 21 Juni 2024 Sebesar Rp.4,005,000 - Nomor NTPN : A83893IGA9UG6CI9 Tanggal 27 Juni 2024 Sebesar Rp.18,582,000 - Nomor NTPN : 4D81A1PLAKQ9EV7N Tanggal 21 Juni 2024 Sebesar Rp.2,128,000 - Nomor NTPN : 513EB3IGA9V023SS Tanggal 26 Juni 2024 Sebesar Rp.1,885,320 - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg III BKN Bandung dengan KPP setempat (3 Paket Meeting) [belum] Tidak perlu bertanya karena temuan Kanreg Bandung berupa kelebihan potong. - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg XIV BKN Manokwari dengan KPP setempat (1 Paket Meeting) - Bukti bahwa PPh23 telah disetor pihak hotel atas koordinasi Bendahara Pengeluaran Kanreg IV BKN Makassar dengan KPP setempat (8 Paket Meeting) - Bukti pembayaran kekurangan PPh23 PusBangPeg ASN (5 Paket Meeting) - Surat permintaan bukti setor PPh 23 Kanreg Makassar - Bukti pembayaran kekurangan PPh23 PPSS - Bukti pembayaran kekurangan PPh23 Kanreg IV BKN Makassar - Bukti pembayaran kekurangan PPh23 Kanreg V BKN Jakarta (2 dari 3 Paket Meeting) (1 paket meeting di Bandar Lampung pelaksanaannya sebelum aturan di tetapkan) Semester II 2024: 1a. Daftar Pembayaran PPh23 atas 7 (tujuh) Kegiatan pada Tanggal 23 Des 24 1b. Tanda Terima Setoran Pajak ke-1, NTPN 863CE5BBPIOL1307 Senilai Rp.993.600 1c. Tanda Terima Setoran Pajak ke-2, NTPN D54CA4EU9O69ALIP Senilai Rp.996.000 1d. Tanda Terima Setoran Pajak ke-3, NTPN 147DA67P9DB2JI70 Senilai Rp.496.800 1e. Tanda Terima Setoran Pajak ke-4, NTPN 7B270746P7TFGFR8 Senilai Rp.796.800 1f. Tanda Terima Setoran Pajak ke-5, NTPN A6FAA746P7TGIRJB Senilai Rp.4.140.000		Akhir Semester II 2024: Belum didukung bukti Sosialisasi kepada Bendahara pengeluaran di masing-masing satker agar dapat memahami aturan dan mengimplementasikan perpajakan sesuai ketentuan dan bukti kordinasi / korespondensi dengan KPP setempat , masih diperlukan surat menyurat kepada hotel dan KPP serta menyampaikan hasil dari surat menyurat.	

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanlanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
					1g. Tanda Terima Setoran Pajak ke-6, NTPN CC8630T8ADSR1A01 Senilai Rp.5.550.000 1h. Tanda Terima Setoran Pajak ke-7, NTPN F8BCD67P9DB68AHT Senilai Rp.2.520.000 1i. Bukti Setoran Telah Diterima Negara, berupa Tangkapan Layar Aplikasi Pajak Semester I 2025: (Rev. ND) 1. Pada Semester I 2025 Kanreg V BKN Jakarta telah ditindaklanjuti dengan Surat Permohonan Informasi Nomor 040/B-KU.04/SD/KR.V/2024 Perihal Permohonan Informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Balasan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Nomor S-159/KPP.2008/2024 Perihal Permohonan Informasi/Kegiatan tanggal 13 Februari 2024 2. Pada Semester I 2025 Kanreg XI BKN Manado telah menindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Pembayaran Pajak Daerah oleh Financial Controller Hotel Four Point by Seraton Manado tanggal 8 Januari 2025 3. Pada Semester I 2025 Kanreg IV BKN Makassar telah ditindaklanjuti dengan Notulensi Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar tanggal 19 Desember 2024 4. Pada Semester I 2025 Biro Umum telah menindaklanjuti dengan Notulen Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati tanggal 5 Oktober 2023			
8			Terdapat Indikasi Kemahalan Pengadaan Paket Router pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	b. Melaporkan kepada LKPP bahwa dalam e-katalog ada barang yang sudah discontinued dan harga tidak sesuai harga pasar.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN - Surat Perintah KPA Pusat (Sesma) ke Kepala Pusat PPSS Semester I 2024: - Notulen bukti oleh PPK PPSS bahwa telah melaporkan ke LKPP - Surat Kepala BKN ke LKPP (barang discontinued) [belum]	Belum Sesuai	Semester I 2024: Semester I 2024, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum ada laporan kepada LKPP terkait barang yang sudah diskontinyu dan harga tidak sesuai harga pasar.	b. Melaporkan kepada LKPP bahwa dalam e-katalog ada barang yang sudah discontinued dan harga tidak sesuai harga pasar.
9			Pengelolaan Kas Pada Tiga Satker BKN Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN: a. Selaku KPA Kantor Pusat BKN untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.	Semester I 2023: - Surat Instruksi Kepala BKN ke KPA Kantor Pusat BKN Semester I 2024: - BA Cash Opname - Bukti perbaikan yang dilakukan - Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Semester II 2024: Pada Semester II 2024 telah ditindaklanjuti dengan: - Bukti pemeriksaan kas dan pimpinan sudah melakukan pengawasan pada bendahara sesuai ketentuan.	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024 Agar melampirkan Bukti ada perbaikan pengelolaan kas dari Bendahara (turun belum sesuai) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pimpinan sudah melakukan pengawasan pada bendahara sesuai ketentuan.	Kepala BKN menginstruksikan Sekretaris Utama BKN: a. Selaku KPA Kantor Pusat BKN untuk lebih teliti melakukan pengawasan atas pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran.
10	2024	63/LHP/XVI/05/2024 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2023	A. Pengelolaan PNBP pada Pusbangpeg ASN Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menginstruksikan Sekretaris Utama agar memerintahkan Kepala dan Pengelola PNBP Pusbangpeg ASN lebih cermat dalam mengelola PNBP sesuai ketentuan.	Semester II 2024: Surat Perintah Kepala Ke sestama Tanda Terima Sestama Surat Perintah Sestama ke Kapusbang Tanda terima Kapusbang Surat Pernyataan Kapusbang Surat Perintah Kapusbang Ke pengelola PNBP Tanda Terima Pengelola PNBP	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	Kepala BKN akan menginstruksikan Sekretaris Utama agar memerintahkan Kepala dan Pengelola PNBP Pusbangpeg ASN untuk lebih cermat dalam mengelola PNBP sesuai ketentuan.

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanlanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
11			B1. Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Tiga Satuan Kerja Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menginstruksikan Sekretaris Utama agar memerintahkan Kepala Satker terkait supaya PPK lebih cermat dalam menyusun HPS, mendokumentasikan harga pembentuk HPS dan melakukan negosiasi harga.	Surat Semester II 2024: Perintah Kepala Ke sestama Tanda terima Sestama Surat perintah Sesma Tanda terima Kanreg I Tanda Terima Kanreg IV Tanda Terima Kanreg X Surat Perintah Kanreg I Tanda terima Kanreg I Surat Perintah Kanreg IV Tanda terima Kanreg IV Surat Perintah Kanreg X Tanda terima Kanreg X Analisa HPS dan Riwayat Negosiasi Harga Pengadaan Sewa Tenda Kanreg IV BKN Makassar - Analisa HPS dan Riwayat Negosiasi harga pengadaan sewa Kanreg I BKN Yogyakarta Analisa HPS dan Riwayat Negosiasi harga pengadaan sewa Kanreg X BKN Denpasar [belum] Dokumen Pembentuk HPS [belum] Bukti Negosiasi Harga [belum] Surat Pernyataan	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	Kepala BKN akan menginstruksikan Sekretaris Utama agar memerintahkan Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg IV BKN Makassar dan Kanreg X BKN Manado-Denpasar supaya PPK lebih cermat dalam menyusun HPS, mendokumentasikan harga pembentuk HPS dan melakukan negosiasi harga.
12			B2. Kekurangan Volume atas Sembilan Paket Pekerjaan pada Lima Satuan Kerja Sebesar Rp96.360.176.	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menginstruksikan Sekretaris Utama agar memerintahkan Kepala Satker terkait supaya PPK lebih cermat dalam memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan.	Surat Semester II 2024: Perintah Kepala Ke Sestama Tanda Terima Sestama Surat Perintah Sestama Tanda Terima Kapus PPSS Tanda Terima Kanreg Banjarmasin Tanda Terima Kanreg Denpasar Tanda Terima Kanreg Aceh Tanda Terima Kapusbang Surat Perintah Kapus PPSS ke PPK dan tanda terima Surat Perintah Kanreg Banjarmasin ke PPK Surat Perintah Kanreg Denpasar ke PPK Tanda Terima PPK Banjarmasin Tanda Terima PPK Denpasar Surat Perintah Kanreg Aceh ke PPK Tanda terima PPK Aceh Surat Perintah Kapusbang ke PPK Tanda Terima PPK Pusbang Surat Pernyataan PPK PPSS Surat Pernyataan PPK Pusbang Surat Pernyataan PPK Kanreg X BKN Denpasar Surat Pernyataan PPK Kanreg XIII BKN Aceh Surat Pernyataan PPK Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	Kepala BKN akan menginstruksikan Sekretaris Utama agar memerintahkan Kepala dan PPK PPSS BA BUN, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XIII BKN Aceh dan Pusbangpeg ASN terkait untuk lebih cermat dalam memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan.
13			B3. Pengelolaan Belanja dan Pengembalian Belanja pada Dua Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menginstruksikan Sekretaris Utama agar: a. Memerintahkan PPK, dan Bendahara Pengeluaran Kanreg XIII Aceh lebih cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan.	Semester II 2024: Surat Perintah Kepala Ke Sestama Tanda Terima Sestama Surat Perintah Sestama Tanda Terima Kakanreg Aceh Surat Perintah Kakanreg Aceh Ke PPK dan BP Tanda Terima PPK dan BP Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Kanreg XIII BKN Aceh Surat Pernyataan PPK Kanreg XIII BKN Aceh	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	Kepala BKN akan menginstruksikan Sekretaris Utama agar: a. Memerintahkan PPK, dan Bendahara Pengeluaran Kanreg XII Aceh lebih cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan.
14				b. Memerintahkan KPA, PPSPM, PPK, dan Bendahara Pengeluaran Kanreg IV Makassar lebih cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan.	Semester II 2024: Surat Perintah Kepala Ke Sestama Tanda Terima Sestama Surat Perintah Sestama Tanda terima Kakanreg Makassar Surat Perintah Kakanreg Makassar ke PPK dan BP Tanda terima PPK dan BP - Surat Pernyataan KPA Kanreg IV BKN Makassar - Surat Pernyataan BP Kanreg IV BKN Makassar Surat Pernyataan PPSPM Kanreg IV BKN Makassar	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	b. Memerintahkan KPA, PPSPM, PPK, dan Bendahara Pengeluaran Kanreg IV Makassar lebih cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan.

No	Tahun LHP	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindaklanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
15			B4. Proses Pengadaan melalui E-Purchasing pada Kegiatan Jasa Pendukung Penyelenggaraan Seleksi CASN Mandiri BKN Tahun 2023 Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepala BKN untuk menginstruksikan Sekretaris Utama agar: a. Memerintahkan PPK lebih cermat dalam: 1) memverifikasi dokumen kesesuaian sarana prasarana pendukung seleksi CASN, 2) melakukan addendum jika terdapat perubahan titik	Semester II 2024: Surat Perintah Kepala Ke Sestama Tanda Terima Sestama Surat Perintah Sestama 4. Surat Pernyataan PPK BA BUN TA 2023 tanggal 10 Juni 2024 [belum] Bukti Pelaksanaan Perintah	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	Kepala BKN akan menginstruksikan Sekretaris Utama agar: a. Memerintahkan PPK lebih cermat dalam: 1) memverifikasi dokumen kesesuaian sarana prasarana pendukung seleksi CASN, 2) melakukan addendum jika terdapat perubahan titik
16				b. Memerintahkan PPK berkoordinasi dengan LKPP terkait pelaksanaan seleksi CASN tahun mendatang dan perhitungan denda/sanksi bila terjadi kekurangan volume sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.	Semester II 2024: Surat Perintah Kepala Ke Sestama Tanda Terima Sestama Surat Perintah Sestama Notulen Rapat CASN Notulen Rapat dengan LKPP Notulen Rapat dengan LKPP	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	b. Memerintahkan PPK berkoordinasi dengan LKPP terkait pelaksanaan seleksi CASN tahun mendatang dan perhitungan denda/sanksi bila terjadi kekurangan volume sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
17			C. Peralatan dan Mesin Tidak Diketahui Keberadaannya Sebanyak 75 Unit Sebesar Rp782.074.191	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menginstruksikan Sekretaris Utama agar: a. Menelusuri Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila terdapat penyalahgunaan BMN.	Semester II 2024: Surat Perintah PIt. Kepala BKN ke Sesma - Tanda Terima Sestama - Surat Perintah Sesma ke Karo Umum Tanda Terima Karoum - Surat Pernyataan Karo Umum - Risalah Lelang - DBR - Lampiran Surat Pernyataan Karo Umum berupa Hasil Inventarisasi Manual	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	Kepala BKN akan menginstruksikan Sekretaris Utama agar: a. Menelusuri Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila terdapat penyalahgunaan BMN.
18				b. Memerintahkan kepala satuan kerja terkait memutakhirkan informasi DBR pada SIMAN.	Semester II 2024: Surat Perintah PIt. Kepala BKN ke Sesma - Tanda Terima Sestama - Surat Perintah Sesma ke Karo Umum Tanda Terima Karoum - Surat Pernyataan Karo Umum - Lampiran Surat Pernyataan Karo Umum berupa Hasil Inventarisasi Manual	Pengajuan Sesuai	Semester I 2024: Belum bisa upload ke SIPTL	b. Memerintahkan kepala satuan kerja terkait memutakhirkan informasi DBR pada SIMAN.

Informasi:

Belum Sesuai

5

Pengajuan Sesuai

13

Belum diTL

0

18

Sisa Setoran:

Rp0

Jakarta, 26 Februari 2025

Mengetahui,

Inspektur

Ditandatangani Secara Elektronik
Dedi Herdi



LAMPIRAN XIII

LAPORAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

LAPORAN

PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN

(PIPK)

TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2024

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Badan Kepegawaian Negara. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **efektif dengan pengecualian**.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **memadai**.

Jakarta, 23 Januari 2025

Ketua Tim Penilai PIPK UAPA BKN T.A. 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik
PUTRI HARTATI, SE, M Si
"



- A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai
1. Akun Peralatan dan Mesin (132111)

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

Temuan				Rekomendasi
A.	Kelemahan Material			
	-			
B.	Kelemahan Signifikan			
KANTOR PUSAT				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Kegiatan inventarisasi peralatan mesin belum efektif.	Sensus BMN tidak dilakukan sesuai kaidah (terakhir dilakukan pada tahun 2019).	Ketidaksesuaian hasil inventarisasi dengan jumlah fisik peralatan dan mesin.	Agar Pengelola BMN melakukan sampling sensus ke ruangan unit kerja minimal satu bulan sekali.
KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL II SURABAYA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL III BANDUNG				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL IV MAKASSAR				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL V JAKARTA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VI MEDAN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-

KANTOR REGIONAL VIII BANJARMASIN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL IX JAYAPURA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL X DENPASAR				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XI MANADO				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XIII BANDA ACEH				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XIV MANOKWARI				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
PUSAT PENGEMBANGAN ASN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
C.	Kelemahan yang Berdampak Rendah			
KANTOR PUSAT				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin masih belum efektif.	a. Pengawasan atas aset masih lemah. b. Prosedur pencatatan/pendokumentasian yang tidak konsisten. c. Kurangnya kesadaran atau kompetensi pegawai terkait pentingnya manajemen aset.	Barang rusak/aset yang sudah dihapuskan namun masih dilakukan pemeliharaan.	a. Melakukan pemeriksaan aset secara berkala dan dilakukan evaluasi secara teratur. b. Proses penghapusan aset agar lebih jelas: menetapkan prosedur dan dokumentasi penghapusan aset yang lengkap serta wajib diketahui oleh pihak berwenang.

				c. Sistem manajemen aset bisa diperbaharui (menggunakan RFID atau perangkat lunak sehingga informasi terkait aset mudah didapatkan dan akurat).
2.	Kegiatan atas penghapusan peralatan dan mesin masih belum efektif.	a. Prosedur administrasi penghapusan yang cukup kompleks b. Data peralatan dan mesin yang kurang akurat sehingga menimbulkan inkonsistensi data. c. Kurangnya kesadaran atau kompetensi tentang pentingnya manajemen aset bagi pegawai unit terkait. d. Kurangnya koordinasi antar unit, baik antara Biro Umum (selaku pengelola barang) dengan Unit Kerja (pengguna barang)	Terjadi penghapusan terhadap BMN yang masih digunakan.	a. Proses penghapusan aset yang jelas: tetapkan prosedur dan dokumentasi penghapusan aset yang lengkap serta wajib diketahui oleh pihak berwenang. b. Melakukan pemeriksaan aset secara berkala dan dilakukan evaluasi secara teratur. c. Biro Umum selaku pengelola barang terus meningkatkan kompetensi terkait manajemen aset. d. Sistem manajemen aset bisa diperbaharui (menggunakan RFID atau perangkat lunak) sehingga informasi terkait aset mudah didapatkan dan akurat).
KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL II SURABAYA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL III BANDUNG				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi

-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL IV MAKASSAR				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL V JAKARTA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VI MEDAN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL VIII BANJARMASIN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL IX JAYAPURA				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL X DENPASAR				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XI MANADO				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XIII BANDA ACEH				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
KANTOR REGIONAL XIV MANOKWARI				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-
PUSAT PENGEMBANGAN ASN				
No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
-	-	-	-	-

Tabel E
Penilaian Kelemahan Gabungan

Nama Entitas Pelaporan: Badan Kepegawaian Negara

Uraian Kelemahan	Pusat	Kanreg I Yogyakarta	Kanreg II Surabaya	Kanreg III Bandung	Kanreg IV Makassar	Kanreg V Jakarta	Kanreg VI Medan	Kanreg VII Palembang	Kanreg VIII Banjarmasin	Kanreg IX Jayapura	Kanreg X Denpasar	Kanreg XI Manado	Kanreg XII Pekanbaru	Kanreg XIII Banda Aceh	Kanreg XIV Manokwari	Pusbang ASN	Rata- Rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan Menurut Tim Penilai UAPA
(1)	(2)																(3)	(4)	(5)	(6)
Terdapat salah satu aktivitas dalam proses pengadaan peralatan dan mesin yang belum tepat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin masih belum efektif.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kegiatan atas penghapusan peralatan dan mesin masih belum efektif.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kegiatan inventarisasi peralatan mesin belum efektif.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2

Keterangan:
Sesuai dengan perhitungan kertas kerja penyesuaian
Total Salah Saji Teridentifikasi: -
Simpulan PIPK Gabungan: Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIEDP)



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LAPORAN HASIL REVIU

PENGENDALIAN INTERN PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

TINGKAT UAPA – BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088)

Nomor : 024/AI.02/LHR/H/2025

Tanggal : 28 Februari 2025

INSPEKTORAT

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Reviu PIPK dilaksanakan terhadap Laporan Hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai Tingkat UAKPA dan UAPA Badan Kepegawaian Negara (BA 088), dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai.

1. Dalam pelaksanaannya, Tim Penilai PIPK Badan Kepegawaian Negara (BA 088) telah melaksanakan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian yang ditujukan dengan **kinerja yang memuaskan**, antara lain:
 - a. Tim Penilai telah ditetapkan untuk di tingkat UAKPA dan UAPA;
 - b. Akun signifikan telah ditetapkan dan dituangkan pada Berita Acara Persetujuan Penentuan Akun Signifikan dengan diketahui pihak Tim Penilai UAPA dan Manajemen Pemilik Bisnis Proses;
 - c. Dalam penentuan akun signifikan telah menggunakan beberapa pertimbangan yaitu salah satunya adanya temuan berulang dari BPK.
2. Hasil reviu Inspektorat dapat disimpulkan bahwa penyusunan simpulan gabungan PIPK yaitu **Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP)**. Terdapat **beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA/UAPA**, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada proses/transaksi utama belum semua diidentifikasi berdasarkan Berita Acara Persetujuan Penentuan Akun Signifikan Nomor 11/KU.04/BA/A/2024 tanggal 17 September yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020. Adapun proses/transaksi utama yang belum diidentifikasi tersebut, yaitu (1) Penggunaan; (2) Penilaian; (3) Pemindahtanganan; dan (4) Pemusnahan;
 - b. Terdapat risiko utama pada proses/transaksi utama yang belum seluruhnya diidentifikasi;
 - c. Terdapat beberapa risiko utama yang memiliki tipe pengendalian aplikasi. Namun seharusnya, tipe pengendalian yang sesuai adalah ITDM (*IT Dependent Manual*) karena pengendalian utama atas risiko utama bukan dikendalikan oleh

- aplikasi, melainkan masih dilakukan manual oleh pihak yang ditunjuk sebagai verifikator dengan bantuan aplikasi;
- d. Penilaian pengendalian dinyatakan sudah memadai, namun memberikan usulan koreksi/*feedback* atas pengendalian yang sudah ada;
 - e. Belum terdapat *FlowChart*/Prosedur Operasional Standar (POS) yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111);
 - f. Tim penilai melakukan penilaian atas risiko utama dan pengendalian yang diidentifikasi oleh pemilik pengendali didapatkan hasil memadai dan disimpulkan cukup sehingga tidak ada risiko utama yang disajikan ke Tabel A.1. Namun, berdasarkan hasil reviu dokumen atas identifikasi risiko dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Reviu PIPK didapatkan hasil, belum seluruhnya pengendalian dapat dinilai memadai;
 - g. Masih terdapat satker yang tidak melampirkan dokumen pendukung baik berupa reviu dokumen, hasil wawancara, survei, maupun observasi atas Pengujian Intern Tingkat Entitas (PITE) pada faktor Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan;
 - h. Masih terdapat satker yang melakukan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) belum sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yaitu harus dilakukan pengujian pada seluruh area logikal (9 komponen) dan area operasional TIK dan kelangsungan layanan (6 komponen);
 - i. Pada Pengujian Atribut Pengendalian (C1), Pengujian pengendalian tidak didukung dengan bukti dukung yang relevan dan memadai. Tipe pengendalian “Manual” pada Tabel A belum seluruhnya dituangkan dalam Tabel C.1 untuk kemudian dilakukan pengujian atribut pengendaliannya. Tim Penilai menentukan sampel/dokumen dengan tidak tepat karena sampel/dokumen yang disajikan belum terinci;
 - j. Pada Pengujian Pengendalian Aplikasi (C2), masih terdapat satker yang melakukan pengujian pengendalian aplikasi yang belum wajar karena aplikasi yang digunakan untuk pengendalian akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111) bukan merupakan aplikasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga tidak perlu dilakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Tabel C.2;

- k. Pada Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian Pengendalian (D), masih terdapat satker yang melakukan penilaian tanpa didukung hasil pengujian pada Tabel B.1, B.2, dan C.1 yang memadai; dan Penyajian pada Tabel C.1 dan C.2 tidak tepat;
3. Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan oleh Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA dan UAPA Badan Kepegawaian Negara, antara lain sebagai berikut:
- a. Dalam penetapan Tim Penilai agar Tim diambil dari luar manajemen pemilik bisnis proses untuk menghindari terjadinya Conflict of Interest.
 - b. Mengidentifikasi seluruh Proses/Transaksi Utama untuk akun signifikan Aset BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. Melakukan konfirmasi lebih mendalam kepada pemilik pengendalian terkait identifikasi risiko utama, pada semua proses transaksi utama mulai dari perencanaan sampai dengan penatausahaan terkait dengan akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111).
 - d. Melakukan penilaian lebih mendalam terkait pengendalian yang sudah dilakukan untuk setiap risiko utama yaitu apakah pengendalian yang sudah ada telah dapat memitigasi risiko utama tersebut.
 - e. Melakukan koordinasi ke pemilik pengendalian untuk menyusun flowchart/POS yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111);
 - f. Memberikan perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya yang dinilai tidak memadai dan dituangkan pada Tabel A1;
 - g. Melakukan pengujian dan Penilaian PITE dan melengkapi seluruh data dukung yang relevan meliputi revidi dokumen, wawancara dan survei;
 - h. Pengujian PUTIK dilaksanakan pada dua area (area akses logical dan area operasional TIK dan kelangsungan layanan) berdasarkan PMK No 17/PMK.09/2019 dengan didukung dokumen dan hasil wawancara yang memadai;
 - i. Melakukan pengujian atribut pengendalian sesuai dengan ketentuan pada PMK 17/PMK.09/2019;

- j. Dalam menyajikan dan melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) hanya untuk tipe pengendalian **aplikasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara** yang tertuang pada Tabel A dan A.1 pada penilaian PIPK selanjutnya.
- k. Melakukan pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian secara wajar dan didukung oleh bukti yang memadai;
- l. Menyajikan pengujian pengendalian aplikasi dan melakukan pengujian atribut pengendalian sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 17/PMK.09/2019; dan
- m. Melakukan penilaian kelemahan gabungan dengan melakukan pengujian dan pengecekan pada tabel D untuk setiap Satker, tidak hanya sebatas melakukan rekapitulasi data.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/KMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK;
2. Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor.189.1/KU.04/NDA/A/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024;
3. Surat Tugas Inspektur Badan Kepegawaian Negara nomor 001/AI.02/TU/H/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang pelaksanaan tugas Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024.

B. Tujuan

Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan memastikan hasil penilaian PIPK oleh Tim Penilai telah memenuhi kualitas standar yang diharapkan, serta objektivitas peneilaiannya dapat ditingkatkan.

C. Ruang Lingkup

Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari Laporan Hasil Penilaian PIPK Badan Kepegawaian Negara (BA 088) yang disampaikan oleh Tim Penilai PIPK UAPA Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penguatan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2024

D. Metodologi

Reviu PIPK dilaksanakan dengan metode uji petik (sampling) dan dilakukan paling lambat bersamaan dengan reviu laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan berje

BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Penilaian PIPK dilakukan menggunakan perangkat yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara nomor 189.1/KU.04/ND/A/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 dan Berita Acara Persetujuan Penentuan Akun signifikan nomor 11/KU.04/BA/A/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penentuan Akun Signifikan.
2. Dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta ketersediaan auditor APIP yang ditugaskan untuk melakukan reviu PIPK atas Penilaian oleh Tim Penilai, maka entitas akuntansi yang direviu dilakukan secara uji petik (sampling) dengan penentuan Akun Peralatan dan Mesin (132111) sebagai akun signifikan yang ditetapkan manajemen. Berdasarkan hal tersebut, uji petik dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Entitas akuntansi yang pernah / memiliki temuan pemeriksaan BPK pada akun Peralatan dan Mesin;
 - b. Entitas akuntansi yang belum pernah dijadikan sampel pada reviu PIPK sebelumnya.

Dari pertimbangan sebagaimana di atas maka untuk tingkat entitas akuntansi yang dilakukan reviu sebagai uji petik (sampling) terdiri dari Kantor Pusat BKN, Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor regional IX BKN Jayapura dan Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

Prosedur reviu dilakukan dengan:

1) Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap kertas kerja penilaian dari tim penilai untuk menilai kecukupan identifikasi proses/transaksi utama pelaporan keuangan, kecukupan identifikasi risiko utama, dan melihat apakah seluruh risiko telah dimitigasi dengan pengendalian utama, reviu dokumen juga dilakukan untuk menilai pengujian pengendalian intern tingkat entitas (PITE) yang dilakukan, dan ketepatan pengambilan sampel pengujian atribut pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai.

2) Verifikasi dan Konfirmasi

Verifikasi dilakukan terhadap bukti dukung penilaian PITE, sampel pengujian atribut pengendalian serta dilakukan konfirmasi kepada tim penilai atas bukti – bukti dukung penilaian tersebut.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Tim Penilai untuk menilai identifikasi risiko, pengendalian dan perbaikannya, pengujian PITE, pengujian PUTIK, pengujian atribut pengendalian, pengujian pengendalian aplikasi, penilaian efektivitas implementasi pengendalian serta penilaian kelemahan pengendalian yang telah dilakukan oleh tim penilai.

4) Reperformance

Reperformance (reviu ulang suatu pekerjaan) dilakukan untuk pengujian atribut pengendalian untuk melihat konsistensi pelaksanaan pengendalian terutama dalam rangka melihat dampak terhadap salah saji yang diakibatkan pengendalian yang tidak andal.

5) Analisis

Analisis dilakukan terhadap hasil pengujian atau simpulan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai.

BAB III

HASIL REVIU

A. Kinerja yang Memuaskan/Capaian

Penentuan ruang lingkup dan materialitas untuk tingkat entitas akuntansi telah dilakukan secara wajar yaitu :

1. Tim Penilai telah ditetapkan untuk di tingkat UAKPA dan UAPA;
2. Akun signifikan telah ditetapkan dan dituangkan pada Berita Acara Persetujuan Penentuan Akun Signifikan dengan diketahui pihak Tim Penilai UAPA dan Manajemen Pemilik Bisnis Proses;
3. Dalam penentuan akun signifikan telah menggunakan beberapa pertimbangan yaitu salah satunya adanya temuan berulang dari BPK.

Namun, penentuan ruang lingkup dan materialitas yang dilakukan masih terdapat penyimpangan yaitu Anggota tim penilai yang disusun terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha beserta staffnya untuk yang di Kantor Regional serta Staf atau Pejabat Fungsional di Biro Keuangan yang merupakan bagian manajemen pemilik bisnis proses. Hal ini menyebabkan penilaian dapat dilakukan dengan tidak secara wajar dan terjadi *conflict of interest*.

B. Identifikasi Risiko dan Kecukupan rancangan Pengendaliannya (Tabel A)

Berdasarkan hasil reuiu, Tim Penilai telah melakukan pengujian Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi. Namun, Tim penilai melakukan penilaian belum secara wajar. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Kantor Pusat BKN
 - a. Pada proses transaksi utama belum semua diidentifikasi berdasarkan Berita Acara Persetujuan Penentuan akun signifikan nomor : 11/KU.04/BA/A/2024 tanggal 17 September yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, yaitu:
 - 1) Penggunaan;
 - 2) Penilaian;
 - 3) Pemindahtanganan; dan
 - 4) Pemusnahan.

- b. Risiko utama pada transaksi utama belum seluruhnya diidentifikasi, yaitu misalnya:

No.	Proses / Transaksi Utama	Risiko Utama yang Belum Diidentifikasi
1.	Perencanaan kebutuhan dan anggaran	Potensi ketidaksesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan BMN (RKA)
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kesalahan penentuan metode pemilihan kontrak
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman di setiap tahap (jadwal pengadaan)
		Kesalahan penentuan jenis kontrak (<i>lump sum/satuan</i>)
		Kesalahan penetapan spesifikasi teknis
		Kesalahan menentukan tarif jaminan
		PPK tidak melakukan SCM (<i>Show Cause Meeting</i>)
		Terafiliasi dengan pihak penyedia (pelaksanaan pemilihan)
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman pemenang di setiap tahapan
		Keterlambatan pelaksanaan kontrak
		Wanprestasi

- c. Usulan koreksi yang dibuat oleh Tim Penilai untuk pengendalian yang dinyatakan tidak memadai belum tepat;
- d. Belum memiliki Bisnis proses atau *flowchart* terkait Akun Signifikan Peralatan dan Mesin (akun 132111).

2. Kantor Regional IV BKN Makassar

- a. Pada proses transaksi utama belum semua diidentifikasi berdasarkan Berita Acara Persetujuan Penentuan akun signifikan nomor : 11/KU.04/BA/A/2024 tanggal 17 September yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, yaitu:

- 1) Penggunaan;
- 2) Penilaian;
- 3) Pemindahtanganan;
- 4) Pemusnahan.

b. Terdapat risiko utama pada proses/transaksi utama belum seluruhnya diidentifikasi, yaitu:

No.	Proses / Transaksi Utama	Risiko Utama yang Belum Diidentifikasi
1.	Perencanaan kebutuhan dan anggaran	Ketidaksesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan BMN (RKA)
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kesalahan penentuan metode pemilihan kontrak
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman di setiap tahap (jadwal pengadaan)
		Kesalahan perhitungan HPS
		Kesalahan penentuan jenis kontrak (<i>lump sum/satuan</i>)
		Kesalahan menentukan tarif jaminan
		PPK tidak melakukan SCM (<i>Show Cause Meeting</i>)
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman pemenang di setiap tahapan
		Keterlambatan pelaksanaan kontrak
		Wanprestasi

- c. Terdapat pengendalian utama yang belum diidentifikasi dengan tepat dalam mendeteksi/mencegah terjadinya risiko utama, namun tim penilai menyatakan jika pengendalian tersebut sudah memadai;
- d. Belum terdapat *FlowChart*/POS yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111).

3. Kantor Regional IX BKN Jayapura

- a. Pada proses transaksi utama belum semua diidentifikasi berdasarkan Berita Acara Persetujuan Penentuan akun signifikan nomor : 11/KU.04/BA/A/2024 tanggal 17 September yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27

tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, yaitu:

- 1) Penggunaan;
- 2) Penilaian;
- 3) Pemindahtanganan; dan
- 4) Pemusnahan.

b. Risiko utama pada transaksi utama belum seluruhnya diidentifikasi, yaitu misalnya:

No.	Proses / Transaksi Utama	Risiko Utama yang Belum Diidentifikasi
1.	Perencanaan kebutuhan dan anggaran	Potensi ketidaksesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan BMN (RKA)
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kesalahan penentuan metode pemilihan kontrak
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman di setiap tahap (jadwal pengadaan)
		Kesalahan perhitungan HPS
		Kesalahan penentuan jenis kontrak (<i>lump sum/satuan</i>)
		Kesalahan penetapan spesifikasi teknis
		Kesalahan menentukan tarif jaminan
		PPK tidak melakukan SCM (<i>Show Cause Meeting</i>)
		Terafiliasi dengan pihak penyedia (pelaksanaan pemilihan)
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman pemenang di setiap tahapan
		Keterlambatan pelaksanaan kontrak
		Wanprestasi

- c. Terdapat pengendalian utama yang belum diidentifikasi dengan tepat dalam mendeteksi/mencegah terjadinya risiko utama, namun Tim Penilai menyatakan jika pengendalian tersebut sudah memadai;
- d. Terdapat beberapa risiko utama yang memiliki tipe pengendalian aplikasi. Namun seharusnya, tipe pengendalian yang sesuai adalah ITDM (*IT Dependent Manual*) karena pengendalian utama atas risiko utama bukan

dikendalikan oleh aplikasi, melainkan masih dilakukan manual oleh pihak yang ditunjuk sebagai verifikator dengan bantuan aplikasi, yaitu:

No.	Proses / Transaksi Utama	Risiko Utama	Pengendalian Utama	Tipe Pengendalian
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Salah Akun Belanja	Verifikasi SPP dan SPBy	Aplikasi (SAKTI)
2.		Kesalahan input nilai belanja di SAKTI	Verifikasi SPP dan SPBy	Aplikasi (SAKTI)
3.	Pelaporan Peralatan dan Mesin	Jumlah barang yang dilaporkan dalam laporan BMN tidak sesuai dengan jumlah fisik barang	Verifikasi dan Validasi BMN yang dilaporkan	Aplikasi (SAKTI dan SIMAN)

- e. Penilaian pengendalian dinyatakan sudah memadai, namun memberikan usulan koreksi/*feedback* atas pengendalian yang sudah ada; dan
- f. Belum terdapat *FlowChart*/Prosedur Operasional Standar (POS) yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111).

4. Kantor Regional XIII BKN Aceh

- a. Pada proses transaksi utama belum semua diidentifikasi berdasarkan Berita Acara Persetujuan Penentuan akun signifikan nomor : 11/KU.04/BA/A/2024 tanggal 17 September yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, yaitu:
 - 1) Penggunaan;
 - 2) Penilaian;
 - 3) Pemindahtanganan; dan
 - 4) Pemusnahan.
- b. Risiko utama pada transaksi utama belum seluruhnya diidentifikasi, yaitu:

No.	Proses / Transaksi Utama	Risiko Utama yang Belum Diidentifikasi
1.	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Potensi ketidaksesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan BMN (RKA)

2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kesalahan penentuan metode pemilihan kontrak
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman di setiap tahap (jadwal pengadaan)
		Kesalahan perhitungan HPS
		Kesalahan penentuan jenis kontrak (<i>lump sum/satuan</i>)
		Kesalahan penetapan spesifikasi teknis
		Kesalahan menentukan tarif jaminan
		PPK tidak melakukan SCM (<i>Show Cause Meeting</i>)
		Terafiliasi dengan pihak penyedia (pelaksanaan pemilihan)
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman pemenang di setiap tahapan
		Keterlambatan pelaksanaan kontrak
		Wanprestasi

- c. Terdapat pengendalian utama yang belum diidentifikasi dengan tepat dalam mendeteksi/mencegah terjadinya risiko utama, namun tim penilai menyatakan jika pengendalian tersebut sudah memadai;
- d. Penilaian pengendalian dinyatakan sudah memadai, namun memberikan usulan koreksi/feedback atas pengendalian yang sudah ada;
- e. Belum terdapat FlowChart/POS yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111).

5. Kantor Regional XIV BKN Manokwari

- a. Pada proses transaksi utama belum semua diidentifikasi berdasarkan Berita Acara Persetujuan Penentuan akun signifikan nomor : 11/KU.04/BA/A/2024 tanggal 17 September yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, yaitu:
 - 1) Penggunaan;
 - 2) Penilaian;
 - 3) Pemindahtanganan; dan

4) Pemusnahan.

b. Risiko utama pada transaksi utama belum seluruhnya diidentifikasi, yaitu:

No.	Proses / Transaksi Utama	Risiko Utama yang Belum Diidentifikasi
1.	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Potensi ketidaksesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan BMN (RKA)
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kesalahan penentuan metode pemilihan kontrak
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman di setiap tahap (jadwal pengadaan)
		Kesalahan perhitungan HPS
		Kesalahan penentuan jenis kontrak (<i>lump sum/satuan</i>)
		Kesalahan penetapan spesifikasi teknis
		Kesalahan menentukan tarif jaminan
		PPK tidak melakukan SCM (<i>Show Cause Meeting</i>)
		Terafiliasi dengan pihak penyedia (pelaksanaan pemilihan)
		Ketidaksesuaian waktu pengumuman pemenang di setiap tahapan
		Keterlambatan pelaksanaan kontrak
		Wanprestasi
		BAST tidak sesuai dengan kondisi lapangan

c. Terdapat pengendalian utama yang belum diidentifikasi dengan tepat dalam mendeteksi/mencegah terjadinya risiko utama, namun tim penilai menyatakan jika pengendalian tersebut sudah memadai;

d. Belum terdapat FlowChart/POS yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111).

C. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1)

1. Kantor Pusat BKN

a. Terdapat resiko utama yang pengendaliannya tidak memadai, Tim Penilai sudah memberikan usulan koreksi. Namun, usulan koreksi tersebut belum memadai dan belum dapat meminimalisir risiko;

- b. Perbaikan pengendalian utama yang diusulkan pada tabel A, tidak seluruhnya disajikan pada tabel A1, yaitu:

No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Nilai HPS tidak menggambarkan nilai pasar	Reviu oleh Pejabat Pengadaan untuk non tender, oleh Pokja Pemilihan untuk tender
2		Salah Akun Belanja	Pemeriksaan POK oleh PPK Verifikasi Dokumen Tagihan
3	Penghapusan Peralatan dan Mesin	Penghapusan terhadap BMN yang masih digunakan	Monitoring berkala setiap unit kerja
4	Inventarisasi Peralatan dan Mesin	Ketidaksesuaian Hasil Inventarisasi dengan Jumlah Fisik Peralatan dan Mesin	Sensus BMN secara berkala minimal 1x dalam 5 tahun

2. Kantor Regional IV BKN Makassar

Sesuai hasil reviu dokumen dan wawancara seharusnya masih terdapat pengendalian utama yang tidak memadai untuk mencegah terjadinya risiko utama pada Tabel A kemudian Tim Penilai memberikan usulan perbaikan untuk disajikan pada Tabel A1. Adapun usulan koreksi atas pengendalian yang tidak memadai tersebut sebagai berikut:

No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Pengendalian Utama	Usulan Perbaikan Pengendalian Utama
1	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	Tidak sesuai perencanaan kebutuhan PM dengan Data/Barang yang ada.	Reviu dan telaah dokumen perencanaan/keuangan	- Inventarisasi kebutuhan Peralatan dan Mesin - Cek fisik kondisi barang secara berkala (<i>stock opname</i> PM)

3. Kantor Regional IX BKN Jayapura

Berdasarkan hasil revidu dokumen atas identifikasi risiko dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Revidu PIPK didapatkan hasil belum seluruhnya pengendalian dapat dinilai memadai.

4. Kantor Regional XIII BKN Aceh

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim penilai terkait Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A), tim penilai belum memahami sepenuhnya teknik penilaian Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) dan Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1).

5. Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Berdasarkan hasil revidu atas perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai PIPK Kantor Regional XIV BKN Manokwari, Tim penilai telah mencantumkan seluruh risiko utama yang tidak memadai pada tabel A ke dalam tabel A.1. Namun, perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian yang disusun oleh Tim Penilai masih terdapat kelemahan yaitu terdapat risiko utama yang pengendaliannya tidak memadai pada proses/transaksi utama penghapusan peralatan dan mesin, Tim Penilai sudah memberikan usulan koreksi. Namun, usulan koreksi tersebut belum memadai dan meminimalisir risiko.

D. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas / PITE (B1)

1. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan hasil revidu, Tim Penilai pada Kantor Pusat BKN telah melakukan Pengujian pengendalian intern tingkat entitas telah secara **wajar** sesuai dengan penilaian pada Tabel B.1 berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 dengan kondisi sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Telah dilakukan revidu dokumen, wawancara, survei dan observasi;

Terhadap pertanyaan “Apakah jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?” tidak dilakukan wawancara, survei dan observasi, namun Kelemahan ini Tidak Signifikan karena target kinerja

masih dapat tercapai meskipun terjadi ketidaksesuaian jumlah pejabat/pegawai dengan Analisis Beban Kerja (ABK);

b. Penilaian Risiko

Telah dilakukan reviu dokumen, wawancara, survei dan observasi;

c. Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan reviu dokumen, wawancara, survei dan observasi;

Terhadap pertanyaan “Apakah unit kerja telah mengatur pembatasan akses atas aset dan aplikasi yang dimiliki?” tidak dilakukan reviu dokumen, wawancara dan survei namun Kelemahan ini Tidak Signifikan karena umumnya di seluruh unit sudah terdapat pembatasan atas aset dan aplikasi yang dimiliki namun belum dituangkan ke dalam bentuk Surat Keputusan;

d. Informasi dan Komunikasi

Telah dilakukan reviu dokumen, wawancara, survei dan observasi;

e. Pemantauan

Telah dilakukan reviu dokumen, wawancara dan survei.

Nilai persentase skor faktor-faktor PITE pada tabel B1 yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kantor Pusat BKN memperoleh nilai 96 % dan sesuai hasil reviu persentase skor faktor-faktor PITE memperoleh **nilai 96%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keandalan Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) Kantor BKN Pusat dikategorikan dengan tingkatan **“Tinggi”**.

2. Kantor Regional IV BKN Makassar

Berdasarkan hasil reviu terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas diketahui bahwa tim penilai Kantor Regional IV BKN Makassar telah menguji PITE dan membuat penilaian **belum secara wajar** sesuai dengan penilaian PITE pada tabel B.1 PMK 17/PMK.09/2019 dengan kondisi sebagai berikut :

a. Lingkungan pengendalian

Telah terdapat bukti wawancara dan hasil survei yang disajikan belum andal.

Serta, belum terdapat bukti reviu dokumen

b. Penilaian Risiko

Telah terdapat hasil survei yang disajikan namun belum andal. Serta, belum terdapat bukti revidi dokumen

c. Kegiatan Pengendalian

Telah terdapat hasil revidi dokumen yang belum memadai dan hasil survei yang disajikan belum andal. Serta, belum terdapat bukti observasi

d. Informasi dan Komunikasi

Belum terdapat bukti revidi dokumen dan hasil survei

e. Pemantauan

Belum terdapat bukti revidi dokumen dan hasil survei

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Regional IV BKN Makassar memperoleh nilai 100%. Namun sesuai hasil revidi, persentase skor faktor-faktor PITE memperoleh **nilai 36%** dikarenakan tidak terdapat dokumen pendukung yang dilampirkan seperti hasil revidi dokumen, wawancara, survei, dan observasi yang memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keandalan Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) Kantor Regional IV BKN Makassar dikategorikan dengan tingkatan "**Sedang**".

3. Kantor Regional IX BKN Jayapura

Berdasarkan hasil revidi terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) diketahui bahwa Tim Penilai Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menguji PITE sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revidi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Namun, atas penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) yang dilakukan dapat disimpulkan **tidak wajar** dikarenakan tidak terdapat dokumen pendukung baik berupa revidi dokumen, hasil wawancara, survei, maupun observasi atas Pengujian Intern Tingkat Entitas (PITE) pada faktor Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh Tim Penilai Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh nilai 100%. Namun sesuai hasil revidi persentase skor faktor-faktor PITE Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh **nilai 24%**, dikarenakan tidak adanya bukti dukung yang memadai dan relevan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keandalan Pengujian Pengendalian Intern Tingkat

Entitas (PITE) Kantor Regional IX BKN Japura dikategorikan dengan tingkatan **“Rendah”**.

4. Kantor Regional XIII BKN Aceh

Berdasarkan hasil revidir terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas diketahui bahwa tim penilai Kantor Regional XIII BKN Aceh telah menguji PITE dan membuat penilaian belum wajar sesuai dengan penilaian PITE pada tabel B.1 PMK 17/PMK.09/2019 dengan kondisi sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Telah terdapat beberapa bukti revidir dokumen namun belum sepenuhnya memenuhi faktor-faktor PITE. Serta, tidak terdapat bukti wawancara, survei maupun observasi.

b. Penilaian Risiko

Telah terdapat beberapa bukti revidir dokumen namun belum sepenuhnya memenuhi faktor-faktor PITE. Serta, tidak terdapat bukti wawancara dan survei.

c. Kegiatan Pengendalian

Telah terdapat beberapa bukti revidir dokumen namun belum sepenuhnya memenuhi faktor-faktor PITE. Serta, tidak terdapat bukti wawancara, survei maupun observasi.

d. Informasi dan Komunikasi

Telah terdapat beberapa bukti revidir dokumen namun belum sepenuhnya memenuhi faktor-faktor PITE. Serta, tidak terdapat bukti wawancara, survei maupun observasi.

e. Pemantauan

Telah terdapat beberapa bukti revidir dokumen namun belum sepenuhnya memenuhi faktor-faktor PITE. Serta, tidak terdapat bukti wawancara, survei maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Regional XIII BKN Aceh memperoleh nilai 100%. Namun, sesuai hasil revidir, persentase skor faktor-faktor PITE memperoleh **nilai 32%** dikarenakan tidak terdapat dokumen pendukung yang dilampirkan seperti hasil revidir dokumen, wawancara, survei, dan observasi yang memadai. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa keandalan Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) Kantor Regional XIII BKN Aceh dikategorikan dengan tingkatan **rendah**.

5. Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Berdasarkan hasil reuiu, Tim Penilai pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari telah melakukan Pengujian pengendalian intern tingkat entitas **belum secara wajar** sesuai dengan penilaian pada Tabel B.1 PMK Nomor 17/PMK.09/2019 dengan kondisi sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Telah terdapat bukti wawancara namun hasil survey yang disajikan belum andal serta hanya melampirkan satu bukti reuiu dokumen.

b. Penilaian Risiko

Telah dilakukan wawancara dan melampirkan sebagian bukti reuiu dokumen namun tidak terdapat bukti survei dan observasi;

c. Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan wawancara namun tidak terdapat bukti reuiu dokumen, survei dan observasi;

d. Informasi dan Komunikasi

Telah dilakukan wawancara namun tidak terdapat bukti reuiu dokumen, survei dan observasi;

e. Pemantauan

Telah dilakukan wawancara namun tidak terdapat bukti reuiu dokumen, survei dan observasi;

Nilai persentase skor faktor-faktor PITE pada tabel B1 yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kantor Regional XIV BKN Manokwari memperoleh nilai 96 %. Setelah dilakukan reuiu berdasarkan reuiu dokumen, survei, wawancara dan observasi yang telah dilampirkan oleh Tim Penilai, persentase skor faktor-faktor PITE memperoleh nilai 28% yang artinya 28 % faktor yang dinilai ada dan 72 % faktor yang dinilai belum ada/ belum terdapat bukti yang memadai atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. **Kesimpulan efektivitas Pengendalian Internal Tingkat Entitas Rendah.**

E. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi / PUTIK (B2)

1. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan hasil reviu, Tim Penilai Kantor Pusat BKN telah melakukan pengujian PUTIK dengan membuat penilaian secara wajar. Namun, masih terdapat kelemahan dalam melakukan pengujian wawancara yaitu penentuan responden masih belum tepat sasaran.

2. Kantor Regional IV BKN Makassar

Berdasarkan hasil reviu, pengujian PUTIK telah dilakukan oleh tim penilai Kantor Regional IV BKN Makassar dengan hasil pengujian “Efektif” namun penilaian tersebut **belum dilakukan secara wajar**. Pengujian yang dilakukan tidak didukung dengan dokumen, hasil wawancara maupun hasil kuesioner yang memadai. Selain itu dari 9 Area Akses Logical, Tim penilai baru menguji pada 4 area akses yaitu:

- a. Pemantauan terhadap penggunaan hak akses;
- b. Pemantauan terhadap hak akses dari pegawai yang dimutasi/ mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum dicabut sesegera mungkin;
- c. Pengendalian atas akses remote dan jaringan secara teknis dan administratif;
- d. Pemantauan terhadap Kata sandi default untuk akun-akun default di database, server, dan aplikasi telah diubah

Untuk 6 area operasional TIK dan Kelangsungan layanan, Tim Penilai hanya menguji 3 area akses, yaitu:

- a. Pemantauan terhadap Penerapan prosedur backup dan restore secara konsisten;
- b. Pemantauan atas gangguan atau insiden operasional TI diidentifikasi, ditangani, direviu, dan dianalisa dengan tepat waktu;
- c. Pemantauan atas pengendalian fisik yang diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

3. Kantor Regional IX BKN Jayapura

Berdasarkan hasil revidi terhadap Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) diketahui bahwa Tim Penilai Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menguji PUTIK sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revidi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yaitu pada area logikal (9 komponen) dan area operasional TIK dan kelangsungan layanan (6 komponen). Namun, atas penilaian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) yang dilakukan dapat disimpulkan **tidak wajar** dikarenakan tidak terdapat dokumen pendukung yang memadai.

4. Kantor Regional XIII BKN Aceh

Berdasarkan hasil revidi, pengujian PUTIK telah dilakukan oleh tim penilai Kantor Regional XIII BKN Aceh dengan hasil pengujian “Efektif”, namun penilaian tersebut **belum dilakukan secara wajar**. Pengujian yang dilakukan tidak didukung dengan dokumen, hasil wawancara maupun hasil kuesioner yang memadai.

5. Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Berdasarkan hasil revidi, pengujian PUTIK telah dilakukan oleh tim penilai Kantor Regional XIV BKN Manokwari dengan hasil pengujian “Efektif”. Namun penilaian tersebut **belum dilakukan secara wajar**. Pengujian yang dilakukan tidak didukung dengan dokumen, hasil wawancara maupun hasil kuesioner yang memadai. Selain itu dari 9 Area akses logikal, *Tim penilai baru menguji pada 3 area akses yaitu:*

- a. Pemantauan terhadap penggunaan hak akses
- b. Pemantauan terhadap hak akses dari pegawai yang dimutasi/ mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum dicabut sesegera mungkin.
- c. Pemantauan terhadap Kata sandi default untuk akun-akun default di database, server, dan aplikasi telah diubah.

Untuk 6 area operasional TIK dan Kelangsungan layanan, Tim *Penilai hanya menguji 1 area akses* berupa Pemantauan atas pengendalian fisik yang diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

F. Pengujian Atribut Pengendalian (C1)

1. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan hasil reviu, tim penilai pada Kantor Pusat BKN telah melakukan Pengujian Atribut Pengendalian secara wajar dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Telah menentukan jumlah sampel dan atribut dengan tepat;
- b. Telah didukung dengan bukti dukung yang relevan dan memadai;
- c. Telah didukung dengan perhitungan sampel yang memadai.

2. Kantor Regional IV BKN Makassar

Berdasarkan hasil reviu terhadap Pengujian Atribut Pengendalian atas penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional IV BKN Makassar, dapat disimpulkan bahwa penilaian tersebut tidak wajar. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Ketidaktepatan Tim Penilai dalam menentukan sampel/dokumen, yaitu:

No	Nama Pengendalian Utama	Nomor Sampel/ Dokumen
1.	Reviu dan Telaah Dokumen Perencanaan	Sakti dan SIMAN Seharusnya: TOR, RAB SPM 001A tahun 2024 SPM 002A tahun 2024 Dst
2.	Reviu dan Telaah Dokumen Pengadaan	Microsoft Excel dan Word, LPSE Seharusnya: HPS SPM 001A tahun 2024 SPM 002A tahun 2024 Dst

- b. Pengujian pengendalian belum seluruhnya terdapat bukti dukung yang relevan dan memadai;

3. Kantor Regional IX BKN Jayapura

Berdasarkan hasil revidi terhadap Pengujian Atribut Pengendalian atas penilaian oleh Tim Penilai Kantor Regional IX BKN Jayapura, dapat disimpulkan **tidak wajar** dikarenakan:

- a. Pengujian pengendalian tidak didukung dengan bukti dukung yang relevan dan memadai;
- b. Tipe pengendalian “Manual” pada Tabel A belum seluruhnya dituangkan dalam Tabel C.1 untuk kemudian dilakukan pengujian atribut pengendaliannya;
- c. Tim Penilai menentukan sampel/dokumen dengan tidak tepat karena sampel/dokumen yang disajikan belum terinci. Berikut contoh penyajian sampel pada C.1:

No	Proses/Transaksi Utama	Nama Pengendalian Utama	Nomor Sampel/ Dokumen
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Verifikasi Dokumen, SPP, SPBy	TOR Seharusnya Atribut: SPM xxx Tahun xxx SPM xxx Tahun xxx dst. CHR Seharusnya: CHR Nomor xxx Tahun xxx dst. (d disesuaikan dengan bukti dukung yang disajikan pada Tabel A)

- d. Terdapat sampel/dokumen yang tidak sesuai dengan uraian pengendalian di Tabel A, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengendalian Utama	Nomor Sampel/Dokumen	Keterangan
1	Verifikasi Dokumen, SPP, SPBy	TOR, RAB, RKBMN, CHR, HPS, Riwayat HPS, Analisa HPS	Sesuai dengan Tabel A
		Lembar Monitoring	Tidak Sesuai dengan Tabel A
		Nota Dinas Unit Kerja	
		Sketsa	

4. Kantor Regional XIII BKN Aceh

Berdasarkan hasil revidu terhadap Pengujian Atribut Pengendalian atas penilaian oleh Tim Penilai Kantor Regional XIII BKN Aceh, dapat disimpulkan **belum dilakukan secara wajar**, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Ketidaktepatan Tim Penilai dalam menentukan sampel/dokumen, yaitu:

No	Nama Pengendalian Utama	Nomor Sampel/ Dokumen
1.	Reviu dan Telaah Dokumen Perencanaan	POK Seharusnya: POK TA xxx Revisi Ke - x dst TOR Seharusnya: TOR xxxx dst
2.	Pemeriksaan PPK	BAST Seharusnya: BAST Atribut: SPM No. xxx Tahun xxx SPM No. xxx Tahun xxx dst

b. Hasil pengujian atribut pengendalian dan reperformance yang disampaikan tidak dapat diyakini karena penentuan sampel/dokumen tidak tepat, bukti sampel/dokumen tidak memadai serta hasil konfirmasi terhadap tim penilai menunjukan bahwa tim penilai tidak melakukan pengujian terhadap atribut pengendalian dan reperformance.

5. Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Berdasarkan hasil revidu terhadap Pengujian Atribut Pengendalian atas penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kantor Regional XIV BKN Manokwari, dapat disimpulkan bahwa penilaian tersebut **tidak wajar**. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Tim penilai menentukan sampel/ dokumen dengan tidak tepat karena sampel/ dokumen yang disajikan belum terinci, yaitu:

No	Nama Pengendalian Utama	Nomor Sampel/ Dokumen
1.	Pemasangan DIR aset serta PIC pengguna	DBR, Barcode Asset, Surat Peminjaman Seharusnya: DBR dengan No xxxx List Barcode Asset dan Foto Kesesuaian dengan Kondisi Riil Surat Peminjaman No. xxxx yang sudah di validasi dan di agendakan dst
2.	Verifikasi status kondisi aset dengan fisik	Database SIMAN Seharusnya: Laporan Cek Fisik kondisi aset No.xxxx Printout Tarikan data SIMAN mengenai kondisi aset
3.	Verifikasi dan validasi kode barang	Kodefikasi BMN Seharusnya: Laporan hasil verifikasi dan validasi kode barang.
4.	Sensus BMN secara berkala	DBR, Laporan Sensus BMN Seharusnya: BA Sensus BMN No xxx Laporan Sensus BMN No xxx dst

- b. Berdasarkan hasil reviu Tabel C.1 Pengujian Atribut Pengendalian dilakukan secara tidak wajar dikarenakan hasil persentase pada tabel B.1 hanya 28 % yang menunjukan jika efektivitas PITE rendah. Hasil pengujian atribut

pengendalian dan reperformance yang disampaikan tidak dapat diyakini karena penentuan sampel/dokumen tidak tepat dan tidak memadai dimana jika hasil PITE Rendah dengan populasi $100 \leq N < 499$, maka jumlah sampel disesuaikan dengan rumus: $n_{\text{definitif}} = n \cdot \{1 - (n/N)\}$. Selain itu, hasil konfirmasi terhadap tim penilai menunjukkan bahwa tim penilai tidak melakukan pengujian terhadap atribut pengendalian dan reperformance.

G. Pengujian Pengendalian Aplikasi (C2)

1. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan hasil reuiu, tim penilai Kantor Pusat tidak melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) karena pada Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) serta Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) tidak terdapat tipe pengendalian Aplikasi maka tidak perlu dilakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2). Sehingga Tim Penilai Kantor Pusat telah melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi secara wajar.

2. Kantor Regional IV BKN Makassar

Berdasarkan hasil reuiu, pengujian pengendalian aplikasi telah dilakukan oleh tim penilai Kantor Regional IV BKN Makassar dengan hasil pengujian “Andal” namun penilaian tersebut belum dilakukan secara wajar karena pada Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) serta Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) tidak terdapat tipe pengendalian Aplikasi sehingga tidak perlu dilakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2).

3. Kantor Regional IX BKN Jayapura

Berdasarkan hasil reuiu, Tim Penilai Kantor Regional IX BKN Jayapura telah melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi. Namun, pengujian pengendalian aplikasi pada Kantor Regional IX BKN Jayapura belum dilakukan secara wajar. Hal ini dikarenakan aplikasi yang digunakan untuk pengendalian akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111) bukan merupakan aplikasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga tidak perlu dilakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Tabel C.2.

4. Kantor Regional XIII BKN Aceh

Berdasarkan hasil revidu, tim penilai Kantor Regional XIII BKN Aceh tidak melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) karena pada Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) serta Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) tidak terdapat tipe pengendalian Aplikasi maka tidak perlu dilakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2). Sehingga, Tim Penilai Kantor Regional XIII BKN Aceh telah melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi sudah secara wajar.

5. Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Berdasarkan hasil revidu, tim penilai Kantor Regional XIV BKN Manokwari telah melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) namun tidak tepat. Seharusnya, Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) tidak perlu dilakukan karena pada Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) serta Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) tidak terdapat tipe pengendalian Aplikasi.

H. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (D)

1. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan hasil revidu, Tim Penilai Kantor Pusat BKN telah melakukan pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian tidak wajar dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Simpulan efektivitas implementasi yang berasal dari Pengujian Atribut Pengendalian (Tabel C.1) dinilai efektif, namun disajikan TL (Tindak Lanjut) dan hasil penilaian kelemahan pada tabel D;
- b. Pengisian Usulan Koreksi (*feedback*) oleh Tim Penilai pada tabel D belum tepat sehingga TL (Tindak Lanjut) “Tidak Tuntas” dan Hasil Penilaian Kelemahan masih terdapat “Kelemahan Signifikan”.

2. Kantor Regional IV BKN Makassar

Berdasarkan hasil revidu, tim penilai Kantor Regional IV BKN Makassar telah melaksanakan Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian. Namun, penilaian Efektivitas Implementasi

Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai belum dapat diyakini secara wajar dikarenakan :

- a. Bukti dukung dan hasil pengujian pada Tabel B.1, C.1 dan C.2 belum memadai dan belum wajar;
- b. Pengujian yang dilakukan tim penilai pada Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (Tabel B.1) tidak terdapat kelemahan signifikan maupun kelemahan tidak signifikan, namun tersaji dalam Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (Tabel D).

3. Kantor Regional IX BKN Jayapura

Berdasarkan hasil revidi, Tim Penilai Kantor Regional IX BKN Jayapura telah melaksanakan Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian. Namun, Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (Tabel D) yang dilakukan oleh Tim Penilai belum diyakini secara wajar dikarenakan:

- a. Tidak terdapat bukti dukung atas hasil pengujian pada Tabel B.1, B.2, dan C.1 yang memadai; dan
- b. Penyajian pada Tabel C.1 dan C.2 tidak tepat.

4. Kantor Regional XIII BKN Aceh

Berdasarkan hasil revidi, tim penilai Kantor Regional XIII BKN Aceh telah melaksanakan Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian. Namun, penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai belum dilakukan secara wajar dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil revidi, bukti dukung dan hasil pengujian pada Pengendalian Intern Tingkat Entitas/PITE (Tabel B.1) dan Atribut Pengendalian (Tabel C.1) belum memadai dan belum wajar. Serta, tidak terdapat bukti dukung atas hasil Pengujian PUTIK (Tabel B.2);
- b. Penyajian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian belum dilakukan secara wajar, seperti:
 - 1) Pengujian yang dilakukan tim penilai pada Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (Tabel B.1) tidak terdapat kelemahan signifikan maupun

kelemahan tidak signifikan, namun tersaji dalam Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (Tabel D);

- 2) Simpulan efektivitas implementasi yang berasal dari Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (Tabel B1) dan Pengujian Atribut Pengendalian (Tabel C.1) dinilai efektif, namun disajikan TL (Tindak Lanjut) dan hasil penilaian kelemahan.

5. Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Berdasarkan hasil revidi, tim penilai Kantor Regional XIV BKN Manokwari telah melaksanakan Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian. Namun, penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai belum dilakukan secara wajar dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pengujian yang dilakukan tim penilai pada Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (Tabel B.1) masih terdapat kelemahan tidak signifikan, namun tidak tersaji dalam Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (Tabel D);
- b. Pengujian yang dilakukan tim penilai pada pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi (Tabel B.2) tidak tepat karena seharusnya tidak perlu dilakukan pengujian sehingga tidak disajikan dalam Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (Tabel D);
- c. Terdapat satu pengendalian utama pada C.1 berupa Sensus BMN secara berkala, yang belum disimpulkan efektivitasnya sehingga tidak terdapat usulan koreksi dan tindak lanjut.

I. Penilaian Kelemahan Gabungan (Tabel E)

Berdasarkan hasil revidi atas penilaian kelemahan gabungan, Tim Penilaian UAPA telah melaksanakan penilaian kelemahan gabungan telah dilakukan secara wajar dengan melakukan rekapitulasi dari penilaian tabel D pada Satker kemudian membuat simpulan sebelum penyesuaian, nilai penyesuaiannya hingga menetapkan simpulan PIPK Gabungan. Namun, atas penilaian tersebut hasilnya belum dapat

diyakini kebenarannya dikarenakan penilaian yang dilakukan pada Tabel D oleh satker (UAKPA) yang dijadikan uji petik (sampling) masih belum sesuai ketentuan.

J. Simpulan PIPK Gabungan

Setelah mempertimbangkan hasil revidi dan penyajian pelaporan keuangan pada akun signifikan Peralatan dan Mesin (Akun 132111), maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Entitas Badan Kepegawaian Negara adalah **Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP)**.

K. Koreksi / Perbaikan yang Belum Dilakukan

Berdasarkan hasil revidi Inspektorat atas PIPK UAPA Badan Kepegawaian Negara (BA 088), disarankan kepada Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA dan UAPA agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan Ruang Lingkup dan Materialitas

Dalam penetapan Tim Penilai agar Tim diambil dari luar manajemen pemilik bisnis proses untuk menghindari terjadinya Conflict of Interest.

2. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (A)

- a. Mengidentifikasi seluruh Proses/Transaksi Utama untuk akun signifikan Aset BMN yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020;
- b. Melakukan konfirmasi lebih mendalam kepada pemilik pengendalian terkait identifikasi risiko utama, pada semua proses transaksi utama mulai dari perencanaan sampai dengan penatausahaan terkait dengan akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111);
- c. Melakukan penilaian lebih mendalam terkait pengendalian yang sudah dilakukan untuk setiap risiko utama yaitu apakah pengendalian yang sudah ada telah dapat memitigasi risiko utama tersebut;
- d. Melakukan koordinasi ke pemilik pengendalian untuk menyusun flowchart/POS yang jelas terkait bisnis proses pada akun signifikan Peralatan dan Mesin (132111).

3. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (A1)

Memberikan perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya yang dinilai tidak memadai pada Tabel A dan kemudian dituangkan pada Tabel A1.

4. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas / PITE (B1)

Melakukan pengujian dan Penilaian PITE dan melengkapi seluruh data dukung yang relevan meliputi reviu dokumen, wawancara dan survei.

5. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi / PUTIK (B2)

Pengujian PUTIK dilaksanakan pada dua area berdasarkan PMK No 17/PMK.09/2019 agar didukung dengan dokumen dan hasil wawancara yang memadai. Adapun dua area yang dimaksud pada ketentuan tersebut, yaitu:

a. *Area Akses Logical* :

- 1) Program *security awareness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara;
- 2) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses;
- 3) Matrik akses pengguna (user access matrix /UAM) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala;
- 4) Hak akses dari pegawai yang dimutasi atau mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum, dicabut sesegera mungkin;
- 5) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya;
- 6) Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif;
- 7) Kata sandi default untuk akun-akun default di database, server dan aplikasi telah diubah;
- 8) Penetration testing/ vulnerability assessment dilakukan pada segmen sistem/ jaringan yang sesuai berdasarkan profil risikonya dan segala kelemahan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui;
- 9) Jejak audit (Audit trail) di aplikasi diaktifkan dan direviu secara berkala.

b. *Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan*

- 1) Implementasi prosedur *backup* dan *restore* secara konsisten.
- 2) Service Level Agreement (SLA) atau Operational Level Agreement (OLA) secara formal didefinisikan antara pihak - pihak terkait.
- 3) Implementasi dan uji berkala atas DRP.
- 4) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa helpdesk, dll.).
- 5) Gangguan atau insiden operasional TI diidentifikasi, ditangani, direviu, dan dianalisa dengan tepat waktu.
- 6) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

6. Pengujian Atribut Pengendalian (C1)

- a. Melakukan pengujian atribut pengendalian sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat **harus** didukung dengan bukti dukung yang relevan dan memadai dengan metode pengujian atribut pengendalian menggunakan sensus atau *sampling* tergantung dari jumlah populasi yang diuji;
- b. Memastikan seluruh pengendalian utama beserta dokumen pendukung yang memiliki tipe pengendalian “Manual dan ITDM (*IT Dependent Manual*)” pada Tabel A telah dilakukan pengujian dan hasilnya diuraikan pada Tabel C.1;
- c. Menentukan sampel/dokumen serta metode pengujian atribut pengendalian menggunakan sensus atau *sampling* tergantung dari jumlah populasi yang diuji sesuai dengan PMK 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- d. Memastikan sampel/dokumen yang dilakukan pengujian pada Tabel C.1 sesuai dengan dokumen pendukung Tabel A.

7. Pengujian Atribut Aplikasi (C2)

Menyajikan dan melakukan Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) hanya untuk tipe pengendalian **aplikasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara** yang tertuang pada Tabel A dan A.1 pada penilaian PIPK selanjutnya.

8. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan penilaian Kelemahan Pengendalian (D)

- a. Melakukan pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian secara wajar dan didukung oleh bukti yang memadai; dan
 - b. Menyajikan pengujian pengendalian aplikasi dan melakukan pengujian atribut pengendalian sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yaitu:
 - 1) Menyajikan seluruh pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas/PITE yang memperoleh skor “0” pada Tabel B.1 ke Tabel D;
 - 2) Menyajikan seluruh hasil pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi/PUTIK yang “Tidak Efektif” pada Tabel B.2 ke Tabel D;
 - 3) Menuangkan hasil Tabel C.1 ke Tabel D, dengan ketentuan jika dilakukan *reperformance* dan hasilnya “Kelemahan Signifikan” maka pada hasil dari Simpulan Efektivitas Implementasi (SEI) di Tabel D disajikan “Tidak Efektif”. Kemudian menguraikan usulan koreksi (feedback), pengisian Tindak Lanjut atas usulan koreksi dan hasil penilaian kelemahan.
- Sedangkan, jika pada Tabel C.1 tidak dilakukan *reperformance* atau untuk hasil *reperformance* “Kelemahan Tidak Signifikan” maka hasil Simpulan Efektivitas Implementasi (SEI) di Tabel D disajikan “Efektif” dan tidak perlu memberikan usulan koreksi, pengisian Tindak Lanjut serta hasil penilaian kelemahan.

9. Penilaian Kelemahan Gabungan (tabel E)

Melakukan penilaian kelemahan gabungan dengan melakukan pengujian dan pengecekan pada tabel D untuk setiap Satker, tidak hanya sebatas melakukan rekapitulasi data.

L. Apresiasi

Inspektorat Badan Kepegawaian Negara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama dan bantuan dari seluruh pejabat dan pegawai selaku Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA maupun UAPA Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun Anggaran 2024 selama penugasan reviu berlangsung.

Jakarta, 28 Februari 2025

Inspektur,

Ditandatangani Secara Elektronik
Dedi Herdi



LAMPIRAN XIV

NOTA KESEPAKATAN FINAL

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA088) TAHUN 2024

Nomor: NKF-9/088/PB.6/2025

Pada hari **Selasa, 06 Mei 2025**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2024 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 09 Mei 2024.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Asri Dyah Prabawati, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	KEMENTERIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA – selaku Penyusun LKKL
2	Bambang Sulistyono , Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Rahmat Mulyono, Plt. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Rifiani Ristanti, Pengendali Teknis	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L





LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0
Pendapatan Perpajakan	0	0	0
Pajak Dalam Negeri	0	0	0
Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	41,462,195,556	0	41,462,195,556
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0
Pendapatan BLU	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	41,462,195,556	0	41,462,195,556
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	41,462,195,556	0	41,462,195,556
Belanja Negara	0	0	0
Belanja Pemerintah Pusat	1,500,101,756,801	0	1,500,101,756,801
Belanja Pegawai	374,117,703,451	0	374,117,703,451
Belanja Barang	954,577,173,848	0	954,577,173,848
Belanja Modal	171,406,879,502	0	171,406,879,502
Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Belanja Lain-lain	0	0	0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0
Transfer ke Daerah	0	0	0
Dana Perimbangan	0	0	0
Dana Transfer Umum	0	0	0
Dana Bagi Hasil	0	0	0
Dana Alokasi Umum	0	0	0
Dana Transfer Khusus	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0
Dana Insentif Daerah	0	0	0
Dana Keistimewaan DIY	0	0	0
Dana Otonomi Khusus	0	0	0
Dana Desa	0	0	0
Hibah Kepada Daerah	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,500,101,756,801	0	1,500,101,756,801
PEMBIAYAAN	0	0	0



KERTAS KERJA NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
ASET	0	0	0
ASET LANCAR	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara kas	0	9,270,300	9,270,300
Kas pada BLU	0	0	0
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	33,977,549,372	2,969,438	33,980,518,810
Uang Muka Belanja (prepayment)	0	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0	0
Piutang Perpajakan	0	0	0
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	0	0	0
Piutang Bukan Pajak	4,796,426,727	1,437,373,203	6,233,799,930
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-23,982,134	-7,186,866	-31,169,000
Bagian Lancar TPA	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	0	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	0	0	0
Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
Persediaan	6,336,367,391	7,398,185	6,343,765,576
Persediaan yang Belum Diregister	0	0	0
Jumlah Aset Lancar	45,086,361,356	1,449,824,260	46,536,185,616
ASET TETAP	0	0	0
Tanah	2,331,580,054,368	0	2,331,580,054,368
Peralatan dan Mesin	779,477,804,993	-11,440,825,892	768,036,979,101
Gedung dan Bangunan	874,352,667,113	21,842,143,665	896,194,810,778
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24,683,399,940	-45,825,000	24,637,574,940
Aset Tetap Lainnya	13,706,059,416	-30,700,000	13,675,359,416
Konstruksi Dalam Pengerjaan	42,113,973,622	-22,492,368,097	19,621,605,525
Aset Konsesi Jasa	0	0	0
Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	-812,017,041,775	11,272,447,245	-800,744,594,530
Jumlah Aset Tetap	3,253,896,917,677	-895,128,079	3,253,001,789,598
PROPERTI INVESTASI	0	0	0
Properti Investasi	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	0	0
Jumlah Properti Investasi	0	0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	0	0	0
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	0	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	0	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang	0	0	0
ASET LAINNYA	0	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset Tak Berwujud	59,620,529,497	0	59,620,529,497
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	311,639,851,974	0	311,639,851,974
Dana Penjaminan	0	0	0
Dana Kelolaan BLU	0	0	0
Aset Lain-lain	8,171,116,874	12,379,613,892	20,550,730,766
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-57,973,755,843	-11,698,246,095	-69,672,001,938
Jumlah Aset Lainnya	321,457,742,502	681,367,797	322,139,110,299
JUMLAH ASET	3,620,441,021,535	1,236,063,978	3,621,677,085,513
KEWAJIBAN	0	0	0



KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	313,349,094,283	249,584,001	313,598,678,284
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	1,013,976,246	19,375,570	1,033,351,816
Hibah Yang Belum Disahkan	170,045,000	-170,045,000	0
Uang Muka dari KPPN	0	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	314,533,115,529	98,914,571	314,632,030,100
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0	0	0
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	0	0
Kewajiban Konsesi Jasa	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	314,533,115,529	98,914,571	314,632,030,100
EKUITAS	3,305,907,906,006	1,137,149,407	3,307,045,055,413
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,620,441,021,535	1,236,063,978	3,621,677,085,513



LAPORAN OPERASIONAL (LO)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,557,772,724	-19,072,770	39,538,699,954
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	39,557,772,724	-19,072,770	39,538,699,954
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	39,557,772,724	-19,072,770	39,538,699,954
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
Beban Pegawai	373,696,508,734	6,627,820	373,703,136,554
Beban Persediaan	6,602,406,691	-5,774,085	6,596,632,606
Beban Barang dan Jasa	760,106,230,195	-1,272,525,378	758,833,704,817
Beban Pemeliharaan	24,189,330,186	-145,813,150	24,043,517,036
Beban Perjalanan Dinas	130,157,147,903	0	130,157,147,903
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0
Beban Bunga	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	106,193,475,094	227,419,650	106,420,894,744
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	10,245,168	7,186,866	17,432,034
Beban Transfer	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	1,400,955,343,971	-1,182,878,277	1,399,772,465,694
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-1,361,397,571,247	1,163,805,507	-1,360,233,765,740
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-522,246,218	0	-522,246,218
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	436,080,789	0	436,080,789
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	958,327,007	0	958,327,007
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22,171,064	0	22,171,064
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	183,628,968	0	183,628,968
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	161,457,904	0	161,457,904
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-500,075,154	0	-500,075,154
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-1,361,897,646,401	1,163,805,507	-1,360,733,840,894
POS LUAR BIASA	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	-1,361,897,646,401	1,163,805,507	-1,360,733,840,894



LAPORAN PEERUBAHAN EKUITAS (LPE)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Uraian	Unaudited	Koreksi BPK dan/atau Koreksi Mandiri	Audited
EKUITAS AWAL	3,208,549,866,357	0	3,208,549,866,357
SURPLUS/DEFISIT-LO	-1,361,897,646,401	1,163,805,507	-1,360,733,840,894
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-1,575,055,101	-196,701,100	-1,771,756,201
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	1,678,100	1,678,100
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	-1,571,935,101	-198,379,200	-1,770,314,301
LAIN-LAIN	-3,120,000	0	-3,120,000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,460,830,741,151	170,045,000	1,461,000,786,151
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	97,358,039,649	1,137,149,407	98,495,189,056
EKUITAS AKHIR	3,305,907,906,006	1,137,149,407	3,307,045,055,413

**Usulan Jurnal Koreksi
LK BKN (BA 088) TA 2024**

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
1	017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	715,999.00		Koreksi penyesuaian perhitungan pendapatan diterima dimuka dengan perhitungan harian
			425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		715,999.00	
			313211	Transfer Keluar	28,582,500.00		Koreksi transaksi Transfer Keluar Jaringan Listrik ke Kantor Regional III BKN Bandung yang belum dicatat pada LK Unaudited berdasarkan BAST Nomor 035/BASTB/BMN.KP/2024
			133111	Gedung dan Bangunan		28,582,500.00	
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	285,825.00		
			313211	Transfer Keluar		285,825.00	Koreksi transaksi Transfer Keluar Jaringan LAN ke Kantor Regional III BKN Bandung yang belum dicatat pada LK Unaudited berdasarkan BAST Nomor 035/BASTB/BMN.KP/2024
			313211	Transfer Keluar	155,289,000.00		
			132111	Peralatan dan Mesin		155,289,000.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	19,411,125.00		
			313211	Transfer Keluar		19,411,125.00	Koreksi Pencatatan Transportable Water Pump NUP 1- Saldo Penyusutan Debit
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	198,379,200.00		
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		198,379,200.00	Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan akrual air apartemen yang belum dicatat pada LK Unaudited
			522113	Beban Langganan Air	259,784.00		
			212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		259,784.00	
			522111	Beban Langganan Listrik	649,420.00		
			212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		649,420.00	Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan akrual IPL Apartemen yang belum dicatat pada LK Unaudited
			523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,459,200.00		
			212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		7,459,200.00	Koreksi pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Bengeluaran atas retur transaksi bendahara yang masih tersedia di RKK Ops BRI per 31 Des
			111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	8,967,500.00		
			212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		8,967,500.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	302,800.00		Koreksi pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Bengeluaran atas Penerimaan Lain-lain yang masih tersedia di RKK Ops BRI per 31 Des
			425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		302,800.00	
			115212	Piutang Lainnya	5,637,700.00		Koreksi pengembalian belanja atas kelebihan belanja pemeliharaan atas pekerjaan perbaikan panel lampu halaman gedung BKN Kantor Pusat
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		5,637,700.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	28,188.00		
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		28,188.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9,031,283,234.00		Koreksi pencatatan aset tetap yang sudah tidak digunakan untuk operasional ke Aset Lain-Lain (Server)
			132111	Peralatan dan Mesin		9,031,283,234.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	9,031,283,234.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		9,031,283,234.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	9,031,283,234.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		9,031,283,234.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9,031,283,234.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		9,031,283,234.00	
			115212	Piutang Lainnya	1,343,056,943.00		Koreksi pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran Belanja Jasa Lainnya pada kegiatan Seleksi CASN BKN
			522191	Beban Jasa Lainnya		1,343,056,943.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	6,715,285.00		
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		6,715,285.00	
			133111	Gedung dan Bangunan	22,599,554,415.00		Koreksi pencatatan KDP pembangunan UPT Mataram yang telah selesai pekerjaannya menjadi Aset Definitif
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		22,599,554,415.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	22,492,368,097.00		Koreksi pencatatan KDP pembangunan UPT Mataram yang telah selesai pekerjaannya menjadi Aset Definitif
			136111	Konstruksi Dalam pengerjaan		22,492,368,097.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	107,186,318.00		
			212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		107,186,318.00	
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	225,995,544.00		
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		225,995,544.00	
2	017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,360.00		Koreksi penyesuaian perhitungan pendapatan diterima dimuka dengan perhitungan harian
			219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		2,360.00	
			114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	3,823,274.00		Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan belanja dibayar dimuka yang belum dicatat pada LK Unaudited
			521111	Beban Keperluan Perkantoran		3,823,274.00	
3	450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8,950,000.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (AC Split)
			132111	Peralatan dan Mesin		8,950,000.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,580,000.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		3,580,000.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	895,000.00		
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		895,000.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8,950,000.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		8,950,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,580,000.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		3,580,000.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	895,000.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (AC Split)
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		895,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8,000,000.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (Transportable Water Pump)
			132111	Peralatan dan Mesin		8,000,000.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,000,000.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (Transportable Water Pump)
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		8,000,000.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8,000,000.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		8,000,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8,000,000.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		8,000,000.00	
			593111	Beban Persediaan konsumsi	8,351,406.00		Koreksi pencatatan selisih kurang jumlah persediaan atas cek fisik
			117111	Barang Konsumsi		8,351,406.00	
			593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	54,000.00		
			117113	Bahan untuk Pemeliharaan		54,000.00	
			117111	Barang Konsumsi	2,208,826.00		Koreksi pencatatan selisih tambah jumlah persediaan atas cek fisik
			593111	Beban Persediaan konsumsi		2,208,826.00	
			115212	Piutang Lainnya	45,842,160.00		Koreksi pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran belanja sewa pada pekerjaan sewa sarana dan prasarana Non IT
			522141	Beban Sewa		45,842,160.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	229,211.00		
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		229,211.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	42,836,400.00		Koreksi pencatatan pengurangan nilai aset atas pengembalian belanja modal pekerjaan renovasi gedung gudang persediaan dan pekerjaan alumunium composite panel
			133111	Gedung dan Bangunan		42,836,400.00	
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,524,046.00		
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1,524,046.00	
			115212	Piutang Lainnya	42,836,400.00		Koreksi pengembalian belanja modal atas kelebihan belanja modal pekerjaan renovasi gedung gudang persediaan dan pekerjaan alumunium composite panel
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		42,836,400.00	
			594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	214,182.00		
			116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		214,182.00	
4	017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,683.00		Koreksi penyesuaian perhitungan belanja dibayar dimuka dengan perhitungan harian
			114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		3,683.00	
			133111	Gedung dan Bangunan	28,582,500.00		Koreksi transaksi Transfer Masuk Jaringan Listrik dari Kantor Pusat BKN yang belum dicatat pada LK Unaudited berdasarkan BAST Nomor 035/BASTB/BMN.KP/2024
			313221	Transfer Masuk		28,582,500.00	
			313221	Transfer Masuk	285,825.00		
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		285,825.00	
			132111	Peralatan dan Mesin	155,289,000.00		Koreksi transaksi Transfer Masuk Jaringan LAN dari Kantor Pusat BKN yang belum dicatat pada LK Unaudited berdasarkan BAST Nomor 035/BASTB/BMN.KP/2024
			313221	Transfer Masuk		155,289,000.00	
			313221	Transfer Masuk	19,411,125.00		
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		19,411,125.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	28,582,500.00		Koreksi pencatatan penggabungan NUP Pengadaan Jaringan Listrik yang dikapitalisasi ke NUP Gedung Bangunan Utama
			133111	Gedung dan Bangunan		28,582,500.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	285,825.00		Koreksi pencatatan penggabungan NUP Pengadaan Jaringan Listrik yang dikapitalisasi ke NUP Gedung Bangunan Utama
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		285,825.00	
			133111	Gedung dan Bangunan	28,582,500.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		28,582,500.00	
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	772,500.00		
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		772,500.00	
5	560635	KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	862,263,000.00		Koreksi pencatatan aset tetap kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Rumah Dinas sebanyak 12 unit)
			133111	Gedung dan Bangunan		862,263,000.00	
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	225,428,896.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		225,428,896.00	
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16,102,064.00		
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		16,102,064.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	862,263,000.00		Koreksi pencatatan aset tetap kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Rumah Dinas sebanyak 12 unit)
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		862,263,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	225,428,896.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		225,428,896.00	
			592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	16,102,064.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		16,102,064.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	45,825,000.00		Koreksi pencatatan aset tetap kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Bangunan Air)
			134112	Irigasi		45,825,000.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	19,440,907.00		Koreksi pencatatan aset tetap kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Bangunan Air)
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		19,440,907.00	
			137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1,388,636.00		
			591312	Beban Penyusutan Irigasi		1,388,636.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	45,825,000.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		45,825,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	19,440,907.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		19,440,907.00	
			592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,388,636.00		Koreksi pencatatan aset tetap kondisi rusak berat yang belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Bangunan Air)
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		1,388,636.00	
			521111	Beban Keperluan Perkantoran	740,555.00		Koreksi penyesuaian perhitungan belanja dibayar dimuka dengan perhitungan harian
			114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		740,555.00	
			218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	170,045,000.00		Pengesahan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk barang Tahun Anggaran 2024 berupa HIBAH POJOK BACA DIGITAL sesuai MPHL-BJS Nomor 823011811995133773
			391131	Pengesahan Hibah Langsung		170,045,000.00	
			133111	Gedung dan Bangunan	147,688,650.00		Koreksi pencatatan atas pekerjaan dari renovasi pagar dengan realisasi nilai pekerjaan diatas nilai kapitalisasi menggunakan MAK Belanja Pemeliharaan
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		147,688,650.00	
			591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,461,477.00		
			137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		2,461,477.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	147,688,650.00		
			523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		147,688,650.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			522111	Beban Langganan Listrik	102,935,819.00		Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan akrual listrik yang belum dicatat pada LK Unaudited
			212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		102,935,819.00	
			522112	Beban Langganan Telepon	5,798,140.00		Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan akrual telepon yang belum dicatat pada LK Unaudited
			212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		5,798,140.00	
			521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,700,000.00		Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan akrual internet yang belum dicatat pada LK Unaudited
			212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		9,700,000.00	
6	606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,778.00		Koreksi penyesuaian perhitungan pendapatan diterima dimuka dengan perhitungan harian
			219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		6,778.00	
			521111	Beban Keperluan Perkantoran	35,872.00		Koreksi penyesuaian perhitungan belanja dibayar dimuka dengan perhitungan harian
			114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		35,872.00	
7	606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,977,568.00		Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan pendapatan diterima dimuka yang belum dicatat pada LK Unaudited
			219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		3,977,568.00	
8	622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	7,163.00		Koreksi penyesuaian perhitungan belanja dibayar dimuka dengan perhitungan harian
			521111	Beban Keperluan Perkantoran		7,163.00	
			117111	Barang Konsumsi	11,584,765.00		Koreksi persediaan berupa BBM yang masih tersedia di gudang sebanyak 800 L per 31 Des 2024
			391113	Koreksi Nilai Persediaan		11,584,765.00	
			391113	Koreksi Nilai Persediaan	9,906,665.00		Koreksi persediaan berupa BBM yang masih tersedia di gudang sebanyak 800 L per 31 Des 2024, dengan rincian:
			593111	Beban Persediaan konsumsi		9,906,665.00	1. Koreksi Beban 703 liter 2. Koreksi Ekuitas 97 liter
9	622390	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	981,026,369.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (Peralatan dan Mesin)
			132111	Peralatan dan Mesin		981,026,369.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	981,026,369.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (Peralatan dan Mesin)
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		981,026,369.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	981,026,369.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		981,026,369.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	981,026,369.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		981,026,369.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,653,000.00		
			132111	Peralatan dan Mesin		4,653,000.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,722,400.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		3,722,400.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	465,300.00		
			591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		465,300.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,653,000.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		4,653,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,722,400.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		3,722,400.00	
			592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	465,300.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		465,300.00	
10	667882	KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	3,757.00		Koreksi penyesuaian perhitungan pendapatan diterima dimuka dengan perhitungan harian
			425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		3,757.00	

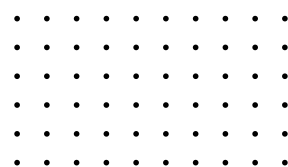
No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
11	667896	KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	49,413.00		Koreksi penyesuaian perhitungan pendapatan diterima dimuka dengan perhitungan harian
			425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		49,413.00	
			511111	Beban Gaji Pokok PNS	6,321,600.00		Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan pembayaran kekurangan gaji (KGB periode Mar-Des 2024) yang belum dicatat pada LK Unaudited
			212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		6,321,600.00	
			511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	676.00		
			212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		676.00	
			511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	289,740.00		
			212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		289,740.00	
			511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,804.00		
			212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		15,804.00	
12	667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16,182,332.00		Koreksi penyesuaian tambahan, perhitungan pendapatan diterima dimuka yang belum dicatat pada LK Unaudited
			219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		16,182,332.00	
13	667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	3,014.00		Koreksi penyesuaian perhitungan belanja dibayar dimuka dengan perhitungan harian
			521111	Beban Keperluan Perkantoran		3,014.00	
			522141	Beban Sewa	119,550.00		Koreksi penyesuaian perhitungan belanja dibayar dimuka dengan perhitungan harian
			114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		119,550.00	
14	020505	PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	117111	Barang Konsumsi	2,010,000.00		Koreksi persediaan berupa materiail yang masih tersisa sebanyak 201 lembar per 31 Des 2024
			593111	Beban Persediaan konsumsi		2,010,000.00	
			219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	24,299.00		Koreksi penyesuaian perhitungan pendapatan diterima dimuka dengan perhitungan harian
			425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		24,299.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	35,647.00		Koreksi penyesuaian perhitungan belanja dibayar dimuka dengan perhitungan harian
			521111	Beban Keperluan Perkantoran		35,647.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,383,933,289.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (Peralatan dan Mesin)
			132111	Peralatan dan Mesin		1,383,933,289.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,383,933,289.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1,383,933,289.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,383,933,289.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1,383,933,289.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,383,933,289.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (Peralatan dan Mesin)
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		1,383,933,289.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	30,700,000.00		
			135121	Aset Tetap Lainnya		30,700,000.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	30,700,000.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		30,700,000.00	
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	22,980,000.00		Koreksi pencatatan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-Lain (3 unit laptop)
			132111	Peralatan dan Mesin		22,980,000.00	
			137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	22,980,000.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		22,980,000.00	
			166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	22,980,000.00		
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		22,980,000.00	

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Uraian
			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	22,980,000.00		
			169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		22,980,000.00	



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12,
Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta
Timur (021) 8092423 / 80930008 - Fax .
(021) 8010301